

Dr. Rizki Damayanti, S.IP, M.A.

KAWASAN EROPA KONTEMPORER

Dinamika Integrasi, Tantangan Multikulturalisme,
dan Penguatan Diplomasi Global



Editor:

Zaenal Muttaqin, S.Th.I., M.A.



K A W A S A N EROPA KONTEMPORER

**Dinamika Integrasi, Tantangan Multikulturalisme,
dan Penguatan Diplomasi Global**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

K A W A S A N EROPA KONTEMPORER

**Dinamika Integrasi, Tantangan Multikulturalisme,
dan Penguatan Diplomasi Global**

Diterbitkan Oleh



Kawasan Eropa Kontemporer

Dinamika Integrasi, Tantangan Multikulturalisme, dan Penguatan Diplomasi Global

Penulis : Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A

Editor : Zaenal Muttaqin, S.Th.I, M.A.

Penyelaras Aksara : Annisa Nurisnaini KP

Penata Letak : Ridwan Nur M

Perancang Sampul : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor: 147/DIY/2021

Jl. Maredan No. F01, Maredan, RT.06/RW.41, Sendangtirto, Kec. Berbah,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

Telp. (0274)2254549. Hp. 085865342317

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangsemestamedia

Website: www.bintangpustaka.com

Email: bintangsemestamedia@gmail.com

redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2024

Bintang Semesta Media Yogyakarta

xviii + 346 hal : 15 x 23 cm

ISBN Cetak: 978-623-190-879-7

ISBN Digital: 978-623-190-880-3 (PDF)

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Didedikasikan untuk
putri semata wayangku tercinta,
l'amore della mia vita,
Aisyah Zahra Iqbal.**

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Selamat datang di buku yang didedikasikan untuk mendukung mata kuliah Kawasan Eropa. Kawasan Eropa adalah wilayah yang penuh dengan sejarah, dinamika politik, dan interaksi budaya yang menarik untuk dijelajahi. Buku ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan yang kokoh kepada mahasiswa dalam memahami peran dan perkembangan Kawasan Eropa kontemporer dalam konteks global.

Dalam setiap bab, pembaca akan dibimbing untuk menjelajahi aspek-aspek kritis dari Kawasan Eropa, sekaligus memberikan landasan pengetahuan yang kuat untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah ini. Mempelajari Eropa memiliki nilai yang signifikan dalam studi Hubungan Internasional karena Eropa memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan hubungan internasional.

Dari sisi sejarah, Eropa mencerminkan periode perdamaian dan perang yang berfluktuasi sepanjang ribuan tahun. Eropa telah menjadi saksi sejumlah konflik, seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta Perang Dingin yang membagi benua ini selama puluhan tahun. Namun, Eropa juga telah memasuki era

perdamaian yang signifikan dan upaya kolaborasi yang bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Inilah beberapa aspek penting sejarah Eropa yang mencerminkan kedua sisi, yaitu sebagai tanah damai dan perang. Singkatnya, Eropa telah menjadi panggung utama konflik, kolonialisme, perjanjian internasional, dan perubahan politik yang memengaruhi dunia secara luas. Studi sejarah Eropa membantu memahami evolusi hubungan internasional.

Eropa juga merupakan contoh dari bagaimana sejarah benua dapat mencerminkan transformasi dari periode perang ke upaya perdamaian dan kerja sama. Keberadaan Uni Eropa sebagai salah satu entitas politik dan ekonomi terbesar di dunia, memiliki pengaruh signifikan dalam masalah-masalah seperti perdagangan, lingkungan, kebijakan luar negeri, dan keamanan global. Memahami dinamika Uni Eropa penting untuk memahami diplomasi global.

Eropa juga merupakan pusat kebijakan global, di mana beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris (meskipun keluar dari Uni Eropa), dan Jerman adalah pemain kunci dalam kebijakan luar negeri dan keamanan global. Mempelajari pandangan dan tindakan negara-negara ini dapat memberikan wawasan tentang isu-isu global.

Eropa memiliki berbagai organisasi regional seperti Uni Eropa, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), dan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan dan kerja sama regional. Keberadaan organisasi-organisasi regional di Eropa ini merupakan contoh studi tentang cara kerja sama regional yang dapat berdampak pada tata hubungan internasional.

Seiring dengan perubahan global yang pesat, Eropa juga tidak luput dari perkembangan isu-isu kontemporer. Buku ini berusaha

untuk menggali beberapa isu kunci yang menjadi sorotan di masa kini, di antaranya dampak globalisasi, krisis migrasi, islamofobia, konflik dan perdamaian, serta hubungan Uni Eropa dengan berbagai kawasan di dunia.

Globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara negara-negara Eropa berinteraksi, baik dalam hal ekonomi maupun budaya. Buku ini mengupas dampak globalisasi pada struktur ekonomi, perubahan dalam pola migrasi, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Eropa dalam menjaga kedaulatan sembari tetap terlibat dalam panggung global.

Salah satu isu paling urgensi di Eropa saat ini adalah krisis migrasi. Buku ini merinci akar penyebab krisis, implikasi kemanusiaan, dan respons politik yang diambil oleh negara-negara Eropa. Pembaca akan diajak untuk memahami dinamika kompleks antara kebutuhan kemanusiaan dan kebijakan keamanan nasional.

Isu-isu seputar Islamofobia dan tantangan terhadap multikulturalisme juga menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis mengeksplorasi bagaimana masyarakat Eropa menanggapi keberagaman budaya dan agama, serta upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Buku ini juga membahas konflik dan upaya perdamaian kontemporer di Kawasan Eropa. Dari perubahan geopolitik hingga dinamika internal dalam beberapa negara, pembaca akan dibimbing melalui analisis mendalam tentang tantangan untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di kawasan ini.

Terakhir, buku ini mengupas hubungan Uni Eropa dengan berbagai kawasan di dunia. Sebagai entitas politik dan ekonomi yang berkembang pesat, Uni Eropa memiliki peran yang semakin signifikan dalam konteks hubungan internasional. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang

bagaimana Uni Eropa berinteraksi dengan kawasan-kawasan lain, membentuk aliansi, dan berkontribusi pada dinamika global.

Dengan demikian, pentingnya mempelajari Kawasan Eropa adalah untuk memahami peranannya dalam sejarah dan perkembangan global. Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga membangkitkan minat dan keinginan untuk lebih mendalami kompleksitas Kawasan Eropa.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam perjalanan memahami dan menggali lebih dalam Kawasan Eropa kontemporer. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2024

Penulis

Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A.

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAGIAN I INTEGRASI DI EROPA KONTEMPORER:	
PROSPEK DAN TANTANGAN	1
BAB 1 PROSPEK INTEGRASI EROPA	3
A. Penguatan Ekonomi Bersama	2
B. Kerja Sama Politik.....	10
C. Pengaruh Global	13
D. Kebebasan Pergerakan.....	16
 BAB 2 TANTANGAN INTEGRASI EROPA.....	 27
A. Krisis Keuangan dan Ekonomi	28
B. Migrasi dan Pengungsi	32
C. Populisme dan Nasionalisme	34
D. The Brexit	37
E. Krisis Keamanan	42
F. Ketidaksetaraan Regional.....	45
G. Tantangan Perluasan Keanggotaan UE.....	49
H. Perbedaan Kebijakan dan Budaya	53

BAGIAN II ISLAM DI EROPA KONTEMPORER.....	59
BAB 1 SEJARAH ISLAM DI EROPA.....	61
A. Kedatangan Awal Islam di Eropa	62
B. Periode Penyebaran Islam di Eropa.....	70
C. Migrasi Modern Muslim ke Eropa.....	75
D. Pertumbuhan Komunitas Muslim Era Kontemporer.....	83
 BAB 2 IDENTITAS MUSLIM DI EROPA	 89
A. Agama Islam sebagai Inti Identitas Muslim di Eropa.....	90
B. Kebudayaan Muslim di Eropa	95
C. Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim di Eropa ...	102
 BAB 3 POLITIK DAN KEBIJAKAN TERKAIT MUSLIM	
DI EROPA.....	115
A. Kebijakan Migrasi dan Pengungsi Muslim di Negara-	
Negara Eropa.....	116
B. Kebijakan Multikulturalisme dan Pluralisme terhadap	
Muslim di Eropa	132
 BAB 4 TANTANGAN INTEGRASI MUSLIM	
DI EROPA.....	143
A. Stereotipe Negatif Muslim di Eropa	144
B. Isu Radikalisasi dan Ekstremisme Islam di Eropa.....	147
C. Meningkatnya Isu Islamofobia	158
 BAB 5 PERANG DAN KONFLIK MELIBATKAN MUSLIM	
DI EROPA KONTEMPORER	165
A. Perang Bosnia (1992-1995) dan Dampaknya bagi Eropa	166

- B. Konflik di Kosovo (1998-1999) dan Dampaknya bagi Eropa.....172
- C. Konflik di Chechnya dan Dampaknya bagi Eropa.....177

BAGIAN III PERANG DAN DAMAI DI EROPA

KONTEMPORER.....183

BAB 1 GARIS SEJARAH PERANG DI MASA LALU DAN DAMPAKNYA BAGI EROPA.....185

- A. Perang Dunia I dan Kemunculan Negara-Negara Baru di Eropa186
- B. Perang Dunia II dan Pembentukan Uni Eropa.....198
- C. Perang Dingin dan Runtuhnya Blok Timur.....207

BAB 2 TANTANGAN PERDAMAIAN DI EROPA

KONTEMPORER.....219

- A. Perdamaian di Balkan220
- B. Sejarah Panjang Konflik Siprus dan Turki.....223
- C. Konflik Basque di Spanyol dan Prancis.....228
- D. Konflik Ukraina dan Ketegangan dengan Rusia.....230
- E. Masa Depan Perdamaian di Eropa.....244

BAGIAN IV HUBUNGAN EROPA KONTEMPORER

DENGAN KAWASAN LAIN251

BAB 1 HUBUNGAN TRANSATLANTIK253

- A. Hubungan Transatlantik sebagai Aspek Sentral Hubungan Eropa-AS.....254
- B. Perbedaan dan Tantangan dalam Hubungan Transatlantik258

BAB 2 HUBUNGAN DENGAN ASIA.....	265
A. Hubungan Strategis Eropa dengan China, Jepang, dan India	266
B. Persaingan dan Kompleksitas Tantangan dalam Hubungan Eropa dan Asia.....	273
BAB 3 HUBUNGAN DENGAN AFRIKA.....	281
A. Sejarah Kolonialisme, Diplomasi, dan Kemitraan dalam Hubungan Eropa-Afrika.....	282
B. Tantangan Konflik di Afrika Modern dan Isu Migrasi dalam Hubungan Eropa-Afrika.....	287
BAB 4 HUBUNGAN DENGAN TIMUR TENGAH	293
A. Minyak dan Energi sebagai Aspek Kunci Hubungan Eropa dengan Timur Tengah	294
B. Terorisme, Instabilitas Politik, Berbagai Konflik Regional, dan Kritik Terkait Hak Asasi Manusia dalam Perjalanan Hubungan Eropa-Timur Tengah.....	298
BAB 5 HUBUNGAN DENGAN AMERIKA LATIN.....	305
A. Kolaborasi Ekonomi Strategis antara Eropa dan Amerika Latin.....	306
B. Tantangan Ketidaksetaraan Ekonomi dalam Hubungan Eropa-Amerika Latin dan Kontroversi Kesepakatan UE-Mercosur.....	310

BAB 6 KERJA SAMA REGIONAL	313
A. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan <i>Association of Southeast Asian Nation</i> (ASEAN): Katalis Pembangunan Regional.....	314
B. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan Berbagai Organisasi Regional di Afrika: Memperkuat Integrasi dan Kerja Sama Regional.....	318
C. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan Mercosur: Memetakan Cakrawala Baru dan Membuka Peluang	323
D. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan CARIFORUM dan Forum Pasifik: Menjembatani Atlantik dan Pasifik.....	325
E. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan <i>Gulf Cooperation Council</i> (GCC): Menuju Kemakmuran dan Kolaborasi Strategis.....	328
DAFTAR PUSTAKA	332
TENTANG PENULIS	344

DAFTAR SINGKATAN

ACP	: African, Caribbean and Pasific
AfD	: Alternative für Deutschland
AJCEP	: ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
AMISOM	: African Union Mission to Somalia
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nation
ASEM	: Asia-Europe Meeting
AU	: African Union
Brexit	: British Exit
BRI	: Belt and Road Initiative
BRICS	: Brazil, Rusia, India, China and South Africa
CAI	: Comprehensive Agreement on Investment
CARIFORUM	: The Forum of the Caribbean Group of African, Caribbean and Pacific States
CDU	: Christlich Demokratische Union
CELAC	: Community of Latin American and Caribbean States
CIS	: Commonwealth of Independent States
COP	: Conference of the Parties
CSDP	: Common Security and Defense Policy

DDR	: Deutsche Demokratische Republik
DRC	: Democratic Republic of the Congo
EAC	: East African Community
EBA	: European Banking Authority
EBU	: European Banking Union
EC	: European Community
ECB	: European Central Bank
ECCAS	: Economic Community of Central African States
ECOWAS	: Economic Community of West African States
ECSC	: European Coal and Steel Community
EEC	: European Economic Community
eFP	: Enhanced Forward Presence
EMU	: European Monetary Union
ENP	: European Neighbourhood Policy
EPA	: Economic Partnership Agreements
ESIF	: European Structural and Investment Funds
ESM	: European Single Market
ESMA	: European Securities and Markets Authority
ERM II	: Exchange Rate Mechanism II
ETA	: Euskadi Ta Askatasuna
EU	: European Union
EU-India BTIA	: EU-India Broad-based Trade and Investment Agreement
EURATOM	: European Atomic Energy Community
FN	: Front National
FTA	: Free Trade Area
GCC	: Gulf Cooperation Council

GDPR	: General Data Protection Regulation
G20	: Group 20
G7	: Group 7
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
ICC	: International Criminal Court
IMF	: International Monetary Fund
ISDS	: Investor-State Dispute Settlement
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
JCPOA	: Joint Comprehensive Plan of Action
JNIM	: Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin
KT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
LNG	: Liquid Natural Gas
LREM	: La République En Marche!
Mercosur	: Mercado Común del Sur
MINUSMA	: The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MONUSCO	: The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
M5S	: Movimento 5 Stelle
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NRF	: NATO Response Force
OSCE	: Organization for Security and Co-operation in Europe
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	: Partito Democratico

PDB	: Produk Domestik Bruto
PESCO	: Permanent Structured Cooperation
RN	: Rassemblement National
RRF	: Recovery and Resilience Facility
SADC	: Southern African Development Community
SALT	: Strategic Arms Limitation Talks
SEECF	: South-East European Cooperation Process
SPD	: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
START	: New Strategic Arms Reduction Treaty
TFEU	: Treaty on the Functions of the European Union
TTIP	: Transatlantic Trade and Investment Partnership
UCK	: Ushtria Çlirimtare e Kosovës
UNFICYP	: United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
UNMIK	: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNPROFOR	: United Nations Protection Force
UE	: Uni Eropa
WTO	: World Trade Organization

BAGIAN I

INTEGRASI DI EROPA KONTEMPORER: PROSPEK DAN TANTANGAN

Integrasi di Eropa kontemporer mengacu pada proses dan upaya untuk menggabungkan negara-negara Eropa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Proses integrasi Eropa dimulai setelah Perang Dunia II dengan tujuan utama untuk mencegah terulangnya konflik yang merusak di Eropa. Uni Eropa/UE (*European Union*/EU) adalah salah satu contoh terpenting dari integrasi di Eropa yang telah membawa banyak perkembangan positif, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks kontemporer. Tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama yang kuat antara negara-negara anggota dan penyesuaian terhadap perubahan dalam dinamika global dan regional. Dalam konteks ini, integrasi Eropa kontemporer merupakan proyek yang kompleks dan terus berkembang, di mana perubahan politik, ekonomi, dan sosial akan terus memengaruhi prospek integrasi Eropa di masa depan.

BAB 1

PROSPEK INTEGRASI EROPA



Integrasi di Eropa kontemporer adalah sebuah proses yang terus berlanjut, di mana negara-negara Eropa bekerja sama untuk menciptakan kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih erat. Proses ini dimulai setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk mencegah konflik berskala besar di Eropa dan mempromosikan kerja sama ekonomi. Proses ini juga telah menjadi salah satu fitur sentral dari perkembangan Eropa modern dan memiliki dampak yang signifikan di berbagai bidang. Dalam hal ini, integrasi Eropa dilakukan melalui berbagai lembaga dan mekanisme seperti UE dan *Eurozone*. Namun, penting untuk dipahami bahwa proses integrasi Eropa ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan nasional, perbedaan pandangan antara negara-negara anggota, dan dinamika geopolitik global. Secara umum, terdapat beberapa hal utama yang menjadi prospek integrasi Eropa kontemporer, di antaranya penguatan ekonomi bersama, kerja sama politik, pengaruh global, dan kebebasan pergerakan.

A. Penguatan Ekonomi Bersama

Salah satu prospek utama integrasi Eropa adalah terciptanya Pasar Tunggal Eropa (*European Single Market/ESM*) dan mata uang Euro yang memungkinkan terjadinya perdagangan bebas, investasi yang lebih mudah, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di seluruh wilayah. Bergabung dalam Pasar Tunggal Eropa berarti bahwa negara-negara tersebut telah menghapuskan hambatan perdagangan internal dan mematuhi aturan dan regulasi yang berkaitan dengan Pasar Tunggal Eropa. Di sisi lain, mata uang euro digunakan sebagai mata uang resmi dalam wilayah *Eurozone*, yang terdiri dari negara-negara yang mengadopsi Euro sebagai mata uang mereka. Penguatan ekonomi bersama melalui Pasar Tunggal Eropa dan mata uang Euro ini merupakan dua elemen kunci dalam proses integrasi ekonomi di UE, yang juga sekaligus

memberikan dampak positif dan signifikan pada perekonomian negara-negara anggota UE (Farrell et al., 2002). Keduanya, Pasar Tunggal Eropa dan *Eurozone*, bertujuan untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara anggota UE, tetapi dengan tujuan dan tingkat integrasi yang berbeda. Pasar Tunggal Eropa menciptakan zona perdagangan bebas tanpa hambatan, sementara *Eurozone* menciptakan mata uang tunggal bersama dan kebijakan moneter yang terkoordinasi (Recchi, 2015).

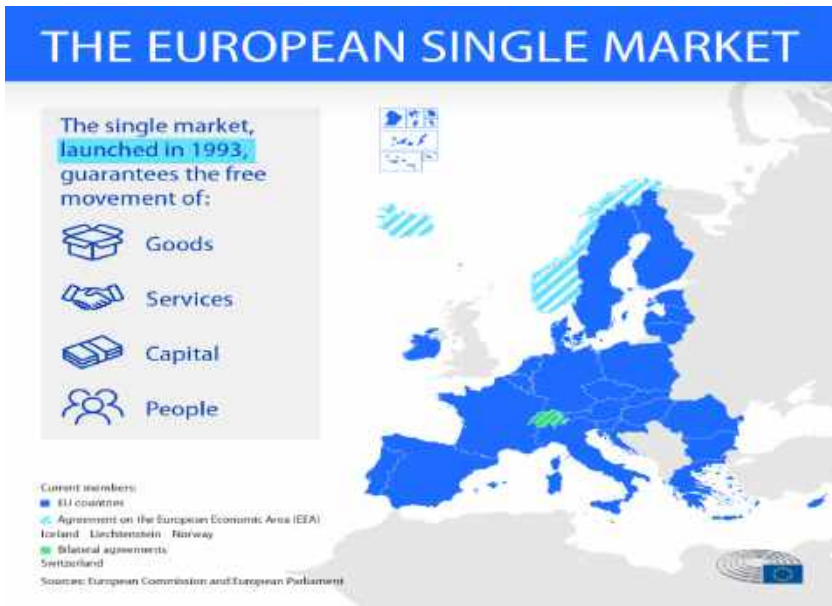
Pasar Tunggal Eropa (European Single Market)

Pasar Tunggal Eropa, juga dikenal sebagai Pasar Eropa, dibentuk pada tanggal 1 Januari 1993. Ini adalah salah satu tonggak penting dalam integrasi ekonomi Eropa dan merupakan bagian dari Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community/EEC*) yang merupakan pendahulu dari UE. Keberadaan pasar tunggal ini menciptakan satu area ekonomi di seluruh UE di mana barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dapat bergerak secara bebas tanpa hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, atau kontrol perbatasan. Tujuan dari pasar tunggal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat kepada konsumen melalui kompetisi yang lebih sehat (Recchi, 2015).

Langkah awal menuju Pasar Tunggal Eropa dimulai sejak pendirian Komunitas Eropa (*European Community/EC*) pada tahun 1950-an. Pada awalnya, fokus utama kerja sama ini adalah menghapus tarif perdagangan antarnegara anggota. Pada tahun 1986, dengan diberlakukannya Akta Tunggal Eropa (*European Single Act/ESA*), pembentukan Pasar Tunggal Eropa mendapatkan momentum yang kuat. Akta ini mengatur berbagai sektor ekonomi, termasuk barang, jasa, tenaga kerja, dan modal, dengan tujuan menciptakan ruang ekonomi tanpa hambatan di antara negara-negara anggota (Delanty, 1995). Selama beberapa dekade

berikutnya, banyak tindakan tambahan diambil untuk menghapus hambatan teknis perdagangan melalui harmonisasi regulasi dan standar di berbagai sektor ekonomi.

Pembentukan Pasar Tunggal Eropa kemudian terus berkembang seiring dengan bergabungnya negara-negara baru ke dalam UE. Proses perluasan ini tentu membutuhkan penyesuaian dan harmonisasi lebih lanjut. Terkait hal ini, UE memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara anggotanya melalui berbagai program untuk membantu negara-negara tersebut agar dapat mengintegrasikan ekonominya ke dalam Pasar Tunggal Eropa. Saat ini negara-negara yang telah bergabung ke dalam Pasar Tunggal Eropa adalah Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Dengan lebih dari 500 juta warga dan konsumen potensial, Pasar Tunggal Eropa menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Hal ini sekaligus menjadikan Pasar Tunggal Eropa sangat menarik bagi perusahaan di dalam maupun di luar UE untuk beroperasi di wilayah ini (Delanty, 2019).



Peta negara-negara UE dan non-UE yang merupakan bagian dari Pasar Tunggal Eropa

Sumber: *30 Years of EU Single Market: Benefits and Challenge*
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20230112STO66302/30-years-of-eu-single-market-benefits-and-challenges-infographics>

Dengan menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, Pasar Tunggal Eropa juga memberikan peluang dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, di samping juga memberikan insentif bagi perusahaan dalam mencapai efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Keberadaan pasar tunggal juga mendorong persaingan yang sehat, yang mengarah pada peningkatan kualitas produk dan pilihan yang lebih baik bagi konsumen. Karena adanya penghapusan hambatan perdagangan dan promosi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pula, maka Pasar Tunggal Eropa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di seluruh wilayah UE. Kondisi ini

dimungkinkan dengan adanya kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peluang bisnis, mendukung stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing global UE (Recchi, 2015). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pasar Tunggal Eropa merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam proses integrasi ekonomi di Eropa dan telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggota UE. Pasar tunggal ini juga sekaligus memfasilitasi perdagangan yang lebih mudah dan lebih efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk perusahaan Eropa.

Mata Uang Euro

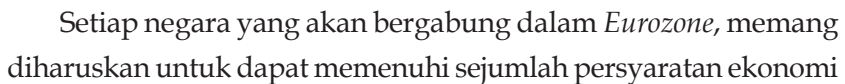
Mata uang Euro adalah mata uang tunggal yang digunakan oleh sejumlah negara di UE. Euro juga digunakan dalam berbagai transaksi internasional dan merupakan salah satu mata uang cadangan yang penting di dunia. Selain itu, Euro juga digunakan dalam perdagangan dan bisnis di banyak negara di luar *Eurozone*, sehingga menjadikannya salah satu mata uang global yang kuat. Simbol resmi dari mata uang Euro adalah € dengan kode mata uangnya adalah EUR.

Euro merupakan alat pembayaran resmi dalam *Eurozone*, yaitu wilayah di mana mata uang ini digunakan sebagai mata uang resmi. Negara-negara dalam *Eurozone* ini menggunakan mata uang Euro sebagai alat pembayaran tunggal yang juga dimaksudkan untuk menghilangkan risiko fluktuasi mata uang asing dalam perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota. Penggunaan mata uang yang sama juga memudahkan perdagangan dan investasi di antara negara-negara *Eurozone* yang berarti juga mendorong pertumbuhan perdagangan intra-Eropa (Mulhearn & Vane, 2008). Di atas semua itu, Euro memberikan stabilitas dan prediktabilitas dalam perdagangan dan keuangan di wilayah

Eurozone, yang pada akhirnya berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi biaya transaksi.

Proses terciptanya *Eurozone* sendiri terjadi dalam beberapa tahapan. Langkah awal menuju *Eurozone* dimulai dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Perjanjian ini mengatur kerangka kerja bagi pembentukan mata uang tunggal Euro dan Zona Euro. Proses selanjutnya adalah penetapan kriteria konvergensi, di mana sebelum negara-negara dapat mengadopsi Euro, negara-negara tersebut harus memenuhi kriteria konvergensi ekonomi yang ketat, termasuk stabilitas harga, defisit anggaran yang terkendali, dan tingkat suku bunga yang mendekati rata-rata tingkat suku bunga UE (Mulhearn & Vane, 2008).

Euro kemudian diperkenalkan sebagai mata uang fisik pada tahun 1999. Pada awalnya, ini hanya berlaku untuk transaksi nontunai dan keuangan, sementara mata uang nasional masih beredar. Pada tahun 2002, Euro menjadi mata uang tunggal di sebagian besar negara-negara *Eurozone*, menggantikan mata uang nasional negara-negara tersebut. Berikutnya, terjadi perluasan zona Euro. Sejumlah negara yang memenuhi kriteria kemudian bergabung dengan Zona Euro, sehingga memperluas wilayah mata uang Euro. Saat ini, terdapat 19 negara anggota *Eurozone* yang menggunakan Euro sebagai mata uang mereka, yaitu Austria (AT), Belgia (BE), Siprus (CY), Estonia (EE), Finlandia (FI), Yunani (GR), Irlandia (IE), Italia (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luksemburg (LU), Malta (MT), Belanda (NL), Portugal (PT), Slowakia (SK), Slovenia (SI), Spanyol (ES), Jerman (DE), dan Prancis (FR).



dan hukum yang telah ditetapkan. Persyaratan utama untuk bergabung dalam *Eurozone* melibatkan masuknya negara tersebut ke dalam mekanisme pertukaran mata uang Eropa, yang dikenal sebagai *Exchange Rate Mechanism II* (ERM II), yaitu mekanisme pertukaran mata uang yang mengikat nilai mata uang negara tersebut terhadap Euro dengan fluktuasi yang sangat terbatas, serta memenuhi kriteria konvergensi ekonomi yang ditetapkan dalam Perjanjian Maastricht.

Berdasarkan ketentuan ERM II, negara yang ingin bergabung ke dalam *Eurozone* harus mempertahankan stabilitas harga yang tinggi. Kriteria ini diukur dengan membandingkan tingkat inflasi nasional dengan tingkat inflasi rata-rata tiga negara dengan tingkat inflasi terendah dalam *Eurozone*. Selain itu, defisit anggaran negara tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika defisit melampaui batas ini, negara tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi defisit di bawah 3%. Utang publik negara juga tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Jika utang melampaui batas ini, negara tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi utang secara bertahap. Terkait suku bunga, tingkat suku bunga negara harus berada dalam “marginal” atau “long-term” sekitar 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku dalam tiga negara dengan tingkat inflasi terendah dalam *Eurozone*. Negara yang ingin bergabung ke dalam *Eurozone* juga harus menjadi anggota ERM II selama setidaknya dua tahun tanpa gangguan berarti. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan stabilitas tingkat pertukaran dalam jangka panjang dan tidak boleh mengalami devaluasi yang signifikan (Jovanovic, 1997).

Di samping itu, negara yang hendak bergabung ke dalam *Eurozone* harus memiliki kerangka hukum dan regulasi yang memungkinkan untuk membentuk kebijakan moneter yang independen, serta kerja sama dalam kebijakan moneter bersama

dalam *Eurozone*. Kebijakan untuk bergabung dalam *Eurozone* ini juga harus mendapatkan dukungan politik dalam negara tersebut. Setelah sebuah negara memenuhi semua persyaratan ini dan mendapatkan persetujuan dari UE, maka negara tersebut dapat mengadopsi Euro sebagai mata uang resminya dan menjadi anggota penuh *Eurozone*. Proses bergabung dalam *Eurozone* ini merupakan komitmen jangka panjang, serta memerlukan perencanaan ekonomi yang matang dan reformasi struktural yang mungkin memerlukan waktu beberapa tahun bagi sebuah negara untuk dapat diimplementasikan (Chiara & Challand, 2013).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keberadaan Pasar Tunggal Eropa dan mata uang Euro ini memiliki banyak manfaat, tetapi di sisi lain terdapat juga beberapa tantangan. Hal ini terutama berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi seperti krisis utang negara yang telah menguji stabilitas mata uang Euro dan memaksa negara-negara anggota untuk melakukan reformasi ekonomi yang diperlukan. Secara umum, dapat dinyatakan pula bahwa penguatan ekonomi bersama Eropa melalui integrasi ekonomi ini adalah salah satu aspek penting dari UE dan merupakan komponen utama dari kesuksesannya dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penguatan ekonomi bersama ini harus diimbangi dengan kerja sama politik, sosial, dan budaya untuk mencapai tujuan integrasi yang lebih luas.

B. Kerja Sama Politik

Integrasi Eropa juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan perdamaian di kawasan tersebut. Tujuan ini dicapai melalui kerja sama dalam kebijakan luar negeri, pertahanan bersama, dan diplomasi. Integrasi Eropa melalui kerja sama politik ini dimulai setelah Perang Dunia II yang menghancurkan kawasan Eropa dan menyebabkan jutaan korban jiwa. Upaya

untuk mencegah terulangnya perang besar di Eropa pulalah yang menjadi salah satu pendorong utama bagi pendirian UE dan organisasi-organisasi sebelumnya seperti Komunitas Eropa (*European Community/EC*). Dalam konteks ini, integrasi Eropa dipandang berkontribusi pada stabilitas politik dan perdamaian di kawasan tersebut melalui kerja sama dalam bentuk kebijakan luar negeri, pertahanan bersama, dan diplomasi (Chiara & Challand, 2013).

Terkait kerja sama dalam kebijakan luar negeri, UE telah mengembangkan kebijakan luar negeri bersama untuk mengoordinasikan tindakan diplomatik negara-negara anggotanya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa UE dapat berbicara dengan satu suara dalam masalah-masalah internasional, sehingga akan meningkatkan pengaruhnya dalam perundingan global. Kerja sama dalam kebijakan luar negeri UE ini merupakan salah satu aspek penting dari integrasi Eropa, di mana keputusan terkait kebijakan luar negeri UE biasanya diambil berdasarkan konsensus di antara negara-negara anggota. Ini berarti semua negara anggota harus setuju atau tidak mengutarakan keberatan terhadap suatu tindakan atau kebijakan tertentu. Prinsip konsensus ini membantu menciptakan kesatuan dalam tindakan diplomatik UE. Kebijakan luar negeri UE sendiri terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) kebijakan luar negeri dan keamanan umum, (b) kebijakan keamanan dan pertahanan bersama, dan (c) kerja sama dalam masalah hukum dan dalam hal hukum. Pilar pertama mencakup kerja sama diplomatik dan politik, sementara pilar kedua berfokus pada aspek pertahanan, dan pilar ketiga melibatkan kerja sama dalam hal hukum dan hukum internasional (Bache et al., 2015).

UE juga memiliki seorang Kepala Kebijakan Luar Negeri yang juga disebut sebagai Wakil Presiden Komisi Eropa (*Vice-President of the European Commission*). Wakil Presiden Komisi Eropa

bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan luar negeri UE dan mewakili UE di tingkat internasional, sekaligus juga memimpin layanan luar negeri UE yang merupakan badan diplomatik UE. Sementara di berbagai negara dan organisasi internasional di seluruh dunia, UE memiliki delegasi yang bertindak sebagai perwakilan diplomatik UE di tingkat lokal dan mengoordinasikan tindakan diplomatik UE di lapangan. UE juga melakukan kerja sama regional dalam kebijakan luar negerinya, misalnya melalui *European Neighbourhood Policy* (ENP), yaitu kerangka kebijakan luar negeri mencakup dukungan untuk reformasi politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara mitra yang bertujuan untuk mendekatkan UE dan negara-negara tetangganya di Timur dan Selatan, demi keuntungan dan kepentingan bersama (European Union, 2023).

Terkait instrumen diplomatik, UE memiliki berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional mencakup perjanjian perdagangan, perjanjian nuklir, dan perjanjian perdamaian yang ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Dalam konteks pertahanan bersama, UE telah mengembangkan kerja sama dalam bidang pertahanan melalui inisiatif seperti Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (*Common Security and Defense Policy/ CSDP*), di mana kerja sama ini meliputi pengembangan pasukan penjaga perdamaian, misi-misi peradilan, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di wilayah-wilayah yang terkena konflik (Almond et al., 1999). UE juga berperan aktif dalam upaya diplomasi, baik dalam penyelesaian konflik regional maupun dalam negosiasi perjanjian-perjanjian internasional. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah peran UE dalam mengawasi proses perdamaian di Irlandia Utara.

Berbagai kerja sama yang ditempuh melalui kebijakan luar negeri UE di atas, bertujuan untuk menciptakan konsistensi dan kesatuan dalam tindakan diplomatik negara-negara anggota,

sehingga meningkatkan pengaruh dan efektivitas UE dalam perundingan internasional. Meskipun terdapat tantangan dalam mencapai konsensus di antara negara-negara anggota yang memiliki kepentingan dan pandangan yang beragam, kerja sama ini tetap menjadi salah satu elemen inti dalam upaya integrasi Eropa.

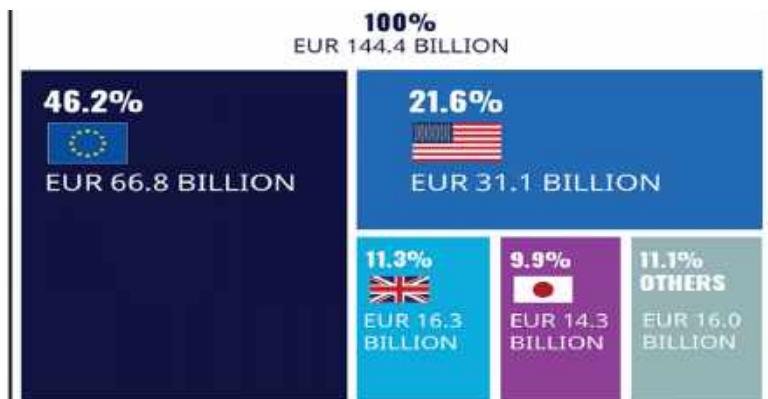
C. Pengaruh Global

UE adalah salah satu entitas politik dan ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh signifikan dalam masalah-masalah seperti perdagangan, lingkungan, kebijakan luar negeri, dan keamanan global. Dengan bersatu, negara-negara Eropa dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam permasalahan global, sekaligus memungkinkan untuk berperan sebagai pemain penting dalam perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, dan penanganan konflik global.

Dalam sektor perdagangan internasional, UE merupakan salah satu pemain terbesar. Dengan menggabungkan pasar di antara negara-negara anggotanya, UE memiliki daya tawar ekonomi yang besar dalam perundingan perdagangan dengan negara-negara lain. UE dapat berperan dalam membentuk aturan perdagangan global dan mempromosikan prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Terkait isu perlindungan lingkungan, UE juga telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Melalui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang disepakati tahun 2015 dan komitmen terhadap energi terbarukan, UE menjadi pemimpin dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Bache et al., 2015).

UE juga memiliki peran aktif dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi, termasuk memberikan dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas di berbagai konflik di seluruh dunia,

serta berperan aktif dalam menjawab tantangan keamanan global seperti penyebaran senjata nuklir dan terorisme. UE juga merupakan donor bantuan pembangunan terbesar di dunia. Melalui bantuan pembangunan dan kerja sama pembangunan, UE membantu negara-negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah-masalah kemanusiaan.



UE pada tahun 2020 menegaskan posisinya sebagai donor terkemuka di dunia, yaitu memberikan 46% bantuan global.

Sumber: *Team Europe Increased Official Development Assistance to €66.8 Billion as the World's Leading Donor in 2020.* <https://euneighbourseast.eu/news/latest-news/team-europe-increased-official-development-assistance-to-e66-8-billion-as-the-worlds-leading-donor-in-2020/>

Dalam konteks kerja sama keamanan, UE memiliki instrumen kebijakan keamanan dan pertahanan yang dapat digunakan dalam menjaga stabilitas global. Ini mencakup misi dan operasi militer di berbagai negara untuk memfasilitasi perdamaian dan keamanan. Sementara dalam konteks kerja sama internasional, UE adalah mitra kerja sama yang penting bagi banyak negara di seluruh dunia. Kerja sama ini mencakup dialog politik, bantuan pembangunan, dan berbagai program kerja sama lainnya. Karenanya, UE kemudian memiliki peran penting dalam mempromosikan stabilitas ekonomi global melalui dukungan terhadap lembaga keuangan internasional

dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait hubungan yang luas dengan berbagai negara dan kawasan di seluruh dunia, UE memiliki posisi yang kuat, yang juga mencerminkan peran aktifnya dalam diplomasi internasional dan kerja sama luar negeri. Sebagai contoh, UE memiliki kemitraan strategis dengan AS yang juga merupakan kemitraan paling penting dalam diplomasi internasional. Kedua entitas ini berkolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan isu-isu global seperti perubahan iklim. Hubungan ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di seluruh dunia (Kenealy et al., 2015).

UE juga memiliki mitra ekonomi terbesar di luar negeri, yaitu China. Keduanya memiliki hubungan ekonomi yang kuat dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi. Meskipun memiliki persaingan ekonomi, tetapi UE dan China tetap memiliki kesepakatan dan dialog ekonomi yang penting. Terkait kerja sama pembangunan di Afrika, UE telah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan negara-negara Afrika dalam upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta penyelesaian konflik. Program-program pembangunan UE di Afrika ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut (Noutcheva et al., 2013).

Demikian halnya di kawasan Asia, UE juga memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara di Asia. Ini mencakup dialog dengan negara-negara Asia, misalnya melalui Pertemuan Asia-Eropa (*Asia-Europe Meeting/ASEM*), serta kerja sama ekonomi dan keamanan dengan negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Kerja sama regional lainnya juga terus dikembangkan oleh UE termasuk kemitraan dengan negara-negara di Amerika Latin,

Timur Tengah, dan Asia Tengah. Dalam hal ini, UE juga memiliki peran dalam memediasi konflik di Timur Tengah dan mendukung perdamaian di wilayah tersebut (Kenealy et al., 2015).

UE memang bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga entitas politik dan diplomatik yang memiliki peran penting dalam membentuk dunia saat ini. Dengan bersatunya negara-negara Eropa di bawah payung UE, negara-negara tersebut dapat berkolaborasi lebih efektif dalam menangani tantangan global sekaligus berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di seluruh dunia.

D. Kebebasan Pergerakan

Inti dari integrasi Eropa adalah kebebasan pergerakan orang, barang, jasa, dan modal. Hal ini memungkinkan warga Eropa untuk bekerja, belajar, dan hidup di negara-negara lain tanpa hambatan yang signifikan. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari Pasar Tunggal Eropa yang dibentuk oleh UE, yang merupakan contoh nyata dari upaya untuk menciptakan entitas yang lebih bersatu dan efisien di Eropa, sekaligus menjadi salah satu pencapaian terpenting dari integrasi Eropa.

Kebebasan Pergerakan Orang

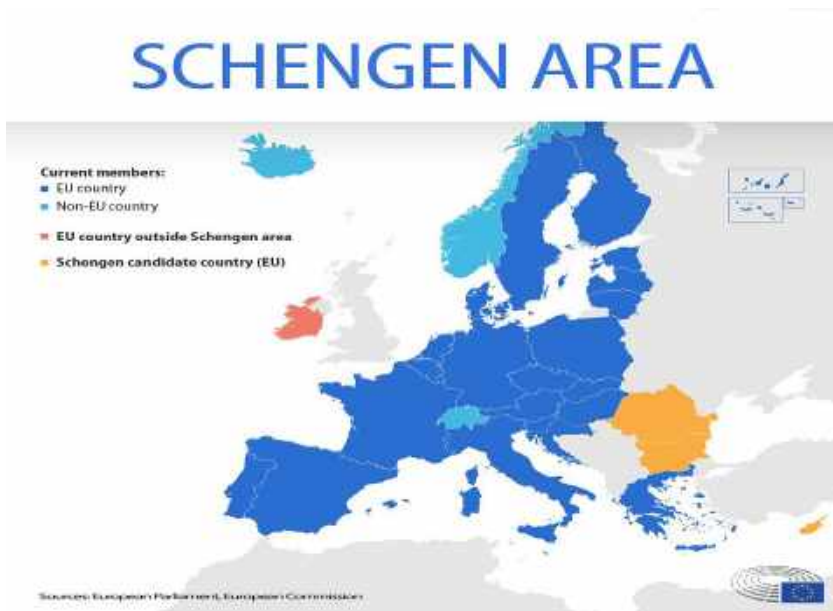
Salah satu aspek paling terkenal dari integrasi Eropa adalah kebebasan pergerakan orang, yang dikenal sebagai Perjanjian Schengen (*Schengen Agreement*). Negara-negara yang berpartisipasi dalam perjanjian ini menghilangkan kontrol perbatasan internal mereka, sehingga memungkinkan warga Eropa untuk bepergian di antara negara-negara anggota tanpa perlu visa atau pemeriksaan perbatasan yang ketat. Perjanjian ini juga memungkinkan warga UE untuk tinggal dan bekerja di negara lain tanpa izin kerja khusus (Riso & Andersen, 2014).

Perjanjian Schengen dinamai dari desa Schengen di Luksemburg, tempat perjanjian ini pertama kali ditandatangani pada tahun 1985 oleh lima negara anggota UE pada saat itu, yaitu Belgia, Prancis, Jerman Barat, Luksemburg, dan Belanda. Tujuan utama perjanjian ini adalah menghapus kendala perbatasan internal di antara negara-negara anggota. Salah satu aspek paling mencolok dari Perjanjian Schengen adalah penghapusan kontrol perbatasan internal antara negara-negara anggota. Ini berarti bahwa orang-orang dapat bepergian di antara negara-negara Schengen tanpa perlu menghadapi pemeriksaan perbatasan yang ketat. Pemeriksaan perbatasan hanya diterapkan di perbatasan eksternal Schengen, yang membuat sistem ini memungkinkan pergerakan yang lancar di dalam wilayah Schengen (Recchi, 2015).

Negara-negara Schengen juga memiliki peraturan bersama mengenai visa Schengen, yaitu visa yang memungkinkan seseorang untuk masuk dan bepergian di seluruh wilayah Schengen selama periode visa tersebut berlaku. Ini mempermudah perjalanan wisatawan dan pelaku bisnis di dalam wilayah Schengen. Selain pergerakan bebas, Perjanjian Schengen juga memberikan warga UE hak untuk tinggal dan bekerja di negara Schengen lainnya tanpa izin kerja khusus. Kondisi ini menciptakan peluang mobilitas pekerja yang signifikan di seluruh wilayah Schengen (Riso & Andersen, 2014).

Seiring berjalannya waktu, lebih banyak negara telah bergabung dengan perjanjian Schengen, termasuk negara-negara yang bukan anggota UE. Meskipun demikian, tidak semua negara UE adalah bagian dari Schengen. Artinya, terdapat negara UE yang memilih untuk tetap mempertahankan kontrol perbatasan internal mereka. Hingga tahun 2023, negara-negara yang telah menjadi anggota penuh Schengen dan berpartisipasi dalam perjanjian ini adalah Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis,

Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia, Selain negara-negara di atas, juga terdapat beberapa negara yang bukan anggota UE, tetapi berpartisipasi dalam perjanjian Schengen sebagai negara terkait atau terasosiasi. Beberapa negara ini adalah Liechtenstein, Norwegia, Islandia, dan Swiss yang memiliki peraturan perbatasan khusus dengan negara-negara Schengen atau mengikuti sebagian besar prinsip Schengen.



Peta wilayah Schengen.

Sumber: *How does the EU Work, and What is It Doing about Climate Change?* <https://10billionsoptions.prowly.com/229366-how-does-the-eu-work-and-what-is-it-doing-about-climate-change>

Sementara Inggris (termasuk Inggris Raya dan Irlandia Utara), tidak berpartisipasi dalam Perjanjian Schengen. Inggris tetap mempertahankan kontrol perbatasan internalnya dengan negara-negara UE dan negara-negara Schengen, bahkan ketika masih

menjadi anggota UE sebelum Brexit. Pada 31 Januari 2020, Inggris resmi meninggalkan UE melalui proses yang dikenal sebagai Brexit, dan periode transisi berlangsung hingga 31 Desember 2020. Selama periode transisi ini, aturan UE masih berlaku di Inggris, termasuk dalam hal pergerakan bebas di dalam wilayah Schengen. Namun, setelah periode transisi berakhir, Inggris tidak lagi terikat oleh aturan Schengen dan memiliki kendali penuh atas perbatasannya sendiri. Sebagai hasilnya, perjalanan antara Inggris dan negara-negara Schengen saat ini melibatkan pemeriksaan perbatasan dan persyaratan visa jika diperlukan. Inggris juga telah mengembangkan sistem imigrasi dan visa yang berbeda setelah Brexit (Wright, 2023).

Perjanjian Schengen memang telah memainkan peran penting dalam menciptakan iklim pergerakan bebas di Eropa, yang merupakan salah satu pencapaian paling menonjol dalam integrasi Eropa. Meskipun perjanjian ini memudahkan pergerakan, tetapi perlu diingat bahwa hal ini juga menciptakan tantangan dalam mengelola keamanan perbatasan eksternal dan menangani masalah seperti imigrasi ilegal dan keamanan.

Kebebasan Pergerakan Barang

Pasar Tunggal Eropa menciptakan kebebasan pergerakan barang di seluruh UE. Ini berarti bahwa barang-barang yang memenuhi standar UE dapat diperdagangkan secara bebas di semua negara anggota tanpa hambatan tarif atau regulasi nasional yang berlebihan, sehingga juga berpeluang meningkatkan pilihan konsumen dan memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beroperasi di pasar UE. Kebebasan pergerakan barang merupakan salah satu prinsip utama dari Pasar Tunggal Eropa yang juga menjadi salah satu dari empat kebebasan dasar yang diatur dalam Perjanjian tentang Fungsi-Fungsi Uni Eropa (*Treaty on the Functions*

of the European Union/TFEU), sekaligus menjadi landasan utama bagi bersatunya ekonomi di UE (Manners, Rosamond, 2018).

Kebebasan pergerakan barang di Pasar Tunggal Eropa berarti bahwa barang-barang dapat diperdagangkan secara bebas di antara negara-negara anggota UE tanpa hambatan atau diskriminasi. Beberapa prinsip utama yang mendasari kebebasan pergerakan barang ini adalah sebagai berikut (Parker, 2016).

1. Penghapusan tarif: negara-negara anggota UE telah sepakat untuk menghapus tarif bea masuk antarnegara anggota, sehingga tidak ada hambatan finansial dalam perdagangan barang di antara mereka.
2. Larangan diskriminasi: tidak ada diskriminasi terhadap barang-barang dari negara anggota tertentu. Prinsip ini menghindari praktik proteksionisme yang dapat merugikan negara-negara lain.
3. Harmonisasi standar: pasar Tunggal Eropa juga melibatkan upaya untuk harmonisasi standar teknis dan peraturan terkait dengan produk-produk tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di UE memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan lingkungan yang setara.
4. Bebasnya pergerakan: barang-barang dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh wilayah UE. Tidak ada pemeriksaan perbatasan atau kontrol yang rutin untuk barang-barang yang diperdagangkan di antara negara anggota.
5. Prinsip negara asal: prinsip negara asal berarti bahwa suatu produk yang sah di satu negara anggota UE harus diakui sebagai sah di semua negara anggota UE. Ini mencegah diskriminasi terhadap produk-produk dari negara tertentu.

6. Kepatuhan terhadap aturan: negara-negara anggota harus mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan pergerakan barang yang ditetapkan oleh UE. Komisi Eropa memiliki peran penting dalam memantau dan menegakkan aturan-aturan ini.

Diberlakukannya kebebasan pergerakan barang di UE sendiri merupakan hasil dari perkembangan bertahap yang terjadi selama beberapa dekade. Setelah Pasar Tunggal Eropa resmi diberlakukan pada tahun 1993, UE secara bertahap menghapus tarif bea masuk antarnegara anggota selama beberapa dekade. Dimulai sejak tahun 1990-an, UE telah melakukan berbagai harmonisasi standar dan mengadopsi prinsip negara asal. Langkah besar UE lainnya adalah melakukan penghapusan kontrol perbatasan, di mana UE secara bertahap menghapus pemeriksaan perbatasan dan kontrol yang berkaitan dengan pergerakan barang di antara negara anggota, sekaligus menciptakan zona perdagangan bebas di seluruh UE. Berikutnya, UE terus mengembangkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pergerakan barang dan memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi aturan ini (Parker, 2016).

Kebebasan pergerakan barang memang merupakan salah satu elemen kunci yang memungkinkan Pasar Tunggal Eropa menjadi sebuah entitas ekonomi yang kuat dan bersatu. Keberadaan pasar tunggal ini memungkinkan produsen untuk mengakses pasar yang lebih besar, meningkatkan persaingan, dan memberikan berbagai pilihan kepada konsumen di seluruh UE. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini juga memiliki tantangan, seperti masalah harmonisasi regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan upaya melawan perdagangan palsu. Oleh karena itu, integrasi ekonomi di UE terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam rangka memastikan berfungsinya Pasar Tunggal Eropa dengan baik.

Kebebasan Pergerakan Jasa

Pasar Tunggal Eropa juga mencakup kebebasan pergerakan jasa. Ini berarti bahwa perusahaan jasa dari satu negara anggota dapat menawarkan layanan mereka di negara-negara lain tanpa hambatan berarti. Contohnya adalah perusahaan keuangan, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan kesehatan yang dapat beroperasi di seluruh UE. Kebebasan pergerakan jasa dalam UE memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan persaingan di antara negara-negara anggota. Dalam konteks ini, adanya kebebasan pergerakan jasa memberikan lebih banyak pilihan layanan kepada konsumen di seluruh UE (Recchi, 2015). Namun, seperti halnya dengan kebebasan pergerakan barang, masih terdapat tantangan dan isu yang harus diatasi, seperti harmonisasi regulasi yang lebih lanjut dan perbedaan dalam sektor jasa yang diatur secara nasional.

Setiap negara anggota UE memiliki regulasi nasional yang berbeda untuk sektor-sektor jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Perbedaan ini dapat menciptakan hambatan administratif dan biaya tambahan bagi penyedia jasa yang ingin beroperasi di berbagai negara anggota. Meskipun upaya harmonisasi regulasi terus dilakukan, tetapi tantangan tetap ada. Terkait prinsip-prinsip kebebasan pergerakan jasa, beberapa negara anggota UE juga belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan masalah bagi penyedia jasa yang menghadapi hambatan yang tidak sah atau diskriminatif dalam upaya mereka untuk beroperasi di negara tertentu. Di samping itu, masih terdapat pula ketidaksetaraan dalam sektor jasa tertentu. Beberapa sektor jasa, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, cenderung diatur dengan lebih ketat daripada sektor lainnya (Laffan, 2017). Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan jasa tertentu di

seluruh UE, terutama jika regulasi di satu negara lebih ketat daripada di negara lain.

Permasalahan terkait bahasa dan budaya juga masih menjadi persoalan, di mana beberapa jenis layanan, seperti jasa kesehatan atau hukum, sangat tergantung pada bahasa dan budaya. Dalam hal ini, ketika penyedia jasa dari negara anggota yang berbeda bekerja di negara lain, komunikasi dan pemahaman dapat menjadi masalah. Kebebasan pergerakan jasa juga harus diimbangi dengan perlindungan sosial dan hak buruh yang memadai. Beberapa negara anggota masih memiliki kekhawatiran bahwa penyedia jasa dari negara lain akan menciptakan persaingan yang merugikan pekerja dan sistem sosial mereka sendiri. Sementara, beberapa profesi, seperti dokter, pengacara, dan akuntan, juga dimungkinkan menghadapi hambatan khusus dalam upaya mereka untuk berpraktik di negara anggota lainnya karena peraturan dan persyaratan kualifikasi yang berbeda (Wright, 2023).

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan terkait pergerakan jasa ini, UE terus berupaya untuk mempromosikan harmonisasi regulasi, meningkatkan pemantauan dan penegakan, serta memfasilitasi dialog antara negara anggota untuk mencapai kesepakatan terkait regulasi tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara memfasilitasi pergerakan jasa dan memastikan bahwa konsumen, pekerja, dan penyedia jasa dilindungi dengan baik.

Kebebasan Pergerakan Modal

Kebebasan pergerakan modal memungkinkan investasi lintas batas tanpa hambatan. Hal ini menciptakan kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal mereka di berbagai negara anggota UE, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat. Kebebasan pergerakan modal

juga telah membantu menciptakan pasar keuangan bersatu di UE, di mana hal ini telah memberikan berbagai manfaat ekonomi dan finansial bagi negara-negara anggota dan pelaku pasar. Berikut beberapa poin penting terkait kebebasan pergerakan modal di UE dan dampaknya (Adler-Nissen, 2016).

1. Akses yang lebih mudah ke modal: kebebasan pergerakan modal memungkinkan bank, lembaga keuangan, dan investor untuk lebih mudah mengakses modal dari negara-negara anggota lainnya. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber dana, termasuk pasar saham, obligasi, dan pinjaman dari berbagai negara.
2. Pertumbuhan pasar modal: pasar modal di UE telah tumbuh secara signifikan seiring dengan kebebasan pergerakan modal. Pertumbuhan ini mencakup pertumbuhan pasar saham, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Pasar modal yang lebih besar dan lebih terintegrasi memberikan peluang investasi yang lebih besar dan meningkatkan likuiditas.
3. Diversifikasi portofolio: investor dapat dengan lebih mudah mendiversifikasi portofolio investasi mereka di berbagai negara anggota. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko dan memberikan potensi hasil yang lebih baik.
4. Mendorong persaingan: kehadiran lembaga-lembaga keuangan dari berbagai negara anggota mendorong persaingan yang lebih sehat di sektor keuangan, sekaligus menghasilkan layanan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah bagi konsumen.
5. Stabilitas keuangan: Meskipun terdapat risiko keuangan yang dapat menyebar lebih cepat di seluruh UE, kerangka kerja pengawasan dan regulasi UE juga telah diperkuat

untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Misalnya, berbagai badan pengawas keuangan UE bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur lembaga-lembaga keuangan di seluruh UE.

6. Peningkatan keuangan korporat: Perusahaan dapat dengan lebih mudah mengakses sumber dana dari berbagai negara anggota untuk mendanai ekspansi bisnis mereka, penelitian, pengembangan, dan proyek investasi lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Terkait kebebasan pergerakan modal, UE juga telah memiliki aturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak investor dan memberikan keamanan hukum bagi mereka yang melakukan investasi di negara-negara anggota. Beberapa aspek perlindungan investor dalam konteks UE adalah sebagai berikut (Parker, 2016).

1. Perlindungan terhadap eksproperti yang tidak sah: UE mengakui pentingnya hak milik pribadi dan prinsip perlindungan terhadap eksproperti yang tidak sah. Jika pemerintah negara anggota UE mengambil langkah-langkah yang merugikan investor asing, seperti nasionalisasi atau eksproperti tanpa kompensasi yang wajar, maka investor tersebut dapat mengajukan gugatan hukum melalui berbagai mekanisme arbitrase yang tersedia, seperti Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*).
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): UE memiliki kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang HKI di seluruh UE dan membantu mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan.

3. **Transparansi dan kepatuhan hukum:** UE menetapkan standar tinggi terkait transparansi dalam investasi dan peraturan modal. Hal ini memungkinkan investor untuk dengan mudah mengakses informasi tentang persyaratan investasi, peraturan, dan prosedur hukum di negara-negara anggota UE. Selain itu, investor memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau banding ke pengadilan atau badan arbitrase yang relevan jika merasa hak-hak mereka dilanggar.
4. **Perlindungan terhadap diskriminasi:** Prinsip dasar dalam UE adalah larangan diskriminasi terhadap investor asing. Investor asing harus diberikan perlakuan yang sama dengan investor domestik dalam hal hak-hak, kewajiban, dan peluang investasi.
5. **Kerja sama peraturan dan pengawasan:** UE juga memiliki badan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar keuangan dan melindungi investor, seperti Otoritas Perbankan Eropa (*European Banking Authority/EBA*) serta Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (*European Securities and Markets Authority/ESMA*). Kedua badan ini bertugas mengawasi kepatuhan terkait regulasi keuangan dan menangani masalah jika terjadi pelanggaran.

Kebebasan pergerakan modal memang memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi risiko keuangan yang dapat menyebar lebih cepat di seluruh UE, sehingga menuntut perlunya koordinasi kebijakan ekonomi di antara negara-negara anggota dalam mengelola ekonomi yang saling terkait.

BAB 2

TANTANGAN INTEGRASI EROPA



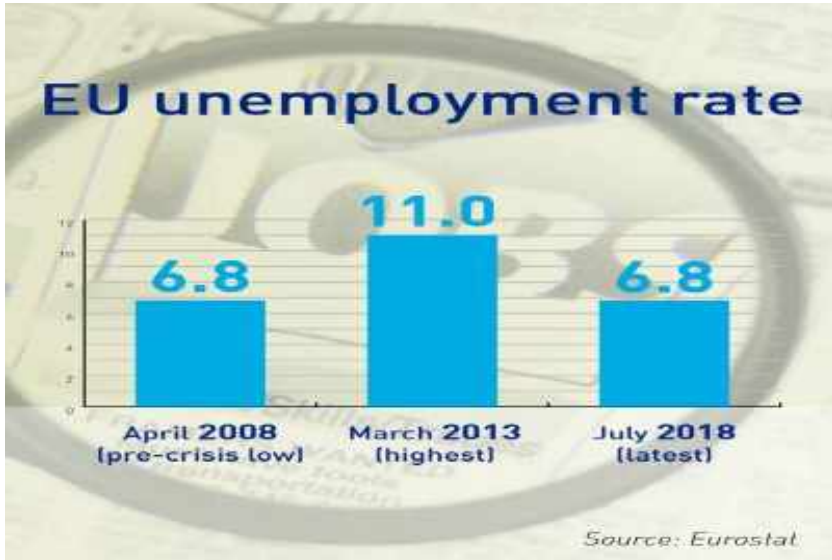
Proses integrasi Eropa, yang melibatkan berbagai negara anggota UE yang bekerja sama dalam berbagai bidang, telah memberikan banyak manfaat ekonomi, politik, dan sosial. Namun, proses ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam menjaga keberlangsungannya. Integrasi Eropa memang merupakan sebuah proyek yang ambisius dan kompleks. Pandangan ini mencerminkan dinamika yang terjadi di dalam proses integrasi Eropa. Terkait hal ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan, UE dan negara-negara anggotanya terus bekerja keras untuk mencapai tujuan integrasi. Masa depan integrasi Eropa memang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan UE dalam mengatasi berbagai tantangan, sembari memanfaatkan peluang yang ada. Perubahan dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial akan memengaruhi sekaligus membentuk arah masa depan integrasi. Oleh karena itu, kemampuan UE untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul akan menjadi kunci keberhasilan masa depannya. Adapun beberapa tantangan integrasi Eropa tersebut di antaranya terkait krisis keuangan dan ekonomi, migrasi dan pengungsi, populisme dan nasionalisme, Brexit, krisis keamanan, ketidaksetaraan regional, perluasan keanggotaan UE, serta perbedaan kebijakan dan budaya.

A. Krisis Keuangan dan Ekonomi

Krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008 telah menghadirkan tantangan besar bagi ekonomi UE. Beberapa negara anggota mengalami krisis utang, yang memicu kekhawatiran terkait stabilitas Euro dan ketahanan ekonomi bersama. Sementara sebagian besar negara telah pulih, ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara anggota tetap menjadi masalah, yang mengancam stabilitas ekonomi Eropa secara keseluruhan.

Ketika krisis keuangan global terjadi, beberapa negara anggota UE, terutama di kawasan Euro, mengalami krisis utang

yang serius. Dalam beberapa kasus, krisis ini telah memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan stabilitas keuangan negara-negara tersebut. Tingkat pengangguran meningkat tajam di seluruh UE sebagai akibat dari resesi ekonomi. Banyak warga EU kehilangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor terkait konstruksi dan keuangan (Laffan, 2017).



Tingkat pengangguran di UE selama krisis keuangan global.

Sumber: *EU Unemployment at Its Lowest since the Financial Crisis*, diakses dari <https://www.bussinesseurope.eu/news/eu-unemployment-its-lowest-financial-crisis>)

Berikut adalah beberapa contoh krisis keuangan dan ekonomi yang pernah terjadi di beberapa negara UE.

1. Krisis utang *Eurozone* (2010-2012): krisis ini dimulai dengan masalah utang di beberapa negara anggota *Eurozone*, terutama Yunani, Portugal, dan Spanyol. Negara-negara ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Krisis ini mengancam stabilitas Euro dan memerlukan intervensi dari UE, Bank Sentral Eropa (*European Central Bank/ECB*), dan Dana

Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) untuk menyelamatkan negara-negara tersebut dengan menyediakan bantuan keuangan dan berbagai program pemulihan ekonomi.

2. Krisis Keuangan Siprus (2013): siprus mengalami krisis keuangan yang signifikan pada tahun 2013, di mana sejumlah besar dana yang disimpan di sektor perbankan negara tersebut terancam hilang karena masalah dalam sektor perbankan. Krisis ini memaksa Siprus untuk mencari bantuan finansial dari UE dan IMF dalam bentuk paket penyelamatan yang mencakup restrukturisasi sistem perbankan.
3. Brexit (2016): keputusan Inggris untuk meninggalkan UE, yang dikenal sebagai Brexit, juga memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan keuangan Inggris dan UE. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan, investasi, dan stabilitas pasar keuangan di wilayah tersebut.
4. Krisis COVID-19 (2020): pandemi COVID-19 menghasilkan krisis kesehatan global yang juga memiliki dampak ekonomi yang serius di seluruh dunia, termasuk di negara-negara anggota UE. Negara-negara UE menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi, lonjakan pengangguran, dan beban fiskal yang besar untuk menangani pandemi. Sebagai respons, UE meluncurkan Fasilitas Pemulihan dan Ketahanan (*Recovery and Resilience Facility/RRF*) yang besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi dampak pandemi.
5. Krisis keuangan Italia (2021): Italia menghadapi masalah keuangan dan ekonomi, yaitu tingkat utang yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini merupakan tantangan serius bagi perekonomian Italia dan menjadi perhatian bagi pemerintah UE.

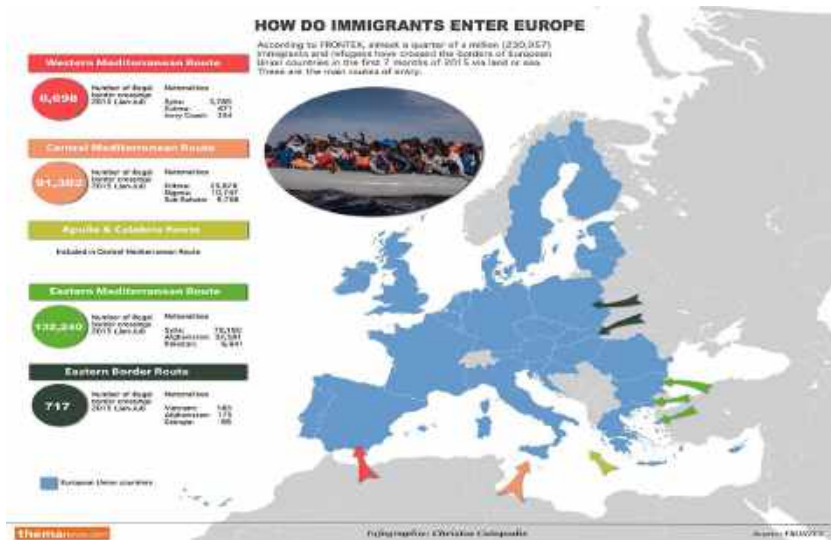
Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di negara-negara anggota UE ini, ikut mengancam stabilitas mata uang Euro dan membutuhkan langkah-langkah penanganan krisis yang kompleks. Terkait hal ini, UE dan lembaga-lembaga pembiayaan internasional seperti IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang terkena dampak krisis utang. Beberapa negara kemudian harus mengimplementasikan program-program reformasi struktural yang ketat sebagai bagian dari paket bantuan ini.

Krisis keuangan juga memicu reformasi dalam pengawasan sektor keuangan di UE, yaitu dengan mengadopsi berbagai peraturan baru yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mencegah krisis serupa di masa mendatang, termasuk dilakukannya pembentukan Uni Perbankan Eropa (*European Banking Union/EBU*) dan Otoritas Perbankan Eropa (*European Banking Authority/EBA*). Meskipun beberapa negara pulih dari krisis dengan cepat, ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara anggota tetap menjadi masalah. Beberapa negara masih menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan masalah ekonomi lainnya, sementara yang lainnya tumbuh lebih cepat. Hal ini menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di beberapa wilayah (Guiraudon et al., 2016).

Krisis utang juga memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan keuangan negara anggota. Beberapa negara harus merestrukturisasi utang mereka atau bergantung pada bantuan finansial dari UE dan IMF, yang berdampak memunculkan isu-isu terkait kedaulatan ekonomi. Pada akhirnya, krisis keuangan global menunjukkan bahwa integrasi ekonomi di UE memerlukan koordinasi kebijakan ekonomi yang lebih erat antara negara-negara anggota. Koordinasi kebijakan ekonomi ini merupakan bagian dari upaya yang harus terus berlanjut untuk memperkuat stabilitas ekonomi di UE dan meminimalkan potensi krisis ekonomi di masa mendatang.

B. Migrasi dan Pengungsi

Krisis migrasi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2010 telah menjadi salah satu tantangan paling signifikan dalam sejarah UE dan telah menciptakan ketegangan politik di seluruh Eropa. Krisis migrasi ini memuncak pada tahun 2015 dan 2016, ketika jumlah pengungsi dan migran yang mencoba mencari perlindungan di Eropa meningkat secara dramatis. Krisis migrasi ini terutama terkait dengan lonjakan besar-besaran pengungsi dan migran yang datang ke Eropa, terutama melalui rute Mediterania. Krisis ini ditandai dengan kedatangan sejumlah besar pengungsi, terutama dari Suriah, Afghanistan, Irak, dan negara-negara Afrika Utara lainnya yang sedang dilanda konflik. Para pengungsi ini mencoba mencari perlindungan di Eropa (De Haas, 2018). Beberapa rute migrasi yang paling populer adalah melalui Yunani, Italia, dan Spanyol.



Rute imigran untuk mencapai Eropa.

Sumber: *Continental Migration to Europe* <https://nupsreview.wordpress.com/2016/03/01/continental-migration-to-europe/>

Beberapa negara anggota UE kemudian menghadapi kesulitan dalam menangani jumlah pengungsi dan migran yang masuk. Kondisi ini menciptakan situasi yang sulit di beberapa wilayah, terutama di tempat penampungan sementara dan di perbatasan negara-negara tertentu. Krisis pengungsi ini juga menciptakan beban besar pada negara-negara anggota UE yang berada di garis depan, seperti Yunani dan Italia, yang harus menangani kedatangan besar-besaran pengungsi tanpa sumber daya yang memadai. Pemukiman kumuh dan kondisi yang tidak manusiawi di tempat pengungsian menjadi perhatian besar. Ketidaksetaraan dalam pembagian beban antara negara-negara anggota juga menjadi masalah utama. Beberapa negara anggota UE menolak kuota pengungsi yang diusulkan untuk berbagi beban, dan terdapat peningkatan dukungan untuk partai politik yang menentang kedatangan pengungsi, yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan politik di antara negara-negara UE (Neuman Stanivuković & Neuman, 2019).

Selain memunculkan perpecahan di antara negara-negara anggota, krisis migrasi juga meningkatkan populisme dan nasionalisme dalam politik di beberapa negara. Perdebatan yang sengit muncul terkait bagaimana menangani aliran migran, termasuk masalah penahanan, distribusi, dan deportasi. Seiring dengan meningkatnya tekanan politik, UE kemudian mencoba merespons dengan berbagai cara dalam upaya mengatasi krisis ini, termasuk meningkatkan patroli perbatasan, mendukung operasi penyelamatan di laut, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mengadopsi berbagai kebijakan migrasi. UE juga membuat berbagai kesepakatan, di antaranya Kesepakatan Uni Eropa-Turki dan pembentukan koridor humaniter yang bertujuan untuk mengurangi aliran migran melalui rute Turki ke Yunani. UE juga memperkuat pengawasan perbatasannya, terutama di perbatasan Schengen. Hal ini berdampak pada munculnya tantangan dalam

menjaga kebebasan pergerakan di UE, sambil mengelola masalah keamanan dan migrasi (Tosun et al., 2014).

Krisis migrasi dan pengungsi yang terjadi ini telah menguji kesiapan UE dalam mengatasi masalah bersama yang melibatkan banyak negara anggota. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan adil terkait krisis ini, termasuk relokasi pengungsi, pembentukan sistem perlindungan bersama, dan kerja sama dengan negara-negara di luar UE dalam mengatasi akar penyebab migrasi. Krisis migrasi ini juga telah memiliki pengaruh jangka panjang pada politik dan kebijakan migrasi di seluruh UE. Beberapa negara anggota telah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait dengan imigrasi dan pengungsi, dan isu ini tetap menjadi perdebatan penting dalam politik UE.

C. Populisme dan Nasionalisme

Di beberapa negara Eropa, terdapat tren naiknya partai-partai populis dan nasionalis. Partai-partai ini sering kali mengusung platform yang menentang terjadinya penguatan integrasi Eropa, menekankan kedaulatan nasional, dan menyoroti isu-isu seperti imigrasi, perdagangan internasional, dan hubungan luar negeri. Implikasi dari tren ini di antaranya dapat mengancam kohesi UE, di mana keberadaan partai-partai populis dan nasionalis telah menciptakan perpecahan dalam UE. Hal ini dimungkinkan terjadi karena negara-negara anggota dapat saja memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keberlanjutan proses integrasi dan keberadaan partai-partai ini dapat memengaruhi kebijakan nasional serta sikap negara terhadap isu-isu Eropa.

Partai-partai populis dan nasionalis yang mengancam kohesi UE memang telah muncul di berbagai negara anggota UE dalam beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa contoh partai-partai populis dan nasionalis yang memiliki pengaruh di beberapa negara UE (Vachudova, 2021).

1. Partai Brexit di Inggris: Partai Konservatif di Inggris, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Theresa May dan kemudian Boris Johnson, telah mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan Brexit, yaitu meninggalkan UE. Selain itu, Partai Brexit yang dipimpin oleh Nigel Farage memiliki peran dalam menggerakkan dukungan untuk Brexit.
2. Fidesz di Hungaria: Partai Fidesz yang dipimpin oleh Viktor Orban telah menjadi fokus perhatian karena kebijakan-kebijakan yang mengekang kebebasan media, sistem peradilan, dan hak-hak sipil di Hungaria. Partai ini telah dikritik oleh sejumlah pihak dalam UE, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokratis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Lega di Italia: Lega yang dipimpin oleh Matteo Salvini adalah partai nasionalis yang vokal dalam penentangan terhadap imigrasi dan kebijakan UE. Partai ini pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Italia.
4. Partai Kebebasan di Austria: Partai Kebebasan Austria (FPÖ) telah menjadi partai nasionalis yang signifikan di Austria. Partai ini memiliki sejarah terkait dengan anti-imigrasi dan pandangan yang menentang integrasi Eropa.
5. Partai AfD di Jerman: Partai Alternatif untuk Jerman (*Alternative für Deutschland*/AfD) adalah partai populis di Jerman yang telah mendapatkan kursi di parlemen Jerman. Partai ini menentang imigrasi dan memiliki pandangan euroskeptis.
6. Partai Nasionalis di Prancis: Marine Le Pen dan partainya, *Rassemblement National* (sebelumnya *Front National*), telah menjadi kekuatan nasionalis yang signifikan di Prancis. Partai ini mengusung platform anti-imigrasi dan euroskeptis.

Tren kenaikan partai-partai populis dan nasionalis ini memang telah berimplikasi menciptakan ketegangan di antara negara-negara anggota UE, sekaligus menciptakan tantangan dalam upaya menjaga kohesi di antara negara-negara anggota terkait dengan beragamnya pandangan politik. Namun, penting untuk diingat bahwa UE tetap memiliki dukungan yang luas di banyak negara anggota. Banyak warga UE yang mendukung proyek integrasi Eropa dan menganggapnya sebagai alat untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di benua tersebut. Oleh karena itu, tantangan dari partai-partai ini harus dilihat dalam konteks dinamika politik yang lebih luas di UE.

Fakta terkait masih kuatnya dukungan terhadap integrasi Eropa juga tercermin melalui survei dan pemilihan umum di sejumlah negara anggota UE, di mana walaupun terjadi pergeseran politik di beberapa negara, mayoritas penduduk di banyak negara masih mendukung keanggotaan mereka di UE. Perkembangan politik yang terkait dengan populisme dan nasionalisme juga dapat bervariasi di antara negara-negara anggota UE dan bahkan di dalam negara. Tidak semua negara atau wilayah memiliki tingkat dukungan yang sama terhadap partai-partai populis dan nasionalis. Dalam hal ini, masih cukup luas masyarakat di UE yang menyadari manfaat ekonomi dan politik yang dihasilkan dari kerja sama antarnegara. Keuntungan seperti akses ke pasar tunggal, mobilitas lintas perbatasan, dan kemampuan untuk berbicara sebagai blok dalam urusan dunia adalah aspek yang banyak dihargai oleh negara-negara anggota. Masalah global seperti perubahan iklim, migrasi, dan tantangan ekonomi, dipandang juga memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Dalam menghadapi masalah ini, banyak negara anggota menyadari bahwa kerja sama Eropa adalah kunci untuk mencapai solusi yang efektif (Bonikowski & Gidron, 2016).

Dengan demikian, penting untuk mempertahankan dialog dan komunikasi antara negara anggota dengan pandangan politik yang berbeda. Dalam konteks dinamika politik yang kompleks ini, penting pula bagi UE untuk tetap berfokus pada nilai-nilai inti yang menjadi dasar proyek integrasi Eropa, seperti perdamaian, toleransi, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Kemampuan untuk menanggapi tantangan internal dengan pendekatan yang kooperatif dan untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah global akan menjadi kunci bagi kesuksesan dan kelangsungan UE di masa depan.

D. The Brexit

Brexit adalah singkatan dari "*British Exit*" yang merujuk pada keputusan Inggris untuk meninggalkan UE. Proses keluarnya Inggris dari UE ini diawali oleh hasil referendum pada 23 Juni 2016, di mana mayoritas pemilih Inggris memilih untuk meninggalkan UE dengan perbandingan sekitar 52% mendukung Brexit dan sekitar 48% menentangnya. Hasil referendum ini memiliki dampak yang sangat besar di Inggris, UE, dan di seluruh dunia. Proses Brexit berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan negosiasi yang kompleks tentang berbagai aspek, termasuk perdagangan, imigrasi, kebijakan perbatasan, dan banyak lagi (Taggart & Szczerbiak, 2018).

Keputusan Inggris untuk memilih Brexit dalam referendum pada tahun 2016 dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks. Beberapa faktor kunci yang berperan dalam keputusan tersebut adalah sebagai berikut (Taggart & Szczerbiak, 2018).

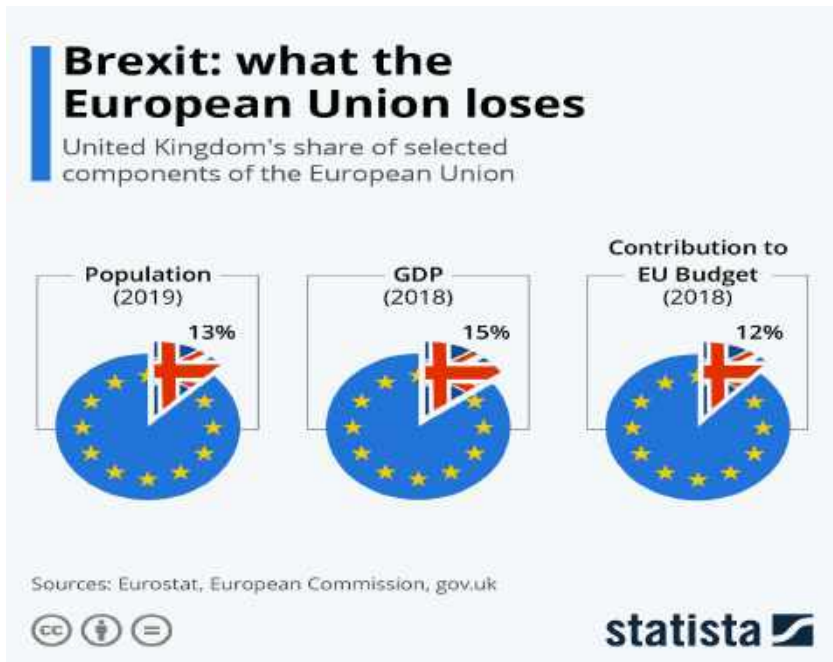
1. Kontrol atas kebijakan sendiri: salah satu argumen utama pendukung Brexit adalah bahwa Inggris akan mendapatkan lebih banyak kontrol atas kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk imigrasi, perdagangan, dan regulasi, jika Inggris keluar dari UE. Mereka berpendapat

bahwa keluar dari UE akan mengembalikan kedaulatan nasional.

2. Ketidakpuasan terhadap kebijakan imigrasi UE: isu imigrasi adalah salah satu faktor penting dalam kampanye Brexit. Beberapa orang di Inggris merasa bahwa kebijakan bebas pergerakan di UE telah membawa imigran yang berlebihan ke Inggris, yang akan memengaruhi lapangan kerja dan layanan publik. Pendukung Brexit menginginkan lebih banyak kendali atas masalah imigrasi.
3. Kritik terhadap biaya keanggotaan: Brexit juga dikaitkan dengan kritik terhadap biaya keanggotaan Inggris di UE. Selama kampanye, dinyatakan bahwa uang yang dibayarkan oleh Inggris ke UE dapat digunakan untuk tujuan domestik yang lebih penting, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.
4. Perasaan identitas nasional: beberapa orang di Inggris memiliki perasaan identitas nasional yang kuat dan merasa bahwa keanggotaan di UE mengancam kedaulatan dan identitas nasional mereka. Beberapa pendukung Brexit merasa bahwa Brexit akan memulihkan kedaulatan dan mengukuhkan kembali identitas nasional.
5. Kampanye politik: kampanye yang dijalankan oleh kelompok-kelompok pro dan kontra Brexit memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan pemilih. Argumen yang disajikan dalam kampanye-kampanye tersebut memiliki dampak signifikan pada keputusan pemilih.
6. Polarisasi politik: Inggris mengalami polarisasi politik yang meningkat selama periode referendum Brexit. Partai-partai politik, terutama Partai Konservatif dan Partai Buruh, memiliki perpecahan internal terkait dengan Brexit, yang memengaruhi opini publik.

7. Isu ekonomi: meskipun beberapa pendukung Brexit berpendapat bahwa Inggris akan mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, banyak analis ekonomi dan organisasi bisnis mengkhawatirkan dampak singkatnya, seperti penurunan nilai mata uang *poundsterling* dan ketidakpastian ekonomi.

Keputusan untuk memilih Brexit sangat kontroversial dan membagi pendapat di Inggris, dan dampaknya masih terus berkembang. Sejak referendum tersebut, Inggris telah menjalani serangkaian peristiwa dan negosiasi dengan UE terkait pengaturan kondisi dan persyaratan perpisahan. Proses ini mencakup negosiasi mengenai perdagangan, hak warga, perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, serta banyak aspek lain dari hubungan masa depan antara Inggris dan UE. Brexit kemudian secara resmi diberlakukan pada 31 Januari 2020, yaitu ketika Inggris meninggalkan UE setelah periode transisi yang berlangsung hingga akhir tahun tersebut. Selama periode transisi, Inggris tetap berada di bawah regulasi UE termasuk berlanjutnya akses dalam Pasar Tunggal Eropa. Setelah periode transisi tersebut berakhir pada 31 Desember 2020, Inggris benar-benar keluar dari pasar tunggal dan UE.



Hal yang hilang dari UE pasca-Brexit.

Sumber: *Brexit: What the European Union Loses?* <https://www.statista.com/chart/20677/brexit-what-the-eu-loses/>

Brexit memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, termasuk perdagangan, ekonomi, perjalanan, dan hubungan luar negeri Inggris dan UE, meskipun telah dicapai kesepakatan perdagangan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021, yang ditujukan untuk mengatur perdagangan barang dan jasa antara keduanya setelah Brexit. Keluarnya Inggris dari UE ini juga merupakan contoh konkret dari tantangan integrasi Eropa, terutama mencerminkan kompleksitas antara kehendak nasional versus integrasi Eropa, di mana Brexit menciptakan ketegangan antara kehendak nasional suatu negara anggota dengan prinsip integrasi Eropa. Dengan kata lain, Brexit menggambarkan bahwa dalam UE, setiap negara memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan tetap berada di dalam UE atau keluar, tetapi pada saat

yang sama juga terdapat aspirasi untuk menciptakan persatuan ekonomi dan politik yang lebih dalam.

Proses negosiasi antara Inggris dan UE untuk menentukan persyaratan keluarnya Inggris dari UE juga merupakan contoh konkret dari sejauh mana integrasi telah menciptakan keterkaitan yang rumit (kompleksitas negosiasi). Permasalahan terkait perdagangan, hak warga, dan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia misalnya, telah menjadi perdebatan yang kompleks dan sulit diatasi. Brexit juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan, baik untuk Inggris maupun UE. Kebijakan perdagangan yang berubah setelah Brexit, terutama dengan berakhirnya akses Inggris ke Pasar Tunggal Eropa, ikut memengaruhi perdagangan, investasi, dan ekonomi secara keseluruhan.

Di lain pihak, Brexit juga menjadi pembelajaran bagi UE, khususnya mendorong pemikiran ulang tentang bagaimana meningkatkan keberlangsungan proyek integrasi Eropa dan mengatasi isu-isu yang mungkin memicu negara-negara lain untuk berpikir serupa. Hal ini juga mendorong dilakukannya percepatan pembicaraan terkait reformasi internal dan peran UE di masa depan. Pada akhirnya, Brexit menciptakan ketegangan politik, baik di Inggris maupun di antara negara-negara anggota UE, terutama terkait dengan pandangan beragam tentang integrasi Eropa, serta perasaan anti Eropa di beberapa negara yang selama ini juga menjadi tantangan bagi proyek integrasi. Singkatnya, Brexit adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga kohesi dalam UE, terutama ketika terdapat beragam pandangan dan aspirasi di antara negara-negara anggota. Hal ini juga mencerminkan pentingnya beradaptasi dan mengevaluasi cara-cara baru untuk menjaga integrasi Eropa dalam lingkungan yang terus berubah.

E. Krisis Keamanan

Krisis keamanan seperti konflik di Ukraina dan ancaman teroris telah menantang kemampuan UE untuk bersatu dalam menangani masalah keamanan. Hal ini mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan global yang dihadapi oleh UE dan kerumitan dalam mencapai konsensus di antara negara-negara anggota terkait kepentingan dan pandangan yang beragam.

Konflik di Ukraina, terutama di wilayah timur Ukraina yang disengketakan, telah menjadi salah satu krisis keamanan terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Konflik ini bukan hanya menciptakan ketegangan antara UE dan Rusia, tetapi juga telah menguji kemampuan UE untuk merespons secara efektif. Sanksi ekonomi terhadap Rusia adalah salah satu langkah yang diambil oleh UE sebagai respons terhadap krisis ini. UE juga berupaya memainkan peran penting dalam upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Bersama dengan Prancis, Jerman, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (*Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE*), UE telah menjadi bagian dari proses Perjanjian Minsk, yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata dan penyelesaian politik (Wright, 2023).

Ancaman teroris, terutama yang terkait dengan kelompok-kelompok seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), juga telah memengaruhi keamanan Eropa. Serangan teroris di beberapa negara anggota UE, misalnya serangan di Paris pada 2015 dan serangan di Brussels pada 2016 merupakan peristiwa tragis yang telah mengguncang Eropa dan menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk mengatasi ancaman terorisme, sekaligus menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya mengatasi ancaman ini (Robins-Early, 2016). Tantangan keamanan ini kemudian mendorong UE untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan antara negara-negara anggotanya.

Pada tahun 2017, UE meluncurkan Proyek Kerja Sama Pertahanan Eropa (*Permanent Structured Cooperation*/PESCO) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bersama. Dalam hal ini, UE merespons ancaman terorisme dengan sejumlah langkah yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kerja sama antarnegara yang ditempuh melalui (Zielonka, 2017):

1. Pertukaran informasi intelijen: kerja sama antara negara-negara anggota UE dalam pertukaran informasi intelijen menjadi kunci dalam upaya melawan terorisme. UE telah berupaya memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik antara negara-negara anggota, termasuk data tentang pelaku teroris potensial dan jaringan teroris.
2. Pencegahan radikalisisasi: upaya pencegahan radikalisisasi telah menjadi fokus penting dalam strategi UE. Hal ini mencakup program-program untuk mengidentifikasi dan mendampingi individu yang berisiko terpapar radikalisme serta mendukung pendidikan dan integrasi sosial sebagai upaya pencegahan.
3. Kontrol perbatasan: UE telah memperkuat kontrol perbatasannya, terutama di wilayah Schengen yang menerapkan perjalanan bebas tanpa perbatasan internal. Ini bertujuan untuk menghentikan pergerakan orang yang terkait dengan terorisme atau imigrasi ilegal.
4. Kerja sama dengan negara asal teroris: UE telah berupaya untuk bekerja sama dengan negara-negara di luar UE untuk mengatasi akar penyebab terorisme dan menghentikan aliran pendanaan teroris. Hal ini mencakup kerja sama dalam penegakan hukum, pembangunan, dan diplomasi.
5. Legislasi anti terorisme: Banyak negara anggota UE telah memperkenalkan undang-undang anti terorisme yang lebih ketat untuk memberantas aktivitas teroris. UE juga telah mengadopsi regulasi dan direktif yang berlaku di

seluruh UE untuk memperkuat kerangka hukumnya dalam menghadapi terorisme.

Upaya UE menjaga keamanan, tentu juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan luar negeri dan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, UE berusaha untuk menjadi pemain penting dalam diplomasi global dan memainkan peran dalam memediasi konflik dan mengatasi tantangan keamanan internasional. UE aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional dalam melawan terorisme, termasuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara di luar UE. Ini mencakup dukungan terhadap usaha-usaha global untuk menghentikan pergerakan teroris, memerangi pembiayaan terorisme, dan mencegah ekstremisme.

Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh UE terkait keamanan adalah persoalan pengungsi. Krisis migrasi dan pengungsi yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, memiliki dampak terhadap keamanan dan stabilitas di Eropa. Penanganan aliran migran yang besar-besaran telah menjadi tantangan bagi UE dalam menjaga keamanan perbatasan dan stabilitas internal. Secara umum, meskipun UE berhasil mencapai kerja sama keamanan yang signifikan dalam hal kontra-terorisme dan pengawasan perbatasan, tetapi adanya fakta bahwa beberapa negara anggota memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu keamanan tertentu, telah menciptakan tantangan bagi UE dalam mencapai konsensus dan koordinasi yang efektif (Börzel, 2018).

Terkait perbedaan pendekatan nasional misalnya, setiap negara anggota UE memiliki kebijakan keamanan nasional yang berbeda, terutama dalam hal imigrasi dan pengawasan perbatasan. Beberapa negara mungkin lebih terfokus pada penegakan hukum dan keamanan perbatasan, sementara yang lain lebih terbuka terhadap pendekatan yang lebih humaniter terhadap migran

dan pengungsi. Terdapat juga perbedaan dalam pendekatan terhadap kontra-terorisme, termasuk perbedaan dalam definisi teroris dan kelompok teroris. Pengawasan perbatasan UE juga merupakan masalah dan tantangan yang rumit, terutama ketika aliran migran terjadi secara besar-besaran. Beberapa negara anggota UE yang berada di jalur migrasi utama menghadapi beban yang lebih besar dalam mengelola aliran migran dan memerlukan pengawasan perbatasan yang kuat. Meskipun demikian, UE telah berusaha untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam hal keamanan dan penanganan aliran migran. Ini termasuk pembentukan lembaga-lembaga seperti Frontex, yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan UE, serta pertukaran informasi intelijen dan kerja sama dalam penegakan hukum melalui Europol. Selain itu, negosiasi dan kesepakatan seperti Kesepakatan UE-Turki bertujuan untuk mengelola aliran migran secara bersama-sama (Bulmer & Joseph, 2016).

Mencapai konsensus di antara 27 negara anggota UE dengan kepentingan yang beragam memang bukanlah tugas yang mudah. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam mengambil tindakan cepat dan efektif dalam mengatasi tantangan keamanan. Tantangan ini mencerminkan kompleksitas mengelola keragaman pandangan dan kebijakan di antara negara-negara anggota UE sambil mencoba mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan perbatasan dan stabilitas internal di tengah aliran migran yang besar-besaran.

F. Ketidaksetaraan Regional

Ketidaksetaraan regional merupakan salah satu tantangan utama dalam proses integrasi Eropa. Meskipun UE telah mencapai tingkat integrasi yang signifikan, tetapi masih terdapat perbedaan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang besar antara berbagai wilayah di UE. Beberapa aspek yang menggambarkan tantangan ketidaksetaraan regional dalam konteks integrasi Eropa misalnya

meliputi perbedaan ekonomi antara negara-negara UE yang sangat signifikan. Negara-negara anggota yang lebih kaya memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara anggota yang lebih miskin (Manners & Rosamond, 2018). Perbedaan ini kemudian menciptakan ketidaksetaraan dalam hal standar hidup, lapangan kerja, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Terdapat pula kesenjangan besar dalam pembangunan infrastruktur di seluruh UE. Beberapa wilayah memiliki infrastruktur yang modern dan efisien, sementara wilayah yang lain masih menghadapi tantangan dalam hal transportasi, telekomunikasi, dan konektivitas. Sistem perawatan kesehatan di negara-negara UE juga bervariasi dalam hal kualitas dan aksesibilitas. Demikian pula, masih terdapat ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan keterampilan yang juga berdampak pada terjadinya kesenjangan dalam kualifikasi tenaga kerja, sehingga pada akhirnya ikut memengaruhi daya saing ekonomi suatu negara. Ketidaksetaraan regional juga dapat terlihat dalam kemampuan ekonomi wilayah di dalam negara-negara anggota. Terdapat wilayah yang lebih makmur dan lebih berkembang, sementara wilayah yang lain masih menghadapi masalah ekonomi yang serius. Perbedaan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan antara negara-negara UE dan wilayah-wilayah di dalamnya juga menjadi salah satu tantangan penting (Jones, 2018).

Terkait perbedaan ekonomi, dapat terlihat secara signifikan pada perbedaan antara negara-negara anggota UE di utara dan selatan. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Swedia di utara memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara di selatan seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol. Krisis utang di beberapa negara selatan juga telah memperburuk kondisi ketidaksetaraan ini. Terjadinya perbedaan ekonomi antara

utara dan selatan dalam wilayah UE ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut (Nicolaidis, 2019).

1. Krisis utang dan ketidaksetaraan: krisis utang yang melanda beberapa negara selatan UE, seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal, menyebabkan kondisi ekonomi yang sulit. Untuk mengatasi masalah utang, negara-negara ini mengimplementasikan kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Akibatnya, ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara selatan dan utara semakin memperbesar kesenjangan.
2. Pendapatan per kapita yang berbeda: negara-negara di utara UE, seperti Jerman dan Belanda, memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara di selatan seperti Yunani dan Spanyol. Ini menciptakan perbedaan dalam standar hidup, akses ke layanan, dan peluang ekonomi bagi warganya.
3. Tingkat pengangguran yang tinggi: krisis ekonomi dan utang telah menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi di beberapa negara selatan UE, terutama di kalangan pemuda. Tingkat pengangguran pemuda yang tinggi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kondisi masyarakat.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi ini, UE berupaya memberikan dukungan dan mempromosikan reformasi struktural di negara-negara selatan. Program bantuan dan dana UE tersebut misalnya dalam bentuk Dana Struktural dan Investasi Eropa (*European Structural and Investment Funds/ESIF*), yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah UE. UE juga telah mengadopsi berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi di seluruh wilayahnya,

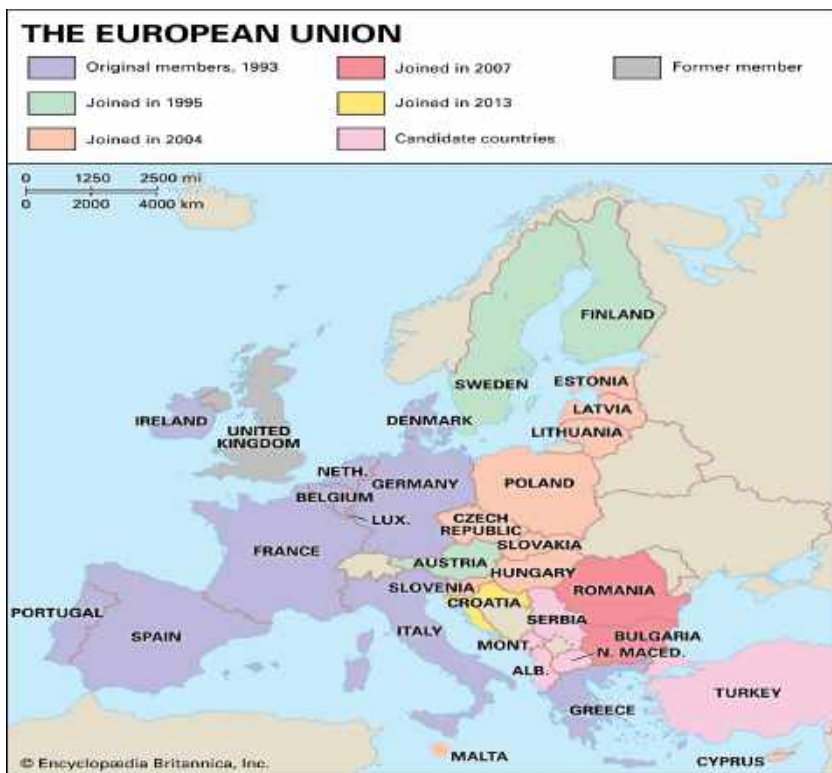
termasuk penerapan aturan anggaran yang ketat dan kontrol keuangan melalui Uni Moneter Eropa (*European Monetary Union/EMU*).

Perbedaan ekonomi antara utara dan selatan UE memang merupakan salah satu isu kompleks dalam integrasi Eropa. Mengatasi ketidaksetaraan ini adalah bagian integral dari upaya menjaga kohesi serta keberlanjutan proyek integrasi. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketidaksetaraan regional berperan dalam menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial di antara warga UE. Hal ini juga dapat menjadi hambatan bagi integrasi yang lebih dalam, karena negara-negara anggota dengan tingkat ketidaksetaraan yang tinggi, cenderung memiliki keengganan dalam mendukung langkah-langkah yang mengharuskan mereka memberikan kontribusi lebih besar atau mengorbankan kepentingan ekonomi nasional mereka. Ini dapat menghambat upaya untuk mencapai integrasi yang lebih dalam, seperti harmonisasi pajak atau anggaran EU yang lebih besar (Rittberger & Blauburger, 2018).

Perbedaan ekonomi juga dapat menjadi isu yang dimanfaatkan oleh partai politik populis dan nasionalis. Partai-partai ini berpotensi menggunakan ketidaksetaraan regional sebagai alat untuk memobilisasi dukungan dan mengkritik proyek integrasi Eropa, yang dapat mengancam kohesi UE. Dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kebijakan, negara-negara yang lebih kaya cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan UE. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan memengaruhi alokasi sumber daya dan dukungan kebijakan yang lebih besar untuk negara-negara yang lebih kaya. Dengan demikian, mengatasi ketidaksetaraan regional bukanlah tantangan yang mudah untuk dihadapi, tetapi merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kohesi UE serta menjaga dukungan publik terhadap integrasi Eropa.

G. Tantangan Perluasan Keanggotaan UE

UE saat ini memiliki 27 negara anggota, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. UE masih terus berupaya untuk melakukan perluasan keanggotaan, di mana pengembangan dan perluasan keanggotaan UE ini telah menjadi isu penting dalam upaya untuk memperluas zona perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Eropa.



Peta negara anggota UE.

Sumber: *European Union*. <https://www.britannica.com/topic/European-Union>

Beberapa negara juga telah menjadi target atau calon perluasan keanggotaan UE, meskipun proses ini mungkin bergerak lambat dan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk pemenuhan kriteria keanggotaan dan kemauan politik. Beberapa negara yang menjadi target atau calon perluasan keanggotaan UE di antaranya adalah (Schimmelfennig, 2014):

1. Negara Balkan Barat: negara-negara di wilayah Balkan Barat, termasuk Montenegro, Makedonia Utara, Serbia, Albania, dan Bosnia-Herzegovina, telah diidentifikasi sebagai calon perluasan keanggotaan UE. Proses negosiasi telah dimulai dengan beberapa negara ini, sementara yang lain masih dalam tahap awal eksplorasi. Proses perluasan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat stabilitas dan rekonsiliasi di wilayah tersebut.
2. Turki: meskipun negosiasi dengan Turki telah berjalan lama dan terhenti dalam beberapa periode, Turki tetap menjadi salah satu negara yang memiliki status calon perluasan keanggotaan UE. Perjalanan Turki menuju keanggotaan penuh, dinyatakan masih memerlukan penyelesaian sejumlah isu, termasuk HAM, kebebasan berpendapat, dan isu Siprus.
3. Ukraina: Ukraina adalah salah satu negara di Eropa Timur yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan UE. Hubungan antara Ukraina dan UE telah mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara UE dan Ukraina pada tahun 2014. Namun, permasalahan terkait dengan konflik di Ukraina Timur dan reformasi dalam negeri masih menjadi tantangan.
4. Moldova dan Georgia: Moldova dan Georgia merupakan dua negara di Eropa Timur yang telah menyatakan minatnya untuk menjadi anggota penuh UE. Kedua negara

ini telah menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan UE, yang merupakan langkah menuju integrasi lebih lanjut.

5. Kosovo: Kosovo adalah negara yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2008. Meskipun sejumlah negara anggota UE telah mengakui kemerdekaan Kosovo, statusnya masih diperdebatkan. Kosovo telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan UE, tetapi proses perluasan masih dalam tahap awal.

Penting untuk diingat bahwa proses perluasan keanggotaan UE adalah proses yang panjang dan rumit. Calon negara anggota harus mampu memenuhi kriteria politik, ekonomi, dan hukum yang ketat sebelum dinyatakan dapat bergabung dengan UE. Selain itu, proses ini juga memerlukan persetujuan dari semua negara anggota yang sudah ada dalam UE. Oleh karena itu, kemajuan dalam proses perluasan dapat bervariasi berdasarkan negara dan isu-isu yang perlu diatasi.

Perluasan keanggotaan UE sendiri akan sangat terkait erat dengan proses integrasi Eropa yang lebih luas. Ketika UE mempertimbangkan perluasan keanggotaan, tentu terdapat beberapa dampak terhadap integrasi Eropa yang perlu menjadi perhatian. Sebagai contoh, setiap penambahan anggota baru akan memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam lembaga-lembaga UE, di mana negara-negara baru tersebut akan mendapatkan perwakilan di parlemen UE dan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat mengubah dinamika dalam proses pengambilan keputusan dan memengaruhi kebijakan yang diadopsi.

Perluasan juga dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sikap publik di negara-negara anggota yang sudah ada terhadap masuknya anggota baru. Perubahan dalam komposisi UE ini akan memengaruhi persepsi publik terkait legitimasi UE dan

dukungan politik untuk integrasi lebih lanjut. Terkait penyesuaian anggaran, penambahan anggota baru akan memengaruhi anggaran UE. Dalam hal ini, negara-negara baru tersebut memerlukan dukungan keuangan dan bantuan struktural untuk mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur mereka, yang tentu saja memerlukan penyesuaian dalam alokasi anggaran UE.

Proses perluasan keanggotaan juga dapat memengaruhi identitas Eropa secara keseluruhan. Pertanyaan tentang apa yang berarti menjadi “Eropa” dapat muncul dan memengaruhi pembentukan identitas Eropa secara bersama. Dalam konteks ini, proses perluasan keanggotaan dapat memengaruhi pembentukan identitas Eropa melalui beberapa aspek sebagai berikut (Sassatelli, 2002).

1. Keragaman budaya dan sejarah: setiap negara yang baru bergabung dengan UE akan membawa keragaman budaya, bahasa, dan sejarah mereka sendiri. Ini dapat menciptakan pertanyaan tentang apa yang merupakan “identitas Eropa” yang bersama-sama, mengingat keragaman ini.
2. Persepsi tentang batas Eropa: proses perluasan dapat memengaruhi persepsi tentang batas geografis Eropa dan siapa yang termasuk dalam definisi geografis tersebut. Misalnya, ketika negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia dan Hungaria bergabung dengan UE, pertanyaan muncul tentang apakah Eropa berhenti di perbatasan geografis mereka atau apakah itu termasuk lebih banyak negara di Timur Tengah.
3. Pertanyaan identitas nasional vs. identitas Eropa: bagi negara-negara yang baru bergabung, terdapat pertanyaan tentang bagaimana mereka memadukan identitas nasional mereka dengan identitas Eropa yang sedang berkembang. Apakah menjadi warga negara UE menggantikan identitas nasional, ataukah keduanya dapat hidup berdampingan?

4. Dinamika politik internal: proses perluasan juga dapat menciptakan dinamika politik internal dalam negara-negara anggota yang sudah ada. Isu-isu seperti imigrasi, ekonomi, dan identitas nasional dapat menjadi perdebatan politik dalam negara-negara yang sudah ada, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembentukan identitas Eropa.

Penting pula untuk diingat bahwa identitas Eropa adalah konsep yang dinamis dan terus berkembang. Proses perluasan adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan identitas ini. Namun, identitas Eropa juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, termasuk nilai-nilai bersama, tujuan integrasi, dan pengalaman bersama dalam memecahkan masalah bersama seperti krisis ekonomi dan krisis migrasi. Bagaimanapun, pertanyaan tentang identitas Eropa akan tetap menjadi subjek perdebatan yang menarik dan penting dalam konteks integrasi Eropa yang terus berlanjut.

Pada akhirnya, meskipun perluasan keanggotaan UE adalah proses yang rumit dan penuh tantangan, tetapi hal ini juga merupakan bagian penting dari proyek integrasi Eropa yang lebih besar. Perluasan keanggotaan dapat membantu memperluas zona perdamaian, stabilitas, dan nilai-nilai demokrasi di seluruh Eropa. Oleh karena itu, meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, perluasan terus menjadi bagian dari perjalanan UE menuju integrasi lebih lanjut.

H. Perbedaan Kebijakan dan Budaya

Perbedaan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota masih menjadi salah satu tantangan utama dalam integrasi Eropa. Sebagai contoh, meskipun UE memiliki mata uang tunggal Euro, kebijakan ekonomi masih menjadi wewenang nasional. Negara-negara anggota memiliki

kebebasan untuk menentukan anggaran mereka sendiri, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi lainnya. Perbedaan ini dapat menciptakan ketidakharmonisan ekonomi antara negara-negara anggota. Demikian halnya sistem kesejahteraan sosial di negara-negara anggota UE dapat sangat bervariasi. Beberapa negara memiliki sistem kesejahteraan yang besar dan luas, sementara yang lain memiliki pendekatan yang lebih terbatas. Perbedaan ini dapat memengaruhi tingkat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang tersedia bagi warga negara.

Di samping itu, proses pengambilan keputusan di UE sering kali melibatkan negosiasi yang rumit dan memerlukan kompromi yang sulit. Hal ini misalnya terkait kedaulatan nasional, di mana setiap negara anggota UE mempertahankan kedaulatan nasional mereka dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berarti, masih terdapat keinginan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kontrol atas kebijakan dalam lingkup nasional masing-masing (Triandafyllidou & Gropas, 2014).

Negara-negara anggota UE juga memiliki kepentingan nasional yang beragam. Misalnya, negara dengan sektor pertanian yang kuat akan memiliki prioritas yang berbeda dalam kebijakan pertanian dibandingkan dengan negara yang lebih tergantung pada industri manufaktur. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan produktivitas antara negara-negara anggota juga menciptakan perbedaan pendekatan dalam kebijakan ekonomi. Demikian halnya dengan perbedaan dalam budaya, norma sosial, dan sistem jaminan sosial, ikut memengaruhi pandangan dan kebijakan negara-negara anggota dalam berbagai isu, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan HAM.

Fakta lain yang dihadapi adalah negara-negara anggota UE menghadapi tantangan global yang berbeda, seperti imigrasi, perubahan iklim, dan keamanan. Ini menciptakan kebutuhan untuk

beradaptasi dengan kebijakan yang relevan dengan situasi negara masing-masing. Hal ini ditambah dengan proses pengambilan keputusan di UE yang melibatkan berbagai lembaga dan negosiasi antarnegara, ikut menciptakan ruang bagi kompromi yang rumit dalam mencapai kesepakatan. UE juga harus mengatasi perbedaan dalam hukum dan kebijakan nasional yang ada di negara-negara anggotanya, sehingga harmonisasi hukum dan peraturan di seluruh UE memerlukan waktu dan upaya yang besar (Bulmer & Joseph, 2016).

Perbedaan bahasa, budaya, dan identitas nasional juga menjadi tantangan dalam menciptakan rasa persatuan di UE. Membangun solidaritas di antara negara-negara dengan latar belakang budaya yang beragam tentu bukan hal yang mudah. UE sendiri merupakan kumpulan negara dengan keanekaragaman budaya yang besar. Keanekaragaman budaya ini sebetulnya menjadi salah satu aset, tetapi juga berpotensi menciptakan tantangan dalam hal komunikasi dan pemahaman di antara masyarakat Eropa. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan kerja sama budaya dan integrasi sosial menjadi penting (Christensen et al., 2001).

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, UE sering kali melakukan kompromi yang memerlukan waktu dan upaya yang besar dari semua pihak. Pada saat yang sama, integrasi Eropa telah menciptakan struktur kebijakan dan lembaga-lembaga yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berkolaborasi dan mencari solusi bersama dalam berbagai isu. Kesepakatan UE biasanya mencerminkan semangat kerja sama dan saling menghormati kedaulatan nasional. Mencapai kesepakatan yang mengakomodasi beragam kepentingan dan latar belakang negara-negara anggota adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan proyek integrasi ini.

Masih dalam upaya mengatasi berbagai perbedaan, UE juga telah mengadopsi pendekatan berdasarkan subsidiaritas, yang mengharuskan pengambilan keputusan di tingkat UE hanya ketika itu lebih efektif daripada tingkat nasional. Prinsip subsidiaritas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi dan kebijakan nasional dengan integrasi dan pengambilan keputusan kolektif di tingkat UE. Ini mencerminkan prinsip dasar dalam pembentukan UE yang menghormati beragamnya kebijakan, budaya, dan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota, dengan tetap mengupayakan pencapaian tujuan bersama terkait integrasi ekonomi, politik, dan sosial.

Selain itu, UE juga bekerja untuk mencapai harmonisasi regulasi di beberapa bidang, misalnya melalui keberadaan Pasar Tunggal Eropa, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antarnegara dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seragam. Meskipun dalam faktanya, berbagai perbedaan masih tetap ada, tetapi penting untuk diingat bahwa integrasi Eropa juga telah mencapai sejumlah tingkat harmonisasi dan kerja sama yang signifikan di berbagai bidang, yang menciptakan manfaat besar dalam hal perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas di benua tersebut. Tantangan selanjutnya adalah terus bekerja menuju integrasi yang lebih dalam, sembari menghormati keanekaragaman budaya, sosial, dan politik yang ada di UE.

Sementara dalam upaya mengatasi berbagai perbedaan seperti bahasa, tradisi, dan nilai-nilai budaya, beberapa langkah telah diambil, di antaranya melibatkan program pertukaran dan mobilitas, seperti Program Erasmus+, yang memungkinkan siswa, pelajar, dan pekerja muda untuk belajar atau bekerja di negara-negara anggota UE lainnya. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, tetapi juga memperkuat ikatan personal dan profesional di seluruh Eropa (Calance, 2012).

Diluncurkan pula program UE seperti *Creative Europe* yang memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek di bidang budaya dan kreativitas. Ini mencakup seni, sastra, film, musik, dan sektor kreatif lainnya. Pendanaan ini membantu mempromosikan keanekaragaman budaya dan memfasilitasi kolaborasi lintas batas. UE juga memperingati Hari Eropa setiap tahunnya dengan berbagai kegiatan dan acara yang ditujukan untuk merayakan keanekaragaman budaya di antara negara-negara anggota. Selain itu, proyek-proyek budaya bersama diatur untuk mempromosikan pertukaran dan dialog lintas budaya. Diterapkan pula pendekatan pendidikan multibahasa yang diharapkan dapat membantu memfasilitasi komunikasi di antara masyarakat Eropa. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan lebih banyak bahasa di berbagai konteks, termasuk di media, pendidikan, dan bisnis, sekaligus dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi. Terakhir, dilakukan upaya promosi warisan budaya bersama Eropa yang juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ikatan budaya. Upaya ini melibatkan pelestarian dan promosi situs-situs bersejarah, warisan budaya tak benda, dan tradisi-tradisi unik di seluruh UE (Gehler, 2016).

BAGIAN II

ISLAM DI EROPA KONTEMPORER

Islam di Eropa kontemporer mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, identitas, dan masyarakat di era modern. Islam telah menjadi bagian integral dari keberagaman budaya dan agama di Eropa selama berabad-abad, dengan sejarah yang meliputi periode kejayaan dan ketegangan. Pada masa sekarang, populasi Muslim di Eropa telah meningkat karena imigrasi, baik yang berasal dari negara mayoritas Muslim maupun dari negara-negara lain. Dari sini, masyarakat Muslim di Eropa memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam, termasuk kelompok imigran generasi pertama yang datang ke Eropa untuk bekerja dan generasi kedua yang lahir di Eropa. Generasi kedua sering kali menghadapi tantangan identitas yang unik, karena mereka dibesarkan di lingkungan yang menciptakan jembatan antara budaya orang tua mereka dan budaya tempat mereka tinggal. Terdapat pula sejumlah kelompok Muslim di Eropa yang memiliki sejarah panjang di benua ini. Sebagai contoh, komunitas Muslim di Spanyol memiliki akar sejarah yang berlangsung selama berabad-abad, terutama selama masa kejayaan Islam di Al-Andalus. Sementara di Balkan, terdapat kelompok Muslim seperti Bosniak yang telah tinggal di wilayah tersebut secara historis. Dalam perkembangannya, populasi Muslim di Eropa juga menghadapi sejumlah isu sosial dan kultural, seperti isu integrasi, diskriminasi, dan isu identitas. Pemerintah dan masyarakat di Eropa berusaha untuk mengatasi isu-isu ini melalui kebijakan yang mendukung inklusivitas dan dialog antarbudaya.

BAB 1

SEJARAH ISLAM DI EROPA



Sejarah panjang Islam di Eropa, yang melibatkan masa-masa kejayaan, seperti saat Islam memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Andalusia (Spanyol saat ini), dan masa-masa ketegangan, seperti perang salib dan penaklukan oleh kekuatan Kristen, telah membentuk keragaman dan dinamika yang unik. Dalam keseluruhan, sejarah Islam di Eropa mencerminkan dinamika kompleks antara berbagai peradaban dan agama. Periode kejayaan, konflik, dan perdagangan telah membentuk keragaman yang unik dalam lanskap budaya dan sejarah di wilayah ini. Sejarah ini terus memainkan peran penting dalam pemahaman dan interaksi antara komunitas Muslim dan nonmuslim di Eropa. Di masa kini, sejarah Islam di Eropa tetap memberikan dampak pada keragaman dan dinamika di berbagai negara. Kelompok Muslim yang tinggal di Eropa membawa warisan budaya mereka sendiri, di mana sejumlah masjid dan pusat kebudayaan Islam hadir di berbagai kota di Eropa. Sejarah Islam di Eropa ini juga telah menjadi subjek penelitian dan analisis oleh para ahli sejarah dan ilmuwan sosial. Beberapa poin penting yang dikemukakan oleh para ahli mengenai sejarah Islam di Eropa meliputi masa kedatangan awal Islam di Eropa, periode penyebaran Islam di Eropa, migrasi modern Muslim di Eropa, dan masa pertumbuhan komunitas Muslim di era kontemporer.

A. Kedatangan Awal Islam di Eropa

Sejarah kedatangan awal Islam di Eropa dimulai pada abad ke-7 masehi ketika pasukan Muslim Arab memperluas wilayah mereka melalui penaklukan dan ekspansi di berbagai wilayah. Beberapa peristiwa penting dalam kedatangan awal Islam di Eropa tersebut di antaranya adalah penaklukan Spanyol oleh Umayyah, perluasan wilayah Muslim di Italia Selatan, kedatangan Muslim di Sisilia, dan perluasan Utsmaniyah ke Eropa. Selama masa penaklukan dan keberadaan awal Islam di Eropa ini, komunitas

Muslim membangun pusat-pusat kebudayaan, ekonomi, dan intelektual yang penting. Mereka mengembangkan arsitektur yang megah, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi (Berger, 2014).

Kedatangan awal Islam di Eropa juga menghasilkan budaya yang saling memengaruhi antara Muslim dan masyarakat Kristen di wilayah tersebut. Hal ini misalnya terlihat pada banyaknya kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang memiliki akar bahasa Arab. Sementara, pengaruh Arab juga terlihat di bidang seni, musik, dan kuliner di wilayah tersebut. Penting pula untuk dicatat bahwa wilayah-wilayah Muslim di Eropa pada periode awal tersebut secara bertahap direbut oleh kekuatan Kristen melalui Perang Salib dan ekspansi kerajaan Kristen lainnya. Meskipun demikian, pengaruh dan warisan Islam dalam sejarah Eropa tetap dapat ditemukan dalam banyak aspek budaya dan peradaban di wilayah tersebut (Abulafia, 1997).

Penaklukan Spanyol oleh Umayyah

Kedatangan Muslim pertama di Eropa ditandai melalui peristiwa penaklukan Spanyol oleh Umayyah pada tahun 711 M, yaitu ketika pasukan Muslim Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara dan menaklukkan wilayah Visigoth di Spanyol. Penaklukan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam di Eropa, sekaligus menjadi awal bagi kekuasaan Muslim di Semenanjung Iberia yang dikenal sebagai Al-Andalus. Pada puncak kekuasaannya, kekuatan Muslim di Al-Andalus mencakup sebagian besar Spanyol saat ini, Portugal, dan bahkan meluas hingga ke wilayah Prancis (Halliday, 1996).

Penaklukan Spanyol sendiri terjadi pada awal abad ke-8, di mana Spanyol atau Iberia yang merupakan bagian dari Kekaisaran Visigoth yang telah menguasai wilayah tersebut sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat mengalami ketidakstabilan politik dan konflik internal di antara penguasa Visigoth, yang berakibat pada melemahnya kekuatan mereka. Pada tahun 711 M, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, seorang jenderal Umayyah dari Afrika Utara, mendarat di Spanyol dengan persetujuan gubernur berkuasa saat itu, Roderick, yang merupakan penguasa Visigoth. Pasukan Muslim, yang terdiri dari pasukan Arab dan pasukan beragam etnis Muslim, seperti Berber, berhasil mengalahkan pasukan Visigoth dalam Pertempuran Guadalete (Berger, 2014).

Setelah pertempuran Guadalete, pasukan Umayyah kemudian melanjutkan penaklukan Spanyol. Mereka dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah, termasuk kota-kota penting seperti Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Penduduk setempat, termasuk orang Kristen dan Yahudi, diberikan pilihan untuk mengadopsi Islam atau membayar *jizyah* (pajak perlindungan) sebagai warga nonmuslim dengan hak-hak tertentu. Setelah penaklukan, wilayah yang dikuasai oleh Umayyah di Spanyol dikenal sebagai Al-Andalus. Umayyah kemudian mendirikan kekhalifahan di Cordoba pada tahun 756 M, yang kemudian menjadi pusat budaya, ekonomi, dan ilmiah yang makmur. Periode kekhalifahan ini dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam di Spanyol, di mana Islam, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dalam harmoni dan terjadi pertukaran ilmu dan budaya yang luas (Dodds, 1992).



Peta wilayah kekuasaan Umayyah di Spanyol

Sumber: <https://2puertadecuartos.wordpress.com/2017/06/25/unit-2-origin-and-expansion-of-islam/>

Periode Al-Andalus ini juga ikut memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan intelektual dan budaya di Eropa. Pada saat itu, Al-Andalus menjadi pusat peradaban maju yang ditandai dengan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pertanian. Karya-karya cendekiawan Muslim seperti Averroes, Ibn Rushd, dan Ibn Tufail, serta peninggalan arsitektur seperti Masjid Cordoba dan Alhambra, masih dapat dilihat keberadaannya hingga saat ini (Harvey, 1996).

Pada abad ke-11, kekuasaan Umayyah di Spanyol melemah akibat perselisihan internal dan serangan dari kerajaan Kristen utara. Pada tahun 1492 M, kota Granada, yang merupakan bagian terakhir dari kerajaan Muslim di Al-Andalus, jatuh ke tangan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile, menandai berakhirnya kekuasaan Muslim di Spanyol. Meskipun demikian, peristiwa penaklukan Spanyol oleh Umayyah ini

memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah dan budaya Spanyol serta pengaruh Islam di Eropa. Al-Andalus menjadi jembatan antara dunia Islam dan Eropa pada masa itu, dengan warisan budaya, intelektual, dan arsitektural yang masih terlihat hingga hari ini (Harvey, 1996).

Perluasan Wilayah Muslim di Italia Selatan

Pada abad ke-9, pasukan Muslim Arab menyerang Italia Selatan dan mendirikan wilayah kekuasaan mereka di wilayah Puglia (dikenal juga sebagai Apulia) yang terletak di sebelah tenggara semenanjung Italia. Wilayah Puglia ini menjadi target perluasan wilayah oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang berbasis di Timur Tengah dan bertujuan untuk memperluas pengaruh Islam serta mengendalikan jalur perdagangan di Mediterania. Pada saat itu, Mediterania adalah pusat perdagangan penting, dan kendali atas wilayah-wilayah pesisirnya sangat diinginkan. Para penakluk Muslim, dalam hal ini dari Kekhalifahan Abbasiyah, mencoba memperluas pengaruh mereka melalui serangan dan pendirian basis di sejumlah wilayah pesisir Mediterania, termasuk serangan terhadap Puglia, yang kemudian menjadi bagian dari wilayah yang dikenal sebagai “Emirat Bari” (Berger, 2014).

Pada tahun 847 M, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abbas ibn Fadl al-Sharabi menyerbu kota Bari, yang saat itu merupakan salah satu pusat penting di Italia Selatan. Pasukan Muslim berhasil merebut kota tersebut dari penguasa Bizantium setempat. Setelah penaklukan, wilayah Bari dan sekitarnya diperintah oleh seorang pemimpin Muslim yang diberi gelar “Emir”. Emirat Bari kemudian berdiri sebagai entitas politik yang terpisah dari pemerintahan Bizantium dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Emirat Bari (847-871 M) ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang signifikan di wilayah Italia Selatan. Kota

Bari juga menjadi pusat administratif dan budaya yang makmur, dengan penduduk yang terdiri dari kalangan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Emirat Bari juga menjalin hubungan dengan negara-negara Kristen di Eropa, termasuk gereja dan penguasa Bizantium serta Kekaisaran Karolingian di Prancis. Terdapat pula kontak dan pertukaran budaya, perdagangan, dan diplomasi antara Emirat Bari dengan Eropa Kristen pada masa itu (Berger, 2014).

Pada akhir abad ke-10, emirat tersebut mengalami serangkaian pengepungan oleh pasukan Kristen. Pada tahun 871 M, Bari dikepung oleh pasukan Bizantium pimpinan Kaisar Louis II. Meskipun emirat berhasil bertahan, tetapi serangan-serangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada tahun 871 M, kota tersebut jatuh ke tangan Bizantium. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Muslim di Bari dan terjadi pemulihan kekuasaan Kristen kembali di wilayah tersebut. Serangan dan penaklukan ini juga memicu reaksi dari Paus dan bangsa Eropa yang mendukung Perang Salib, yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim di Italia Selatan dan di tempat lain. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Eropa dan dunia Muslim selama Abad Pertengahan dan bagaimana perkembangan sejarah dan geopolitik mengubah kendali atas wilayah-wilayah tersebut.

Kedatangan Muslim di Sisilia

Kedatangan Muslim di Sisilia merupakan bagian dari perluasan wilayah Islam di Italia Selatan pada abad ke-9. Peristiwa ini diawali ketika terjadi penaklukan Sisilia pada tahun 827 M, yaitu ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh pemimpin Aghlabiyah, Asad ibn al-Furat, menyerbu Sisilia. Serangan ini merupakan bagian dari perluasan wilayah Muslim di Mediterania dan bertujuan untuk mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya di wilayah tersebut. Setelah penaklukan awal tersebut, penduduk setempat,

termasuk orang Kristen Bizantium, memberontak melawan penguasa Muslim. Namun, pemberontakan tersebut berhasil diredam, dan pasukan Muslim kemudian mengusir pasukan Bizantium dari Sisilia pada tahun 878 M, sekaligus mengakhiri kekuasaan Bizantium di pulau tersebut (Chiarelli, 2011).

Setelah menguasai Sisilia, wilayah tersebut menjadi Emirat yang diperintah oleh seorang pemimpin Muslim yang diberi gelar “Emir”. Emirat Sisilia menjadi bagian dari kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian, pada abad ke-10, beralih ke kekuasaan Fatimiyah yang berbasis di Afrika Utara. Emirat Sisilia berkembang menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Kota Palermo menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang makmur, dengan kehadiran Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Emirat Sisilia dikenal sebagai periode toleransi agama dalam sejarah Eropa. Hal ini ditandai dengan Muslim, Kristen, dan Yahudi di Sisilia hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pertanian (Berger, 2014).

Pada abad ke-11, Emirat Sisilia menghadapi serangkaian pengepungan oleh pasukan Kristen. Pada tahun 1061 M, kota Messina, yang menjadi basis terakhir Emirat Sisilia, jatuh ke tangan pasukan Norman yang dipimpin oleh Roger I dari Sisilia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Muslim di Sisilia dan dimulainya kekuasaan Norman. Banyak para ahli berpendapat bahwa kedatangan Muslim di Sisilia dan pendirian Emirat Sisilia memberikan dampak yang signifikan terhadap sejarah dan budaya di pulau tersebut. Pengaruh Islam dalam arsitektur, seni, pertanian, dan sistem irigasi masih dapat dilihat hingga saat ini di Sisilia. Meskipun kekuasaan Muslim kemudian berakhir, tetapi warisan mereka tetap berperan penting dalam perkembangan budaya dan sejarah Sisilia (Chiarelli, 2011).

Perluasan Utsmaniyah ke Eropa

Pada abad ke-14, Kekaisaran Utsmaniyah, yang berbasis di wilayah Anatolia, mulai memperluas wilayah ke Eropa Tenggara. Kekaisaran ini mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-16 dengan melakukan penaklukan Konstantinopel (sekarang Istanbul) pada tahun 1453, yang menandai akhir Kekaisaran Bizantium. Peristiwa ini diawali ketika pada awal abad ke-14, Utsmaniyah, sebuah negara Turki Sunni yang didirikan oleh Osman I, telah menguasai wilayah-wilayah di Anatolia dan bermaksud memperluas kekuasaannya ke wilayah Balkan di Eropa Tenggara. Pada saat itu, Utsmaniyah juga menghadapi perlawanan dari kekuatan Kristen, terutama Kekaisaran Bizantium (Faroghi, 2006).

Pada tahun 1453, pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II mengepung Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Setelah pengepungan yang berkepanjangan, pasukan Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota tersebut pada 29 Mei 1453. Penaklukan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari seribu tahun dan menandakan pendirian Kesultanan Utsmaniyah di wilayah tersebut. Setelah penaklukan Konstantinopel, Utsmaniyah terus berupaya memperluas kekuasaannya di Eropa Tenggara, di antaranya dengan menaklukkan wilayah-wilayah penting yang dikenal sebagai Rumelia. Wilayah ini mencakup Yunani, Serbia, Bulgaria, Rumania, dan sebagian besar Balkan (Albania, Serbia, Bosnia). Utsmaniyah menerapkan sistem pemerintahan yang kompleks, termasuk pemerintahan sentral yang kuat dan pengaturan administratif yang melibatkan struktur militer dan sipil. Selama pemerintahan Sultan Selim I dan Sultan Suleiman yang Agung pada abad ke-16, Utsmaniyah berhasil mencapai puncak kekuasaannya dan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia (Berger, 2014).

Di wilayah Eropa Tenggara yang dikuasai oleh Utsmaniyah, juga terjadi koeksistensi antara komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi. Utsmaniyah dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap komunitas nonmuslim, meskipun adanya pembatasan tertentu. Utsmaniyah juga memperkenalkan sistem hukum Islam (syariah) dan mengembangkan sistem ekonomi yang maju. Pada abad ke-16, kekuasaan Utsmaniyah mencapai puncaknya, ditandai dengan kemampuan untuk mengontrol wilayah yang luas di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Akan tetapi, setelah mencapai puncak kekuasaannya, Utsmaniyah menghadapi kemunduran dan terjadi perpecahan internal yang mengarah pada kemerosotan kekuasaan pada abad-abad berikutnya (Hathaway & Barbir, 2008).

B. Periode Penyebaran Islam di Eropa

Masa penyebaran Islam di Eropa mencakup periode sekitar abad ke-7 hingga abad ke-17. Masa ini tidak dapat dilepaskan dari masa awal kedatangan Islam ke Eropa yang ditandai dengan terjadinya penaklukan berbagai wilayah Eropa oleh kekuasaan Islam. Masa ini juga ditandai dengan terjadinya berbagai konflik antara Islam dan Eropa Kristen yang dipandang memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan melibatkan pertempuran militer, perang, dan ketegangan politik serta agama. Beberapa konflik yang terjadi antara Islam dan Eropa Kristen tersebut di antaranya perang Salib, pertempuran Lepanto, pertempuran Wina, dan *reconquista* Spanyol.

Perang Salib

Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang terjadi antara abad ke-11 dan ke-13 antara pasukan Kristen Eropa dan negara-negara Muslim di Timur Tengah. Perang Salib merupakan salah satu konflik yang paling terkenal dalam sejarah perang antara Islam dan Kristen di Eropa. Perang ini dimulai pada akhir

abad ke-11 sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci, terutama Yerusalem, yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Agama, kebanggaan nasional, dan ambisi politik menjadi faktor yang berperan dalam memobilisasi partisipasi Kristen Eropa dalam perang ini (Hillenbrand, 2021).

Perang Salib terdiri dari beberapa kampanye militer yang dilakukan oleh pasukan Kristen dengan melibatkan kerajaan-kerajaan Kristen seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Setiap kampanye memiliki tujuan yang berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah merebut kembali Tanah Suci dari Muslim. Salah satu momen penting dalam Perang Salib adalah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Salib pada tahun 1099. Dalam peristiwa ini, pasukan Kristen menyerbu dan merebut kota Yerusalem yang menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Perang Salib sendiri direspons oleh Muslim dengan berbagai cara. Salah satunya melalui perlawanan bersenjata melawan pasukan Salib yang mencoba merebut wilayah mereka. Pemimpin Muslim seperti Salahuddin al-Ayyubi (Saladin) memimpin perlawanan yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang direbut oleh Salib (Hillenbrand, 2021).

Perang Salib berdampak luas terhadap hubungan antara Islam dan Kristen di Eropa. Konflik ini meningkatkan ketegangan dan permusuhan antara kedua agama dan memperdalam persepsi negatif antara kedua pihak. Perang Salib juga membawa perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Eropa, seperti meningkatnya pengaruh perdagangan dan kebangkitan kota-kota. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa Perang Salib bukanlah konflik tunggal yang melibatkan Islam dan Kristen. Hubungan antara kedua agama ini jauh lebih kompleks dan beragam, termasuk periode toleransi, kerja sama, dan perdagangan di antara keduanya. Dengan kata lain, konflik Perang Salib mencerminkan konteks historis dan politik khusus pada masa itu, tetapi tidak

mencerminkan hubungan yang ada antara Islam dan Kristen saat ini.

Pertempuran Lepanto (1571)

Pertempuran Lepanto merupakan pertempuran laut yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571 antara Kekaisaran Utsmaniyah yang beragama Islam dengan aliansi Kristen yang dipimpin oleh Spanyol dan Venesia. Pertempuran ini merupakan salah satu konflik penting dalam sejarah pertempuran antara Eropa Kristen dan dunia Muslim di Eropa pada masa itu. Pertempuran Lepanto dilatarbelakangi ketika pada abad ke-16, Kesultanan Utsmaniyah menguasai wilayah yang luas dan memiliki armada laut yang kuat. Utsmaniyah berupaya memperluas kekuasaannya ke wilayah Eropa Tenggara dan menjadi ancaman besar bagi negara-negara Kristen di Mediterania (Berger, 2014).

Untuk menghadapi ancaman Utsmaniyah, negara-negara Kristen membentuk Liga Suci pada tahun 1571. Liga ini dipimpin oleh Spanyol, Venesia, dan negara-negara Kristen lainnya dengan tujuan untuk menghadang dan menghancurkan kekuatan Utsmaniyah di laut. Armada Liga Suci kemudian dikumpulkan dan dipersiapkan untuk menghadapi armada Utsmaniyah. Armada Liga Suci sendiri terdiri dari berbagai negara dan kapal-kapal perang besar seperti galley, galeas, dan kapal layar, dengan total sekitar 200 kapal (Berger, 2014).

Pertempuran dimulai di lepas pantai Lepanto, Yunani, pada 7 Oktober 1571. Pertempuran ini berlangsung dengan sengit, melibatkan tembakan meriam, serangan kapal-kapal perang, dan pertempuran di atas kapal. Pada akhirnya, pasukan Liga Suci berhasil memenangkan pertempuran ini dan menghancurkan sebagian besar armada Utsmaniyah. Kemenangan Liga Suci dalam Pertempuran Lepanto dianggap sebagai momen penting dalam perlawanan terhadap kekuasaan Utsmaniyah di Mediterania.

Meskipun tidak menghancurkan sepenuhnya armada Utsmaniyah, pertempuran ini melemahkan kekuatan laut Utsmaniyah dan membatasi ekspansi mereka. Pertempuran ini juga memiliki konsekuensi simbolis dan moral yang kuat, karena pasukan Kristen berhasil menghadapi dan mengalahkan kekuatan Utsmaniyah yang dianggap kuat pada saat itu (Berger, 2014).

Pertempuran Wina (1683)

Pertempuran Wina adalah pertempuran penting yang terjadi pada tahun 1683 antara pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang beragama Islam dengan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Kerajaan Polandia dan Kekaisaran Habsburg di Wina, Austria. Pertempuran ini diawali ketika pada abad ke-17, Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan kekuatan kuat di Eropa Timur dan telah memperluas kekuasaannya ke sebagian besar Balkan, berupaya melancarkan serangkaian kampanye militer dengan tujuan untuk merebut Wina, ibu kota Kekaisaran Habsburg (Wheatcroft, 2009).

Pada tahun 1683, pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Pasha Kara Mustafa Belgrade mengepung Wina dengan kekuatan yang besar. Utsmaniyah berharap dapat merebut Wina dan mengakhiri Kekaisaran Habsburg. Pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Polandia, Jan III Sobieski, bergabung dengan pasukan Kekaisaran Habsburg di bawah komando Karl V dari Lothringen untuk membela Wina. Pasukan Kristen mampu membangun pertahanan yang kuat di sekitar kota. Pada tanggal 12 September 1683, pasukan Kristen melancarkan serangan terhadap pasukan Utsmaniyah di luar tembok Wina. Pasukan Polandia menggunakan kavaleri berat sebagai kekuatan utama mereka dan berhasil memukul mundur pasukan Utsmaniyah. Serangan mendadak ini menggemparkan pasukan Utsmaniyah dan mengubah arah pertempuran (Wheatcroft, 2009).

Pasukan Kristen kemudian berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan memukul mundur pasukan Utsmaniyah. Kemenangan ini mengakhiri ancaman langsung Kesultanan Utsmaniyah terhadap Wina dan membalikkan momentum perang melawan Utsmaniyah di Eropa Tengah dan menghentikan ekspansi Utsmaniyah ke Eropa Tengah. Pertempuran ini juga memberikan dorongan moral kepada negara-negara Kristen lainnya dalam melawan kekuatan Utsmaniyah (Wheatcroft, 2009).

Reconquista (Penaklukan) Spanyol

Reconquista atau dikenal sebagai Penaklukan Spanyol adalah proses penaklukan wilayah Spanyol yang sebelumnya dikuasai Muslim oleh kerajaan-kerajaan Kristen. *Reconquista* berlangsung selama berabad-abad, dimulai pada abad ke-8 dan berakhir pada tahun 1492 ketika pasukan Kristen merebut kembali Granada, yang merupakan pusat terakhir kekuasaan Muslim di Spanyol. *Reconquista* memicu pertempuran dan pertikaian antara kedua pihak (Tolan et al., 2012).

Penaklukan Spanyol ini bermula ketika pada tahun 711, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar wilayah Spanyol dalam beberapa tahun. Muslim kemudian membangun kekhalifahan di Al-Andalus, yang mencakup sebagian besar semenanjung Iberia. Setelah penaklukan Muslim, kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol mulai melancarkan perlawanan terhadap kekuasaan Muslim. Kerajaan Asturias menjadi pusat perlawanan Kristen pada awalnya, dan melalui perlawanan yang gigih dan kampanye militer, mereka berhasil merebut kembali wilayah-wilayah di utara. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan Kristen lainnya seperti Leon, Castile, Aragon, Navarre, dan Portugal juga terus menguat dan memperluas kekuasaan mereka dengan berupaya merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Selama

Reconquista, terjadi pertempuran dan konflik berkepanjangan di antara kedua pihak (Tolan et al., 2012).

Reconquista juga melibatkan partisipasi negara-negara Kristen lainnya di Eropa. Pada abad ke-11, Paus memobilisasi serangkaian Perang Salib untuk mendukung upaya *Reconquista*. Pasukan dari negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Jerman juga ikut bergabung dengan pasukan Kristen Spanyol dalam upaya merebut kembali wilayah dari tangan Muslim. Pada akhirnya, Granada kemudian menjadi wilayah terakhir yang dikuasai oleh Muslim di Spanyol. Pada tahun 1492, pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Fernando dan Ratu Isabella dari Spanyol merebut Granada, sekaligus mengakhiri kekuasaan Muslim di Spanyol. Tahun ini juga ditandai dengan pengusiran umat Islam dan Yahudi dari Spanyol (Tolan et al., 2012).

Reconquista memiliki dampak yang luas terhadap sejarah dan budaya Spanyol. Penaklukan tersebut menyebabkan penyebaran dan penguatan agama Kristen di Spanyol, serta memengaruhi seni, arsitektur, dan sastra. *Reconquista* juga menciptakan ketegangan dan kesenjangan antara komunitas Kristen dan Muslim, sekaligus membentuk identitas nasional Spanyol yang didasarkan pada konsolidasi politik dan agama Kristen.

C. Migrasi Modern Muslim ke Eropa

Migrasi modern Islam di Eropa adalah fenomena yang berasal dari akhir abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini. Peristiwa ini memiliki akar sejarah yang kompleks dan terkait erat dengan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Migrasi modern Islam di Eropa ini mencakup periode setelah Perang Dunia II, yaitu ketika terjadi migrasi besar-besaran umat Muslim dari berbagai negara ke Eropa. Migrasi Muslim yang terjadi ini merupakan sebuah fenomena yang signifikan dan

berpengaruh dalam sejarah migrasi modern di benua Eropa, di mana pasca-Perang Dunia II, banyak negara Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja karena infrastruktur dan perekonomian mereka hancur akibat perang. Akibatnya, negara-negara Eropa mencari pekerja dari negara-negara dengan tingkat ekonomi yang kurang maju, termasuk negara-negara mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah (Grebbe, 2022).

Terdapat tiga hal utama yang mendasari terjadinya migrasi Muslim ke Eropa pasca-Perang Dunia II, yaitu hubungan kolonial, perjanjian tenaga kerja, dan migrasi ekonomi. Dalam konteks hubungan kolonial, sejumlah besar migran Muslim yang datang ke Eropa pasca-Perang Dunia II berasal dari wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Belanda, dan Spanyol memiliki sejarah kolonial di wilayah Afrika Utara (seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia) dan wilayah Timur Tengah (seperti Turki, Suriah, dan Lebanon). Migrasi ini terkadang dianggap sebagai “migrasi bekas koloni”. Dalam konteks perjanjian tenaga kerja, beberapa negara Eropa menandatangani perjanjian resmi dengan negara-negara mayoritas Muslim untuk mendatangkan pekerja. Misalnya, Prancis menandatangani perjanjian tenaga kerja dengan Tunisia pada tahun 1961 dan dengan Maroko pada tahun 1963, yang memungkinkan orang-orang dari negara-negara tersebut untuk datang dan bekerja di Prancis. Sementara dalam konteks migrasi ekonomi, migran Muslim yang datang ke Eropa umumnya datang untuk mencari pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Para migran Muslim ini bekerja dalam berbagai sektor, seperti konstruksi, pertanian, manufaktur, dan sektor jasa (Nielsen, 2004).

Migrasi Modern Muslim ke Eropa dalam Konteks Hubungan Kolonial

Migrasi Muslim ke Eropa dalam konteks hubungan kolonial memiliki keterkaitan sejarah yang kompleks dan berdampak jangka panjang pada hubungan antara kedua wilayah tersebut. Hubungan kolonial antara Eropa dan wilayah-wilayah mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah telah memainkan peran penting dalam menggambarkan dinamika migrasi modern ini, di mana selama masa kolonial, Eropa mendominasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah untuk kepentingan ekonomi mereka (Ramadan, 1999). Hal ini mencakup pengeksploitasian sumber daya alam, penanaman tanaman komersial, dan penggunaan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri di Eropa. Hubungan ekonomi yang tidak seimbang ini telah menciptakan ketidaksetaraan dan mendorong migrasi manusia ke Eropa dalam pencarian pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Setelah periode kemerdekaan atau peralihan kekuasaan dari kekuasaan kolonial ke pemerintahan nasional, banyak warga negara dari wilayah-wilayah mantan koloni yang mencari peluang ekonomi meninggalkan negara asal mereka dan bermigrasi ke Eropa. Migrasi pekerja ini terjadi dalam skala besar pada tahun 1950-an hingga 1970-an sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja di Eropa pasca-Perang Dunia II. Pekerja migran Muslim dari bekas koloni ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi pascaperang di negara-negara Eropa. Mereka banyak bekerja di sektor-sektor seperti industri, konstruksi, pertanian, dan perawatan kesehatan. Tanpa kontribusi pekerja migran Muslim ini, pemulihan ekonomi pascaperang di negara-negara Eropa akan menjadi lebih sulit terjadi (Ramadan, 1999).

Dalam perjalanannya, pekerja migran Muslim dari bekas koloni ini dihadapkan pada tantangan integrasi di negara-negara Eropa. Perbedaan budaya, bahasa, dan agama menciptakan kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat Eropa. Tantangan ini sering kali diperparah oleh isu-isu diskriminasi, rasisme, dan islamofobia yang mengemuka di beberapa negara Eropa. Hubungan kolonial yang terjadi di masa lalu juga telah meninggalkan jejak yang kuat dalam identitas masyarakat Muslim dan masyarakat Eropa. Kedua sisi sering kali merasakan dampak dari sejarah tersebut, dan kadang-kadang meningkatkan ketegangan atau ketidakpercayaan di antara mereka. Migrasi Muslim ke Eropa dalam konteks hubungan kolonial dapat dinyatakan telah membentuk lanskap sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di kedua wilayah tersebut.

Migrasi Modern Muslim ke Eropa dalam Konteks Perjanjian Tenaga Kerja

Migrasi modern Muslim ke Eropa dalam konteks perjanjian tenaga kerja adalah fenomena yang terjadi pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja di negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II. Seiring dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tinggi untuk membangun kembali infrastruktur dan ekonomi yang hancur akibat perang, negara-negara Eropa mulai mencari pekerja dari negara-negara lain, termasuk negara-negara mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah (Nielsen, 2004).

Untuk memfasilitasi kedatangan para pekerja asing tersebut, beberapa negara Eropa menandatangani perjanjian tenaga kerja bilateral dengan negara-negara mayoritas Muslim, seperti Turki, Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Perjanjian ini memungkinkan migran dari negara-negara tersebut datang dan bekerja di negara-negara

Eropa untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam sektor-sektor tertentu yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Mayoritas pekerja migran Muslim yang datang ke Eropa di bawah perjanjian tenaga kerja tersebut bekerja di sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, pertanian, konstruksi, dan sektor jasa seperti perawatan kesehatan. Pekerja migran Muslim ini juga sering kali dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik dan berat, yang kurang diminati oleh pekerja lokal. Perjanjian tenaga kerja bagi pekerja migran Muslim ini biasanya dirancang untuk waktu sementara, dengan durasi kerja tertentu dan ketentuan repatriasi setelah masa kontrak berakhir. Dalam kenyataannya, banyak pekerja migran memilih untuk tetap tinggal di negara Eropa setelah kontrak mereka berakhir atau beralih ke jalur migrasi lain, seperti migrasi keluarga atau status pengungsi (Ramadan, 1999).

Pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi di negara-negara Eropa pascaperang, di mana mereka membantu mengisi kekurangan tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Meskipun kehadiran pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim ini telah memberikan manfaat ekonomi, integrasi mereka ke dalam masyarakat Eropa tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan budaya, bahasa, agama, dan norma sosial sering kali menciptakan tantangan bagi pekerja migran untuk beradaptasi dan diakui secara penuh sebagai bagian dari anggota masyarakat. Tantangan integrasi dan isu-isu terkait migrasi pekerja Muslim ini bahkan tetap menjadi fokus perdebatan di Eropa hingga saat ini.

Migrasi Modern Muslim ke Eropa dalam Konteks Migrasi Ekonomi

Migrasi modern Muslim ke Eropa dalam konteks migrasi ekonomi terutama berkaitan dengan pergerakan orang-orang dari negara-negara mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah ke negara-negara Eropa dalam mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Migrasi ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong pergerakan penduduk ini dan memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Dalam hal ini, negara-negara Eropa dipandang menawarkan pasar tenaga kerja yang lebih luas dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara asal mereka, yang sering kali memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan kesempatan kerja yang terbatas (Nielsen, 2004).

Negara-negara tujuan pekerja migran Muslim dalam mencari peluang ekonomi di Eropa beragam, tergantung pada sejumlah faktor termasuk kebutuhan tenaga kerja, kebijakan migrasi, bahasa, budaya, dan hubungan bilateral antara negara asal dengan negara tujuan. Beberapa negara Eropa yang menjadi tujuan utama pekerja migran Muslim adalah sebagai berikut (Tibi, 2002).

1. Jerman: Jerman telah menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim di Turki, khususnya sejak periode tahun 1960-an, yaitu ketika dilakukan perjanjian tenaga kerja dengan Turki. Banyak pekerja migran Muslim dari Turki bermigrasi ke Jerman untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk manufaktur, konstruksi, dan sektor jasa.
2. Prancis: Prancis juga merupakan salah satu negara Eropa yang menarik banyak pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Sejarah kolonial Prancis di wilayah ini telah menciptakan hubungan migrasi yang kuat antara kedua wilayah ini.

3. Inggris: Inggris telah menjadi tujuan populer bagi pekerja migran Muslim dari berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Banyak pekerja migran dari Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Arab bermigrasi ke Inggris untuk mencari peluang ekonomi dan pekerjaan.
4. Belanda: Belanda juga menjadi tujuan penting bagi pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Turki dan Maroko. Sejarah hubungan kolonial dengan wilayah-wilayah tersebut juga telah memengaruhi migrasi ke negara ini.
5. Italia dan Spanyol: Italia dan Spanyol telah menarik banyak pekerja migran Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim di Afrika Utara, terutama selama periode pasca-Perang Dunia II, yaitu ketika kedua negara ini membutuhkan pekerja tambahan untuk sektor pertanian dan konstruksi.
6. Swedia dan Norwegia: negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia juga telah menjadi tujuan migrasi pekerja Muslim dari berbagai negara mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Migrasi ekonomi Muslim ke negara-negara Eropa ini memiliki dampak ekonomi di negara asal mereka melalui remitansi, yaitu sebagian pendapatan yang dikirimkan kembali ke negara asal oleh para pekerja migran. Remitansi ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian negara-negara asal dan membantu keluarga mereka yang tinggal di sana. Sementara bagi negara-negara Eropa, kehadiran pekerja migran Muslim dengan motif ekonomi ini memiliki dampak yang kompleks. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana negara-negara Eropa menangani dan mengintegrasikan pekerja migran ke dalam masyarakat dan ekonomi mereka.

Berikut adalah beberapa dampak utama kehadiran pekerja migran Muslim dengan motif ekonomi bagi negara-negara di Eropa (Amghar, 2016).

1. Kontribusi pada pasar tenaga kerja: pekerja migran Muslim memberikan tenaga kerja tambahan yang penting bagi sektor-sektor tertentu di negara-negara Eropa. Mereka sering kali mengisi kekurangan tenaga kerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang kurang diminati oleh pekerja lokal, seperti sektor pertanian, konstruksi, atau industri manufaktur. Kehadiran mereka juga membantu mengimbangi ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja di beberapa sektor penting.
2. Dukungan pada pertumbuhan ekonomi: pekerja migran Muslim berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa dengan membayar pajak dan konsumsi barang dan jasa. Mereka juga membantu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di sektor-sektor tertentu. Selain itu, remitansi yang dikirim kembali ke negara asal oleh pekerja migran juga memberikan kontribusi pada perekonomian negara-negara asal.
3. Keberagaman budaya dan sosial: kehadiran pekerja migran Muslim membawa keberagaman budaya dan sosial ke negara-negara Eropa. Mereka membawa budaya, tradisi, dan praktik agama mereka yang berbeda, yang berkontribusi pada keragaman budaya dan sosial di masyarakat. Hal ini dapat menjadi peluang bagi interaksi lintas budaya yang positif, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antara berbagai kelompok masyarakat.
4. Tantangan integrasi: tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara Eropa adalah bagaimana mengintegrasikan pekerja migran Muslim ke dalam masyarakat dengan baik. Perbedaan budaya, bahasa, agama, dan norma sosial

- dapat menciptakan hambatan bagi integrasi yang sukses.
5. Isu-isu sosial dan politik: kehadiran pekerja migran Muslim juga dapat menyebabkan munculnya isu-isu sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, ketegangan sosial dapat muncul antara masyarakat lokal dan pekerja migran, terutama ketika terdapat persepsi tentang ancaman terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan sosial. Isu-isu keamanan dan radikalisasi juga menjadi perhatian di beberapa negara Eropa.
 6. Perdebatan kebijakan: kehadiran pekerja migran Muslim telah menciptakan perdebatan yang berkelanjutan tentang kebijakan migrasi di negara-negara Eropa. Beberapa negara telah menghadapi tekanan politik untuk mengubah atau membatasi kebijakan migrasi, sementara yang lain berusaha mencari pendekatan inklusif dan berdampingan untuk mengintegrasikan pekerja migran secara lebih efektif.

Dengan demikian, kehadiran pekerja migran Muslim dengan motif ekonomi memiliki dampak yang signifikan dan kompleks bagi negara-negara di Eropa. Dalam menghadapi dampak ini, penting bagi negara-negara Eropa untuk memiliki kebijakan migrasi yang inklusif, dan berorientasi pada integrasi, sehingga dapat memanfaatkan manfaat ekonomi dan sosial yang dibawa oleh pekerja migran, sambil mengatasi tantangan yang ada.

D. Pertumbuhan Komunitas Muslim Era Kontemporer

Pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa era kontemporer memiliki sejarah yang kompleks dan beragam. Perkembangannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk migrasi, konflik di wilayah mayoritas Muslim, kebutuhan tenaga kerja, dan perubahan demografis. Selain terjadinya migrasi ekonomi dan perjanjian tenaga kerja bilateral—serta adanya kebutuhan akan tenaga kerja di

sektor-sektor tertentu yang telah memfasilitasi kedatangan pekerja migran Muslim ke Eropa—keberadaan para pengungsi perang, tingkat kelahiran dan populasi muda yang tinggi, reunifikasi keluarga dan perkawinan antarbudaya, serta konversi agama, ikut menjadi faktor penting dalam pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa (Delanty, 2019).

Keberadaan para pengungsi perang di Eropa yang disebabkan karena terjadinya konflik dan perang di berbagai wilayah mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, telah menyebabkan meningkatnya gelombang pengungsi yang mencari perlindungan di negara-negara Eropa. Beberapa konflik dan perang di wilayah mayoritas Muslim yang telah menyebabkan gelombang pengungsi ke Eropa adalah sebagai berikut (Hashas, 2019).

1. Konflik di Suriah: perang sipil di Suriah telah menyebabkan terjadinya salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Jutaan warga sipil, termasuk banyak Muslim, telah mengungsi dari negara ini dan mencari perlindungan di negara-negara Eropa.
2. Konflik di Irak: perang dan ketegangan antaretnis di Irak telah menyebabkan gelombang pengungsi, termasuk Muslim, yang kemudian mencari perlindungan di Eropa.
3. Konflik di Afghanistan: konflik berkepanjangan di Afghanistan telah menyebabkan banyak pengungsi Muslim dari negara ini mencari perlindungan di Eropa.
4. Konflik di Libya: perang saudara di Libya telah menyebabkan pengungsi dari berbagai negara Afrika Utara yang mencari perlindungan di Eropa melalui rute laut Mediterania.



Pengungsi Suriah yang menempuh rute laut untuk mencapai Eropa.

Sumber: *'Our Adventure Has Started,' Syrian Refugees Embark for Europe.*

<https://www.voanews.com/a/syrian-refugees-embark-for-europe-on-dangerous-journey/2956547.html>

Pengungsi konflik dari negara mayoritas Muslim ini menghadapi perjalanan yang berbahaya dan penuh tantangan untuk mencapai Eropa. Mereka sering kali melakukan perjalanan melalui rute laut yang berbahaya atau jalur migrasi darat yang sulit. Banyak dari mereka menghadapi risiko kehilangan nyawa, pemerasan, eksploitasi, atau penahanan selama perjalanan mereka. Setibanya di negara-negara Eropa, para pengungsi Muslim ini mengajukan permohonan suaka untuk mendapatkan perlindungan resmi. Proses pengajuan suaka ini membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, di mana terdapat pula fakta bahwa beberapa negara Eropa juga menghadapi tantangan dalam menangani jumlah pengungsi yang besar (King & Okólski, 2019).

Selain kedatangan para pengungsi perang, pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa era kontemporer juga dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas penduduk di beberapa negara Eropa. Selain itu, populasi

Muslim di Eropa juga cenderung lebih muda, yang menyebabkan pertumbuhan alami dan peningkatan jumlah Muslim di negara-negara Eropa. Hal lainnya yang ikut memengaruhi pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa adalah terjadinya reunifikasi keluarga dan perkawinan antarbudaya. Melalui reunifikasi keluarga, banyak pekerja migran Muslim yang telah datang ke Eropa untuk bekerja kemudian membawa keluarga mereka untuk bersatu kembali. Proses reunifikasi keluarga ini berarti pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya diizinkan untuk bergabung dengan pekerja migran di negara tujuan mereka. Reunifikasi keluarga memungkinkan pekerja migran untuk hidup bersama dengan keluarga mereka dan menciptakan komunitas Muslim yang lebih besar di Eropa (Kinnvall, 2016).

Selain reunifikasi keluarga, perkawinan antarbudaya juga telah berkontribusi pada pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa. Perkawinan antarbudaya terjadi ketika seseorang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda menikah dengan seorang Muslim. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan lebih lanjut dalam jumlah Muslim di negara-negara Eropa karena keluarga-keluarga ini sering membesarkan anak-anak mereka dalam agama Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim di Eropa. Faktor lainnya yang ikut berpengaruh pada pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa era kontemporer adalah terjadinya konversi agama. Konversi agama ini mengacu pada orang-orang yang awalnya beragama nonmuslim dan kemudian memutuskan untuk menjadi Muslim. Meskipun jumlah konversi bervariasi dari negara ke negara, peristiwa ini telah ikut menyumbang pada pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa (van Mol C., 2016).

Sebagai hasil dari faktor-faktor di atas, komunitas Muslim di Eropa telah tumbuh pesat selama beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah Muslim telah menciptakan dampak sosial,

politik, dan budaya yang signifikan di negara-negara Eropa. Komunitas Muslim telah menjadi bagian yang semakin terintegrasi dari masyarakat Eropa, tetapi juga menghadapi tantangan terkait integrasi, diskriminasi, dan isu-isu keamanan. Pertumbuhan komunitas Muslim di Eropa era kontemporer ini akan terus mengalami perubahan, sekaligus memberikan dampak pada dinamika sosial dan politik di benua ini.

BAB 2

IDENTITAS MUSLIM DI EROPA



Muslim di Eropa merupakan salah satu kelompok minoritas agama yang signifikan. Identitas Muslim di Eropa sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah migrasi, budaya, dan kebijakan pemerintah di negara-negara Eropa. Penting pula untuk dipahami bahwa identitas Muslim di Eropa dapat sangat berbeda antara negara-negara, bahkan di wilayah yang berdekatan. Beberapa negara Eropa memiliki populasi Muslim yang lebih besar dan lebih beragam daripada yang lain, dan setiap kelompok Muslim dapat mengalami pengalaman yang unik tergantung pada konteks lokalnya. Identitas Muslim di Eropa biasanya dapat dilihat melalui tiga hal yang melekat, yaitu agama Islam sebagai inti identitas Muslim di Eropa, kebudayaan Muslim di Eropa, juga kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim di Eropa.

A. Agama Islam sebagai Inti Identitas Muslim di Eropa

Agama Islam menjadi inti atau elemen sentral dalam identitas Muslim di Eropa. Ini berarti agama Islam memiliki peran dominan dalam membentuk pandangan, nilai-nilai, perilaku, dan identitas pribadi mereka sebagai seorang Muslim di lingkungan Eropa. Beberapa faktor yang menunjukkan bahwa agama Islam merupakan inti identitas Muslim di Eropa biasanya terwujud melalui keyakinan agama, praktik keagamaan, identitas komunitas, budaya dan tradisi, serta kesadaran solidaritas umat Islam.

Dalam konteks Islam sebagai sebuah keyakinan agama, hal ini berarti identitas Muslim di Eropa didasarkan pada keyakinan dalam agama Islam, yang mendasari praktik dan ritus keagamaan mereka. Bagi Muslim di Eropa, agama Islam bukan hanya sekadar praktik keagamaan, tetapi juga merupakan keyakinan fundamental yang membentuk pandangan dunia dan hidup mereka. Keyakinan ini mencakup keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Allah), kenabian Nabi Muhammad, kitab suci Al-Qur'an, dan berbagai ajaran agama Islam lainnya. Sementara terkait praktik keagamaan,

Muslim di Eropa umumnya menjalankan praktik keagamaan seperti salat, puasa, membayar zakat, dan menghadiri kegiatan keagamaan di masjid. Praktik ini membantu mempertahankan dan memperkuat identitas keagamaan mereka (Amghar, 2016).

Agama Islam menjadi dasar dalam membentuk ikatan komunitas di antara Muslim di Eropa. Mereka sering membentuk kelompok sosial, organisasi, dan pusat kegiatan keagamaan untuk mendukung satu sama lain, memelihara jaringan sosial, dan mempertahankan identitas agama mereka. Agama Islam juga memengaruhi aspek budaya dan tradisi Muslim di Eropa. Ini mencakup hal-hal seperti pakaian tradisional, seni, musik, bahasa, dan praktik lain yang mencerminkan identitas keagamaan dan budaya mereka. Identitas Muslim di Eropa sering kali juga dihubungkan dengan kesadaran sebagai bagian dari umat Islam yang lebih luas, yaitu kesadaran solidaritas umat Islam yang menghubungkan mereka dengan Muslim di seluruh dunia sekaligus berbagi tujuan dan nilai-nilai agama yang sama.

Berikut gambaran negara-negara di Eropa yang memiliki jumlah Muslim cukup signifikan.

Negara-Negara di Eropa dengan Jumlah Masyarakat Muslim Signifikan

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Masyarakat Muslim
1.	Turki	Turki adalah negara di Eropa bagian timur yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, dengan mayoritas dari mereka beragama Islam Sunni. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah dan merupakan pusat penting dalam sejarah Islam.

2.	Prancis	Prancis memiliki jumlah populasi Muslim yang besar, diperkirakan mencapai beberapa juta orang, sekitar 5-8% dari total populasi negara tersebut. Mayoritas Muslim di Prancis adalah Muslim Sunni, dengan juga ada sebagian minoritas Muslim Syiah. Sebagian besar Muslim di Prancis adalah keturunan imigran dari negara-negara dengan mayoritas Muslim di wilayah Maghreb (Aljazair, Maroko, dan Tunisia) dan negara-negara Sub-Sahara.
3.	Jerman	Jerman juga memiliki jumlah populasi Muslim yang signifikan, terutama karena imigrasi dari negara-negara Muslim seperti Turki, Maroko, dan Suriah. Mayoritas Muslim di Jerman adalah Muslim Sunni. Jumlah Muslim di Jerman diperkirakan sekitar 5-6% dari total populasi.
4.	Inggris	Inggris memiliki populasi Muslim yang besar, yaitu sekitar 5-6% dari total populasi negara tersebut. Mayoritas Muslim di Inggris adalah Muslim Sunni, dengan beberapa minoritas Muslim Syiah, di mana sejumlah besar dari mereka adalah imigran atau keturunan imigran dari negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah.

5.	Rusia	Meskipun mayoritas penduduk Rusia adalah Kristen Ortodoks, Rusia memiliki jumlah populasi Muslim yang signifikan, yaitu diperkirakan antara 10-15% dari total populasi negara tersebut. Populasi Muslim di Rusia terdapat di wilayah Kaukasus Utara dan sebagian wilayah selatan Rusia, di mana wilayah Kaukasus Utara memiliki mayoritas Muslim seperti Chechnya, Dagestan, dan Ingushetia.
6.	Belanda	Belanda juga memiliki jumlah populasi Muslim yang besar, terutama karena imigrasi dari negara-negara Muslim seperti Maroko, Turki dan Suriah. Jumlah populasi Muslim di Belanda diperkirakan sekitar 5-7% dari total populasi.
7.	Spanyol	Spanyol memiliki sejumlah populasi Muslim, terutama di wilayah selatan (Andalusia) yang memiliki sejarah Islam yang kaya. Diperkirakan terdapat sekitar 3-4% dari total populasi Spanyol adalah Muslim, dengan mayoritas dari mereka adalah imigran dari negara-negara Maghreb dan Afrika Sub-Sahara.
8.	Swedia	Swedia juga memiliki populasi Muslim yang relatif besar, yaitu sekitar 5% dari total populasi. Mayoritas Muslim di Swedia adalah Muslim Sunni dengan sebagian besar dari mereka adalah imigran dari negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia.

9.	Bosnia dan Herzegovina	Meskipun bukan negara mayoritas Muslim, Bosnia dan Herzegovina memiliki sejumlah populasi Muslim yang signifikan, khususnya di wilayah Bosnia dengan mayoritas Muslim sekitar 50% dari total populasi.
----	------------------------	--

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah dan persentase populasi Muslim di setiap negara dapat berbeda secara signifikan, di mana hal ini dipengaruhi oleh sejarah migrasi, kebijakan imigrasi, dan faktor-faktor sosial lainnya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan bervariasinya jumlah populasi Muslim di negara-negara Eropa antara lain sebagai berikut (Hashas, 2019).

1. Sejarah migrasi.

Sejarah migrasi dari negara-negara Muslim dan wilayah lain ke Eropa memengaruhi jumlah populasi Muslim di masing-masing negara. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan Inggris memiliki sejarah panjang migrasi dari negara-negara dengan mayoritas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah.

2. Kebijakan imigrasi.

Kebijakan imigrasi yang berbeda di setiap negara Eropa memengaruhi jumlah dan komposisi populasi Muslim. Negara-negara yang menerapkan kebijakan imigrasi yang terbuka atau mengizinkan reunifikasi keluarga cenderung memiliki jumlah populasi Muslim yang lebih besar.

3. Kelahiran dan kematian.

Tingkat kelahiran dan kematian di antara populasi Muslim juga memainkan peran dalam menentukan pertumbuhan populasi. Tingkat kelahiran yang tinggi di kalangan keluarga Muslim dapat menyebabkan peningkatan populasi dalam jangka panjang.

4. Faktor sosial-ekonomi.

Faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan kesempatan kerja, juga memengaruhi tingkat kelahiran dan migrasi. Komunitas Muslim dengan tingkat sosial-ekonomi yang lebih baik, lebih cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah dan lebih mudah berintegrasi dalam masyarakat.

5. Perubahan agama.

Beberapa individu beralih agama atau mengalami konversi ke Islam, di mana hal ini ikut memengaruhi jumlah populasi Muslim di negara-negara Eropa.

6. Perang dan pengungsi.

Peristiwa seperti krisis pengungsi atau konflik di negara-negara Muslim telah menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi Muslim yang mencari perlindungan di negara-negara Eropa tertentu.

7. Kebijakan demografi.

Kebijakan demografi, termasuk dukungan atau insentif dari pemerintah ikut memengaruhi jumlah kelahiran, yang pada akhirnya juga ikut memengaruhi pertumbuhan populasi Muslim di negara-negara Eropa.

Semua faktor di atas saling berkontribusi dalam menciptakan variasi terkait jumlah populasi Muslim di negara-negara Eropa. Kombinasi dari faktor-faktor ini kemudian menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam persentase populasi Muslim di antara negara-negara Eropa.

B. Kebudayaan Muslim di Eropa

Kebudayaan Muslim di Eropa mencerminkan identitas dan keanekaragaman komunitas Muslim yang tinggal di benua ini. Identitas Muslim di Eropa sangat beragam dan dipengaruhi oleh

berbagai faktor, termasuk sejarah migrasi, negara asal, tingkat integrasi, dan interaksi dengan masyarakat mayoritas. Eropa menjadi rumah bagi jutaan Muslim yang berasal dari berbagai negara dan latar belakang etnis. Sebagai hasilnya, keberagaman budaya dan praktik keagamaan tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa contoh keanekaragaman budaya Muslim di Eropa misalnya meliputi etnis dan bahasa, aliran keagamaan, adat istiadat dan tradisi, seni dan kreativitas.

Etnis Muslim di Eropa berasal dari berbagai etnis, seperti Arab, Turki, Pakistan, Bangladesh, Somalia, Albania, dan berbagai negara Afrika Utara lainnya. Setiap kelompok etnis ini membawa tradisi budaya, bahasa, dan adat istiadat mereka sendiri ke Eropa. Komunitas Muslim dari Turki misalnya merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Eropa. Mereka membawa budaya Turki dan berbicara dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri merupakan salah satu bahasa yang umum dijumpai di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Belgia karena migrasi dan kehadiran komunitas Turki yang besar di negara-negara tersebut (Hastings, 2018).

Etnis Arab juga hadir di banyak negara Eropa, terutama terkait keberadaan pengungsi dari negara-negara Arab seperti Suriah, Irak, Lebanon, dan Maroko. Bahasa Arab juga digunakan oleh komunitas Arab di Eropa, dan banyak pula masjid serta pusat keagamaan menggunakan Bahasa Arab dalam kegiatan keagamaan mereka. Komunitas Muslim dari Pakistan dan Bangladesh juga signifikan di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Italia. Bahasa Urdu dan Bahasa Bengali merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis ini di Eropa. Demikian halnya dengan Albania dan Kosovo yang merupakan dua negara Balkan dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Komunitas Muslim dari Albania dan Kosovo ini banyak yang bermigrasi ke

negara-negara Eropa lainnya. Bahasa Albania dan bahasa Serbia (digunakan di Kosovo) kemudian merupakan bahasa yang mereka bawa ke Eropa (Grebbe, 2022).

Komunitas Muslim dari negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia juga hadir di Eropa, di mana mereka juga membawa bahasa Arab dan budaya berpengaruh Berber. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh komunitas Muslim dari negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh yang juga berjumlah besar di beberapa negara Eropa. Bahasa Urdu, Bahasa Bengali, dan Bahasa Hindi merupakan bahasa yang umum digunakan di antara kelompok etnis ini. Selain itu, terdapat juga komunitas Muslim dari berbagai negara lain seperti Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Iran, dan banyak lagi yang membawa etnis dan bahasa mereka sendiri ke Eropa (Ramadan, 1999). Keberagaman etnis dan bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya dan identitas Muslim di Eropa, sekaligus merupakan contoh integrasi dan keragaman yang menjadi ciri khas benua ini.

Terdapat pula beragam aliran keagamaan dalam Islam yang dipraktikkan oleh komunitas Muslim di Eropa. Misalnya, terdapat aliran Sunni, Syiah, Sufi, dan berbagai kelompok lain yang memiliki perbedaan dalam praktik keagamaan, ritual, dan interpretasi agama. Berikut contoh keberadaan masing-masing aliran keagamaan di beberapa negara Eropa (Grebbe, 2022).

1. Penganut Sunni di Eropa

Di negara-negara seperti Turki, Albania, dan Kosovo, mayoritas Muslim adalah Sunni. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, juga terdapat komunitas Sunni yang besar dan beragam karena migrasi dari berbagai negara Muslim. Penganut Sunni juga terdapat di negara-negara lain seperti Spanyol, Italia, Belgia, dan berbagai negara Eropa lainnya.

2. Penganut Syiah di Eropa

Di beberapa negara Eropa, terdapat komunitas Syiah yang signifikan. Misalnya, di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, terdapat sejumlah besar Muslim Syiah dari berbagai latar belakang etnis. Komunitas Syiah juga hadir di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark.

3. Penganut Sufi di Eropa:

Sufi adalah gerakan mistik Islam yang hadir di berbagai negara Eropa. Di Spanyol, misalnya, terdapat komunitas Sufi yang aktif dengan sejarah yang panjang karena peran Sufi dalam sejarah Muslim di Semenanjung Iberia. Di Turki, juga terdapat tradisi Sufi yang kaya, seperti tarekat Mevlevi (tarekat kaum Dervish). Selain itu, beberapa tarekat Sufi dan kelompok Sufi juga ada di negara-negara Eropa lainnya, yang mempromosikan nilai-nilai mistis dan spiritual dalam Islam.

Perlu diingat bahwa identitas agama dan keberagaman Muslim di Eropa sangat beragam dari negara ke negara, di mana hal ini tergantung pada sejarah migrasi dan integrasi setiap komunitas. Tidak hanya Sunni, Syiah, dan Sufi, tetapi juga aliran-aliran lain dalam Islam dapat ditemukan di Eropa, mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman agama dalam kebudayaan Muslim di benua tersebut.

Demikian halnya adat istiadat dan tradisi budaya dari negara asal juga terus dipertahankan oleh banyak keluarga Muslim di Eropa. Perayaan budaya seperti pernikahan, kelahiran, dan perayaan keagamaan dijalankan dengan cara yang mencerminkan identitas budaya mereka. Sebagai contoh, tradisi pernikahan dari negara asal yang sering kali masih dipertahankan oleh komunitas Muslim di Eropa terlihat dalam pernikahan keluarga Turki, yaitu

terdapat tradisi *henna night* (malam henna) di mana calon pengantin perempuan dan keluarganya berkumpul untuk menerapkan henna pada tangan dan kaki pengantin sebagai tanda keberuntungan dan pernikahan yang bahagia. Saat tamu berkunjung ke rumah, tuan rumah Turki juga sering menawarkan “*çerez tepsisi*” yaitu hidangan berbagai kacang, biji-bijian, dan makanan ringan lainnya, serta teh atau kopi untuk merayakan pertemuan dan silaturahmi. Tradisi Arab juga dapat dilihat di beberapa negara Eropa, terutama di wilayah dengan komunitas Arab yang signifikan, misalnya tradisi ziarat atau ziarah ke makam orang-orang suci atau tokoh agama yang sering dijalankan oleh komunitas Muslim Arab (Nielsen, 2004).

Tradisi Pakistan dan Bangladesh dapat terlihat dalam tradisi mehndi, di mana henna diterapkan pada tangan dan kaki calon pengantin perempuan, sebagai bagian dari perayaan pernikahan di komunitas Muslim dari Pakistan dan Bangladesh di Eropa. Sementara tradisi Maghreb (Maroko, Aljazair, Tunisia) dapat dilihat pada tradisi fantasia dan *Gnaoua Music Festival*.



Gnaoua Music Festival di Berlin

Sumber: *Voices of the Moroccan Diaspora, Promoting Traditional Moroccan Music during the Gnaoua Festival in Berlin.* <https://www.berlinglobal.org/index.php?voices-of-the-moroccan-diaspora>

Tradisi fantasia adalah acara seni militer kuda yang melibatkan kelompok penunggang kuda yang mengenakan kostum tradisional. Tradisi ini dijaga dan dipertahankan oleh komunitas Muslim dari wilayah Maghreb di Eropa sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Demikian halnya dengan musik Gnaoua yang merupakan tradisi musik spiritual dari wilayah Maghreb, terutama Maroko. *Gnaoua Music Festival* diadakan di beberapa kota Eropa dan menjadi ajang untuk mempertahankan tradisi musik dan seni dari wilayah tersebut (Tibi, 2002).

Komunitas Muslim di Eropa juga mempertahankan tradisi kuliner khas dari negara asal. Misalnya, hidangan khas seperti couscous dari Maroko, baklava dari Turki, dan biryani dari Pakistan sering dimasak dan disajikan saat perayaan budaya. Di negara-negara Eropa tertentu, pengaruh lingkungan lokal juga memengaruhi kebudayaan Muslim. Kebudayaan Muslim di daerah Balkan adalah contoh yang menarik tentang bagaimana interaksi antara komunitas Muslim dengan budaya lokal mereka telah membentuk identitas budaya yang khas. Negara-negara Balkan, seperti Bosnia dan Herzegovina, Albania, dan Kosovo, memiliki sejarah panjang dengan komunitas Muslim. Di daerah ini, Muslim dipengaruhi oleh budaya Slavia yang dominan, serta oleh tradisi agama Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik yang kuat. Pengaruh budaya Slavia dapat dilihat dalam beberapa aspek kebudayaan Muslim di Balkan, seperti bahasa, adat istiadat, dan seni. Bahasa Bosnia dan Albania yang digunakan oleh banyak Muslim di wilayah ini misalnya, memiliki pengaruh yang kuat dari bahasa Slavia. Selain itu, adat istiadat dan perayaan keagamaan sering menggabungkan elemen budaya Muslim dan Slavia, di mana hal ini mencerminkan integrasi budaya yang kompleks (Tolan, 2012).

Komunitas Muslim di Eropa juga berkontribusi pada seni dan kreativitas mereka sendiri. Seniman Muslim mencerminkan

identitas budaya mereka melalui seni visual, sastra, musik, dan tari. Beberapa contoh komunitas Muslim di Eropa yang telah memberikan kontribusi yang berharga pada berbagai ekspresi seni, di antaranya sebagai berikut (Greble, 2022).

1. Seni Visual

Nja Mahdaoui: seniman Tunisia yang tinggal di Paris, Prancis, dikenal karena karyanya dalam seni kaligrafi Arab yang kontemporer dan abstrak. Karyanya telah dipamerkan di seluruh Eropa dan dunia.

Lalla Essaydi: seniman Maroko yang berbasis di AS, tetapi banyak memamerkan karyanya di Eropa serta terkenal karena lukisan-lukisannya yang menggunakan seni kaligrafi Arab dan fotografi untuk mengeksplorasi identitas perempuan Muslim dalam budaya Barat.

2. Sastra

Elif Shafak: penulis Turki yang menulis sastra dalam bahasa Turki dan Inggris. Karyanya mencakup novel-novel yang menggambarkan kehidupan dan identitas Muslim di Eropa, seperti *The Bastard of Istanbul* dan *10 Minutes 38 Seconds in This Strange World*.

Kamila Shamsie: penulis Pakistan yang berbasis di Inggris dan telah menulis beberapa novel yang berhasil meraih penghargaan, termasuk *Home Fire* yang mengangkat tema tentang identitas Muslim di Eropa.

3. Musik

Natacha Atlas: penyanyi dan komposer berdarah Belgia-Moroko yang memadukan musik Arab, klasik, dan elektronik dalam karyanya. Musiknya mencerminkan perpaduan budaya dan identitasnya sebagai Muslim di Eropa.

Sami Yusuf: penyanyi, komposer, dan multi-instrumentalis berkebangsaan Inggris-Iran yang dikenal karena musiknya

yang mencampurkan elemen tradisional Timur Tengah dan musik kontemporer.

4. Tarian

Akram Khan: koreografer dan penari Inggris-Bangladesh yang telah menciptakan banyak karya tari yang mencerminkan pengalaman identitas ganda sebagai Muslim di Eropa.

Sidi Larbi Cherkaoui: Koreografer Belgia-Maroko yang telah menciptakan tarian kontemporer dengan menggabungkan gerakan-gerakan dari budaya Barat dan Timur.

Contoh-contoh di atas hanya beberapa dari banyaknya seniman, penulis, musisi, dan penari Muslim di Eropa yang telah memberikan kontribusi yang berharga pada berbagai ekspresi seni. Mereka membuka pintu untuk pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan identitas Muslim di wilayah Eropa, sekaligus berkontribusi pada kemajuan seni dan budaya secara keseluruhan.

C. Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim di Eropa

Kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim di Eropa sangat beragam karena berasal dari berbagai negara dengan budaya dan latar belakang yang berbeda. Muslim di Eropa ini dapat menjadi warga negara negara-negara Eropa, keturunan imigran, atau bahkan imigran yang tinggal secara sementara atau ilegal. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas yang umum dari komunitas Muslim di Eropa.

Turki

Sebagai negara dengan sejarah panjang imigrasi pekerja dan keluarga, banyak warga Turki yang telah menjadi warga negara di negara-negara seperti Jerman dan Belanda. Mereka membentuk

komunitas Muslim terbesar di Eropa. Terdapat beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Turki di negara-negara Eropa sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Turki
1.	Jerman	Turki adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Jerman. Sejak tahun 1960-an, banyak pekerja Turki yang bermigrasi ke Jerman untuk membantu memenuhi kekurangan tenaga kerja di industri. Banyak dari mereka dan keturunan mereka telah menjadi warga negara Jerman atau memiliki status tinggal tetap di sana.
2.	Prancis	Muslim Turki juga terdapat di Prancis, terutama di wilayah Alsace dan Lorraine. Beberapa di antaranya adalah imigran generasi pertama, sementara yang lain adalah keturunan dari imigran Turki.
3.	Belanda	Di Belanda, terdapat banyak pekerja Turki yang bermigrasi pada tahun 1960-an dan 1970-an dan kemudian membentuk komunitas yang cukup besar di negara tersebut.
4.	Austria	Turki adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang signifikan di Austria, terutama di kota-kota besar seperti Wina.

5.	Belgia	Komunitas Muslim Turki juga terdapat di Belgia, dengan mayoritas tinggal di kota-kota seperti Brussel, Antwerp, dan Charleroi.
6.	Swedia	Meskipun jumlahnya lebih kecil daripada beberapa negara lain, komunitas Muslim Turki juga terdapat di Swedia.
7.	Swiss	Turki adalah salah satu kelompok imigran terbesar di Swiss, khususnya di wilayah Zurich dan Basel.
8.	Denmark	Denmark juga memiliki komunitas Muslim Turki yang cukup besar, dengan mayoritas tinggal di kota-kota besar seperti Kopenhagen dan Aarhus.

Penting untuk dicatat bahwa komunitas Muslim Turki di Eropa sangat beragam dalam hal latar belakang budaya, kewarganegaraan, dan tingkat integrasi dengan masyarakat setempat. Beberapa dari mereka adalah imigran generasi pertama, sementara yang lain adalah keturunan dari imigran yang telah menetap di Eropa selama beberapa generasi. Muslim Turki ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada keberagaman budaya dan sosial di Eropa, serta memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan ekonomi di negara-negara di mana mereka tinggal.

Maroko

Banyak warga Maroko yang tinggal di negara-negara seperti Prancis dan Spanyol. Dikarenakan ikatan sejarah antara Maroko dan Spanyol, banyak pula orang Maroko yang memiliki

kewarganegaraan ganda atau status penduduk tetap di Spanyol. Selain di Spanyol, komunitas Muslim Maroko juga merupakan salah satu kelompok etnis dan agama yang signifikan di wilayah-wilayah lain di Eropa. Migrasi dari Maroko ke Eropa sendiri telah berlangsung selama beberapa dekade, di mana komunitas Muslim Maroko tersebut telah membentuk kehadiran yang kuat di berbagai negara Eropa. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Maroko di Eropa:

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Maroko
1.	Spanyol	Spanyol adalah salah satu negara di Eropa dengan sejarah panjang migrasi dari Maroko. Banyak imigran Maroko datang ke Spanyol untuk mencari pekerjaan dan menciptakan komunitas yang cukup besar di wilayah seperti Andalusia dan Catalonia.
2.	Prancis	Komunitas Muslim Maroko juga signifikan di Prancis, terutama di wilayah Paris dan kota-kota besar lainnya. Banyak dari mereka adalah imigran generasi pertama atau keturunan dari imigran Maroko.
3.	Italia	Italia juga memiliki komunitas Muslim Maroko yang cukup besar, terutama di kota-kota seperti Milan dan Roma.
4.	Belanda	Di Belanda, terdapat jumlah yang signifikan dari warga negara Maroko dan imigran keturunan Maroko yang kemudian membentuk komunitas di kota-kota seperti Amsterdam dan Rotterdam.

5.	Jerman	Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, terdapat juga komunitas Muslim Maroko di Jerman.
6.	Belgia	Komunitas Maroko juga terdapat di Belgia, dengan jumlah kehadiran yang cukup signifikan di kota-kota seperti Brussels dan Antwerp.
7.	Swedia	Meskipun jumlahnya kecil, terdapat juga imigran Maroko dan keturunannya yang tinggal di Swedia.
8.	Norwegia dan Denmark	Negara-negara Nordik juga memiliki beberapa warga negara Maroko dan komunitas Muslim Maroko di sana.

Kewarganegaraan dan nasionalitas komunitas Muslim Maroko di Eropa sangat beragam. Beberapa dari mereka adalah warga negara negara-negara Eropa tempat mereka tinggal, sedangkan yang lain sering kali memiliki status tinggal sementara atau bahkan ilegal. Komunitas Maroko di Eropa telah berkontribusi pada keberagaman budaya dan sosial di wilayah tersebut dan menjadi bagian integral dari masyarakat di negara-negara di mana mereka menetap.

Pakistan

Warga Pakistan adalah kelompok etnis dan agama yang signifikan di Inggris. Muslim Pakistan ini sering kali memiliki kewarganegaraan Inggris dan merupakan bagian penting dari komunitas Muslim di sana. Komunitas Muslim Pakistan di Eropa juga merupakan kelompok etnis dan agama yang signifikan di wilayah-wilayah lainnya. Migrasi dari Pakistan ke Eropa sendiri

telah berlangsung selama beberapa dekade, dan komunitas Pakistan telah membentuk kehadiran yang kuat di berbagai negara Eropa. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Pakistan di Eropa:

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Pakistan
1.	Inggris	Inggris memiliki salah satu populasi imigran Pakistan terbesar di Eropa. Komunitas Muslim Pakistan di Inggris telah tumbuh pesat selama beberapa dekade, terutama di kota-kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester.
2.	Spanyol	Komunitas Muslim Pakistan juga terdapat di Spanyol, terutama di kota-kota seperti Barcelona dan Madrid. Banyak dari mereka adalah pekerja imigran atau anggota keluarga dari pekerja yang telah bermigrasi ke Spanyol.
3.	Italia	Italia juga memiliki komunitas Muslim Pakistan yang cukup besar, terutama di kota-kota seperti Milan dan Roma.
4.	Belgia	Komunitas Muslim Pakistan juga terdapat di Belgia, dengan kehadiran yang cukup kuat di kota-kota seperti Brussels dan Antwerp.
5.	Jerman	Di Jerman, juga terdapat komunitas imigran Pakistan dan keturunannya, terutama di kota-kota besar seperti Berlin dan Frankfurt.

6.	Norwegia	Di Norwegia juga terdapat beberapa warga negara Pakistan dan imigran keturunan Pakistan yang tinggal di negara tersebut.
7.	Prancis	Meskipun jumlahnya lebih kecil, terdapat juga komunitas Muslim Pakistan di Prancis, terutama di wilayah Paris dan kota-kota besar lainnya.

Bosnia dan Herzegovina

Setelah perang di Yugoslavia, banyak pengungsi dari Bosnia dan Herzegovina menetap di negara-negara Eropa Barat, seperti Austria dan Jerman. Komunitas Muslim Bosnia Herzegovina juga merupakan kelompok etnis dan agama yang signifikan di wilayah Eropa lainnya. Sebagai bagian dari Bosnia dan Herzegovina, mayoritas Muslim di negara ini dikenal sebagai Bosniak. Selain itu, terdapat juga diaspora Bosniak yang tinggal di berbagai negara Eropa sebagai imigran atau pengungsi konflik dari wilayah Balkan. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Bosnia Herzegovina di Eropa.

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Bosnia Herzegovina
1.	Jerman	Jerman memiliki salah satu populasi imigran Bosniak terbesar di Eropa. Banyak dari mereka bermigrasi ke Jerman sebagai pengungsi selama perang di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1990-an. Komunitas Bosniak di Jerman terutama berada di kota-kota seperti Berlin dan Frankfurt.
2.	Austria	Austria juga memiliki komunitas Muslim Bosnia Herzegovina yang cukup besar, terutama di ibu kota Wina dan kota-kota besar lainnya.

3.	Swedia	Swedia juga memiliki diaspora Bosniak yang tinggal di negara ini. Banyak dari mereka bermigrasi selama perang di Bosnia dan Herzegovina yang kemudian menetap di Swedia sebagai pengungsi.
4.	Norwegia dan Denmark	Negara-negara Nordik juga memiliki komunitas Bosniak yang menetap di sana sebagai imigran atau pengungsi.
5.	Belgia	Di Belgia, terdapat juga warga negara Bosnia Herzegovina dan imigran keturunan Bosniak yang menetap di sana secara turun-temurun.
6.	Belanda	Komunitas Bosniak juga terdapat di Belanda, terutama di kota-kota seperti Amsterdam dan Rotterdam.

Bangladesh

Komunitas imigran Bangladesh telah berkembang pesat di Italia, Spanyol, dan negara-negara Eropa lainnya, terutama berkontribusi di sektor pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian dan industri. Migrasi dari Bangladesh ke Eropa telah berlangsung selama beberapa dekade, dan komunitas Bangladesh ini kemudian berhasil membentuk kehadiran yang kuat di berbagai negara Eropa. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Bangladesh di Eropa.

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Bangladesh
1.	Inggris	Inggris memiliki jumlah populasi imigran Bangladesh terbesar di Eropa. Komunitas Muslim Bangladesh di Inggris terutama berada di kota-kota seperti London, Birmingham, dan Manchester.

2.	Italia	Italia juga memiliki komunitas Muslim Bangladesh yang cukup besar, terutama di kota-kota seperti Milan dan Roma.
3.	Spanyol	Komunitas Bangladesh juga terdapat di Spanyol, dengan kehadiran yang cukup kuat di kota-kota seperti Barcelona dan Madrid.
4.	Belgia	Di Belgia, terdapat juga warga negara Bangladesh dan imigran keturunan Bangladesh yang tinggal di sana.
5.	Swedia	Komunitas Muslim Bangladesh juga hadir di Swedia, terutama di kota-kota seperti Stockholm dan Gothenburg.
6.	Denmark dan Norwegia	Denmark dan Norwegia juga memiliki beberapa komunitas Bangladesh dan imigran keturunan Bangladesh yang tinggal di negara tersebut.
7.	Prancis	Meskipun jumlahnya kecil, terdapat juga komunitas Muslim Bangladesh di Prancis, terutama di wilayah Paris dan kota-kota besar lainnya.

Albania

Albania memiliki mayoritas penduduk Muslim dan komunitas Albania yang tinggal di berbagai negara Eropa, termasuk Italia, Yunani, dan Swedia. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Albania di Eropa.

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Albania
1.	Kosovo	Kosovo adalah wilayah yang sebagian besar dihuni oleh etnis Albania, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kosovo secara <i>de facto</i> memisahkan diri dari Serbia dan menyatakan kemerdekaan pada tahun 2008. Banyak warga Muslim Albania dari Kosovo tinggal di berbagai negara Eropa sebagai imigran atau pengungsi.
2.	Makedonia Utara	Makedonia Utara adalah negara tetangga Albania yang memiliki sejumlah komunitas Muslim Albania di wilayahnya.
3.	Yunani	Di wilayah utara Yunani, terdapat komunitas minoritas Muslim Albania yang tinggal di daerah seperti Epirus.
4.	Italia	Italia juga memiliki beberapa imigran Muslim Albania, terutama di wilayah selatan negara ini yang berbatasan dengan Albania.
5.	Swiss	Swiss juga memiliki diaspora Albania yang tinggal di sana, termasuk Muslim Albania.
6.	Jerman	Meskipun jumlahnya relatif kecil, terdapat juga komunitas Muslim Albania di Jerman yang datang sebagai imigran atau pengungsi.
7.	Turki	Turki juga memiliki komunitas Muslim Albania yang tinggal di negara tersebut, terutama di wilayah barat Turki yang berbatasan dengan Albania.
8.	Skandinavia	Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia juga memiliki beberapa komunitas Muslim Albania di wilayah mereka.

Kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Albania di Eropa sangat beragam karena berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Mereka membentuk bagian penting dari keberagaman budaya dan agama di wilayah tersebut dan berkontribusi pada kehidupan sosial dan ekonomi di negara-negara di mana mereka tinggal.

Mesir

Mesir juga memiliki diaspora Muslim yang signifikan di berbagai negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis. Migrasi dari Mesir ke Eropa telah berlangsung selama beberapa dekade, dan komunitas Mesir telah membentuk kehadiran yang kuat di berbagai negara Eropa. Berikut adalah beberapa contoh kewarganegaraan dan nasionalitas Muslim Mesir di Eropa.

No.	Negara di Eropa	Deskripsi Kewarganegaraan dan Nasionalitas Muslim Albania
1.	Italia	Italia memiliki jumlah populasi imigran Mesir terbesar di Eropa. Banyak imigran Mesir tinggal di Italia, terutama di kota-kota besar seperti Milan dan Roma.
2.	Prancis	Prancis juga memiliki komunitas Muslim Mesir yang cukup besar, terutama di wilayah Paris dan kota-kota besar lainnya.
3.	Inggris	Inggris memiliki sejumlah warga negara Mesir dan imigran keturunan Mesir yang tinggal di negara tersebut.
4.	Jerman	Di Jerman, terdapat juga komunitas Muslim Mesir yang hadir sebagai imigran atau pengungsi.

5.	Spanyol	Komunitas Mesir juga terdapat di Spanyol, terutama di kota-kota seperti Barcelona dan Madrid.
6.	Belgia	Di Belgia, terdapat juga warga negara Mesir dan imigran keturunan Mesir yang tinggal di sana.
7.	Swedia	Meskipun jumlahnya lebih kecil, terdapat juga komunitas Muslim Mesir di Swedia.

Kewarganegaraan dan nasionalitas di atas hanya merupakan beberapa contoh. Terdapat banyak negara lain yang juga berkontribusi pada keberagaman komunitas Muslim di Eropa. Setiap komunitas ini memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang unik, yang menciptakan kekayaan dalam identitas dan kontribusi mereka pada masyarakat Eropa secara keseluruhan.

BAB 3



POLITIK DAN KEBIJAKAN TERKAIT MUSLIM DIEROPA



Politik dan kebijakan terkait Muslim di Eropa adalah isu yang kompleks dan bervariasi dari negara ke negara. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ini termasuk sejarah kolonial, migrasi, perkembangan sosial, dan isu-isu keamanan. Sebagai akibatnya, setiap negara Eropa memiliki pendekatan yang berbeda terhadap integrasi, kebebasan beragama, dan masalah sosial yang terkait dengan komunitas Muslim mereka. Kebijakan terkait Muslim di Eropa ini juga sangat bergantung pada situasi politik, budaya, dan sosial di masing-masing negara. Selain itu, perubahan dalam dinamika global dan migrasi juga ikut memengaruhi perkembangan lebih lanjut dalam kebijakan terkait Muslim di Eropa.

A. Kebijakan Migrasi dan Pengungsi Muslim di Negara-Negara Eropa

Kebijakan migrasi dan pengungsi terkait Muslim di negara-negara Eropa telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap masalah ini, tergantung pada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di wilayah mereka. Sebagai kawasan yang heterogen secara budaya, agama, dan politik, dapat dinyatakan bahwa Eropa telah menghadapi berbagai tantangan terkait migrasi dan pengungsi, termasuk migrasi Muslim. Terdapat empat pola kebijakan yang telah diadopsi oleh beberapa negara Eropa terkait migrasi dan pengungsi Muslim, yaitu kebijakan penerimaan dan integrasi, kebijakan ketat dan penahanan, kontrol perbatasan, dan kebijakan anti imigran (De Haas, 2018).

Beberapa negara Eropa, seperti Jerman dan Swedia, adalah contoh negara-negara yang telah mengadopsi kebijakan penerimaan yang lebih terbuka terhadap pengungsi Muslim dan berusaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Hal ini

mencakup kebijakan untuk memberikan akses bagi layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial untuk membantu pengungsi beradaptasi dengan lingkungan baru. Negara-negara seperti Italia dan Yunani, dua negara yang berada di jalur migrasi Mediterania, adalah contoh negara-negara yang telah menghadapi tekanan yang besar dalam menangani migrasi Muslim. Beberapa negara ini telah menerapkan kebijakan ketat, termasuk penahanan dan deportasi sebagai respons terhadap besarnya jumlah pengungsi yang mencapai garis pantai mereka. Terdapat pula banyak negara Eropa yang memilih untuk meningkatkan kontrol perbatasan mereka guna mengurangi jumlah migran yang mencoba masuk secara ilegal. Hal ini telah menyebabkan peningkatan perdebatan terkait HAM dan perlindungan pengungsi. Sementara, beberapa negara di Eropa lainnya telah mengadopsi kebijakan anti-imigran secara umum, yang juga ikut berdampak pada pengungsi Muslim dan kelompok migran lainnya. Kebijakan semacam ini mencakup larangan masuk bagi warga negara dari negara-negara Muslim tertentu atau pengurangan hak bagi para migran yang telah tiba di negara tersebut (Gehler, 2016).

Kebijakan terkait migrasi dan pengungsi Muslim di negara-negara Eropa juga melibatkan keberadaan dalam kerangka kerja sama UE. Dalam konteks ini, UE sebagai entitas politik dan ekonomi memiliki beberapa kebijakan dan peraturan yang mencakup masalah migrasi dan status pengungsi di wilayahnya. Terkait berbagai kebijakan migrasi dan pengungsi Muslim di UE, isu migrasi dan pengungsi menjadi fokus perhatian karena negara-negara anggota berbagi tanggung jawab dalam menghadapi krisis migrasi dan berbagi beban untuk menangani jumlah pengungsi yang datang ke wilayah Eropa. Kebijakan dan kerangka kerja terkait migrasi dan pengungsi di UE tersebut meliputi kebijakan penerimaan pengungsi, sistem Dublin, kebijakan imigrasi, dan kebijakan keamanan perbatasan (King & Okólski, 2019).

Kebijakan penerimaan pengungsi merupakan kerangka kerja yang dimiliki UE untuk menentukan kriteria dan prosedur penerimaan pengungsi. Dalam hal ini juga termasuk menilai kasus-kasus individu dan memberikan perlindungan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan hukum internasional. Sistem Dublin adalah perjanjian antara negara-negara UE yang menentukan negara anggota mana yang bertanggung jawab untuk memproses permohonan suaka seseorang. Sistem ini didasarkan pada prinsip negara pertama kali yang diterima, di mana pengungsi harus mengajukan permohonan suaka di negara pertama kali mereka masuki di wilayah UE. UE juga memperkenalkan program *resettlement* yang bertujuan untuk menampung pengungsi tertentu yang membutuhkan perlindungan khusus. Program ini berfokus pada pengungsi yang berada dalam kondisi yang paling rentan dan memberi mereka kesempatan untuk menetap di negara-negara anggota UE. Terdapat juga upaya UE untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara asal dan transit pengungsi untuk mengatasi akar permasalahan migrasi. Hal ini melibatkan kerja sama dalam hal keamanan perbatasan, pembangunan, dan penanganan konflik (Neuman Stanivuković & Neuman, 2019).

Setiap negara anggota UE juga memiliki kebijakan imigrasi sendiri untuk mengatur masuknya imigran ke wilayah mereka, baik untuk tujuan bekerja, studi, atau tujuan lainnya. Sebagai contoh, setelah Brexit, Inggris juga memiliki kebijakan imigrasi sendiri di luar UE. Beberapa negara anggota UE juga berupaya meningkatkan keamanan perbatasan mereka yang ditujukan untuk mengurangi jumlah migran ilegal yang masuk secara ilegal, yaitu dengan menerapkan kebijakan keamanan perbatasan.

Berikut adalah gambaran umum tentang kebijakan migrasi dan pengungsi terkait Muslim di beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, Swedia, Italia, Hungaria, dan Yunani.

German

Jerman telah menjadi tujuan migrasi utama bagi banyak orang Muslim, termasuk pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Pemerintah Jerman telah mengadopsi kebijakan yang relatif terbuka terhadap pengungsi, terutama selama krisis migrasi Eropa pada tahun 2015, di mana Jerman menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi yang relatif terbuka dan ramah. Pemerintah Jerman menyambut ribuan pengungsi dari berbagai negara, termasuk banyak yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Penerimaan besar-besaran ini dikenal dengan sebutan “*Willkommenskultur*” atau “budaya selamat datang” yang menunjukkan komitmen Jerman untuk membantu orang-orang yang menghadapi krisis kemanusiaan.



Kanselir Jerman, Angela Merkel, menemui pengungsi dari Suriah di Kamp Pengungsi di Jerman.

Sumber: *Islam, Migrants, and Multiculturalism: A Glance at Germany and Beyond*. <https://www.vocaleurope.eu/islam-migrants-and-multiculturalism-a-glance-at-germany-and-beyond/>

Kebijakan penerimaan pengungsi yang terbuka ini menimbulkan tantangan dalam proses integrasi di Jerman. Integrasi pengungsi, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang

Muslim, mencakup berbagai aspek seperti bahasa, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Pemerintah Jerman telah berusaha untuk menyediakan program-program integrasi, pelatihan bahasa, dan layanan pendukung bagi para pengungsi untuk membantu mereka beradaptasi dengan masyarakat Jerman. Selama periode penerimaan besar-besaran pada 2015, terdapat kekhawatiran menyangkut keamanan dan potensi masuknya orang-orang yang memiliki tujuan negatif. Oleh karena itu, pemerintah Jerman meningkatkan upaya pengawasan dan pemeriksaan latar belakang calon pengungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Jerman juga telah menerapkan kebijakan untuk melakukan deportasi terhadap pengungsi yang gagal mendapatkan izin tinggal atau telah dianggap tidak memenuhi syarat untuk tinggal di negara tersebut.

Meskipun pada awalnya kebijakan migrasi Jerman cukup terbuka, masalah integrasi dan tantangan sosial yang muncul, termasuk isu-isu terkait bahasa, pekerjaan, dan akomodasi yang juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan terkait kondisi sosial dan politik internal di Jerman telah menyebabkan pergeseran kebijakan. Pada tahun-tahun berikutnya, Jerman mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait migrasi dan mengurangi jumlah penerimaan pengungsi. Pemerintah Jerman juga telah berusaha untuk berkoordinasi dengan negara-negara anggota UE dan lembaga internasional untuk menghadapi tantangan migrasi dan pengungsi secara lebih luas di tingkat regional dan global.

Pemerintah dan partai politik yang berkuasa, ikut memengaruhi arah kebijakan Jerman terkait isu migran dan pengungsi Muslim. Partai Demokrat Sosial (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands/SPD*) yang pada saat itu merupakan salah satu partai utama dalam pemerintahan Jerman dan dipimpin oleh Angela Merkel hingga 2021, memiliki sejarah dukungan terhadap integrasi pengungsi dan imigran di Jerman. Partai Persatuan Demokrat Kristen (*Christlich*

Demokratische Union/CDU) yang merupakan partai konservatif dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah bersama dengan SPD, juga memiliki pandangan yang beragam tentang masalah pengungsi. Partai ini dikenal dengan kebijakan penanganan krisis pengungsi yang moderat selama masa pemerintahan Kanselir Angela Merkel. Sementara Partai Alternatif untuk Jerman (*Alternative für Deutschland/AfD*) merupakan partai sayap kanan yang memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap masalah pengungsi dan imigrasi. Partai ini telah menjadi oposisi keras terhadap kebijakan pemerintah terkait pengungsi Muslim dan mengadvokasi pengetatan peraturan imigrasi. Pada tahun 2021, Jerman mengalami perubahan pemerintahan setelah pemilihan federal. SPD keluar sebagai pemenang pemilihan dan Olaf Scholz menjadi kanselir menggantikan Angela Merkel. Kebijakan pemerintahan yang baru ini berdampak pada pendekatan terhadap masalah pengungsi dan imigrasi (Grebbe, 2022).

Prancis

Prancis telah menjadi tujuan migrasi bagi banyak pengungsi dari berbagai negara, termasuk banyak yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Prancis memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait migrasi dan pengungsi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Eropa. Pada tahun 2011, Prancis memperkenalkan larangan pemakaian *burqa* (penutup wajah penuh) dan *niqab* (penutup wajah dengan lubang mata) di tempat umum, yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan integrasi dan nilai-nilai sekuler. Larangan ini telah menjadi kontroversial dan memunculkan perdebatan tentang kebebasan beragama dan hak-hak individu (Amghar, 2016).

Tantangan lain yang dihadapi Prancis adalah terkait masalah integrasi sosial dan ekonomi bagi imigran dan pengungsi, termasuk yang berasal dari latar belakang Muslim, di mana banyak dari

mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat Prancis. Di sisi lain, pemerintah Prancis terus meningkatkan upaya pengawasan dan pemeriksaan latar belakang calon pengungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Prancis juga telah menerapkan kebijakan deportasi terhadap imigran dan pengungsi yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk tinggal di negara tersebut. Pada dasarnya, isu-isu migrasi dan pengungsi, khususnya yang terkait dengan Muslim, memang sering kali menjadi perdebatan politik yang kompleks di Prancis (van Mol C., 2016).

Situasi politik di Prancis memang telah menjadi faktor penting dalam konteks kebijakan pengungsi Muslim dan migrasi. Pemerintahan dan partai politik yang berkuasa atau berpengaruh akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah terkait isu migran dan pengungsi Muslim. *La République En Marche!* (LREM) adalah partai yang dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan merupakan partai yang saat ini berkuasa di Prancis. Pemerintahan Macron telah menangani isu migrasi dengan pendekatan yang berfokus pada keamanan perbatasan dan penegakan hukum yang ketat. Demikian halnya, Partai *Rassemblement National* (RN) yang merupakan bekas Partai *Front National* yang dipimpin oleh Marine Le Pen adalah partai nasionalis yang memiliki pandangan yang keras terhadap migrasi dan Islam di Prancis. Partai ini sering mengkritik kebijakan pemerintah terkait pengungsi dan mempromosikan pendekatan yang lebih ketat terhadap imigrasi (De Haas, 2018).

Secara umum, pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron telah mengadopsi berbagai kebijakan terkait pengungsi, termasuk pengaturan sistem perlindungan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pengungsi. Namun, pemerintah juga

telah mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap migrasi ilegal dan penegakan hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa isu-isu terkait integrasi sosial dan ekonomi bagi pengungsi Muslim di Prancis telah menjadi isu yang kompleks. Beberapa pengungsi dan imigran dipandang menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan dan beradaptasi dengan budaya Prancis.

Inggris

Migrasi Muslim di Inggris telah berlangsung selama berabad-abad. Sebagai bekas koloni dan negara yang memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan negara-negara Muslim, Inggris telah mengalami kedatangan migran Muslim dari berbagai belahan dunia. Mayoritas migran Muslim datang dari negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, India, dan negara-negara Timur Tengah. Pengungsi Muslim ini datang ke Inggris karena berbagai alasan, seperti perang, konflik, kekerasan, atau penindasan di negara asal mereka. Inggris sendiri memiliki peraturan dan prosedur untuk mengatasi permohonan suaka dan status pengungsi. Namun, proses ini sering kali rumit dan kontroversial.

Pemerintah Inggris telah berupaya untuk menghadapi tantangan integrasi dan multikulturalisme dengan menghadapi isu-isu terkait pengungsi dan migran Muslim, seperti identitas kebangsaan, bahasa, agama, dan nilai-nilai sosial yang berbeda di antara penduduknya. Beberapa kelompok dan individu menyambut keragaman budaya dan agama sebagai bagian dari identitas Inggris modern, sementara yang lain menyuarakan kekhawatiran tentang integrasi dan akulturasi. Sejak awal abad ke-21, pemerintah Inggris juga telah menghadapi tekanan politik terkait masalah migrasi dan pengungsi (Stone, 2016).

Kebijakan dan pendekatan pemerintah Inggris terhadap masalah migran dan pengungsi Muslim, berubah dari waktu

ke waktu, tergantung pada dinamika politik, opini publik, dan isu-isu global. Sebagai contoh, kebijakan dan pendekatan Inggris terhadap pengungsi Muslim dan isu migrasi telah berubah seiring waktu, terutama sejak keluarnya Inggris dari UE (Brexit) pada tahun 2020. Pemerintahan dan partai politik yang berkuasa atau berpengaruh di Inggris juga memiliki sikap yang bervariasi terkait isu ini. Partai Konservatif (*Conservative Party*) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May dan kemudian Boris Johnson telah mengadopsi sikap yang lebih keras terhadap pengungsi dan migrasi setelah keluarnya Inggris dari UE, yaitu dengan menekankan kontrol perbatasan yang lebih ketat dan perubahan dalam kebijakan pengungsi. Partai Buruh (*Labour Party*) di bawah berbagai pemimpinnya, termasuk Jeremy Corbyn, telah memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap pengungsi dan migrasi, yang ditandai dengan sering mengadvokasi untuk kebijakan pengungsi yang lebih ramah. Partai Liberal Demokrat (*Liberal Democrats*) cenderung memiliki pendekatan yang lebih ramah terhadap pengungsi dan imigrasi, di mana mereka telah mengkritik kebijakan pengungsi yang ketat di bawah pemerintahan Partai Konservatif. Sementara, Partai Brexit (*Brexit Party*) yang dipimpin oleh Nigel Farage adalah partai yang kuat mendukung keluarnya Inggris dari UE, di mana partai ini juga memiliki pendekatan yang keras terhadap imigrasi (Taggart & Szczerbiak, 2018).

Sejak Brexit, Inggris memiliki pemerintahan bersatu yang dipimpin oleh Partai Konservatif di bawah kepemimpinan Boris Johnson. Pendekatan pemerintah terhadap pengungsi dan migrasi, mencerminkan kebijakan Partai Konservatif yang lebih keras. Perubahan kebijakan kemudian dilakukan setelah Brexit, di mana keluarnya Inggris dari UE memungkinkan negara tersebut untuk mengontrol perbatasannya sendiri dan mengubah kebijakan migrasi. Pemerintah Inggris kemudian mengumumkan rencana untuk mengadopsi sistem imigrasi berbasis poin yang memberikan

prioritas kepada imigran berdasarkan keterampilan dan kontribusi ekonomi. Dengan demikian, dapat dinyatakan Inggris telah mengalami perubahan signifikan dalam hal migrasi dan pengungsi pasca-Brexit, yang menciptakan berbagai pandangan dan debat dalam masyarakat dan politik Inggris.

Swedia

Pengungsi Muslim di Swedia berasal dari berbagai negara, termasuk Suriah, Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea, dan negara-negara lain yang mengalami konflik, perang, atau pelanggaran HAM. Swedia sendiri telah lama dikenal karena kebijakan penerimaan pengungsi yang terbuka dan kemanusiaan yang tinggi. Pemerintah Swedia telah mengadopsi konvensi internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951, dan berkomitmen untuk melindungi pengungsi, termasuk pengungsi Muslim, yang memenuhi kriteria perlindungan. Swedia juga telah memiliki kebijakan imigrasi yang memungkinkan orang untuk mencari suaka atau imigrasi ke negara ini, di antaranya mencakup program-program untuk reunifikasi keluarga dan untuk menciptakan jalur legal bagi imigran yang ingin bekerja atau belajar di Swedia (Tosun et al., 2014). Namun, pada beberapa tahun terakhir, meningkatnya jumlah pengungsi telah menimbulkan tantangan bagi sistem kesejahteraan dan integrasi yang akhirnya mendorong pemerintah Swedia untuk melakukan berbagai perubahan kebijakan.

Perubahan dalam kebijakan pengungsi tersebut, misalnya dilakukan dalam bentuk penurunan kuota pengungsi, pengetatan persyaratan perlindungan, dan pengetatan aturan reunifikasi keluarga. Terkait kuota pengungsi, Swedia telah mengurangi kuota pengungsi yang diterima setiap tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan politik domestik terkait dengan jumlah pengungsi yang tiba di Swedia selama beberapa tahun terakhir. Swedia juga memberlakukan persyaratan yang

lebih ketat terkait pengajuan suaka. Hal ini mencakup peningkatan persyaratan bukti-bukti yang harus diajukan oleh pemohon suaka untuk membuktikan bahwa mereka menghadapi ancaman serius di negara asal mereka. Kebijakan ini disebut sebagai “Fokus pada Pengungsi Prioritas Tinggi”, di mana Swedia lebih memfokuskan pada pengungsi yang dianggap “prioritas tinggi” seperti pengungsi Suriah yang mendapatkan prioritas dalam pemrosesan permohonan suaka. Swedia juga menerapkan aturan yang lebih ketat terkait pengajuan reunifikasi keluarga, termasuk persyaratan pendapatan dan kemampuan untuk menyediakan dukungan finansial (Wright, 2023).

Terjadinya berbagai perubahan terhadap kebijakan pengungsi Muslim di Swedia ikut dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di dalam pemerintahan dan partai politik yang berkuasa di Swedia. Partai Sosial Demokrat yang telah lama berkuasa di Swedia sering kali cenderung memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengungsi dan imigran. Mereka umumnya mendukung HAM dan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi. Meskipun demikian, kebijakan pengungsi telah berubah seiring waktu, terutama selama masa pemerintahan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, selama pemerintahan yang berkuasa pada tahun 2015, Swedia menghadapi peningkatan jumlah pengungsi yang mendorong pemerintah untuk menerapkan perubahan dalam kebijakan reunifikasi keluarga dan kuota pengungsi. Sementara, selama periode pemerintahan yang dipimpin oleh partai-partai politik yang lebih konservatif atau kanan, kebijakan migrasi dan pengungsi cenderung lebih ketat. Partai-partai seperti Partai Moderat dan Partai Rakyat Swedia telah memengaruhi perubahan dalam kebijakan pengungsi dengan menekankan kontrol perbatasan yang lebih ketat dan pengetatan persyaratan suaka (Wagner, 2017).

Dalam beberapa periode pemerintahan, partai-partai politik di Swedia sering kali juga membentuk koalisi yang kemudian memengaruhi arah kebijakan pengungsi. Kebijakan-kebijakan ini dapat mencerminkan kompromi antara partai-partai yang berbeda. Selain perubahan dalam pemerintahan, perubahan dalam opini publik terhadap pengungsi dan imigrasi juga ikut memengaruhi arah kebijakan. Dalam hal ini, pada umumnya persepsi masyarakat tentang pengungsi Muslim akan ikut memengaruhi dukungan politik terkait berbagai kebijakan migrasi.

Italia

Italia merupakan negara yang berada di garis depan ketika banyak pengungsi mencoba mencapai Eropa melalui perairan Mediterania. Italia memang memiliki sejarah panjang dalam melakukan operasi penyelamatan di laut untuk menyelamatkan pengungsi yang berlayar melintasi Laut Tengah. Hal ini dinyatakan sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan Italia untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berisiko kehilangan nyawa dalam upaya pengungsian mereka melalui jalur laut.

Pengungsi Muslim di Italia berasal dari berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim di seluruh dunia. Negara-negara asal pengungsi Muslim yang tiba di Italia di antaranya mencakup (De Haas, 2018):

1. Libya: karena posisi geografis Italia yang berdekatan dengan Pantai Libya, banyak pengungsi dan imigran, termasuk pengungsi Muslim, tiba di Italia setelah melintasi Laut Tengah dari Libya.
2. Tunisia: pengungsi Muslim dari Tunisia juga banyak yang berupaya mencari perlindungan di Italia, terutama selama periode konflik politik dan ketidakstabilan di Tunisia.

3. Somalia: somalia adalah salah satu negara asal pengungsi Muslim yang tiba di Italia. Konflik bersenjata dan kekeringan telah mendorong orang-orang Somalia untuk mencari perlindungan dan peluang ekonomi di Italia.
4. Sudan: konflik dan ketidakstabilan di Sudan juga telah menyebabkan pengungsi Muslim tiba di Italia.
5. Eritrea: pengungsi Muslim dari Eritrea mencari perlindungan di Italia karena pelanggaran HAM dan penindasan di negara asal mereka.
6. Afghanistan dan Irak: selain negara-negara Afrika, pengungsi Muslim dari negara-negara Asia seperti Afghanistan dan Irak juga banyak yang mencari perlindungan di Italia.
7. Suriah: selama konflik berkepanjangan di Suriah, banyak pengungsi Muslim Suriah mencari perlindungan di berbagai negara, termasuk Italia.

Italia, sebagaimana negara-negara lain di Eropa, berusaha untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai dengan komitmen internasional dan hukum perlindungan pengungsi. Dalam hal ini, Italia telah mengadopsi konvensi internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951, yang menetapkan kriteria untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang juga berlaku untuk pengungsi Muslim yang memenuhi kriteria perlindungan (Guiraudon et al., 2016).

Italia telah berusaha menangani masalah migrasi dan pengungsi dengan bekerja sama dengan lembaga dan organisasi internasional. Sementara, situasi politik di Italia yang berfluktuasi selama bertahun-tahun ikut memengaruhi kebijakan pemerintah Italia terkait migrasi dan pengungsi, termasuk pengungsi Muslim. Berbagai pemerintahan dan partai politik yang berkuasa di Italia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu pengungsi Muslim

dan migrasi. Kebijakan dan sikap politik terhadap pengungsi Muslim ini, bervariasi sesuai dengan komposisi pemerintahan dan partai politik yang berkuasa. Partai Demokrat (*Partito Democratico*/PD), misalnya adalah partai pusat-kiri di Italia yang berkuasa dalam beberapa pemerintahan, termasuk di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Matteo Renzi. PD cenderung memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengungsi dan migrasi. Partai Lima Bintang (*Movimento 5 Stelle*/M5S) adalah partai populis yang telah berpartisipasi dalam beberapa pemerintahan koalisi di Italia. Sikap mereka terhadap pengungsi cukup bervariasi, tetapi mereka cenderung menekankan isu-isu keamanan perbatasan. Liga (*Lega*) adalah partai politik kanan yang telah berkoalisi dalam beberapa pemerintahan dengan partai-partai lain yang memiliki pandangan yang lebih keras terhadap migrasi. Mereka sering menekankan pengetatan kontrol perbatasan. Sementara, *Forza Italia* adalah partai politik kanan yang cenderung mendukung kontrol perbatasan yang lebih ketat dan memiliki pandangan yang lebih keras terhadap migrasi (King & Okólski, 2019).

Saat ini, Italia memiliki pemerintahan bersatu yang terdiri dari koalisi antara PD, M5S, dan partai-partai lain. Pendekatan mereka terhadap pengungsi dan migrasi mencerminkan kompromi antara berbagai partai dalam koalisi. Italia juga memiliki pemerintahan regional yang memiliki otonomi dalam beberapa kebijakan imigrasi. Beberapa pemerintah regional ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengungsi dan migrasi. Isu migrasi dan pengungsi sendiri menjadi perdebatan sengit dalam politik Italia dan mencerminkan berbagai pandangan dalam masyarakat Italia.

Hungaria

Hungaria adalah negara anggota UE yang terletak di jalur migrasi utama menuju Eropa, sehingga pengungsi dan migran dari berbagai negara, termasuk dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, dapat tiba di negara ini dalam perjalanan mereka menuju negara-negara Eropa lainnya. Migran dan pengungsi Muslim yang tiba di Hungaria ini berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, di antaranya Suriah, Afghanistan, Irak, Iran, dan negara-negara Afrika lainnya (King & Okólski, 2019).

Hungaria merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki pendekatan yang keras terhadap pengungsi Muslim dan migrasi. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán, kebijakan migrasi dan pengungsi Hungaria telah menjadi kontroversial dan sering kali mencerminkan sikap yang sangat kritis terhadap pengungsi Muslim dan migran. Hungaria menolak untuk mengikuti kuota pengungsi yang ditetapkan oleh UE terkait pembagian pengungsi di antara negara-negara anggota. Pemerintah Hungaria juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin menerima pengungsi Muslim sebagai bagian dari program pembagian kuota (Neuman Stanivuković & Neuman, 2019).

Penutupan perbatasan juga dilakukan oleh pemerintah Hungaria, yang ditandai dengan pembangunan pagar dan penghalang fisik di perbatasan dengan negara-negara tetangganya, terutama Serbia dan Kroasia, untuk mencegah masuknya pengungsi dan migran. Hungaria juga memperkenalkan hukum pengungsi yang ketat yang membatasi hak pengungsi untuk mengajukan permohonan suaka. Beberapa pengungsi yang mencoba memasuki Hungaria akan ditahan atau dipaksa meninggalkan negara tersebut (Neuman Stanivuković & Neuman, 2019).

Pemerintahan Orbán secara aktif juga menggunakan retorika anti-migrasi yang kuat, terutama dalam kampanye politiknya.

Mereka sering menggambarkan pengungsi dan migran sebagai ancaman terhadap budaya dan identitas Hungaria. Di bawah pemerintahan Orbán, Hungaria bahkan telah mengubah konstitusinya untuk mencerminkan pandangan anti-migrasi yang lebih keras. Beberapa amendemen konstitusi membatasi hak pengungsi dan hak individu lainnya dalam konteks migrasi. Hungaria berpendapat bahwa tindakan keras terhadap migrasi adalah bagian dari perlindungan keamanan nasional mereka, khususnya terkait isu migrasi dengan potensi ancaman keamanan. Pendekatan Hungaria terhadap pengungsi dan migrasi ini telah mendapatkan kritik dari berbagai organisasi HAM dan lembaga internasional. Kebijakan Hungaria dinyatakan melanggar HAM dasar.

Yunani

Yunani telah menghadapi tekanan besar karena jumlah besar pengungsi yang mencoba mencapai Eropa melalui wilayahnya, terutama dari Turki. Yunani telah bekerja sama dengan UE dan lembaga internasional untuk menangani situasi ini. Kebijakan Yunani terkait migrasi dan pengungsi Muslim sendiri telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena negara ini merupakan pintu masuk utama bagi banyak pengungsi yang mencari perlindungan di UE.

Sejak 2015, Yunani telah menghadapi krisis pengungsi akibat gelombang besar pengungsi yang tiba melalui perbatasan dengan Turki. Banyak dari pengungsi ini berasal dari negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Yunani sendiri memiliki sistem pemrosesan suaka untuk menangani permohonan suaka dari pengungsi yang tiba di negara tersebut. Prosesnya melibatkan pemeriksaan dan penilaian ketat oleh pihak berwenang untuk menentukan status pengungsi. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi, Yunani juga

telah menghadapi tekanan besar dalam menyediakan tempat penampungan yang layak dan kondisi hidup yang manusiawi bagi para pengungsi. Beberapa kamp pengungsi di Yunani menghadapi masalah kelebihan kapasitas dan kondisi yang sulit (King & Okólski, 2019).

Pada tahun 2019, Partai Kiri Radikal (*Syriza*) yang dipimpin oleh Alexis Tsipras kalah dalam pemilihan umum, dan pemerintahan Yunani berpindah ke tangan partai baru, yaitu Partai Konservatif Baru Demokratik (*New Democracy*). Partai ini dipimpin oleh Kyriakos Mitsotakis dan memiliki pendekatan yang lebih tegas terhadap masalah pengungsi dan imigrasi, termasuk rencana untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mengatasi krisis migrasi. Terkait hal ini, Yunani kemudian bekerja sama dengan UE dan negara-negara anggota untuk mengatasi krisis migrasi dan pengungsi, misalnya mencakup kesepakatan dan program yang bertujuan untuk membantu dan membagi tanggung jawab, sekaligus menyediakan bantuan keuangan dalam menangani situasi pengungsi.

Meskipun Yunani telah berusaha menghadapi krisis pengungsi dengan berbagai cara, negara ini juga menerima kritik atas perlakuan terhadap para pengungsi, termasuk masalah HAM dan kondisi hidup yang tidak memadai di beberapa kamp pengungsi. Kebijakan Yunani terhadap pengungsi Muslim dan imigran juga telah menjadi sorotan internasional, terutama terkait dengan tindakan penahanan dan perlakuan terhadap pengungsi di pulau-pulau Yunani.

B. Kebijakan Multikulturalisme dan Pluralisme terhadap Muslim di Eropa

Kebijakan multikulturalisme dan pluralisme di Eropa berkaitan dengan pendekatan dan strategi yang diadopsi oleh negara-negara Eropa dalam menghadapi masyarakat yang semakin beragam secara

budaya, agama, dan etnis. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, menghargai keberagaman, dan memastikan hak asasi semua warga negara dihormati tanpa diskriminasi. Sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar di Eropa, komunitas Muslim menjadi fokus penting dalam kebijakan ini. Pendekatan dan kebijakan ini bervariasi dari satu negara ke negara lain di Eropa, karena setiap negara memiliki kondisi sosial, sejarah, dan politik yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip dan elemen umum yang diakui dalam kebijakan multikulturalisme dan pluralisme Muslim di negara-negara Eropa (Mühlböck & Tosun, 2018).

1. Keadilan dan kesetaraan.

Kebijakan ini menekankan pentingnya memperlakukan semua warga negara dengan adil dan setara, termasuk warga Muslim. Hal ini mencakup hak-hak warga Muslim untuk beragam dalam keyakinan dan praktik agama mereka.

2. Pengakuan terhadap identitas Muslim.

Kebijakan ini mengakui identitas Muslim sebagai bagian penting dari keberagaman sosial dan kultural Eropa. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hari raya dan praktik agama Muslim.

3. Anti diskriminasi dan anti islamofobia.

Negara-negara Eropa berkomitmen untuk melawan diskriminasi dan islamofobia, serta berusaha mencegah tindakan atau retorika yang menghina atau merendahkan umat Islam.

4. Pendidikan dan integrasi.

Kebijakan ini mendorong pendidikan dan integrasi yang mendukung partisipasi aktif dan harmoni antara Muslim dan masyarakat lainnya. Hal ini mencakup upaya untuk

memfasilitasi akses ke pendidikan yang setara dan peluang kerja bagi warga Muslim.

5. Dialog antarbudaya dan agama.

Negara-negara Eropa mendorong dialog dan interaksi antara berbagai kelompok agama dan budaya untuk memperkuat pemahaman dan saling pengertian.

6. Partisipasi politik.

Kebijakan ini mendorong partisipasi politik warga Muslim di tingkat lokal dan nasional, sehingga mereka dapat memiliki suara dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Meskipun banyak negara Eropa telah mengadopsi kebijakan multikulturalisme dan pluralisme untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, keseimbangan dan perwujudan kebijakan ini dapat menjadi tantangan di beberapa negara. Isu-isu seperti integrasi sosial, islamofobia, dan perkembangan politik ikut memengaruhi pendekatan kebijakan di negara-negara tertentu. Berikut beberapa contoh kebijakan multikulturalisme dan pluralisme terhadap Muslim di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Swedia.

Inggris

Inggris telah mengadopsi kebijakan multikulturalisme yang kuat dan mengakui keberagaman agama dan budaya, termasuk Islam. Inggris telah mencanangkan pendekatan inklusif dan menekankan pada hak asasi dan kesetaraan bagi semua warga negaranya. Kebijakan ini mencakup penerimaan warga Muslim dan pengakuan terhadap hari raya dan praktik keagamaan Muslim. Pendidikan multikultural juga didorong untuk meningkatkan pemahaman antarbudaya. Pemerintah Inggris juga aktif dalam mempromosikan dialog antaragama dan memerangi islamofobia.

Meskipun demikian, kebijakan pemerintah Inggris terkait isu multikulturalisme dan pluralisme terhadap Muslim telah berubah seiring berjalannya waktu dan berdasarkan era pemerintahan yang berkuasa. Di bawah kepemimpinan Tony Blair (1997-2007) dari Partai Buruh, Inggris mengadopsi pendekatan multikulturalisme yang lebih kuat. Pemerintah Blair mengakui dan merayakan keragaman budaya dan agama sebagai aset bagi masyarakat Inggris. Pemerintah Blair mendukung pendanaan untuk program-program yang mendorong pada upaya terjadinya integrasi imigran dan komunitas Muslim, termasuk program-program bahasa Inggris dan program pelatihan pekerjaan. Pemerintahan Gordon Brown (2007-2010), yang juga berasal dari Partai Buruh, meneruskan pendekatan multikulturalisme yang kuat ini. Pemerintahan Brown berkomitmen untuk mendukung keragaman dan inklusi sosial. Terdapat pula peningkatan dalam pendanaan program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan akses komunitas Muslim ke layanan pendidikan dan pekerjaan (Kubicek, 2021).

Pemerintahan koalisi antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat di bawah kepemimpinan David Cameron-Clegg (2010-2015) mengadopsi pendekatan yang lebih kritis terhadap multikulturalisme. Cameron menyatakan bahwa multikulturalisme telah gagal dan mengadvokasi “multikulturalisme terpadu” yang menekankan pentingnya integrasi sosial. Pemerintahan era Cameron ini meluncurkan program-program untuk mengatasi ekstremisme, termasuk ekstremisme yang terkait dengan Islam. Pemerintah juga berfokus pada upaya mempromosikan nilai-nilai nasional bersama dan mengurangi ketegangan dalam masyarakat. Di bawah kepemimpinan Theresa May (2016-2019), pemerintah Inggris terus mengejar kebijakan yang berfokus pada pencegahan ekstremisme dan radikalisasi, serta mempromosikan integrasi

sosial. Pemerintahan May mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap pengungsi dan imigran yang mencoba masuk ke Inggris secara ilegal, tetapi juga menekankan pentingnya melindungi HAM dan kebebasan beragama (Kubicek, 2021).

Pemerintahan Boris Johnson (2019-2022) dari Partai Konservatif berupaya mempertahankan fokus pada isu pencegahan ekstremisme dan radikalisasi, yang ditempuh dengan cara mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah kejahatan dan kebencian, termasuk islamofobia. Pemerintahan Johnson yang berada di tengah-tengah negosiasi terkait Brexit, juga ikut menghadapi implikasi terkait isu migrasi dan integrasi. Terakhir, di bawah kepemimpinan Rishi Sunak yang terpilih sebagai Pemimpin Partai Konservatif tanpa lawan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kemudian diangkat oleh Raja Charles III, setelah pengunduran diri Liz Truss sebagai Perdana Menteri akibat krisis pemerintahan, Sunak meluncurkan kampanye dengan mewacanakan perang melawan “ekstremisme Islam” dan menyamakan Islam dengan terorisme. Banyak pandangan kemudian menyatakan bahwa tidak banyak yang akan berubah selama masa jabatan Sunak, melainkan faktanya Inggris sedang memasuki periode di mana lebih banyak diskriminasi menanti umat Islam.

Prancis

Prancis mengadopsi kebijakan yang dikenal sebagai *laïcité*, yaitu sebuah doktrin sekuler yang menegaskan pemisahan antara agama dan negara. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sekuler yang kuat dan menekankan kesetaraan semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaan. Prinsip *laïcité* juga menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan Prancis terhadap Muslim, di mana pemerintah dan lembaga publik diharapkan netral dalam urusan agama dan dilarang menunjukkan preferensi atau dukungan terhadap agama tertentu. Hal ini juga

mencakup larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah dan kantor pemerintah. Kebijakan ini telah menjadi kontroversial karena sering kali menimbulkan konflik dengan warga Muslim yang menganggap bahwa kebebasan beragama mereka terbatas (Hastings, 2018).



Aksi protes di Paris pada tanggal 14 Februari 2021 terkait Undang-Undang anti radikalisme yang diberlakukan pemerintah Prancis yang dipandang anti Muslim

Sumber: *Protesters Say French Anti-Radicalism Law is Anti-Muslim.*

<https://apnews.com/article/religion-paris-radicalism-secularism-france-951fe2ff0b42e8954193f6f9293b0803>

Pemerintah Prancis juga berupaya menekankan pentingnya integrasi sosial bagi semua warga negara, termasuk Muslim. Integrasi dilihat sebagai kunci untuk menciptakan kesatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat Prancis. Terkait hal ini, pendidikan tentang nilai-nilai *laïcité* diperkenalkan di sekolah-sekolah untuk memastikan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip sekuler ini. Tentu saja, pendekatan Prancis terhadap multikulturalisme dan pluralisme terhadap Muslim telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi. Beberapa kelompok menganggap bahwa pendekatan *laïcité* dapat menghambat kebebasan beragama dan kesetaraan bagi warga Muslim. Sementara itu, pemerintah

dan pendukung *laïcité* berpendapat bahwa prinsip ini adalah bagian integral dari identitas dan nilai-nilai Republik Prancis (Hastings, 2018).

Salah satu aspek yang paling kontroversial dari *laïcité* di Prancis adalah larangan penggunaan simbol-simbol agama yang terlihat di lingkungan sekolah negeri. Larangan ini mencakup penggunaan hijab, kippah, salib besar, dan simbol agama lainnya. Larangan ini diberlakukan pada tahun 2004 dan bertujuan untuk menjaga netralitas institusi pendidikan dan memastikan kesetaraan antara siswa dari berbagai latar belakang agama. Prancis juga menerapkan larangan cadar wajah atau *niqab* di tempat umum sejak tahun 2011. Larangan ini menyatakan bahwa orang tidak boleh menutupi wajah mereka sepenuhnya dengan alasan keamanan publik dan integrasi sosial. Terkait masalah pengajaran agama di sekolah, Prancis tidak mengizinkan pengajaran agama di sekolah negeri. Namun, pelajaran tentang sejarah agama dan budaya dapat diajarkan sebagai bagian dari kurikulum umum, dengan fokus pada pendekatan sekuler (Grebbe, 2022).

Terlepas dari berbagai perdebatan dan tantangan yang ada, kebijakan terhadap Muslim di Prancis terus mengalami perubahan dan evolusi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan tuntutan masyarakat. Pemerintah Prancis terus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara prinsip sekulerisme dan penghormatan terhadap hak-hak warga Muslim dalam masyarakat yang semakin beragam. Pada era pemerintahan François Mitterrand (1981-1995), Prancis mencoba untuk memperkenalkan kebijakan multikulturalisme yang lebih inklusif. Namun, pendekatan ini dihadapkan dengan tantangan dan kritik yang signifikan dari kalangan politik dan masyarakat Prancis yang lebih luas. Pemerintahan Jacques Chirac (1995-2007) kemudian mengadopsi Undang-Undang (UU) yang melarang simbol-simbol agama di

sekolah-sekolah negeri Prancis. UU ini membatasi penggunaan simbol-simbol agama, termasuk jilbab (kerudung), di sekolah-sekolah negeri. Tujuannya adalah menjaga prinsip sekularisme Prancis. Pemerintahan Nicolas Sarkozy (2007-2012) juga mengambil sikap keras terhadap isu-isu keamanan dan integrasi, yang ditandai dengan melarang penggunaan cadar (*niqab*) di tempat-tempat umum dan mendukung pembubaran perkumpulan-perkumpulan yang dianggap mengancam keamanan negara.

Pemerintahan François Hollande (2012-2017) yang dihadapkan pada tantangan terkait terorisme dan ekstremisme, terutama setelah serangan teror yang terjadi di Prancis, kemudian mengambil langkah-langkah keras terhadap kelompok-kelompok ekstremis dan mendukung kebijakan sekularisme Prancis yang kuat. Terakhir, Presiden Emmanuel Macron telah mengadopsi pendekatan yang kuat terhadap sekularisme Prancis. Macron juga mendukung reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai republik dan pendidikan sekuler. Pemerintahan Macron meluncurkan kampanye untuk melawan “radikalisme Islam” termasuk melalui pengawasan dan pemantauan masjid-masjid yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ekstremis (De Haas, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah Prancis selalu menyatakan menekankan nilai-nilai sekularisme yang kuat sebagai landasan untuk integrasi dan pluralisme di negara itu, meskipun pada kenyataannya pendekatan ini telah menghadapi kritik dan perdebatan internal di dalam Prancis dan dari komunitas Muslim serta masyarakat internasional.

Jerman

Jerman telah mengadopsi kebijakan multikulturalisme yang mengakui keberagaman agama, termasuk Islam. Jerman juga mendorong partisipasi warga Muslim dalam kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Pemerintah Jerman mendukung

program-program integrasi yang bertujuan membantu imigran, termasuk komunitas Muslim, dalam memahami masyarakat dan budaya Jerman. Hal ini misalnya mencakup kursus bahasa Jerman, pelatihan kerja, dan orientasi budaya untuk membantu imigran agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan multikultural juga ditekankan untuk memperkuat pemahaman antarbudaya dan mengatasi prasangka.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kebijakan pemerintah Jerman terkait isu multikulturalisme dan pluralisme terhadap Muslim telah mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Jerman adalah salah satu negara Eropa yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan integrasi dan hak-hak individu Muslim telah menjadi fokus perhatian. Selama era pemerintahan Angela Merkel (2005-2021), Jerman mengadopsi pendekatan multikulturalisme yang relatif terbuka terhadap imigrasi dan integrasi. Pemerintahan Merkel mendukung pendidikan bahasa Jerman bagi imigran, pelatihan kerja, dan program-program integrasi. Pemerintahan Merkel juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan organisasi Islam di Jerman untuk mempromosikan integrasi dan dialog antaragama. Meskipun terdapat dukungan untuk multikulturalisme, isu integrasi dan identitas nasional juga menjadi topik perdebatan yang penting di bawah kepemimpinan Merkel, terutama sehubungan dengan imigrasi besar-besaran selama krisis pengungsi.

Pada tahun 2021, Olaf Scholz menggantikan Angela Merkel sebagai kanselir Jerman. Meskipun era pemerintahan Scholz masih relatif baru, Scholz telah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap integrasi dan kerja sama antaragama. Kebijakan terkait dengan hak-hak individu Muslim, termasuk kebebasan beragama dan praktik keagamaan, tetap

menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, Jerman juga telah menghadapi isu-isu seperti islamofobia, pencegahan ekstremisme, dan tindakan anti-terorisme yang memengaruhi komunitas Muslim di negara tersebut. Pemerintah Jerman terus bekerja untuk menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan memastikan hak-hak individu, termasuk hak-hak Muslim, dihormati.

Swedia

Swedia menerapkan kebijakan multikulturalisme yang kuat, dengan menekankan pada pengakuan dan penghargaan terhadap identitas agama dan budaya minoritas, termasuk Muslim. Negara ini juga aktif dalam mempromosikan integrasi sosial dan partisipasi politik bagi warga Muslim. Dalam upaya membantu komunitas Muslim untuk dapat mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Swedia, pemerintah Swedia memberikan pendanaan dalam bentuk program-program yang bertujuan membantu imigran, termasuk pelatihan bahasa Swedia, pelatihan kerja, dan orientasi budaya.

Kebijakan pemerintah Swedia terkait isu multikulturalisme dan pluralisme terhadap Muslim mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan era pemerintahan yang berkuasa. Swedia telah lama memiliki tradisi multikulturalisme yang kuat. Dalam hal ini, berbagai era pemerintahan yang berkuasa, telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk mengelola keragaman agama dan budaya dalam masyarakat. Pemerintahan Carl Bildt (1991-1994) dari Partai Moderat menghadapi pertumbuhan imigrasi yang signifikan, termasuk dari negara-negara dengan mayoritas Muslim. Pemerintahan Bildt menekankan pentingnya pendidikan dan integrasi sebagai bagian dari respons terhadap permasalahan terkait imigrasi. Pemerintahan Göran Persson (1996-2006) dari Partai Sosial Demokrat meneruskan untuk mendukung pendekatan multikulturalisme yang inklusif,

yaitu dengan jalan menggabungkan program-program integrasi yang lebih luas, pendidikan, dan dukungan sosial bagi komunitas imigran, termasuk Muslim.

Pemerintahan Fredrik Reinfeldt (2006-2014) dari Partai Moderat kemudian mengambil pendekatan yang lebih ketat terhadap imigran, yang juga ikut memengaruhi komunitas Muslim. Di era pemerintahan ini, didorong integrasi melalui pendidikan bahasa dan pelatihan kerja. Pemerintahan Stefan Löfven (2014-2021) dari Partai Sosial Demokrat juga mendukung integrasi sosial dan multikulturalisme, yang ditandai dengan mengadopsi pendekatan inklusif terhadap imigran, termasuk Muslim, dan mendukung program-program pendidikan dan pelatihan untuk membantu integrasi. Demikian halnya dengan pemerintahan Magdalena Andersson (2021-2022) dan Ulf Kristersson yang saat ini berkuasa, masih mempertahankan pendekatan inklusif terhadap keragaman agama dan budaya. Swedia di bawah pemerintahan Kristersson secara konsisten terus mendorong dilakukannya upaya dialog antaragama, pendidikan, dan dukungan bagi komunitas imigran.

Secara umum, meskipun pendekatan multikulturalisme dan pluralisme tetap menjadi dasar kebijakan Swedia, tingkat imigrasi dan perubahan politik dalam beberapa tahun terakhir dapat memengaruhi fokus dan implementasi kebijakan pemerintah. Selain itu, perdebatan tentang integrasi, HAM, dan isu-isu terkait Islam juga menjadi bagian dari ranah politik Swedia yang terus berubah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait isu ini terus berfluktuasi sesuai dengan perkembangan politik dan sosial.

BAB 4

TANTANGAN INTEGRASI MUSLIM DI EROPA



Integrasi Muslim di Eropa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada konteks sosial, politik, dan sejarah masing-masing negara. Hal ini juga tidak terlepas dari sejarah migrasi Muslim di Eropa yang mencakup periode panjang, dengan gelombang imigrasi yang berbeda. Dalam konteks ini, beberapa negara Eropa mengadopsi model multikulturalisme yang mendorong keragaman budaya dan agama, sementara yang lain mengutamakan asimilasi ke dalam budaya mayoritas. Beberapa tantangan utama integrasi Muslim di Eropa ini di antaranya terkait stereotipe negatif Muslim, isu radikalisasi dan ekstremisme Islam, diskriminasi ekonomi dan kurangnya keterwakilan politik, serta meningkatnya isu islamofobia.

A. Stereotipe Negatif Muslim di Eropa

Stereotipe negatif terkait Muslim di Eropa adalah persepsi atau pandangan yang didasarkan pada prasangka, kesalahpahaman, atau generalisasi yang tidak akurat terhadap komunitas Muslim. Stereotipe ini sering kali tidak mencerminkan kenyataan atau keragaman dalam komunitas Muslim, dan dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi, islamofobia, serta ketidakadilan. Beberapa contoh stereotipe negatif tentang Muslim di Eropa sering kali terkait isu teroris dan ekstremis, tidak terintegrasi dan tidak mau beradaptasi, stereotipe negatif terkait perempuan Muslim, tidak berkontribusi pada masyarakat, serta budaya yang dipandang asing dan tidak kompatibel.

Salah satu stereotipe paling umum adalah mengasosiasikan seluruh komunitas Muslim di Eropa dengan teroris atau ekstremis. Hal ini disebabkan oleh serangan terorisme yang telah terjadi di Eropa oleh beberapa individu atau kelompok militan yang mengaku sebagai Muslim. Padahal, penting untuk diingat bahwa mayoritas Muslim adalah orang-orang yang damai dan tidak

mendukung tindakan kekerasan. Muslim juga sering dianggap tidak terintegrasi dan enggan beradaptasi dengan masyarakat Eropa. Padahal, sebagian besar Muslim di Eropa adalah warga yang berkontribusi secara aktif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara-negara mereka, dan banyak yang telah menjadi bagian dari masyarakat Eropa selama beberapa generasi (Amghar, 2016).

Stereotipe negatif lainnya terkait keberadaan perempuan Muslim yang sering kali dihadapkan pada stereotipe bahwa mereka dipaksa mengenakan hijab atau tidak memiliki kebebasan dan hak-hak yang sama dengan perempuan lainnya. Padahal, realitasnya banyak perempuan Muslim di Eropa memilih untuk mengenakan hijab sebagai bagian dari identitas agama dan budaya mereka, di mana mereka tetap memiliki hak dan kebebasan yang sama seperti perempuan lainnya. Sebagian Muslim juga dianggap tidak berkontribusi pada masyarakat Eropa dan hidup dari dana tunjangan kesejahteraan sosial. Padahal, banyak Muslim yang bekerja, membayar pajak, dan berkontribusi secara positif pada masyarakat di berbagai bidang. Secara umum, Muslim juga sering dianggap membawa budaya yang asing dan tidak kompatibel dengan budaya Eropa (Hashas, 2019). Padahal, Islam telah menjadi bagian dari sejarah Eropa selama berabad-abad, serta banyak praktik dan tradisi Muslim yang telah terintegrasi ke dalam kebudayaan Eropa.

Berbagai stereotipe negatif ini, pada akhirnya menyebabkan terjadinya diskriminasi, penolakan, dan ketegangan antara komunitas Muslim dan komunitas lainnya di Eropa. Untuk mengatasi stereotipe ini, penting untuk meningkatkan kesadaran akan keragaman dalam komunitas Muslim, sekaligus menghargai kontribusi positif yang dibawa oleh warga Muslim dalam masyarakat Eropa. Pendidikan, dialog antarbudaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah langkah-

langkah yang dapat membantu mengatasi stereotipe negatif dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural Eropa.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang di Eropa memiliki stereotipe negatif terhadap Muslim. Stereotipe negatif dimungkinkan terjadi pada sebagian populasi dan disebabkan karena berbagai faktor sosial, sejarah, politik, dan media. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya stereotipe negatif terhadap Muslim di Eropa di antaranya adalah terorisme, pengaruh media, kelompok ekstremis, ketidaktahuan dan kurangnya interaksi, persepsi sosial-politik, serta pengalaman di masa lalu.

Terjadinya berbagai serangan teroris yang melibatkan pelaku Muslim di Eropa menjadi penyebab terbentuknya persepsi negatif terhadap seluruh komunitas Muslim. Insiden seperti serangan di Paris, Brussels, dan London telah mengakibatkan pengaitan negatif antara Muslim dan terorisme di mata sebagian orang. Media massa juga sering kali memperkuat atau menciptakan stereotipe negatif terkait Muslim. Dalam hal ini, pemberitaan yang tidak dipilih dengan cermat atau bias dalam melaporkan kejadian yang melibatkan Muslim, dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok ekstremis yang menganjurkan pandangan intoleran dan radikal juga ikut berkontribusi pada pembentukan stereotipe negatif terhadap seluruh komunitas Muslim, sekaligus menyebabkan persepsi keliru bahwa mereka mewakili mayoritas Muslim (Tibi, 2002).

Faktor berikutnya yang ikut berkontribusi membentuk stereotipe negatif Muslim di Eropa adalah dikarenakan kurangnya pemahaman dan interaksi langsung dengan Muslim. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan tentang agama, budaya, dan praktik mereka, yang pada akhirnya akan mengarah pada prasangka dan stereotipe. Masalah sosial dan politik, seperti imigrasi, integrasi,

dan isu-isu keamanan, juga menjadi faktor yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Muslim. Demikian halnya terjadinya peristiwa perang dan konflik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim di masa lalu, seperti perang di Afghanistan dan Irak, telah ikut berkontribusi meninggalkan kesan yang kuat pada pemikiran masyarakat Eropa (Greble, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang agama dan budaya Muslim, serta untuk mendorong dialog antarbudaya dan interaksi positif dalam mengatasi stereotipe negatif dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif serta penuh pengertian.

B. Isu Radikalisasi dan Ekstremisme Islam di Eropa

Isu radikalisasi dan ekstremisme Islam di Eropa telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara di kawasan tersebut. Kemunculan masalah ini salah satunya dilatarbelakangi fakta terdapatnya beberapa kelompok Muslim di Eropa yang mengalami rasa alienasi dan marginalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial ini berpotensi memicu perasaan frustrasi dan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap propaganda radikal. Tingkat integrasi yang rendah dari beberapa komunitas Muslim dengan masyarakat umum juga berkontribusi menciptakan kesenjangan budaya dan sosial, sekaligus meningkatkan risiko munculnya pandangan ekstrem dan radikal.

Dikaitkan isu radikalisasi dan ekstremisme Islam, kebijakan pemerintah negara-negara Eropa mengalami perkembangan seiring berbagai peristiwa global. Secara umum, kebijakan pemerintah negara-negara Eropa terkait isu radikalisasi dan ekstremisme Islam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga era sebagai berikut (Laskowski & Laskowska, 2022).

1. Era Terorisme Global (2000-an hingga awal 2010-an)
 Pada era ini, serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS) memberikan dampak besar terhadap isu radikalisasi dan ekstremisme di Eropa. Banyak negara Eropa memperketat undang-undang terkait keamanan dan intelijen untuk melawan terorisme internasional. Program deradikalisasi dan rehabilitasi dimulai di beberapa negara Eropa yang ditujukan untuk membantu individu yang terlibat dalam radikalisme kembali ke masyarakat.
2. Era Perang Sipil Suriah dan Irak (2010-an)
 Konflik di Suriah dan Irak menciptakan kekhawatiran tentang pengaruh kelompok militan seperti ISIS. Negara-negara Eropa berusaha mengatasi ancaman yang muncul dari para militan asing yang berangkat ke wilayah tersebut dan kemudian kembali ke Eropa. Banyak negara Eropa memperkenalkan undang-undang dan program yang lebih ketat terkait pemantauan, penahanan, dan rehabilitasi individu yang terlibat dalam militansi.
3. Era Penanganan Ekstremisme *Online* (akhir 2010-an hingga sekarang)
 Era ini ditandai oleh peningkatan pengaruh internet dalam proses radikalisasi. Pemerintah Eropa mulai fokus pada upaya memerangi ekstremisme *online* dan propaganda terorisme. Beberapa negara Eropa memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan pemblokiran situs *web* teroris dan mengejar individu yang menyebarkan propaganda ekstremisme secara *online*. Program deradikalisasi dan upaya pencegahan yang lebih luas, seperti pendidikan dan kesadaran masyarakat, juga terus dilakukan untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi.

Berbagai kebijakan di atas, diadopsi oleh beberapa negara Eropa, seperti Prancis, Belgia, Inggris, Jerman, dan Swedia, yang ikut terdampak dari terjadinya peristiwa serangan teroris dan ekstremisme.

Prancis

Prancis adalah salah satu negara Eropa yang telah mengalami sejumlah serangan teroris yang signifikan dan telah menjadi sorotan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa peristiwa penting terkait isu terorisme dan radikalisasi di Prancis misalnya serangan Paris pada 2015 yang merupakan serangkaian serangan terkoordinasi di Paris pada 13 November 2015. Serangan ini melibatkan penembakan dan bom bunuh diri di berbagai lokasi, termasuk *Bataclan Theater* dan *Stade de France*. Serangan ini menewaskan 130 orang dan melukai banyak lainnya. Serangan ini diklaim dilakukan oleh kelompok teroris ISIS. Sebelumnya, pada Januari 2015, terjadi serangan teroris terhadap kantor majalah satir *Charlie Hebdo* di Paris. Serangan ini menewaskan sejumlah wartawan dan kartunis, dan memicu gelombang solidaritas global di bawah slogan "*Je suis Charlie*". Selanjutnya, pada bulan Juli 2016, seorang pria menabrakkan truk ke kerumunan yang merayakan Hari Nasional Prancis di Nice, menewaskan lebih dari 80 orang dan melukai banyak lainnya. Serangan ini juga dikaitkan dengan kelompok teroris ISIS. Di samping itu, Prancis juga telah mengalami serangkaian serangan teroris lainnya, termasuk serangan di *supermarket* di Toulouse pada 2012, serangan terhadap gereja di Normandy pada 2016, dan serangan di pasar Natal di Strasbourg pada 2018 (Valfort, 2020).

Masalah radikalisasi di Prancis memang telah menjadi perhatian penting, terutama di beberapa lingkungan kota yang lebih terpinggirkan. Faktor-faktor seperti pengangguran, ketidaksetaraan sosial, dan isolasi sosial telah dikaitkan dengan

proses radikalisisasi di kalangan beberapa individu. Pemerintah Prancis telah merespons dengan berbagai langkah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah radikalisisasi, termasuk program deradikalisisasi, tindakan hukum yang lebih ketat terhadap propaganda terorisme, dan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pihak berwenang.

Pada tahun 2006, sebagai respons terjadinya berbagai peristiwa terorisme global, Prancis mengesahkan undang-undang anti-terorisme yang memberikan pemerintah alat yang lebih kuat untuk melawan terorisme dan radikalisisasi. Undang-undang ini memungkinkan penangkapan dan pengawasan lebih ketat terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas teroris. Pemerintah Prancis juga memfokuskan perhatiannya pada penjara sebagai tempat yang rentan terhadap radikalisisasi. Di bawah kebijakan ini, diadopsi program-program untuk mengidentifikasi dan mendekati tahanan yang rentan terhadap pengaruh ekstremisme, serta upaya untuk meresosialisasi mereka (Peter, 2021).

Di era perang sipil Suriah dan Irak pada tahun 2010-an, Prancis seperti banyak negara Barat lainnya menghadapi tantangan yang signifikan terkait isu radikalisisasi dan ekstremisme Islam. Prancis adalah salah satu negara yang aktif dalam koalisi internasional yang berperang melawan ISIS di Suriah dan Irak. Prancis berkontribusi dengan dukungan militer, termasuk serangan udara dan bantuan untuk pasukan lokal yang melawan ISIS. Di kemudian hari, Prancis menghadapi masalah pejuang asing yang kembali ke negara mereka setelah berjuang bersama kelompok-kelompok ekstremis di Suriah dan Irak. Terkait hal ini, pemerintah Prancis kemudian mengambil pendekatan reintegrasi pejuang asing yang kembali ke Prancis yaitu dengan meresosialisasi dan mengawasi mereka, sambil menjatuhkan hukuman hukum bagi yang terlibat dalam kegiatan teroris (Ragazzi, 2014).

Seiring dengan meningkatnya peran internet dan media sosial dalam menyebarkan ideologi radikal, pemerintah Prancis terus beradaptasi dengan perkembangan baru. Pemerintah Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mengatur konten terorisme dan radikal di internet. Undang-undang Anti-Terrorisme Digital ini memberikan wewenang kepada otoritas untuk memblokir situs *web* yang mempromosikan ekstremisme, sekaligus menghukum individu yang mengunggah atau membagikan materi radikal secara *online*. Prancis juga berupaya untuk menjalin kerja sama dengan platform media sosial besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk mengidentifikasi dan menghapus konten terorisme. Pemerintah juga mendesak platform ini untuk meningkatkan algoritma pemantauan konten berpotensi radikal (Ragazzi, 2021).

Belgia

Belgia telah menjadi pusat perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir karena terkait dengan beberapa serangan teroris di Eropa dan masalah radikalisasi di kalangan komunitas Muslim di negara itu. Beberapa peristiwa terkait radikalisasi dan ekstremisme misalnya terjadinya serangan Brussel pada Maret 2016. Ketika itu, dua serangan bom bunuh diri terjadi di Bandara Zaventem dan stasiun kereta api Maelbeek di Brussels, ibu kota Belgia. Serangan ini menewaskan 32 orang dan melukai banyak lainnya. Serangan tersebut diklaim oleh ISIS. Para pelaku serangan ini sebagian besar adalah warga Belgia atau penduduk yang telah terkena dampak radikalisasi (Fadil et al., 2021).

Belgia juga telah menjadi salah satu negara Eropa yang memiliki jumlah terbesar dari warganya yang berangkat untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah dan Irak. Setelah konflik di Timur Tengah, beberapa individu yang telah berpartisipasi dalam perang tersebut telah kembali ke Belgia dan

kemudian menjadi perhatian keamanan. Terkait hal ini, lingkungan Molenbeek di Brussels telah mendapat perhatian khusus karena dianggap sebagai tempat radikalisasi yang signifikan. Sejumlah individu yang terlibat dalam serangan teroris di Eropa, termasuk serangan Paris pada 2015, memiliki koneksi dengan Molenbeek (Fadil et al., 2021).

Pemerintah Belgia kemudian berupaya meluncurkan program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam radikalisme atau yang baru saja kembali dari wilayah konflik. Upaya ini melibatkan kebijakan untuk membantu individu kembali ke masyarakat dengan aman dan membatasi risiko keterlibatan mereka dalam kegiatan terorisme. Belgia juga telah meningkatkan upaya keamanan dan intelijen untuk melawan terorisme dan radikalisasi. Hal ini termasuk peningkatan kerja sama dengan negara-negara sekutu dalam pertukaran informasi intelijen (Fadil et al., 2021). Penting untuk dicatat bahwa Belgia, seperti negara-negara lain di Eropa, berusaha keras untuk mengatasi isu-isu terorisme dan radikalisasi. Meskipun masalah ini tetap menjadi tantangan serius, pemerintah Belgia terus bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya di tingkat nasional dan internasional untuk mengatasi ancaman tersebut dan mencegah proses radikalisasi lebih lanjut.

Inggris

Inggris memiliki sejarah yang terkait dengan radikalisasi dan serangan teroris, di mana beberapa warganya juga telah bergabung dengan kelompok teroris di Suriah dan Irak. Serangan teroris yang paling mencolok di Inggris adalah serangan bom bunuh diri di London pada tanggal 7 Juli 2005. Serangan ini menargetkan sistem transportasi umum dan menyebabkan kematian 52 orang dan melukai ratusan lainnya. Serangan ini dijalankan oleh kelompok ekstremis yang terkait dengan Al-Qaeda. Selama konflik di Suriah dan Irak, sejumlah warga Inggris, termasuk beberapa kaum muda,

telah bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Mereka dikenal sebagai “pejuang asing” atau “*returnees*” ketika mereka kembali ke Inggris setelah berpartisipasi dalam konflik (Abbas, 2011).

Pemerintah Inggris kemudian memperkenalkan sejumlah undang-undang anti-terorisme dan kebijakan keamanan yang lebih ketat, termasuk tindakan pengawasan terhadap individu yang dicurigai terkait dengan terorisme. Inggris juga telah meluncurkan program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk membantu individu yang terlibat dalam radikalisme atau yang kembali dari konflik luar negeri untuk mengatasi faktor-faktor yang memengaruhi proses radikalisasi mereka. Inggris juga berkolaborasi dengan negara-negara sekutu, seperti AS dan negara-negara Eropa lainnya, dalam pertukaran informasi intelijen dan upaya melawan terorisme internasional. Inggris, seperti negara-negara Eropa lainnya, terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan mengatasi ancaman terorisme (Lynch, 2013). Dengan kata lain, terorisme dan radikalisasi telah menjadi perhatian serius, di mana pemerintah Inggris berusaha keras untuk mencegah serangan-serangan baru sekaligus mengatasi faktor-faktor yang memicu proses radikalisasi.

Negara Inggris sendiri menjadi target dan ancaman terorisme seiring dengan partisipasi Inggris dalam konflik di wilayah Muslim, terutama di Irak dan Afghanistan, di mana hal ini telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu debat luas di tingkat nasional dan internasional. Partisipasi intervensi militer Inggris di Irak dimulai ketika pada tahun 2003, Inggris bergabung dengan AS dalam invasi militer ke Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Intervensi ini sangat kontroversial dan mendapat protes di dalam negeri serta di berbagai negara di seluruh dunia. Banyak opini yang menyatakan bahwa intervensi tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang keliru atau tidak sah, terutama terkait klaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang belum terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Inggris juga berpartisipasi

dalam invasi AS ke Afghanistan setelah serangan 11 September 2001 (Abbas, 2021). Upaya untuk mengatasi kelompok Al-Qaeda dan rezim Taliban menjadi tujuan utama intervensi ini. Dalam invasi ini, Inggris memiliki pasukan yang ditempatkan di Afghanistan selama lebih dari satu dekade, meskipun kemudian menarik pasukannya dari negara tersebut (Lynch, 2013).



Para pengunjung rasa mengangkat spanduk saat mereka berkumpul di Trafalgar Square, pusat kota London, selama demonstrasi “Hentikan Perang (*Stop the War*)” pada tanggal 20 November 2010 menentang berlanjutnya keterlibatan Inggris dalam perang di Afghanistan.

Sumber: *British Public Growing Weary of Afghan War*. <https://www.voanews.com/a/british-public-growing-weary-of-afghan-war-110143619/170334.html>

Keterlibatan Inggris dalam konflik Irak dan Afghanistan ini memicu ketegangan dan demonstrasi di dalam negeri, dengan sebagian besar publik yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Para kritikus kebijakan luar negeri berpendapat bahwa partisipasi Inggris dalam konflik tersebut telah meningkatkan risiko serangan teroris di dalam negeri dan memicu radikalisasi

di kalangan sebagian kecil individu. Kebijakan luar negeri Inggris terkait konflik di Irak dan Afghanistan ini kemudian juga telah menjadi subjek evaluasi dan pengaruh terhadap kebijakan di masa depan. Perang di Irak, khususnya, telah menjadi topik debat politik yang mendalam, dengan beberapa anggota parlemen yang mendukung peninjauan ulang kebijakan tersebut. Kebijakan luar negeri Inggris dipandang juga memiliki dampak besar di wilayah tersebut, di mana meskipun rezim Saddam Hussein di Irak telah digulingkan, tetapi konflik pascainvasi dan munculnya kelompok ekstremis seperti ISIS telah mengganggu stabilitas di Timur Tengah (Abbas, 2011).

Jerman

Jerman adalah salah satu negara Eropa yang telah mengalami peningkatan kasus radikalisasi dan serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir, meskipun memiliki undang-undang yang ketat terkait keamanan dan intelijen. Dalam hal ini, Jerman telah menjadi target beberapa serangan teroris, di mana salah satu serangan yang mencolok adalah serangan dengan truk di pasar Natal di Berlin pada Desember 2016, yang menewaskan 12 orang. Serangan tersebut dilakukan oleh seorang individu yang terkait dengan ISIS. Jerman juga telah menghadapi tantangan terkait pemulangan warga negara Jerman yang bergabung dengan kelompok teroris di Suriah dan Irak. Mereka yang kembali dapat menjadi ancaman keamanan (Said & Fouad, 2018).

Radikalisasi di kalangan komunitas Muslim di Jerman sendiri dipandang menjadi masalah yang perlu diatasi. Faktor-faktor seperti pengangguran, ketidaksetaraan, dan isolasi sosial telah dikaitkan dengan proses radikalisasi di kalangan beberapa individu. Beberapa wilayah di Jerman telah dikenal sebagai pusat aktivitas ekstremis atau memiliki jumlah kasus radikalisasi yang

lebih tinggi daripada wilayah lainnya, di antaranya adalah Berlin, Ruhrgebiet, Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen (Saxony), dan Niedersachsen (Lower Saxony) (Said & Fouad, 2018).

Berlin sebagai ibu kota Jerman memiliki populasi dan latar belakang sosial serta ekonomi yang sangat beragam. Hal ini menjadikan Berlin sebagai salah satu wilayah potensial bagi aktivitas radikalisisasi dan ekstremisme. Wilayah metropolitan Ruhrgebiet, yang terletak di bagian barat laut Jerman juga merupakan salah satu wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan. Terdapat beberapa kasus radikalisisasi dan upaya pencegahan di wilayah ini. Baden-Württemberg juga memiliki jumlah populasi Muslim yang cukup besar dan telah menjadi fokus upaya pencegahan radikalisisasi. Kota Hamburg pernah menjadi rumah bagi beberapa individu yang terkait dengan terorisme internasional, termasuk anggota kelompok Al-Qaeda. Sementara wilayah Sachsen (Saxony) juga telah mencatat peningkatan aktivitas ekstremisme, terutama kelompok sayap kanan. Terdapat juga kasus-kasus radikalisisasi Islam di wilayah ini. Demikian halnya dengan Niedersachsen (Lower Saxony). Wilayah ini juga melaporkan kasus-kasus terkait dengan radikalisisasi dan ekstremisme Islam (Baaken et al., 2018).

Pemerintah Jerman kemudian berupaya mengadopsi berbagai program pencegahan dan deradikalisisasi untuk mengatasi isu ini. Upaya ini melibatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan untuk mencegah proses radikalisisasi. Pemerintah Jerman juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam radikalisme atau terlibat dalam kegiatan terorisme potensial. Langkah-langkah keamanan telah ditingkatkan di tempat-tempat dengan risiko tinggi. Meskipun demikian, perlu untuk dipahami bahwa masalah radikalisisasi dan serangan teroris tidak hanya terkait dengan kebijakan keamanan, tetapi juga memiliki akar

penyebab yang lebih dalam, termasuk isu-isu sosial dan ekonomi. Jerman, seperti negara-negara Eropa lainnya, terus berupaya untuk mengatasi isu-isu ini melalui berbagai program dan tindakan kebijakan.

Swedia

Swedia juga dihadapkan pada isu-isu radikalisisasi dan ekstremisme, terutama di beberapa lingkungan kota yang lebih terpinggirkan. Meskipun Swedia belum mengalami serangan teroris sebesar beberapa negara lain di Eropa, negara ini juga tidak luput dari ancaman terorisme. Pada 2010, seorang pelaku serangan bom bunuh diri yang terkait dengan al-Qaeda melakukan serangan bom di Stockholm. Partisipasi Swedia dalam upaya internasional, seperti invasi di Afghanistan dan dalam perang melawan ISIS di Suriah dan Irak, dipandang telah menjadi sumber ketegangan dan perdebatan (Abbas, 2021).

Beberapa lingkungan kota di Swedia, terutama yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan masalah sosial lainnya, kemudian menjadi pusat perhatian dalam konteks radikalisisasi. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan, isolasi sosial, dan ketidakstabilan ekonomi ikut memengaruhi proses radikalisisasi di kalangan beberapa individu. Beberapa wilayah di pinggiran Swedia yang telah dikenal karena kasus radikalisisasi atau aktivitas ekstremisme misalnya Botkyrka, Rinkeby, Rosengård, Angered, dan Tensta (Malmros, 2022).

Botkyrka adalah sebuah kotamadya di pinggiran Stockholm yang memiliki sejumlah besar penduduk keturunan imigran, termasuk warga Muslim. Wilayah ini telah menjadi perhatian dalam konteks radikalisisasi dan upaya pencegahan. Rinkeby dan Tensta yang merupakan distrik di pinggiran Stockholm juga telah mendapat perhatian karena kasus-kasus terkait radikalisisasi dan

ekstremisme. Rosengård, sebuah daerah di Malmö yang memiliki populasi beragam, terutama keturunan imigran, juga telah menjadi fokus upaya pencegahan radikalisisasi. Demikian halnya dengan Angered, sebuah distrik di pinggiran Göteborg yang memiliki sejumlah masalah sosial, termasuk kasus radikalisisasi (Malmros, 2022).

Pemerintah Swedia kemudian terus berupaya untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus-kasus radikalisisasi di seluruh negeri dengan melibatkan komunitas Muslim, lembaga masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya pencegahan radikalisisasi dan pendidikan tentang risiko radikalisisasi tersebar luas di seluruh Swedia, yang ditujukan untuk mengatasi isu ini di berbagai wilayah. Untuk mencegah radikalisisasi dan ekstremisme pula, Swedia telah mengambil langkah-langkah, termasuk didalamnya adalah program deradikalisisasi dan pencegahan yang bertujuan untuk membantu individu yang berpotensi terlibat dalam radikalisme. Terkait hal ini, berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi warga imigran, termasuk mereka yang datang sebagai pengungsi. Diyakini bahwa integrasi yang sukses dapat membantu mencegah isolasi sosial dan ketidaksetaraan yang dapat berkontribusi pada radikalisisasi. Swedia juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional, khususnya dalam bentuk pertukaran informasi intelijen dan upaya bersama melawan terorisme dan radikalisisasi (Malmros, 2022).

C. Meningkatnya Isu Islamofobia

Islamofobia adalah prasangka, diskriminasi, atau tindakan bermotif kebencian terhadap Islam dan Muslim. Di Eropa, isu islamofobia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa aspek penting terkait isu ini termasuk di antaranya muncul dalam bentuk sentimen negatif dan diskriminasi,

serangan fisik dan retorika kebencian, ketidaksetaraan hukum, dan tindakan pengabaian. Muslim di Eropa sering menghadapi sentimen negatif, diskriminasi, dan perlakuan tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan publik. Islamofobia yang terjadi juga sering kali berwujud serangan fisik terhadap individu Muslim atau tempat ibadah. Selain itu, retorika kebencian di media, politik, dan lingkungan *online* juga berkontribusi memperburuk persepsi negatif terhadap Muslim. Undang-undang anti-terorisme dan kebijakan keamanan, di lain pihak, juga berdampak lebih besar pada komunitas Muslim, yaitu sering kali justru memperkuat stereotipe dan merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demikian halnya beberapa partai politik di Eropa telah memanfaatkan islamofobia dalam kampanye mereka, menciptakan ketegangan dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

Islamofobia di berbagai negara Eropa bervariasi dalam tingkat dan bentuknya masing-masing. Prancis adalah salah satu negara di Eropa yang dihadapkan pada meningkatnya islamofobia dan berdampak pada kohesi sosial di negara tersebut. Prancis telah mengalami peningkatan islamofobia, terutama setelah serangan teroris yang melibatkan pelaku yang mengaku sebagai Muslim. Serangan-serangan tersebut telah memicu respons keras dari masyarakat dan pemerintah Prancis, yang pada gilirannya telah berdampak pada persepsi terhadap komunitas Muslim di negara tersebut. Beberapa isu kontroversial terkait Islam dan Islamofobia di Prancis dapat dinyatakan meliputi larangan cadar (*niqab*) dan kerudung wajah penuh (*burka*), debat identitas nasional, kampanye politik, diskriminasi di tempat kerja dan pendidikan, serta adanya kekhawatiran keamanan (Ragazzi, 2021).

Prancis telah menerapkan larangan pakaian tertentu, seperti cadar (*niqab*) dan kerudung wajah penuh (*burka*) di tempat-tempat umum sejak tahun 2011. Kebijakan ini telah memicu debat tentang

kebebasan beragama dan hak perempuan. Kebijakan ini berawal ketika pada tahun 2010, Prancis mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian cadar (*niqab*) dan kerudung wajah penuh (*burka*) di tempat-tempat umum. Undang-undang ini mendapat dukungan luas dari sebagian masyarakat Prancis yang berpendapat bahwa cadar melambangkan penindasan terhadap perempuan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Prancis. Pelanggaran undang-undang ini dapat dihukum dengan denda atau kelas kewarganegaraan. Sebelum undang-undang larangan cadar 2010, Prancis telah mengeluarkan undang-undang pada tahun 2004 yang melarang simbol-simbol agama, termasuk cadar, di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan ini juga memicu kontroversi besar dan mendapat kritik dari beberapa pihak (Ragazzi, 2021).

Larangan cadar (*niqab*) dan kerudung wajah penuh (*burka*) di tempat-tempat umum ini memiliki beberapa tujuan yang dikemukakan oleh para pendukungnya, yaitu sebagai berikut (Valfort, 2020).

1. Keamanan: salah satu alasan yang sering dikutip adalah alasan keamanan. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa pakaian yang menutupi wajah dapat menyembunyikan identitas seseorang dan memengaruhi kemampuan aparat keamanan untuk mengidentifikasi individu dalam situasi potensial yang berbahaya.
2. Integrasi sosial: beberapa pendukung larangan ini mengklaim bahwa larangan cadar bertujuan untuk mempromosikan integrasi sosial, sekaligus menyatakan bahwa individu yang mengenakan cadar akan lebih sulit berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas.
3. Pembebasan wanita: beberapa pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa larangan cadar merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, juga mengklaim

bahwa pemaksaan cadar oleh keluarga atau masyarakat dapat menghambat kemandirian dan kebebasan perempuan.

Sebaliknya, larangan cadar juga mendapatkan kritik keras dari banyak pihak, termasuk kelompok pembela HAM, organisasi Muslim, dan para aktivis, yaitu dengan beberapa argumentasi (Ragazzi, 2014).

1. Kebebasan beragama: banyak kritikus menganggap larangan cadar sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak individual untuk mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama.
2. Diskriminasi: kritikus juga berpendapat bahwa larangan ini dapat memicu diskriminasi terhadap Muslim, terutama perempuan Muslim, dengan membatasi hak mereka untuk mengikuti praktik keagamaan mereka.
3. Stigmatisasi: larangan cadar dapat memicu stigmatisasi dan meningkatkan ketegangan dalam masyarakat, yaitu dengan menciptakan pemisahan antara kelompok agama yang berbeda.
4. Kesetaraan gender: beberapa kritikus berpendapat bahwa larangan cadar tidak selalu bertujuan untuk memerdekakan perempuan, melainkan dapat membuat perempuan yang memilih untuk mengenakan cadar menjadi terisolasi dan terbatas dalam partisipasi publik.

Larangan cadar di Prancis terus menjadi perdebatan hangat, menggambarkan kompleksitas isu-isu terkait agama, kebebasan individu, dan integrasi dalam masyarakat yang multikultural. Dampak ini meluas dan dapat mengarah ke beberapa masalah dan dinamika, di antaranya sebagai berikut (Ragazzi, 2021).

1. Pengerasan sikap dan pemisahan: serangkaian serangan teroris dapat memicu pengerasan sikap terhadap

komunitas Muslim dan berkontribusi pada pemisahan antara kelompok agama yang berbeda. Masyarakat menjadi lebih skeptis dan mencurigai Muslim secara keseluruhan.

2. Stigmatisasi dan diskriminasi: serangan teroris ikut memperburuk stigmatisasi terhadap Muslim dan mengarah pada diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
3. Identitas nasional dan integritas: serangan teroris berdampak negatif pada keberlanjutan upaya diskusi tentang identitas nasional Prancis dan mengakibatkan pertanyaan tentang apakah individu Muslim dapat sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan negara tersebut. Hal ini dapat memicu perasaan ketidaksetaraan dan ketidaksesuaian.
4. Politik dan retorika: serangkaian serangan teroris sering kali dimanfaatkan oleh beberapa partai politik untuk memperkuat agenda mereka yang anti-Islam atau anti-imigrasi. Retorika politik yang merendahkan atau mengecam komunitas Muslim dapat memperdalam polarisasi.
5. Pemisahan sosial: serangan teroris dapat menyebabkan isolasi sosial bagi Muslim dan komunitas lainnya, yang berpotensi menjadi lebih sulit untuk berinteraksi dan berkolaborasi di tengah ketegangan.

Di Prancis terdapat beberapa contoh partai politik yang telah mengadopsi platform yang menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan Islam, imigrasi, dan keberagaman, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut (Ragazzi, 2021).

1. *Rassemblement National* (RN): partai ini sebelumnya dikenal sebagai *Front National* (FN) dan secara luas dianggap sebagai partai sayap kanan jauh atau ekstrem kanan. Partai

ini telah mengadopsi platform anti-imigrasi yang keras dan telah mengadvokasi pengetatan kebijakan imigrasi serta membatasi simbol-simbol agama di tempat-tempat umum.

2. *Républicains* (LR): partai kanan tengah *Républicains* juga telah mengangkat isu-isu imigrasi dan Islam dalam kampanye politiknya. Beberapa anggota partai ini telah mendukung larangan cadar di tempat-tempat umum.
3. *Debout la France*: partai ini juga mengadopsi platform anti-imigrasi dan telah menyoroti isu-isu terkait keamanan dan integrasi dalam kampanye politiknya.
4. *Lutte Ouvrière*: meskipun bukan merupakan partai mayoritas, *Lutte Ouvrière* juga telah mengadopsi pandangan anti-imigrasi dalam beberapa kampanye politiknya.
5. Partai-partai Sayap Kanan atau Ekstrem Kanan: terdapat beberapa partai politik sayap kanan atau ekstrem kanan lainnya di Prancis yang sering kali menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan Islam, imigrasi, dan identitas nasional.

Keberadaan partai-partai politik di atas dan kebijakan pemerintah Prancis dalam menanggulangi isu islamofobia telah mendapatkan berbagai macam kritik dari dalam dan luar negeri. Meskipun pemerintah Prancis telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi islamofobia, beberapa kelompok dan individu menganggap upaya tersebut belum memadai atau bahkan memicu lebih banyak ketegangan. Larangan pakaian tertentu, seperti cadar dan *burka*, di tempat-tempat umum telah dikritik sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak individu untuk berpakaian sesuai keyakinan. Kebijakan ini juga dianggap merendahkan dan merugikan terutama perempuan Muslim.

Beberapa kritikus juga memandang terdapat diskriminasi sistemis terhadap Muslim di Prancis, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perumahan, maupun layanan publik. Para kritikus

berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi isu ini belum memadai. Demikian halnya, beberapa kelompok dan individu berpendapat bahwa retorika politik yang berfokus pada isu-isu keamanan dan anti-terorisme telah ikut memperburuk persepsi negatif terhadap Muslim secara umum dan berkontribusi pada islamofobia. Pada akhirnya, para kritikus berpendapat bahwa pemerintah Prancis terkadang gagal untuk secara memadai melibatkan dan mendengarkan suara-suara dari komunitas Muslim (kurangnya dialog) dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Sementara pemerintah Prancis, di sisi lain, berpendapat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi islamofobia, mempromosikan integrasi sosial, dan melindungi nilai-nilai sekuler negara.

BAB 5

PERANG DAN KONFLIK MELIBATKAN MUSLIM DI EROPA KONTEMPORER



Di sepanjang sejarah, terdapat beberapa perang dan konflik di Eropa kontemporer yang melibatkan pihak-pihak Muslim. Perang dan konflik ini mencerminkan sejarah yang kompleks sekaligus berdampak pada hubungan etnik dan agama di wilayah tersebut. Perang dan konflik semacam ini telah menciptakan tantangan bagi integrasi sosial dan telah memainkan peran dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap komunitas Muslim di Eropa. Beberapa perang dan konflik yang melibatkan Muslim di Eropa kontemporer di antaranya perang Bosnia (1992-1995), konflik di Kosovo (1998-1999), dan konflik di Chechnya.

A. Perang Bosnia (1992-1995) dan Dampaknya bagi Eropa

Perang Bosnia adalah konflik bersenjata yang terjadi dari tahun 1992 hingga 1995 di wilayah Bosnia dan Herzegovina, negara yang pada saat itu merupakan bagian dari Yugoslavia yang sedang mengalami perpecahan. Konflik ini melibatkan tiga kelompok etnis utama, yaitu Muslim Bosnia (Bosniaks), Serbia, dan Kroasia. Sebelum terjadinya Perang Bosnia, Bosnia dan Herzegovina adalah bagian dari Republik Federasi Sosialis Yugoslavia, sebuah negara sosialis yang mencakup beberapa negara bagian di wilayah Balkan. Pada masa Yugoslavia, Bosnia dan Herzegovina merupakan wilayah multi etnis dengan mayoritas penduduknya adalah Bosniaks, serta minoritas Serbia, Kroasia, dan kelompok etnis lainnya. Yugoslavia di bawah pemerintahan Josip Broz Tito berhasil menciptakan hubungan yang relatif stabil antara berbagai kelompok etnis di negaranya, termasuk di Bosnia dan Herzegovina. Namun, setelah kematian Tito pada tahun 1980, Yugoslavia mengalami krisis politik dan ekonomi yang berujung pada perpecahan (Barslund et al., 2017).

Pada awal tahun 1990-an, ketegangan antara kelompok-kelompok etnis di Bosnia dan Herzegovina semakin meningkat. Dalam suasana nasionalisme yang tumbuh di berbagai negara

bagian Yugoslavia, para pemimpin politik etnis di Bosnia dan Herzegovina juga memperkuat retorika nasionalistik dan mencari kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Pada tahun 1992, setelah kemerdekaan Slovenia dan Kroasia, Bosnia dan Herzegovina juga menyatakan kemerdekaannya. Namun, pihak Serbia tidak setuju dengan kemerdekaan tersebut dan ingin menciptakan negara yang dihuni oleh etnis Serbia, sehingga memicu perang di wilayah ini. Padahal sebelum terjadinya perang, Bosniaks merupakan salah satu kelompok etnis yang hidup berdampingan dengan kelompok etnis lainnya di Bosnia dan Herzegovina. Meskipun terdapat perbedaan budaya dan agama di antara kelompok-kelompok etnis tersebut, mereka tinggal dalam satu wilayah yang sama dan hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Namun, konflik politik dan nasionalisme yang tumbuh di antara kelompok-kelompok etnis menyulut perang dan membawa tragedi besar bagi masyarakat Bosnia dan Herzegovina, termasuk Bosniaks, yang menjadi salah satu kelompok etnis yang paling terdampak selama Perang Bosnia (Silber, 1996).

Selama terjadinya perang, tentara Serbia Bosnia yang didukung oleh Serbia dan milisi Kroasia berusaha menguasai wilayah-wilayah Bosnia untuk mencapai tujuan nasionalistik masing-masing. Selama perang, juga terjadi berbagai kekerasan massal, termasuk genosida dan kejahatan perang. Di lain sisi, Bosniaks berjuang untuk mempertahankan integritas wilayah Bosnia dan mendukung kemerdekaannya. Selain itu, Bosniaks juga menjadi sasaran serangan oleh tentara Serbia Bosnia (*Bosnian Serb Army*) yang didukung oleh Serbia dan milisi Kroasia. Bosniaks sendiri menjadi target sasaran dalam Perang Bosnia karena beberapa faktor yang kompleks, termasuk dinamika etnis dan politik yang rumit di wilayah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan Bosniaks menjadi korban adalah sebagai berikut (Barslund et al., 2017).

1. Nasionalisme etnis: Perang Bosnia terjadi di tengah meningkatnya nasionalisme etnis di wilayah Balkan. Beberapa kelompok etnis di Bosnia dan Herzegovina, termasuk Serbia dan Kroasia, memiliki ambisi nasionalistik untuk menciptakan negara masing-masing yang dihuni oleh kelompok etnis mereka. Sebagai kelompok etnis mayoritas di Bosnia, Bosniaks menjadi target sasaran karena kelompok etnis lain berusaha mengendalikan atau menguasai wilayah yang mereka huni.
2. Mencapai tujuan politik: konflik di Bosnia dan Herzegovina dipicu oleh upaya kelompok etnis untuk mencapai tujuan politik mereka. Selama perang, milisi Serbia Bosnia dan milisi Kroasia berusaha untuk merebut wilayah yang didominasi oleh Bosniaks untuk mencapai tujuan politik mereka terkait dengan perpecahan Yugoslavia.
3. Etnisitas dan identitas: selama perang, etnisitas menjadi fokus utama dalam membedakan kelompok-kelompok di Bosnia dan Herzegovina. Bosniaks yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok etnis dengan identitas Islam menjadi target sasaran karena perbedaan etnis mereka dengan kelompok-kelompok etnis Serbia dan Kroasia.
4. Ideologi nasionalistik: terdapat elemen nasionalistik dalam konflik tersebut, di mana keyakinan ideologi nasionalistik dan supremasi etnis mendominasi pandangan kelompok-kelompok ekstremis. Pandangan-pandangan ini berkontribusi pada sikap permusuhan dan kekerasan terhadap Bosniaks.
5. Keinginan untuk mendominasi: beberapa kelompok milisi dan tentara memiliki keinginan untuk mendominasi dan mengendalikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bosniaks. Strategi ini mendorong mereka untuk melakukan serangan dan pembantaian terhadap Bosniaks dalam

upaya mereka untuk mencapai tujuan dominasi etnis di wilayah tersebut.

Kekerasan terhadap Bosniaks kemudian terjadi, yaitu mencakup pembantaian, pengepungan kota, pemerkosaan massal, dan pengusiran etnis yang menjadi peristiwa tragis selama perang. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995. Peristiwa ini terjadi di kota Srebrenica yang merupakan “*enklave*” yang dijaga oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah timur Bosnia dan Herzegovina yang didominasi oleh Bosniaks (Silber, 1996).

Pada saat itu, pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladić melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Srebrenica yang saat itu dihuni oleh ribuan warga sipil Muslim Bosnia yang mencari perlindungan di kota tersebut. Serangan ini bertujuan untuk merebut Srebrenica yang telah ditetapkan sebagai “Area Aman” oleh PBB. Meskipun pasukan PBB dari Belanda (*United Nations Protection Force/UNPROFOR*) berada di kota pada saat itu, mereka tidak mampu menghentikan pasukan Serbia Bosnia dan Srebrenica jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia pada tanggal 11 Juli 1995. Setelah kota jatuh, terjadi aksi genosida yang mengerikan yang menyebabkan pembunuhan massal terhadap ribuan Muslim Bosnia, terutama pria dan anak laki-laki (Silber, 1996).



Banyak keluarga Muslim kehilangan kerabatnya selama Perang Bosnia.

Sumber: The Bosnian war of 1992-1995. <https://www.itv.com/news/2016-03-24/a-guide-to-the-bosnian-war-of-1992-1995>

Lebih dari 8.000 Muslim Bosnia dianggap hilang setelah pembantaian, dan sejak itu, mayat-mayat korban terus ditemukan di berbagai tempat pemakaman massal di seluruh Bosnia. Pembantaian di Srebrenica diakui oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia sebagai genosida, yaitu tindakan pembunuhan dan penghapusan kelompok etnis dengan maksud untuk menghancurkan sepenuhnya atau sebagian kelompok tersebut. Peristiwa ini menyisakan luka mendalam dan trauma bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat Bosnia dan Herzegovina. Pembantaian di Srebrenica dianggap sebagai salah satu kejahatan terburuk di Eropa pasca-Perang Dunia II dan menegaskan perlunya keadilan dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan genosida yang terjadi selama Perang Bosnia.

Perang Bosnia berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Dayton (*Dayton Agreement*) pada Desember 1995, yang mengakhiri pertempuran dan menghasilkan pembagian Bosnia dan

Herzegovina menjadi dua entitas, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina (dominan oleh Bosniaks dan Kroasia) dan Republika Srpska (dominan oleh Serbia). Perjanjian Dayton juga menetapkan Bosnia sebagai negara federal dengan pemerintahan yang berbagi kekuasaan antara tiga kelompok etnis utama. Pembagian politik dan etnis ini telah memengaruhi dinamika politik dan ekonomi negara tersebut, serta menciptakan tantangan dalam mencapai rekonsiliasi dan integrasi sosial. Secara umum, Perang Bosnia menyisakan luka yang mendalam dan trauma bagi masyarakat Bosnia dan Herzegovina, serta menjadi salah satu konflik paling berdarah di Eropa pasca-Perang Dunia II (Burg & Shoup, 1999). Konflik ini telah menarik perhatian dunia internasional dan berdampak pada kebijakan luar negeri banyak negara untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan perdamaian di wilayah Balkan.

Setelah Perang Bosnia, Bosniaks kemudian menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa setelah berakhirnya konflik, Bosnia dan Herzegovina menghadapi tugas besar dalam merekonstruksi infrastruktur dan membangun kembali wilayah yang rusak akibat perang. Proses pembangunan melibatkan dukungan internasional dan upaya dari masyarakat Bosnia termasuk Bosniaks, untuk menciptakan kembali lingkungan yang berfungsi dan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah mengalami trauma dan kekerasan selama perang, banyak korban dan keluarga Bosniaks yang juga mengalami dampak psikologis mendalam (Bieber, 2006).

Perang Bosnia juga memiliki dampak yang luas bagi Eropa dan membawa konsekuensi jangka panjang bagi kawasan ini. Salah satu dampak utama dari Perang Bosnia menyebabkan meningkatnya sorotan terhadap kelemahan UE dalam menghadapi krisis

keamanan dan kemanusiaan di dekat wilayahnya. Kelemahan ini kemudian mendorong UE untuk lebih aktif dalam mengembangkan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama agar lebih efektif dalam menangani konflik dan krisis di kawasan tetangga. Perang Bosnia juga menjadi salah satu pemicu bagi banyak negara Eropa untuk memperkuat kebijakan keamanan dan kemanusiaan mereka. Konflik ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya intervensi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil dalam situasi konflik (Bieber, 2006).

Secara militer, Perang Bosnia menjadi pengalaman yang memengaruhi peran dan eksistensi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai aliansi pertahanan dan keamanan di Eropa, sekaligus meningkatkan tantangan multi etnis dan pluralisme di kawasan Eropa. Dampak perang Bosnia juga dinyatakan melampaui batas geografis wilayah tersebut dan memberikan pelajaran penting bagi Eropa dalam menghadapi tantangan keamanan dan kemanusiaan di masa depan. Konflik ini meningkatkan kesadaran tentang perlunya kerja sama internasional dalam mengatasi konflik serta mendorong penciptaan lingkungan yang lebih stabil dan damai di kawasan Eropa.

B. Konflik di Kosovo (1998-1999) dan Dampaknya bagi Eropa

Konflik di Kosovo adalah salah satu konflik etnis yang signifikan di wilayah Balkan, khususnya di Kosovo, yang melibatkan masyarakat Muslim. Kosovo sendiri merupakan wilayah otonom di Serbia dengan mayoritas penduduk Muslim Albania. Sejak awal abad ke-20, masyarakat Albania di Kosovo telah menyuarakan aspirasi untuk otonomi atau kemerdekaan dari Serbia, terutama setelah runtuhnya Yugoslavia pada awal tahun 1990-an. Konflik di Kosovo kemudian mencapai titik puncaknya pada akhir 1990-an. Pada tahun 1998, gerakan pemberontak etnis Albania yang dikenal sebagai *Ushtria Çlirimtare e Kosovës* (UCK) atau Tentara

Pembebasan Kosovo, mulai melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Serbia. Kelompok ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Kosovo dari Serbia (Goff, 1999).

Pemerintah Serbia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Slobodan Milošević, menanggapi pemberontakan dengan keras. Pasukan keamanan Serbia, termasuk tentara dan polisi, melancarkan kampanye militer yang brutal di Kosovo. Puluhan ribu orang, kebanyakan warga sipil Muslim Albania, menjadi korban kekerasan dan diusir dari rumah mereka. Penggunaan kekerasan yang meluas oleh pasukan keamanan Serbia di Kosovo menarik perhatian internasional. Pada tahun 1999, NATO meluncurkan kampanye militer yang dikenal sebagai Operasi *Allied Force* untuk menghentikan kekerasan dan memaksa Serbia untuk menarik pasukannya dari Kosovo. Selama kampanye ini, NATO melancarkan serangan udara terhadap target militer di Serbia (Cordial & Rosandhaug, 2008).

Konflik berakhir dengan penarikan pasukan Serbia dari Kosovo dan pengawasan internasional atas wilayah tersebut. Pada tahun 1999, Resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB menetapkan keberadaan Misi PBB di Kosovo (*United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*/UNMIK) untuk mengawasi dan membantu proses pemulihan dan rekonsiliasi. Pada tahun 2008, pemerintah Kosovo yang didominasi oleh etnis Albania kemudian menyatakan kemerdekaan dari Serbia. Namun, status Kosovo masih menjadi sumber ketegangan dan perselisihan internasional. Hal ini terutama disebabkan beberapa negara, termasuk Serbia, menolak mengakui kemerdekaan tersebut (Cordial & Rosandhaug, 2008).

Konflik di Kosovo sendiri memiliki akar sejarah yang kompleks dan beragam faktor yang menyebabkannya. Beberapa penyebab utama konflik di Kosovo adalah sebagai berikut (Todorovski et al., 2016).

1. Isu identitas dan nasionalisme: Kosovo adalah wilayah yang kaya akan sejarah dan identitas etnis yang kompleks. Penduduknya terdiri dari mayoritas etnis Albania Muslim dan minoritas etnis Serbia yang mayoritas beragama Ortodoks. Isu identitas etnis dan nasionalisme memainkan peran sentral dalam konflik, karena masing-masing kelompok mengklaim hak atas wilayah ini dan berusaha untuk melindungi dan memperjuangkan identitas budaya dan agama mereka.
2. Penindasan etnis: sejarah Kosovo dipenuhi dengan penindasan etnis dan konflik antara penduduk etnis Albania dan Serbia. Pada masa lalu, penduduk etnis Albania di Kosovo telah mengalami diskriminasi dan penindasan dari penguasa Serbia, terutama selama periode di bawah penguasaan Yugoslavia dan Milosevic.
3. Perjuangan untuk kemerdekaan: pada tahun 1989, Presiden Serbia saat itu, Slobodan Milosevic, mencabut otonomi Kosovo dan memberlakukan kebijakan represif terhadap penduduk etnis Albania. Tindakan ini memicu perjuangan penduduk etnis Albania untuk mencari kemerdekaan dan otonomi penuh bagi Kosovo, sementara Serbia menegaskan klaimnya atas wilayah tersebut.
4. Pecahnya Yugoslavia: pecahnya Yugoslavia pada awal tahun 1990-an memicu konflik etnis yang kompleks di seluruh wilayah, termasuk di Kosovo. Konflik ini mencakup berbagai konflik bersenjata dan kekerasan antara kelompok etnis Albania dan Serbia.
5. Intervensi asing: faktor eksternal seperti intervensi militer asing juga berperan dalam konflik Kosovo. Intervensi NATO pada tahun 1999 untuk menghentikan kekerasan dan mencegah krisis kemanusiaan lebih lanjut menyebabkan

berakhirnya konflik, tetapi juga meninggalkan isu-isu sensitif tentang kedaulatan dan status wilayah tersebut.

6. Isu keagamaan: meskipun isu keagamaan tidak menjadi penyebab utama konflik, tetapi adanya fakta perbedaan agama antara mayoritas Muslim Albania dan mayoritas Ortodoks Serbia, ikut memengaruhi dinamika dan persepsi dalam konflik ini.

Konflik di Kosovo telah meninggalkan bekas yang mendalam bagi masyarakat Muslim Albania di wilayah tersebut. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka selama konflik, dan peristiwa tersebut telah menyisakan luka yang rumit di masyarakat Kosovo. Secara umum, dampak utama yang dialami Muslim Kosovo selama konflik di antaranya terjadinya kekerasan dan tragedi kemanusiaan. Konflik tersebut menyebabkan kekerasan yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda, termasuk pasukan keamanan Serbia dan kelompok separatis Albania Kosovo. Kekerasan ini menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil, serta kehancuran infrastruktur dan pemukiman. Ribuan orang Kosovo, termasuk Muslim, juga terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya dan kekerasan selama konflik. Banyak warga Muslim terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahiran mereka, mencari perlindungan di wilayah yang lebih aman atau di negara-negara tetangga (Cordial & Rosandhaug, 2008).

Selama konflik, terjadi pula kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang mengerikan terhadap perempuan Muslim Kosovo oleh pasukan Serbia. Hal ini menyebabkan trauma psikologis dan fisik yang serius pada para korban. Sebelum dan sesudah konflik, juga terdapat laporan tentang diskriminasi terhadap minoritas etnis dan agama di Kosovo, termasuk Muslim. Peristiwa ini mencakup pembatasan hak-hak politik, pendidikan, dan sosial bagi Muslim Kosovo. Pada akhirnya, meskipun konflik berakhir

dengan intervensi NATO pada tahun 1999, dampaknya terus dirasakan di masa pascakonflik. Proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi pengungsi dan korban kekerasan menjadi tugas yang rumit. Pada tahun-tahun berikutnya, otoritas Kosovo berusaha untuk memastikan bahwa semua warga dapat hidup berdampingan secara damai dan membangun negara yang stabil dan berkembang (Todorovski et al., 2016).

Sementara bagi Eropa, konflik di Kosovo memiliki dampak yang signifikan, baik selama periode konflik itu sendiri maupun dalam jangka panjang setelahnya. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi di antaranya adalah terjadinya krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi massal yang melarikan diri dari kekerasan dan pengusiran. Lebih dari satu juta orang Kosovo diperkirakan mengungsi ke negara-negara tetangga selama konflik, yang menimbulkan tekanan besar pada negara-negara tersebut dan organisasi bantuan internasional. Konflik di Kosovo juga menjadi krisis keamanan terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II, di mana untuk menghentikan kekerasan dan mencegah krisis kemanusiaan yang lebih buruk, NATO melakukan intervensi militer di Kosovo pada tahun 1999. Intervensi ini melibatkan banyak negara anggota NATO dan menandai intervensi militer pertama NATO di luar wilayah anggota aliansi. Perubahan batas dan stabilitas wilayah juga terjadi di Eropa. Setelah konflik berakhir, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008, tetapi status kemerdekaan Kosovo masih dipersengketakan oleh Serbia dan beberapa negara lain di Eropa. Situasi ini telah menciptakan ketidakstabilan regional dan berpotensi memicu ketegangan antarnegara di Eropa (Todorovski et al., 2016).

Konflik Kosovo juga menjadi babak baru bagi Eropa terkait tantangan keamanan dan radikalisasi. Pascakonflik, beberapa warga Kosovo telah bergabung dengan kelompok-kelompok militan di

luar negeri, termasuk kelompok teroris. Hal ini menyebabkan munculnya masalah keamanan bagi Eropa, karena terdapat risiko kembalinya militan dengan peran Kosovo sebagai jalur transit bagi calon pejuang asing yang ingin berangkat ke wilayah konflik di Timur Tengah. Sementara terkait proses integrasi Eropa, konflik di Kosovo telah memengaruhi upaya integrasi Eropa. Banyak negara anggota UE telah mengakui kemerdekaan Kosovo, tetapi beberapa negara, termasuk Spanyol dan beberapa negara anggota lainnya, tidak mengakui kemerdekaan tersebut karena khawatir dampaknya terhadap isu-isu separatisme di wilayah mereka sendiri. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya stabilitas dan perdamaian di wilayah Eropa Tenggara sebagai prasyarat bagi integrasi lebih lanjut di Eropa. Dalam jangka panjang, konflik di Kosovo telah menjadi pelajaran bagi komunitas internasional tentang pentingnya penanganan konflik secara efektif, perlindungan HAM, dan upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan di wilayah Eropa dan seluruh dunia.

C. Konflik di Chechnya dan Dampaknya bagi Eropa

Chechnya adalah sebuah republik otonom di wilayah Kaukasus Utara di Rusia. Penduduk mayoritas di Chechnya adalah Muslim Sunni, dan agama Islam memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan identitas masyarakat di wilayah ini. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Muslim di Chechnya, di mana setiap desa dan kota biasanya memiliki masjid sebagai tempat untuk beribadah, mengajar dan belajar agama, serta berkumpul bersama untuk acara-acara keagamaan dan kebudayaan (Evangelista, 2003).

Beberapa daerah di Chechnya menerapkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariat dalam sistem hukum dan sosial mereka. Hukum syariat ini diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti hukum keluarga, peradilan pidana, dan regulasi kehidupan

sehari-hari. Masyarakat Chechnya juga mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan lokal mereka yang dipengaruhi oleh agama Islam. Nilai-nilai agama dan adat istiadat sering terjalin dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa penting dalam kehidupan seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Sementara, pendidikan agama memiliki peran penting di Chechnya, banyak madrasah (sekolah agama Islam) di wilayah ini yang mengajarkan ajaran-ajaran agama, bahasa Arab, dan pengetahuan Islam lainnya (Evangelista, 2003).

Sejak awal abad ke-19, Chechnya telah mengalami berbagai konflik dengan pemerintahan Rusia, yang melibatkan upaya kemerdekaan dan otonomi. Konflik di Chechnya tersebut memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Berbagai faktor telah berkontribusi terhadap timbulnya konflik yang dapat diuraikan sebagai berikut (Tsatsos, 2014).

1. Sejarah otonomi dan kemerdekaan: Chechnya telah lama memiliki sejarah otonomi dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selama periode antara Perang Dunia I dan II, dan setelah pembubaran Uni Soviet pada 1991, Chechnya menyatakan kemerdekaannya, tetapi pemerintah Rusia menolak mengakui kemerdekaan tersebut, yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik.
2. Etnisitas dan nasionalisme: masyarakat Chechnya memiliki identitas etnis dan nasionalisme yang kuat, yang menjadi faktor pendorong konflik dengan pemerintah Rusia yang mencoba mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Ketegangan antara keinginan Chechnya untuk otonomi atau kemerdekaan dan upaya Rusia untuk mempertahankan integritas teritorialnya menjadi pemicu konflik.

3. Faktor agama: mayoritas penduduk Chechnya adalah Muslim Sunni, dan agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Selama konflik, elemen ekstremis dari gerakan keagamaan Islam juga muncul dan berkontribusi pada eskalasi konflik.
4. Konflik identitas dan budaya: identitas budaya dan bahasa Chechnya yang berbeda dari mayoritas etnis Rusia juga menjadi faktor konflik. Perbedaan budaya dan bahasa sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.
5. Konflik ekonomi dan sosial: faktor ekonomi dan sosial juga berperan dalam konflik di Chechnya. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, pengangguran, dan ketidakadilan sosial menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan yang ikut menyulut konflik.
6. Interaksi dengan pemerintah Rusia: interaksi yang sulit dan kurangnya saling percaya antara pemerintah Rusia dan pemimpin Chechnya juga berkontribusi pada konflik. Kebijakan pemerintah Rusia dalam menangani isu-isu Chechnya, termasuk campur tangan militer dan politik, telah menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan perlawanan di kalangan masyarakat Chechnya.

Konflik paling signifikan yang terjadi antara Rusia dan Chechnya ditandai dengan terjadinya Perang Chechnya pertama pada tahun 1994 hingga 1996, dan Perang Chechnya kedua pada tahun 1999 hingga 2009. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan penderitaan masyarakat di wilayah tersebut.

Perang Chechnya pertama, terjadi pada tahun 1994, yaitu ketika Chechnya menyatakan kemerdekaannya dari Rusia, tetapi pemerintah Rusia menolak mengakui kemerdekaan tersebut.

Perang Chechnya pertama ini berlangsung selama dua tahun dan berakhir dengan penarikan pasukan Rusia serta pembentukan wilayah otonom Chechnya. Perang Chechnya kedua, terjadi pada tahun 1999, ditandai dengan terjadinya serangkaian ledakan di beberapa kota di Rusia. Rusia kemudian menyatakan militan Chechnya sebagai pelaku dan mengirimkan pasukan militer besar-besaran ke wilayah tersebut. Perang Chechnya kedua ini berlangsung selama hampir satu dekade dan berakibat pada banyaknya korban jiwa dan terjadinya kerusakan besar-besaran. Selama dan setelah konflik, terdapat laporan terkait pelanggaran HAM yang berat di Chechnya, termasuk penembakan ekstra yudisial, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Sebagian besar korban pelanggaran ini adalah warga sipil, termasuk Muslim Chechnya (Tsatsos, 2014).

Perang Chechnya memberikan dampak penting bagi Eropa. Meskipun perang ini terjadi di wilayah Kaukasus Utara di Rusia, tetapi dampaknya tidak terbatas pada wilayah tersebut dan telah melibatkan sejumlah isu yang relevan bagi Eropa secara keseluruhan. Dampak tersebut di antaranya terkait isu migrasi dan pengungsi. Dalam konteks ini, Perang Chechnya telah menyebabkan krisis pengungsi di wilayah Kaukasus Utara dan sekitarnya. Pengungsi dari Chechnya ini mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk negara-negara Eropa seperti Ingushetia dan Georgia. Krisis pengungsi ini juga memengaruhi negara-negara Eropa lainnya karena meningkatkan jumlah pengungsi yang mencari perlindungan di wilayah Eropa. Perang Chechnya juga berpengaruh terhadap hubungan antara Rusia dan negara-negara Eropa. Beberapa negara Eropa mengecam kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik, sementara hubungan lain menjadi tegang karena perbedaan pandangan mengenai penanganan konflik tersebut. Laporan tentang pelanggaran HAM selama konflik, menunjukkan terjadinya

tindakan brutal oleh pihak militer Rusia dan milisi Chechnya, di mana hal ini telah menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat internasional.

BAGIAN III

PERANG DAN DAMAI DI EROPA KONTEMPORER

Sejarah Eropa mencerminkan periode perdamaian dan perang yang berfluktuasi sepanjang ribuan tahun. Eropa telah menjadi saksi sejumlah konflik, seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta Perang Dingin yang membagi benua ini selama puluhan tahun. Namun, Eropa juga telah memasuki era perdamaian yang signifikan dan upaya kolaborasi yang bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Setiap peristiwa sejarah Eropa terkait peperangan dan berbagai upaya perdamaian yang dilakukan merupakan cerminan dua sisi Eropa, yaitu sebagai tanah perang dan damai. Berbagai peristiwa tersebut juga mencakup periode waktu yang panjang, dan perubahan dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial Eropa, yang kemudian ikut membentuk narasi yang kompleks mengenai perang dan perdamaian. Dalam perjalanannya pula, Eropa telah berusaha secara aktif untuk belajar dari sejarah konfliknya dan menerapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah konflik di masa depan. Meskipun tantangan masih ada, upaya-upaya perdamaian dan kolaborasi terus menjadi fokus utama bagi Eropa dalam usahanya menciptakan masa depan yang lebih stabil dan damai.

BAB 1

GARIS SEJARAH PERANG DI MASA LALU DAN DAMPAKNYA BAGI EROPA



Perang telah memainkan peran penting dalam sejarah Eropa selama berabad-abad, di mana terjadinya perang tersebut telah berdampak besar pada perkembangan politik, sosial, dan budaya benua tersebut. Dampak-dampak dari perang-perang ini terhadap Eropa termasuk perubahan dalam perbatasan, kebijakan luar negeri, perubahan politik, sosial, dan ekonomi, serta perubahan dalam identitas nasional dan etnis. Berbagai peperangan yang terjadi di Eropa juga telah membawa perubahan yang mendalam dalam cara Eropa melihat dirinya sendiri dan dunia. Dalam hal ini, terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin memang telah menjadi bagian integral dari sejarah perkembangan Eropa. Namun, di masa berikutnya, upaya besar telah dilakukan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Eropa, terutama melalui pembentukan UE dan upaya diplomasi internasional.

A. Perang Dunia I dan Kemunculan Negara-Negara Baru di Eropa

Perang Dunia I (1914-1918) mengguncang tatanan politik di Eropa secara signifikan. Perang ini menyebabkan kemunculan negara-negara baru, mengubah perbatasan, dan menciptakan ketidakstabilan yang akan berdampak pada perkembangan selanjutnya dalam sejarah Eropa dan dunia. Perang Dunia I dimulai sebagai konflik regional di Eropa, tetapi dengan cepat berkembang menjadi konflik dunia yang melibatkan kekuatan besar di seluruh dunia. Perang ini menyebabkan kerugian besar, baik dalam jumlah korban jiwa maupun kerusakan ekonomi.

Jalannya Perang Dunia I, Versailles, dan Perjanjian Perdamaian

Perang Dunia I, juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah konflik global yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 dan memiliki dampak besar pada Eropa dan seluruh dunia. Perang

Dunia I dimulai dengan pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, di Sarajevo oleh seorang pemberontak Serbia pada tanggal 28 Juni 1914. Insiden ini memicu reaksi berantai dan meningkatnya ketegangan antara negara-negara Eropa. Austria-Hungaria kemudian memberikan ultimatum keras kepada Serbia, yang memicu perang antara kedua negara pada bulan Juli 1914. Karena sistem aliansi yang rumit di Eropa, konflik ini dengan cepat melibatkan negara-negara lain, termasuk Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris (Martel, 2006).

Perang Dunia I melibatkan beberapa blok negara yang bertempur satu sama lain, di mana terdapat dua koalisi utama yang terlibat dalam konflik ini, yaitu sebagai berikut (Howard, 2007).

1. Sekutu (*Entente Cordiale*): terdiri atas negara Prancis, Rusia, Inggris, dan Italia. Prancis merupakan salah satu anggota utama Sekutu dengan musuh utamanya selama perang adalah Kekaisaran Jerman. Rusia juga merupakan anggota Sekutu, meskipun mundur dari perang pada tahun 1917 setelah Revolusi Rusia. Inggris adalah anggota lain dari Sekutu dan berperang melawan Jerman di Front Barat. Sementara Italia awalnya adalah bagian dari Blok Sentral, tetapi pada tahun 1915, Italia bergabung dengan Sekutu.
2. Blok Sentral (*Central Powers*): terdiri atas negara Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria. Jerman adalah kekuatan utama dalam Blok Sentral dan terlibat dalam berbagai front, termasuk Front Barat dan Front Timur. Austria-Hungaria adalah sekutu Jerman yang juga terlibat dalam pertempuran di banyak front. Kekaisaran Ottoman (Turki) adalah bagian dari Blok Sentral dan terlibat dalam pertempuran di Timur Tengah, Balkan, dan Front Timur. Sementara Bulgaria adalah

negara terakhir yang bergabung dalam Blok Sentral pada tahun 1915, yang berperan meningkatkan kekuatan Blok Sentral di Front Balkan.

Selain blok-blok utama ini, beberapa negara lain juga terlibat dalam perang, baik sebagai anggota blok atau sebagai negara netral yang kemudian terlibat dalam konflik. Perang Dunia I sendiri memiliki dua front utama di Eropa, yaitu Front Barat dan Front Timur. Front Barat adalah pertempuran di sepanjang perbatasan Prancis dan Belgia dengan Jerman, sementara Front Timur adalah pertempuran di wilayah-wilayah timur Jerman dan Austria-Hungaria melawan Rusia. Jalannya Perang Dunia I juga ditandai oleh banyak pertempuran besar yang merenggut banyak korban jiwa, misalnya Pertempuran Marne (1914), Pertempuran Verdun (1916), Pertempuran Somme (1916), dan Pertempuran Passchendaele (1917) di Front Barat. Di Front Timur, Pertempuran Tannenberg (1914) dan Pertempuran Lemberg (1914) adalah beberapa contoh pertempuran besar (Howard, 2007).

Karakteristik lainnya dari Perang Dunia I adalah digunakannya perkembangan taktik baru dalam perang, termasuk perang gerilya, perang kimia, dan penggunaan senjata berat seperti artileri dan senjata mesin. Pertempuran di Front Barat bahkan sering kali berubah menjadi pertempuran terkubur di mana kedua belah pihak berlindung di parit dan saling menyerang dengan sedikit perubahan dalam garis depan. Pada tahun 1917, AS yang awalnya netral dalam perang, akhirnya ikut terlibat perang setelah serangkaian faktor pemicu termasuk serangan kapal selam Jerman yang menewaskan warga sipil AS. AS kemudian bergabung dalam Perang Dunia I sebagai bagian dari Sekutu. Di lain pihak, Revolusi Rusia pada tahun 1917 menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Rusia dan pengunduran diri Rusia dari perang. Perjanjian Brest-Litovsk pada tahun 1918 mengakhiri perang antara Jerman dan Rusia (Martel, 2006).

Perang Dunia I kemudian berakhir secara resmi pada 11 November 1918, yaitu ketika Perjanjian Senjata Api (*Armistice*) ditandatangani antara Sekutu dan Jerman, yang menghentikan pertempuran di Front Barat. Peristiwa ini menjadi langkah awal menuju perdamaian yang sebenarnya, yang kemudian dicapai melalui berbagai perjanjian damai, termasuk Perjanjian Versailles, yang merupakan salah satu perjanjian perdamaian utama yang mengakhiri perang. Sebelumnya, dengan berakhirnya pertempuran, negosiator dari banyak negara bersekutu berkumpul di Paris untuk merancang perjanjian perdamaian dengan negara-negara sentral yang kalah, terutama Jerman. Konferensi Perdamaian Paris dimulai pada Januari 1919 (Howard, 2007).

Berikutnya, ditandatangani Perjanjian Versailles antara Sekutu dan Jerman pada tanggal 28 Juni 1919. Perjanjian ini menetapkan syarat-syarat perdamaian dengan Jerman dan negara-negara sentral lainnya. Beberapa poin penting dari Perjanjian Versailles adalah sebagai berikut (Howard, 2007).

1. Tanggung jawab Jerman: Jerman dianggap bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia I. Pada bagian terbawah Pasal 231, Jerman diwajibkan mengakui tanggung jawab moral dan materiel atas perang.
2. Wilayah yang dikurangkan: Jerman harus melepaskan beberapa wilayah kepada negara-negara tetangga, termasuk Alsace-Lorraine yang dikembalikan kepada Prancis. Jerman juga harus menyerahkan wilayah Eupen-Malmedy kepada Belgia, serta sebagian dari wilayah Schleswig kepada Denmark.
3. Demiliterisasi: Batasan jumlah pasukan militer Jerman diterapkan untuk mengurangi potensi kekuatan militer Jerman. Jerman juga dilarang memiliki angkatan bersenjata udara, tank, dan kapal selam.

4. Pembatasan industri: Jerman diperintahkan untuk mengurangi produksi senjata dan peralatan militer. Sementara, Sekutu diberikan hak untuk mengawasi industri Jerman guna memastikan ketaatan terhadap perjanjian.
5. Ganti rugi: Jerman diwajibkan membayar ganti rugi besar kepada negara-negara Sekutu. Besarnya ganti rugi ditentukan dalam Perjanjian Versailles, dan jumlahnya sangat besar, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi besar di Jerman.
6. Larangan Anschluss: Jerman dilarang menggabungkan diri dengan Austria (Anschluss). Ini adalah salah satu poin yang menjadi kontroversi dan pada akhirnya diabaikan oleh Nazi Jerman pada tahun 1938.
7. Liga Bangsa-Bangsa/LBB (*League of Nations*): Perjanjian Versailles menciptakan LBB, sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah konflik di masa depan. AS yang awalnya mendukung LBB, tetapi pada kenyataannya tidak pernah bergabung.
8. Klausul kawasan demiliterisasi: Sejumlah wilayah di Jerman, terutama wilayah sekitar Rhein, dinyatakan sebagai zona demiliterisasi.
9. Pengakuan kemerdekaan negara-negara baru: Perjanjian Versailles mengakui kemerdekaan beberapa negara baru yang muncul akibat runtuhnya Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman, seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia.
10. Klaim terhadap Kaisar: Perjanjian ini mencakup pengusiran Kaisar Jerman Wilhelm II dari takhta dan penuntutan pidana terhadapnya atas kejahatan perang. Wilhelm II kemudian melarikan diri ke Belanda dan menghindari penuntutan.

Perjanjian Versailles tidak hanya mengakhiri Perang Dunia I, tetapi juga membentuk tatanan dunia baru yang sangat berbeda. Salah satunya ditandai dengan terjadinya perubahan batas negara. Perdamaian ini, meskipun tidak sempurna, diharapkan akan membawa stabilitas dan perdamaian di Eropa, meskipun kenyataannya menjadi faktor penting dalam peristiwa-peristiwa sejarah selanjutnya. Sementara bagi Jerman, Perjanjian Versailles sangat kontroversial dan dianggap sebagai “Perjanjian Diktat” karena mengesahkan tanggung jawab penuh perang kepada Jerman dan memberlakukan sanksi yang keras. Banyak orang di Jerman merasa bahwa perjanjian tersebut sangat merendahkan dan menghukum Jerman secara tidak adil. Perasaan ini akan membuka jalan bagi ketegangan politik dan ekonomi di Jerman yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada munculnya Perang Dunia II (Delanty, 2019).

Berakhirnya Perang Dunia I dan Kemunculan Negara-Negara Baru di Eropa

Perang Dunia I menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa yang tinggi, dan beban ekonomi yang berat di seluruh Eropa. Hal ini juga memicu perubahan sosial dan politik yang mendalam, termasuk peningkatan tuntutan kemerdekaan nasional dan demokratisasi. Secara keseluruhan, Perang Dunia I mengguncang tatanan politik di Eropa secara signifikan, menghasilkan negara-negara baru, mengubah perbatasan, dan menciptakan ketidakstabilan yang akan berdampak pada perkembangan selanjutnya dalam sejarah Eropa dan dunia. Beberapa dampak Perang Dunia I terhadap kemunculan negara-negara baru di Eropa di antaranya terjadinya keruntuhan Kekaisaran Austria-Hungaria, pembubaran Kekaisaran Ottoman, pembagian Kekaisaran Rusia, dan perubahan perbatasan di Eropa Tengah.

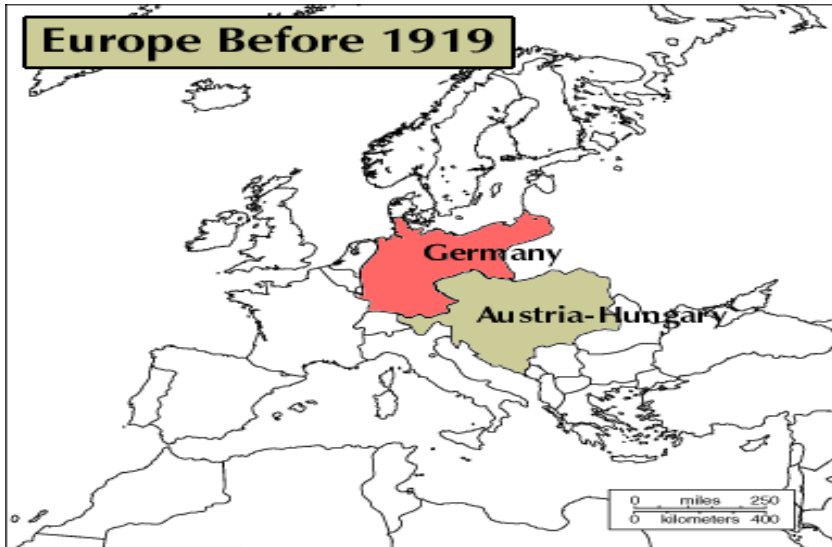
Salah satu dampak paling signifikan dari Perang Dunia I adalah keruntuhan Kekaisaran Austria-Hungaria yang merupakan monarki ganda yang terdiri dari dua kerajaan dan berbagai wilayah lainnya. Monarki ini terdiri dari Austria dan Hungaria yang memiliki otonomi terbatas, sementara wilayah-wilayah lainnya terdiri dari beragam kelompok etnis dan budaya. Selama Perang Dunia I, ketegangan antara kelompok etnis yang berbeda di dalam Kekaisaran Austria-Hungaria semakin meningkat. Setelah perang berakhir pada tahun 1918, tekanan dari dalam dan tekanan dari luar menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Austria-Hungaria (Cebula, 2020).

Setelah keruntuhan Kekaisaran Austria-Hungaria, berbagai negara baru muncul di wilayah-wilayah bekas kekaisaran tersebut. Beberapa negara yang terbentuk meliputi (Cebula, 2020):

1. Republik Austria: Austria menjadi negara merdeka pada tahun 1919, meskipun harus menerima pembatasan atas wilayah-wilayahnya.
2. Republik Hungaria: Hungaria mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Hungaria pada tahun 1918, meskipun kemudian menghadapi konflik dan perubahan dalam pemerintahan.
3. Cekoslovakia: Cekoslovakia muncul sebagai negara merdeka pada tahun 1918, dengan Republik Cekoslovakia yang terbentuk dari bagian-bagian bekas Austria-Hungaria yang dihuni oleh etnis Ceko dan Slovakia.
4. Yugoslavia: Kerajaan Serb-Kroasia-Slovenia didirikan pada tahun 1918 dan kemudian menjadi Kerajaan Yugoslavia pada tahun 1929 setelah penyatuan dengan wilayah-wilayah Serbia.
5. Negara-negara Baltik: Lithuania, Latvia, dan Estonia memproklamasikan kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Rusia setelah Perang Dunia I dan menjadi negara merdeka.

6. Polandia: Polandia mendapatkan kemerdekaan kembali setelah lebih dari seratus tahun terpecah dan dijajah oleh negara-negara tetangga.

Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa keruntuhan Kekaisaran Austria-Hungaria adalah bagian dari transformasi besar-besaran dalam peta politik Eropa setelah Perang Dunia I. Pembentukan negara-negara baru ini mencerminkan perjuangan dan aspirasi berbagai kelompok etnis yang mendiami wilayah bekas kekaisaran, dan juga menjadi salah satu kontributor utama dalam perubahan politik dan sosial di Eropa pasca-Perang Dunia I.



Peta wilayah Eropa sebelum dan setelah Perang Dunia I

Sumber: <https://byjus.com/question-answer/compare-the-map-of-europe-before-and-after-the-territorial-rearrangements-following-wwi-and-select/>

Perang Dunia I juga menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Ottoman dan berdampak besar pada Timur Tengah dan Balkan. Kekaisaran Ottoman adalah kekaisaran Islam yang mencakup wilayah-wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Turki modern, Timur Tengah, dan wilayah Balkan. Setelah perang berakhir, Mustafa Kemal Atatürk memimpin perjuangan untuk mendirikan negara Turki modern. Pada tahun 1923, Kekaisaran Ottoman resmi dihapuskan dan Republik Turki didirikan. Atatürk berupaya melakukan modernisasi Turki dalam berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan budaya. Dengan terjadinya keruntuhan Kekaisaran Ottoman, beberapa negara baru muncul di wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Negara-negara baru ini meliputi (Strachan, 2010):

1. Irak: Irak mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1932 setelah berakhirnya mandat LBB yang diberikan kepada Inggris.
2. Suriah dan Lebanon: Suriah dan Lebanon berada di bawah mandat Prancis setelah Perang Dunia I. Suriah kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1946, sedangkan Lebanon menjadi negara merdeka pada tahun 1943.
3. Yordania: Yordania (sebelumnya dikenal sebagai Transyordania) mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1946.
4. Palestina: mandat LBB atas Palestina menjadi dasar bagi konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini.
5. Pembentukan negara-negara di Balkan: di wilayah Balkan, perubahan perbatasan dan pembentukan negara-negara baru juga terjadi. Misalnya, Yugoslavia muncul setelah Perang Dunia I, menggabungkan berbagai kelompok etnis seperti Serbia, Kroasia, dan Slovenia.

Selain keruntuhan Kekaisaran Ottoman dan pembentukan negara-negara baru di wilayah Timur Tengah dan Balkan ini, salah satu konsekuensi besar dari Perang Dunia I, juga ditandai dengan terjadinya pembagian Kekaisaran Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan perang sipil yang kemudian mengikutinya, mengakibatkan pembagian Kekaisaran Rusia. Ini menghasilkan negara-negara baru seperti Uni Soviet dan beberapa negara independen di Eropa Timur dan Kaukasus, termasuk Ukraina, Belarus, Latvia, Lithuania, dan Estonia (Strachan, 2010).

Revolusi Rusia sendiri dimulai pada tahun 1917 dengan dua revolusi utama, yaitu Revolusi Februari (Maret dalam kalender Gregorian) dan Revolusi Oktober (November dalam kalender Gregorian). Revolusi Februari menggulingkan Tsar Nicholas II dan membentuk pemerintahan sementara, sedangkan Revolusi Oktober membawa Bolsheviks yang dipimpin oleh Vladimir Lenin untuk berkuasa (Strachan, 2010).

Revolusi Rusia dan perang sipil yang kemudian mengikutinya mengakibatkan pembagian Kekaisaran Rusia. Sejumlah wilayah Kekaisaran Rusia merdeka atau dikuasai oleh kelompok oposisi yang berbeda. Beberapa wilayah yang terpengaruh termasuk Ukraina, Belarus, Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan lainnya. Pada tahun 1922, Uni Soviet (Uni Republik Sosialis Soviet) didirikan, dan negara ini menjadi kelanjutan dari bagian utama Kekaisaran Rusia. Uni Soviet, yang berpusat di Moskow, mencakup sebagian besar wilayah bekas Kekaisaran Rusia dan menjadi negara sosialis pertama di dunia. Selain Uni Soviet, beberapa negara independen muncul di wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Beberapa di antaranya adalah (Müller, 2002):

1. Ukraina: Ukraina meraih kemerdekaannya pada tahun 1917-1921, meskipun kemudian diserbu oleh pasukan Bolshevik. Kemerdekaan Ukraina akhirnya tercapai lagi pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet.

2. Belarus: Belarus juga mencapai kemerdekaan sementara pada tahun 1918-1919, tetapi kemudian dianeksasi oleh Uni Soviet dan menjadi bagian dari Uni Soviet hingga 1991.
3. Negara-negara Baltik: Latvia, Lithuania, dan Estonia mencapai kemerdekaan pada tahun 1918, meskipun kemudian direbut oleh Uni Soviet dan Nazi Jerman selama Perang Dunia II, sebelum mendapatkan kemerdekaan kembali setelah perang.
4. Kaukasus dan Asia Tengah: Wilayah-wilayah ini juga mengalami pembentukan negara-negara independen seperti Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan lainnya.

Pembagian Kekaisaran Rusia dan pembentukan negara-negara baru ini merupakan hasil dari perubahan sosial dan politik yang besar selama Revolusi Rusia dan Perang Dunia I. Kondisi ini menciptakan tatanan politik baru di wilayah-wilayah tersebut dan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya di Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah.

Perang Dunia I dan perjanjian-perjanjian pascaperang yang mengikutinya juga menyebabkan perubahan perbatasan di Eropa Tengah. Beberapa negara baru muncul dan beberapa negara yang sudah ada mengalami perubahan perbatasan. Berikut adalah beberapa negara yang mendapatkan kemerdekaan atau mengalami perubahan perbatasan sebagai hasil dari Perang Dunia I dan perjanjian pascaperang (Müller, 2002):

1. Polandia: Polandia adalah salah satu negara yang paling terkenal yang mendapatkan kemerdekaan kembali setelah berakhirnya Perang Dunia I. Polandia sebelumnya telah dibagi oleh tiga kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Rusia.

Pembagian Polandia ini mengalami perubahan dengan pembentukan Republik Polandia yang merdeka pada tahun 1918.

2. Rumania: Rumania juga mengalami perubahan perbatasan signifikan. Rumania memperoleh wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Austria-Hungaria dan Kekaisaran Rusia, termasuk Transilvania, Bukovina, dan Bessarabia.
3. Finlandia: Finlandia memproklamasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Ini mengakhiri sekitar satu abad pemerintahan Rusia atas Finlandia.
4. Bekas negara-negara Baltik: Latvia, Lithuania, dan Estonia adalah negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia I. Negara-negara ini sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia.
5. Kekaisaran Austria dan Hungaria: Kekaisaran Austria-Hungaria mengalami disintegrasi setelah perang berakhir, dan kemudian muncul sebagai negara merdeka yang lebih kecil dengan perbatasan baru.

Perubahan perbatasan dan pembentukan negara-negara baru di Eropa Tengah dan Timur ini merupakan salah satu dampak paling mencolok dari Perang Dunia I. Perubahan-perubahan ini menciptakan tatanan politik baru di kawasan tersebut dan memengaruhi perkembangan sejarah selanjutnya di Eropa.

B. Perang Dunia II dan Pembentukan Uni Eropa

Perang Dunia II di kawasan Eropa adalah konflik terbesar dan paling merusak dalam sejarah Eropa modern. Berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, perang ini melibatkan sejumlah besar negara dan konflik militer di Eropa, Asia, dan Afrika, di mana Eropa menjadi pusat pertempuran utama. Setelah tahun-tahun yang penuh penderitaan dan pengorbanan, Perang Dunia

II berakhir pada tahun 1945 dan memberikan dampak yang mendalam terhadap kawasan Eropa. Meskipun demikian, di lain pihak, Perang Dunia II memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan perlunya perdamaian di Eropa dan mendorong negara-negara Eropa untuk bekerja sama dalam proyek integrasi ekonomi dan politik yang kemudian menjelma menjadi UE yang dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk mencegah terjadinya perang dan mempromosikan stabilitas di benua Eropa setelah pengalaman pahit Perang Dunia II.

Jalannya Perang Dunia II dan Dampaknya Bagi Kawasan Eropa

Perang Dunia II dimulai pada tanggal 1 September 1939, yaitu ketika Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler menyerang Polandia. Invasi ini memicu reaksi dari Prancis dan Britania Raya, yang kemudian menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939. Setelah invasi Polandia, Jerman Nazi memfokuskan serangannya ke arah Barat, yang mengakibatkan jatuhnya beberapa negara di Eropa Barat, termasuk Prancis, Belgia, Belanda, dan Norwegia. Invasi Jerman ke Prancis pada tahun 1940, yang dikenal sebagai *Blitzkrieg* atau “perang kilat” kemudian memungkinkan Jerman untuk menduduki sebagian besar Prancis dalam waktu singkat dan sebagian besar negara Eropa Timur. Pendudukan ini dipandang sangat kejam dan mengakibatkan penderitaan besar bagi penduduk setempat. Negara-negara Eropa Barat yang tersisa kemudian berjuang melawan pendudukan Nazi (Delanty, 1995).

Di lain pihak, Eropa Tengah lebih banyak terlibat dalam konflik yang melibatkan Jerman dan Uni Soviet, terutama setelah serangan Jerman ke Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941, yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa, di mana Front Timur menjadi salah satu teater perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah perang. Operasi ini melibatkan jutaan pasukan Jerman

dan mengakibatkan pertempuran hebat di seluruh Front Timur dengan tujuan untuk menduduki dan menghancurkan Uni Soviet. Pertempuran paling berdarah berikutnya dalam sejarah perang adalah Pertempuran Stalingrad (Agustus 1942-Februari 1943). Dalam pertempuran ini, pasukan Jerman berusaha merebut kota Stalingrad, tetapi akhirnya dikalahkan oleh pasukan Uni Soviet. Pertempuran ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dan menjadi poin balik dalam perang di Front Timur (Hyde-Price, 2007).

Perang Dunia II juga melibatkan konflik udara yang signifikan di Eropa. Terutama, Pertempuran Inggris dan kampanye pengeboman berat di Eropa, termasuk pengeboman kota-kota seperti London dan Dresden. Pada tahun 1944 dan 1945, pasukan Sekutu (terutama pasukan AS, Britania Raya, dan Prancis) mulai membebaskan wilayah-wilayah di Eropa Barat dan bergerak ke timur untuk berhadapan dengan pasukan Uni Soviet di beberapa titik di Front Timur. Pada tanggal 6 Juni 1944, Sekutu meluncurkan Operasi Overlord, serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis, yang dikenal sebagai D-Day. Ini adalah langkah penting dalam pembebasan Eropa dari pendudukan Nazi, dan pasukan Sekutu terus maju melalui Prancis dan Belgia menuju Jerman. Berbagai perang di Front Timur kemudian berakhir pada tanggal 8 Mei 1945, ditandai dengan Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang sekaligus juga mengakhiri perang di Eropa. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa (*Victory in Europe Day/ VE Day*) (Chiara, 2013).

Hal yang penting untuk dicatat bahwa selama Perang Dunia II, banyak negara Eropa terbagi menjadi dua blok yang berlawanan, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros, yang masing-masing memiliki aliansi militer dan kepentingan politik yang berbeda sebagai konsekuensi dari rivalitas antara kedua blok tersebut. Blok Sekutu

merupakan koalisi negara-negara yang dipimpin oleh Britania Raya, Uni Soviet, dan AS, yang dikenal sebagai “Tiga Besar”. Negara-negara lain yang bergabung dengan Blok Sekutu meliputi Prancis (setelah pendudukan Jerman), China, Kanada, Australia, dan negara-negara lainnya. Sementara, Blok Poros adalah koalisi negara-negara yang membentuk aliansi militer dengan Jerman Nazi, Italia Fascist, dan Jepang. Pemimpin utama Blok Poros adalah Jerman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini, dan Kekaisaran Jepang, dengan negara-negara yang menjadi sekutunya antara lain Hungaria, Rumania, Bulgaria, Finlandia, dan negara-negara lainnya (Cardy, 2024).

Ketegangan di Eropa antara Blok Sekutu dan Blok Poros mencapai puncaknya ketika Blok Poros berusaha memperluas kendalanya di Eropa, sementara Blok Sekutu berjuang untuk menghentikan ekspansi tersebut dan mengakhiri ancaman yang dihadapi oleh Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Konflik ini menciptakan ketegangan besar di seluruh Eropa dan mengubah geopolitik kawasan ini secara dramatis. Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Blok Poros dan terjadinya pembagian Eropa, yang ikut menjadi dasar bagi terjadinya Perang Dingin, sekaligus menandai perubahan besar dalam sejarah Eropa pascaperang. Perang Dunia II juga menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk Eropa, dengan jutaan korban jiwa, penghancuran, dan trauma psikologis. Konflik ini juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam politik dan perubahan batas negara di kawasan ini. Setelah berakhirnya perang, upaya besar dilakukan untuk membangun perdamaian, keamanan, dan kerja sama di Eropa, yang akhirnya melahirkan proyek-proyek seperti UE, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali konflik besar di masa depan.

Arti Penting Pembentukan Uni Eropa Bagi Kawasan Eropa

Pembentukan UE adalah sebuah proses panjang yang dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II dan berlanjut selama beberapa dekade. Proses ini dimulai ketika para pemimpin Eropa berusaha menciptakan kerja sama ekonomi yang akan mengakhiri konflik di antara negara-negara Eropa. Inisiatif awal melibatkan pembentukan Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (*European Coal and Steel Community/ECSC*) melalui kesepakatan *Treaty of Paris* yang diinisiasi oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Luksemburg, dan Belanda pada tanggal 18 April 1951. ECSC mengarah pada integrasi ekonomi sektor batu bara dan baja (Bache et al., 2015).

Keenam negara tersebut menginisiasi pembentukan ECSC dengan dilandasi oleh beberapa faktor penting, di antaranya adanya pengalaman Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan kondisi Eropa Barat terpukul parah oleh kerusakan fisik dan kerugian manusia. Pengalaman perang ini sangat memengaruhi pemimpin Eropa Barat yang kemudian berupaya mencari cara untuk menghindari konflik bersenjata di masa depan. Disadari bahwa sektor-sektor industri yang strategis seperti batu bara dan baja adalah faktor penting dalam kemampuan militer, dan dengan mengendalikannya secara bersama-sama, akan dapat mengurangi potensi konflik.

Perekonomian yang terpuruk pasca-Perang Dunia II, juga menjadi landasan bagi keenam negara tersebut untuk menginisiasi ECSC. Banyak negara Eropa Barat menghadapi perekonomian yang hancur, sehingga kemudian berupaya mencari cara untuk membangun kembali perekonomian mereka dan mengatasi masalah pengangguran. Melalui ECSC, negara-negara ini berharap untuk memperbaiki industri batu bara dan baja yang sangat penting bagi perekonomian mereka. Terdapat pula faktor tekanan dari AS yang

mendorong Eropa Barat untuk mengintegrasikan sektor industri batu bara dan baja mereka sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong pemulihan ekonomi Eropa pasca-Perang Dunia II, khususnya melalui Program Bantuan Marshall (*Marshall Plan*). Hal ini diawali ketika pada tahun 1947, AS mengeluarkan Doktrin Truman (*Truman Doctrine*) yang menegaskan komitmennya untuk membantu negara-negara yang terancam oleh ekspansi komunis. Komitmen ini kemudian diikuti dengan diluncurkannya *Marshall Plan* pada tahun 1948, yang memberikan bantuan ekonomi besar kepada negara-negara Eropa Barat dengan tujuan untuk membantu pemulihan pascaperang dan mencegah penyebaran komunisme. AS melihat integrasi ekonomi Eropa sebagai cara untuk mengurangi potensi konflik dan mengamankan perdagangan yang stabil (Jovanovic, 1997).

Beberapa pemimpin Eropa Barat, seperti Jean Monnet dan Robert Schuman, ikut mendukung gagasan integrasi Eropa ini sebagai cara untuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Mereka menganggap ECSC sebagai langkah pertama menuju integrasi yang lebih luas. Enam negara yang menginisiasi ECSC adalah negara-negara yang pada awalnya berseteru dalam Perang Dunia II. Namun, negara-negara ini kemudian menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama dan perdamaian. Inisiatif ECSC ini menjadi landasan bagi pembentukan UE yang lebih luas, di mana ECSC berhasil menciptakan kerja sama ekonomi dan mengurangi potensi konflik antara negara-negara Eropa, yang juga menjadi langkah awal menuju integrasi ekonomi dan politik yang lebih dalam di kawasan tersebut (Pagden, 2002).



Perdana Menteri Prancis, Robert Schuman, menandatangani Perjanjian Paris yang menandai terbentuknya ECSC

Sumber:<https://historicalarchives.europarl.europa.eu/home/cultural-heritage-collections/news/treaty-of-paris.html>

Pada tanggal 25 Maret 1957, Perjanjian Roma (*Treaty of Rome*) ditandatangani oleh enam negara yang sama yang membentuk ECSC. Perjanjian ini mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community/EEC*) dan Masyarakat Energi Atom Eropa (*European Atomic Energy Community/EURATOM*). EEC bertujuan menciptakan pasar tunggal untuk barang-barang dan jasa, yang merupakan salah satu langkah awal menuju integrasi ekonomi yang lebih luas. Pada tahun 1960-an, lebih banyak negara Eropa bergabung dengan EEC, dan UE mulai mengembangkan kebijakan bersama dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, transportasi, dan kebijakan regional. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, lebih banyak negara bergabung dengan EEC, termasuk Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol, dan Portugal. Fakta ini memperluas cakupan geografis dan ekonomi UE (Pagden, 2002).

Pada tanggal 7 Februari 1992, Perjanjian Maastricht (*Treaty of Maastricht*) ditandatangani oleh pemimpin dari 12 negara anggota, yaitu Belgia, Italia, Luksemburg, Prancis, Belanda, Jerman Barat, Denmark, Irlandia, Inggris, Yunani, Portugal, dan Spanyol. Perjanjian ini mulai berlaku 1 November 1993 dan mengubah EEC menjadi Uni Eropa (*European Union/EU*), yang juga menetapkan tahapan menuju mata uang tunggal Euro dan memperluas peran UE dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Proses selanjutnya, ditandai dengan upaya UE yang terus memperluas jumlah negara anggota, termasuk negara-negara dari Eropa Timur yang bergabung setelah berakhirnya Perang Dingin. Integrasi UE ini juga mengalami kemajuan positif ketika disepakatinya Perjanjian Lisbon (*Treaty of Lisbon*), yang mulai berlaku pada tahun 2009, memberikan UE lebih banyak wewenang dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan HAM. Perjanjian ini juga mengatur struktur kelembagaan UE (Pichler, 2018).

Pada tahun 1999, EU meluncurkan pembentukan Zona Euro (*Eurozone*). Mata uang tunggal Euro juga diperkenalkan di sejumlah negara anggota UE, di mana beberapa negara kemudian bergabung dengan zona Euro dan membentuk *Eurozone*. Proses integrasi UE berikutnya terfokus pada upaya menyangkut perluasan kebijakan dan peningkatan integrasi. Di tahun 2004, UE berhasil melakukan perluasan keanggotaan terbesar, yang ditandai dengan bergabungnya sebanyak sepuluh negara anggota baru yaitu Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, dan Slowakia. UE kemudian menggenapkan keanggotaannya menjadi 27 negara ketika di tahun 2007 Bulgaria dan Rumania, serta Kroasia di tahun 2013 resmi bergabung menjadi anggota UE (Pichler, 2018).

Proses pembentukan dan integrasi UE ini, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi dan

persoalan migrasi pengungsi yang terjadi selama dekade 2010-an. Integrasi UE juga menghadapi tantangan besar ketika Inggris memutuskan keluar dari UE pada 1 Februari 2020 (*Britain Exit/ Brexit*). Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan integrasi terkait kebijakan ekonomi, lingkungan, dan keamanan terus berlanjut. Pembentukan UE dinyatakan sebagai hasil dari kerja sama antarnegara di Eropa yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Pembentukan UE sendiri memiliki arti penting yang luas bagi kawasan Eropa dalam banyak aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berikut beberapa dampak penting pembentukan UE bagi kawasan Eropa (Warleigh-Lack, 2018).

1. Perdamaian dan stabilitas: UE diciptakan setelah Perang Dunia II untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Eropa. Melalui integrasi ekonomi dan politik, UE telah membantu mengakhiri konflik berskala besar yang selama berabad-abad merusak kawasan Eropa.
2. Perekonomian: UE merupakan pasar tunggal terbesar di dunia dengan lebih dari 500 juta penduduk. Ini memberikan peluang ekonomi yang besar bagi anggota UE dan menciptakan kemakmuran ekonomi. UE juga memiliki mata uang bersama, Euro, yang memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggotanya.
3. Mobilitas dan integrasi sosial: UE telah menghapuskan sebagian besar hambatan perbatasan di antara negara-negara anggotanya. Ini memungkinkan mobilitas bebas orang, barang, dan jasa di seluruh UE. Program seperti Erasmus juga memungkinkan pelajar dan pemuda Eropa untuk belajar dan berkembang di negara lain, sekaligus mendorong pertukaran budaya dan integrasi sosial.
4. Perlindungan HAM: UE mempromosikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan *rule of law* di seluruh negara

anggotanya. Ini mencakup perlindungan minoritas, kesetaraan gender, dan berbagai program yang mendukung penegakan HAM.

5. Keamanan: Melalui kebijakan keamanan dan pertahanan bersama, UE berupaya untuk meningkatkan keamanan di kawasan Eropa, termasuk berkolaborasi dalam menghadapi ancaman seperti terorisme, kriminalitas lintas batas, dan perubahan iklim.
6. Solidaritas: UE berkomitmen pada konsep solidaritas, yang berarti negara-negara anggota berjanji untuk membantu satu sama lain dalam situasi krisis atau kesulitan. Wujud solidaritas ini misalnya terlihat dalam tanggapan UE terhadap krisis keuangan dan migrasi, di mana negara-negara anggota bekerja sama untuk mencari solusi bersama.

UE memiliki arti penting dan dampak positif bagi kawasan Eropa, tetapi penting pula untuk dipahami bahwa masih terdapat tantangan yang harus diatasi, misalnya terkait masalah ekonomi, perbedaan budaya, dan ketegangan politik di antara negara-negara anggota. Meskipun demikian, pembentukan UE tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah Eropa modern yang telah membawa banyak manfaat bagi kawasan tersebut.

C. Perang Dingin dan Runtuhnya Blok Timur

Perang Dingin adalah periode ketegangan dan persaingan ideologis, politik, ekonomi, dan militer antara dua kekuatan utama setelah Perang Dunia II, yaitu AS dan Uni Soviet. Periode ini berlangsung sekitar tahun 1947 hingga 1991. Sementara, runtuhnya Blok Timur mengacu pada serangkaian peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya keberadaan Uni Soviet dan akhir Perang Dingin. Runtuhnya Blok Timur mengubah dinamika geopolitik dunia dan membuka jalan bagi ekspansi demokrasi dan

kapitalisme di sebagian besar Eropa Timur, yang juga mengurangi ketegangan antara AS dan Rusia, meskipun masih terdapat ketegangan dalam hubungan internasional hingga saat ini.

Perang Dingin, Pertarungan Ideologis, dan Pembagian Eropa

Perang Dingin ditandai oleh pertarungan ideologis antara kapitalisme Barat dan komunisme Timur. Pertarungan ideologis ini mencakup persaingan ekonomi, politik, kompetisi militer, dan propaganda. Dalam hal ini, baik Barat maupun Timur, menggunakan propaganda sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai dan ideologi mereka. Kedua belah pihak mencoba untuk memenangkan dukungan masyarakat internasional dan mengkritik sistem lawan mereka melalui media, literatur, dan seni.

Selama masa Perang Dingin, Eropa juga mengalami pembagian menjadi dua blok. Di satu sisi, terdapat Blok Barat mewakili kapitalisme liberal dengan ekonomi pasar bebas, demokrasi politik, dan kebebasan individu sebagai nilai utama. Di sisi lain, Blok Timur mewakili komunisme dengan ekonomi yang dikuasai negara, partai tunggal, dan penekanan pada kesetaraan sosial. Pembagian Jerman menjadi salah satu konsekuensi langsung dari Perang Dingin, di mana Jerman terbagi menjadi Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur). Berlin yang juga terbagi menjadi dua bagian (Barat dan Timur), juga menjadi simbol pembagian ideologis. Berlin Barat (bagian yang dikuasai oleh AS, Britania Raya, Prancis, dan sekutu mereka) menganut kapitalisme, sementara Berlin Timur (dikuasai oleh Uni Soviet) menganut komunisme (Herrmann, 2004).

Pembagian Eropa selama Perang Dingin ini, menciptakan lanskap geopolitik yang kompleks dan berdampak pada masyarakat, politik, dan ekonomi di seluruh benua tersebut. Negara-negara Eropa Barat yang mengadopsi sistem kapitalis

memiliki tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara di Eropa Timur yang menganut komunisme. Hal ini menciptakan perbedaan besar dalam standar hidup dan kesempatan ekonomi di kedua sisi pembagian tersebut. Terjadi pula, pergeseran perbatasan di beberapa wilayah Eropa, seperti Polandia yang kehilangan wilayah timurnya kepada Uni Soviet dan mendapatkan wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Jerman. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam demografi dan geografi negara-negara tersebut. Berikut adalah beberapa detail terkait pergeseran perbatasan di Polandia dan dampaknya (Westad, 2000).

1. Kehilangan wilayah timur Polandia: pada awal Perang Dunia II, Polandia menjadi korban invasi bersama oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet. Pada tahun 1939, berdasarkan Protokol Molotov-Ribbentrop, Nazi Jerman dan Uni Soviet sepakat membagi Polandia. Akibatnya, Polandia kehilangan wilayah timurnya, yang dianeksasi oleh Uni Soviet. Wilayah-wilayah ini termasuk bagian dari wilayah yang disebut sebagai Kresy, yang memiliki sejumlah etnis Polandia.
2. Perolehan wilayah barat Polandia: setelah berakhirnya Perang Dunia II, perbatasan Polandia juga berubah di sebelah barat. Wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Jerman Timur diberikan kepada Polandia. Hal ini sejalan dengan perubahan perbatasan yang direncanakan oleh Sekutu pada Konferensi Potsdam tahun 1945. Wilayah-wilayah ini meliputi sebagian besar Silesia, Pomerania, dan Lausitz.
3. Pemindahan penduduk: perubahan perbatasan ini mengakibatkan pemindahan penduduk besar-besaran. Orang-orang Jerman yang tinggal di wilayah-wilayah yang diberikan kepada Polandia dipindahkan ke wilayah

yang kemudian menjadi Jerman Barat, sedangkan orang-orang Polandia yang tinggal di wilayah-wilayah yang dianeksasi oleh Uni Soviet dipindahkan ke wilayah yang tetap menjadi bagian dari Polandia.

4. Dampak budaya dan sejarah: perubahan perbatasan ini juga mengubah lanskap budaya dan sejarah di wilayah tersebut. Beberapa kota dan wilayah yang sebelumnya memiliki sejarah Jerman menjadi bagian dari Polandia, dan ini menciptakan tantangan dalam penyesuaian, termasuk rekonsiliasi antara kelompok etnis yang berbeda.

Pergeseran perbatasan di Polandia adalah contoh konkret dari bagaimana perubahan geopolitik selama Perang Dingin memiliki dampak yang signifikan pada perbatasan, demografi, dan identitas budaya di Eropa. Kondisi ini menciptakan perubahan signifikan dalam wilayah dan populasi Polandia yang juga berdampak pada dinamika Eropa Timur selama beberapa dekade.

Pembagian wilayah Eropa di masa Perang Dingin juga menciptakan apa yang dikenal sebagai “Perdamaian Dingin” (*“Cold Peace”*). Istilah ini merujuk pada upaya menghindari terjadinya perang besar antara negara-negara besar di Eropa Barat dan Timur, meskipun terdapat ketegangan dan konflik yang potensial untuk terjadi. Kondisi ini juga terkait dengan ketegangan dan persaingan serius antara NATO yang didominasi oleh negara-negara Barat dan Pakta Warsawa (*Warsaw Pact*) yang didominasi oleh negara-negara Blok Timur, di mana kedua belah pihak berusaha untuk mengendalikan ketegangan ini dan menghindari eskalasi yang dapat berujung pada terjadinya perang besar (Halliday, 1993).

Keberadaan NATO dan Pakta Warsawa merupakan wujud nyata persaingan antara dua aliansi militer utama, sekaligus menjadi salah satu aspek sentral dari Perang Dingin yang memengaruhi dinamika keamanan Eropa serta hubungan internasional secara

keseluruhan. NATO yang didirikan pada tahun 1949 oleh negara-negara Eropa Barat dan AS sebagai aliansi pertahanan bersama untuk melindungi diri dari ancaman komunis, berkomitmen untuk saling membantu dalam hal pertahanan kolektif bila salah satu anggotanya diserang. Sementara, Pakta Warsawa didirikan pada tahun 1955 sebagai tanggapan dari pembentukan NATO. Aliansi militer ini terdiri dari negara-negara Blok Timur, yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sebagaimana halnya NATO, anggota Pakta Warsawa juga berkomitmen untuk saling membantu dalam pertahanan kolektif (Halliday, 1993).

NATO dan Pakta Warsawa kemudian terlibat dalam perlombaan senjata yang intens selama Perang Dingin, yaitu mencakup pengembangan senjata nuklir dan konvensional yang lebih kuat, serta upaya untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di Eropa. Kedua negara bersaing membangun arsenal nuklir besar, yang mencakup senjata nuklir strategis (misil balistik antarbenua, kapal selam berpeluru nuklir, dan pesawat pengebom nuklir) serta senjata nuklir taktis. Perlombaan senjata ini meningkatkan ketegangan dan ketakutan akan perang nuklir karena potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya.

Upaya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan dialog diplomatik antara AS dan Uni Soviet atau yang disebut sebagai *détente*, kemudian dilakukan selama tahun 1960-an hingga awal 1980-an. Pada saat *détente*, terjadi sejumlah perjanjian penting antara kedua negara, seperti Perjanjian Penghentian Uji Senjata Nuklir (*Strategic Arms Limitation Talks/SALT*) yang meliputi SALT I dan SALT II dengan tujuan mengurangi jumlah senjata nuklir strategis. Puncak *détente* adalah ketika dilakukannya pertemuan puncak antara Presiden AS Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev, yang menciptakan suasana yang lebih kooperatif antara kedua negara. Namun, *détente*

tidak berlangsung selamanya. Ketegangan kembali meningkat pada akhir 1970-an, misalnya terutama sebagai akibat dari peristiwa invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perlombaan senjata dan ketegangan geopolitik berlanjut hingga Perang Dingin berakhir (Westad, 2000).

Dinamika persaingan antara NATO dan Pakta Warsawa berubah seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1991, runtuhnya Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin dan mengubah lanskap geopolitik di Eropa. Pakta Warsawa dibubarkan pada tahun yang sama, sementara NATO tetap ada dan berkembang menjadi aliansi yang lebih luas. Persaingan antara NATO dan Pakta Warsawa adalah salah satu aspek paling menonjol dari Perang Dingin, di mana keberadaan dua aliansi militer ini menciptakan ketegangan besar dalam hubungan internasional dan memengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan, dan ekonomi negara-negara Eropa serta negara-negara di seluruh dunia selama beberapa dekade. Perlombaan senjata dan upaya *détente* juga sekaligus menjadi contoh bagaimana ketegangan dan kerja sama saling berhubungan selama Perang Dingin. Setelah Perang Dingin berakhir, Eropa mengalami perubahan dramatis. Terjadi reunifikasi Jerman dan perubahan besar dalam politik serta ekonomi di sebagian besar Eropa Timur.

Krisis di Eropa Timur, Runtuhnya Tembok Berlin, dan Akhir Uni Soviet

Krisis di Eropa Timur, runtuhnya Tembok Berlin, dan akhir Uni Soviet adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-20 yang berpengaruh besar terhadap sejarah Eropa dan dunia. Krisis di Eropa Timur (1980-an) merujuk pada serangkaian peristiwa yang terjadi di negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, seperti Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan

negara-negara lainnya. Krisis ini dimulai dengan gerakan reformasi di Polandia yang dipimpin oleh Solidaritas, yaitu serikat pekerja yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan reformasi politik. Krisis ini mengakibatkan tekanan besar pada pemerintah Uni Soviet dan memicu gelombang perubahan politik di seluruh Eropa Timur.

Solidaritas adalah serikat pekerja yang didirikan pada tahun 1980 di Polandia di bawah kepemimpinan Lech Wałęsa. Organisasi ini berjuang untuk hak-hak pekerja, kebebasan berbicara, dan reformasi politik. Solidaritas mendapatkan dukungan besar dari rakyat Polandia dan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah komunis Polandia yang didukung oleh Uni Soviet. Krisis di Polandia kemudian memicu gelombang perubahan politik di negara-negara Eropa Timur lainnya. Misalnya, Hungaria membuka perbatasan dengan Austria, yang memungkinkan penduduk Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Cekoslovakia juga mengalami perubahan politik yang signifikan (Herrmann, 2004).

Pada saat yang sama, Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan *perestroika* (restrukturisasi ekonomi) dan *glasnost* (transparansi politik). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki masalah ekonomi dan politik di Uni Soviet, tetapi di lain pihak juga memberikan dorongan bagi perubahan di negara-negara Eropa Timur yang terpengaruh oleh Uni Soviet. *Glasnost* merupakan kebijakan yang mengacu pada peningkatan keterbukaan politik dan transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat Uni Soviet. Di bawah kebijakan ini, media diberikan lebih banyak kebebasan untuk melaporkan berita dan informasi tanpa sensor. Kebijakan ini juga mengizinkan diskusi terbuka tentang masalah-masalah sosial dan politik yang sebelumnya dianggap tabu. *Glasnost* bertujuan untuk mengatasi masalah korupsi, birokrasi, dan kebijakan yang telah lama dianggap

sebagai hambatan bagi perkembangan Uni Soviet. Sementara, *perestroika* adalah serangkaian reformasi ekonomi yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi yang semakin parah di Uni Soviet. Reformasi ekonomi ini mencakup upaya untuk mengurangi birokrasi, memodernisasi sektor industri, memberikan insentif bagi inovasi ekonomi, dan meningkatkan perdagangan luar negeri. Tujuan *perestroika* adalah menghidupkan kembali ekonomi Uni Soviet yang stagnan dan tidak kompetitif (Halliday, 1993).

Meskipun Gorbachev memiliki niat baik dengan reformasi-reformasinya, upaya-upaya ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Reformasi ekonomi yang dilakukan dalam *perestroika* menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya inflasi. Sementara itu, kebijakan *glasnost* membuka pintu bagi kritik terhadap pemerintah dan Partai Komunis yang selama ini sangat otoriter. Krisis di Uni Soviet ini mencapai puncaknya dengan pengumuman Presiden Mikhail Gorbachev pada 25 Desember 1991 bahwa Uni Soviet akan dibubarkan. Peristiwa ini merupakan tindakan historis yang mengakhiri eksistensi resmi Uni Soviet sebagai sebuah negara dan menggantikannya dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (*Commonwealth of Independent States/ CIS*). CIS adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama antara negara-negara bekas anggota Uni Soviet dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, ekonomi, dan politik. Meskipun CIS mempertahankan beberapa bentuk kerja sama, tetapi CIS menjadi penanda bahwa Uni Soviet sebagai entitas politik telah berakhir (Halliday, 1993).

Seiring dibubarkannya Uni Soviet, Boris Yeltsin yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Federasi Rusia (bagian dari Uni Soviet), memainkan peran penting. Yeltsin adalah seorang reformis yang mendukung kemerdekaan Rusia dan mengambil langkah-langkah untuk mengukuhkan kemerdekaan negara Rusia

dari Uni Soviet. Yeltsin memimpin Rusia dalam transisi menuju bentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis. Rusia kemudian menjadi penerus hukum Uni Soviet dan menjadi negara penerus yang menduduki kursi Uni Soviet di PBB. Setelah pembubaran Uni Soviet pula, banyak negara bekas anggota Uni Soviet menyatakan kemerdekaan mereka secara resmi, termasuk di antaranya negara-negara seperti Ukraina, Belarus, Kazakhstan, dan negara-negara Baltik (Latvia, Lithuania, dan Estonia). Negara-negara ini mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, merancang konstitusi serta sistem pemerintahan sendiri. Peristiwa-peristiwa ini juga memicu gelombang perubahan politik di negara-negara Eropa Timur lainnya, termasuk Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan banyak lainnya yang beralih ke sistem demokratis dan ekonomi pasar bebas setelah runtuhnya rezim komunis (Baaken et al., 2018).

Sebelumnya, pada 1989 terjadi sebuah peristiwa yang sangat simbolis dalam sejarah modern, yaitu runtuhnya Tembok Berlin. Tembok ini telah memisahkan Berlin Timur (yang dikuasai oleh Jerman Timur, yang didukung oleh Uni Soviet) dan Berlin Barat (yang dikuasai oleh Jerman Barat dan sekutu-sekutunya). Runtuhnya tembok ini terjadi setelah tekanan dari rakyat Jerman Timur yang menginginkan reunifikasi Jerman dan perubahan politik di Eropa Timur. Momen ini membuka jalan bagi reunifikasi Jerman dan mengakhiri pembagian yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Tembok Berlin merupakan tembok pembatas yang dibangun oleh pemerintah Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman, atau *Deutsche Demokratische Republik/DDR*) pada tahun 1961. Tembok ini bertujuan untuk mencegah warga Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat (Republik Federal Jerman) yang merupakan negara berideologi Barat. Tembok ini menjadi simbol pembagian Jerman pada masa Perang Dingin. Pada tahun 1989, berbagai

negara Eropa Timur mengalami gelombang perubahan politik. Di Jerman Timur, terjadi protes besar-besaran yang menuntut reformasi politik dan demokratisasi. Aksi protes di Jerman Timur ini semakin meningkat seiring dengan menguatnya dukungan dari Jerman Barat dan komunitas internasional.



Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989.

Sumber: <https://edition.cnn.com/2019/11/07/europe/berlin-wall-fall-30th-anniversary-intl-grm/index.html>

Pada tanggal 9 November 1989, pemerintah Jerman Timur memberlakukan kebijakan yang memungkinkan warga Jerman Timur mengunjungi Jerman Barat tanpa izin. Massa rakyat yang bersukacita datang ke tembok dan mulai meruntuhkannya secara simbolis. Runtuhnya Tembok Berlin ini sekaligus membuka jalan bagi proses penyatuan kembali Jerman yang dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 3 Oktober 1990, penyatuan kembali Jerman secara resmi terwujud. Jerman Timur bergabung dengan Jerman Barat dalam satu negara berdaulat. Reunifikasi ini adalah akhir dari pembagian Jerman yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade (Westad, 2000).

Runtuhnya Tembok Berlin dan Uni Soviet menjadi penanda keruntuhan Blok Timur, sekaligus berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Peristiwa ini juga menjadi simbol perubahan besar di Eropa Timur dan menyebabkan gelombang demokratisasi dan reformasi di banyak negara Eropa Timur. Peristiwa-peristiwa ini juga memiliki dampak yang besar pada dunia politik dan geopolitik, serta membuka babak baru dalam sejarah Eropa dan dunia. Sejak itu, Eropa juga berupaya untuk menciptakan stabilitas dan integrasi lebih lanjut, dengan pembentukan UE pada tahun 1993 sebagai langkah besar menuju kerja sama politik dan ekonomi di antara negara-negara Eropa. Meskipun masih ada tantangan dan ketegangan, Eropa modern berusaha untuk membangun kerja sama dan perdamaian di wilayahnya.

BAB 2

TANTANGAN PERDAMAIAN DI EROPA KONTEMPORER



Perdamaian di Eropa adalah hasil dari berbagai perkembangan sejarah, termasuk akhir Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet, dan penyatuan kembali Jerman. Namun, meskipun telah mencapai kemajuan besar dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan ini, Eropa masih menghadapi sejumlah tantangan perdamaian kontemporer. Beberapa tantangan perdamaian kontemporer tersebut di antaranya terkait proses perdamaian di Balkan, penanganan konflik Siprus dan Turki, serta konflik Ukraina dan ketegangan dengan Rusia. Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan perdamaian ini, kerja sama internasional dan diplomasi sangat penting. Organisasi seperti UE, NATO, dan PBB memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di Eropa. Selain itu, upaya untuk mempromosikan dialog antarnegara, mengatasi ketegangan regional, dan memecahkan konflik secara damai harus diperkuat. Perdamaian di Eropa adalah pencapaian besar, dan upaya harus terus dilakukan untuk mempertahankannya di tengah tantangan yang ada.

A. Perdamaian di Balkan

Perang Balkan adalah sebutan umum untuk sejumlah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Balkan, Eropa Tenggara, selama tahun 1990-an. Perang ini melibatkan sejumlah negara dan kelompok etnis yang berjuang untuk kemerdekaan, kontrol wilayah, dan kepentingan politik. Perang Balkan berkorelasi erat dengan runtuhnya Yugoslavia, yaitu negara federal yang terdiri dari enam republik (Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia) dan dua provinsi otonom (Kosovo dan Vojvodina). Negara ini didirikan setelah Perang Dunia II di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito dan menggabungkan berbagai kelompok etnis dan agama yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada terjadinya ketegangan dalam negara ini, termasuk ketegangan etnis, agama, nasionalisme,

dan aspirasi otonomi yang semakin berkembang di antara republik-republik dan provinsi-provinsi yang berbeda (Delanty, 1995).

Jalannya Perang Balkan cukup kompleks yang diawali dengan terjadinya Perang Slovenia pada tahun 1991, yaitu ketika Slovenia menyatakan kemerdekaan dari Yugoslavia. Konflik ini relatif singkat dan berakhir dengan kesepakatan di bawah tekanan internasional. Perang Slovenia diikuti dengan terjadinya Perang Kroasia (1991-1995), yaitu konflik yang terjadi antara pasukan Kroasia dan pasukan Serbia yang mendukung wilayah-wilayah yang ingin merdeka di Kroasia. Konflik ini menyebabkan perubahan perbatasan dan kekerasan etnis yang mengerikan (Hammond, 2006).

Berikutnya terjadi Perang Bosnia (1992-1995) yang merupakan salah satu konflik paling berdarah dalam rangkaian Perang Balkan. Konflik ini melibatkan pasukan Bosnia, Serbia, dan Kroasia, serta komunitas etnis Bosnia yang berjuang untuk kemerdekaan dan pengendalian wilayah. Perang ini menciptakan banyak peristiwa kekerasan etnis, termasuk genosida di Srebrenica. Perang ini berakhir dengan Perjanjian Dayton pada tahun 1995. Terjadi pula Perang Kosovo pada tahun 1998-1999, yaitu perang yang terjadi antara pasukan Kosovo yang mendukung kemerdekaan dan pasukan Serbia yang menguasai wilayah tersebut. Konflik ini menyebabkan intervensi militer NATO untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Albania di Kosovo. Perang ini berakhir dengan penarikan pasukan Serbia dari Kosovo dan penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian internasional (Hammond, 2006).

Selama konflik berkepanjangan di wilayah Balkan ini, negara Yugoslavia semakin lemah dan akhirnya runtuh. Pada tahun 1992, republik-republik Slovenia, Kroasia, dan Makedonia menyatakan kemerdekaan. Sementara Montenegro awalnya tetap bersama dengan Serbia dalam entitas yang disebut Republik

Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro), Kosovo kemudian menyatakan otonomi *de facto* (Hatzopoulos, 2008).

Secara umum, jalannya Perang Balkan ditandai oleh banyak perubahan perbatasan, pengusiran etnis, dan pelanggaran HAM yang serius. Konflik ini berdampak signifikan pada wilayah Balkan dan komunitas internasional secara keseluruhan. Upaya besar telah dilakukan untuk mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali di wilayah tersebut setelah berakhirnya konflik utama pada tahun 1995. Fase perdamaian di Balkan merupakan pencapaian yang penting dan berharga yang telah dicapai setelah beberapa konflik yang berkepanjangan dan berdarah di wilayah tersebut. Beberapa faktor dan langkah telah berkontribusi pada pencapaian perdamaian di Balkan yang di antaranya melibatkan intervensi internasional, terutama oleh NATO dan UE. Contohnya adalah intervensi militer NATO di Kosovo pada tahun 1999 untuk mengakhiri kekerasan terhadap etnis Albania. Langkah ini membantu mengakhiri konflik di Kosovo dan membuka jalan bagi misi pemeliharaan perdamaian internasional di wilayah tersebut (Hatzopoulos, 2008).

Diplomasi dan perundingan juga telah menjadi bagian integral dari upaya perdamaian di Balkan. Berbagai perjanjian dan kesepakatan telah dicapai melalui proses diplomasi, seperti Perjanjian Dayton yang mengakhiri Perang Bosnia. Proses integrasi Eropa juga turut menjadi insentif besar bagi negara-negara di Balkan dalam upaya melakukan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, prospek menjadi anggota UE telah mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Di samping itu, setelah pembubaran Yugoslavia, berbagai negara baru muncul di Balkan, termasuk Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Makedonia Utara, dan Kosovo. Pembentukan negara-negara ini berkontribusi menciptakan perbatasan yang

lebih jelas dan meminimalkan ketegangan yang ada pada masa lalu. Hal ini terutama disebabkan karena banyak negara di Balkan kemudian melakukan reformasi dalam hal hukum, institusi, dan pemerintahan yang mencakup reformasi sektor keamanan, reformasi peradilan, dan peningkatan tata kelola. Dalam konteks kerja sama regional, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di Balkan. Contohnya adalah Proses Kerja Sama Eropa Tenggara (*South-East European Cooperation Process/SEECP*) yang melibatkan negara-negara di wilayah ini (Wallace, 2001).

Pada akhirnya, meskipun perdamaian telah dicapai di sebagian besar wilayah Balkan, tantangan masih ada. Beberapa konflik antaretnis dan ketegangan politik berlanjut di beberapa wilayah, dan proses reformasi di beberapa negara masih berjalan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi perkembangan di Balkan dan melanjutkan upaya untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di wilayah ini.

B. Sejarah Panjang Konflik Siprus dan Turki

Konflik Siprus adalah konflik berlarut-larut yang melibatkan Siprus, sebuah pulau di Laut Tengah, dan Turki. Konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang dan berhubungan dengan ketegangan antara komunitas etnis Siprus Yunani dan Siprus Turki, serta campur tangan Turki di pulau tersebut. Konflik Siprus telah menjadi isu yang belum terselesaikan di Eropa selama beberapa dekade. Upaya terus dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, tetapi perpecahan yang mendalam dan perbedaan politik antara kedua komunitas di Siprus terkadang menghambat kemajuan dalam proses perdamaian. Meskipun demikian, upaya diplomasi terus dilakukan dengan harapan bahwa konflik ini akan segera terselesaikan dan kedua komunitas dapat hidup bersama dalam perdamaian dan harmoni.

Konflik antara Etnis Siprus Yunani dan Siprus Turki

Konflik Siprus memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan rumit, serta berakar pada ketegangan etnis, agama, dan politik. Pada tahun 1960, Siprus meraih kemerdekaan dari Inggris. Negara ini awalnya didirikan sebagai republik federal dengan komunitas etnis mayoritas Siprus Yunani dan minoritas Siprus Turki. Etnis Siprus Yunani adalah kelompok etnis terbesar di Siprus yang merupakan sebagian besar penduduk Siprus selatan. Mereka berbicara dalam bahasa Yunani dan memiliki budaya dan sejarah yang kaya. Mayoritas penduduk Siprus Yunani adalah orang Kristen Ortodoks Yunani. Sementara, etnis Siprus Turki adalah kelompok etnis terbesar di Siprus utara. Mereka berbicara dalam bahasa Turki dan memiliki budaya dan sejarah yang berbeda dari etnis Siprus Yunani. Mayoritas penduduk Siprus Turki adalah Muslim, di mana sebagian besar mengikuti agama Islam Sunni. Ketegangan antara kedua komunitas ini mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Perbedaan etnis dan agama antara kedua kelompok ini telah menjadi faktor penting dalam konflik Siprus yang berlangsung selama beberapa dekade. Hal ini mencakup perselisihan terkait hak-hak politik, hak tanah, dan hak-hak minoritas. Pada akhirnya, konflik ini memuncak dalam bentrokan fisik dan kekerasan antara kedua komunitas pada awal 1960-an (Kazan, 2002).

Pada bulan Juli 1974, junta militer di Yunani yang dipimpin oleh Jenderal Dimitrios Ioannidis melakukan kudeta di Siprus. Kudeta tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung penggabungan Siprus dengan Yunani, yang dikenal sebagai "*enosis*". Kudeta ini terjadi setelah beberapa tahun ketegangan antara komunitas etnis Siprus Yunani dan Siprus Turki. Akibat kudeta ini, Presiden Siprus Archbishop Makarios III digulingkan dari jabatannya.

Sebagai tanggapan terhadap kudeta Yunani dan sebagai upaya untuk melindungi komunitas Siprus Turki di pulau tersebut, Turki meluncurkan invasi ke Siprus utara pada tanggal 20 Juli 1974. Operasi militer ini dikenal sebagai “Invasi Turki ke Siprus” atau “Operasi Attila”. Invasi tersebut menyebabkan pertempuran sengit antara pasukan Turki dan pasukan Siprus Yunani (Kazan, 2002).



Peta yang menunjukkan wilayah Siprus yang dikuasai Yunani dan Turki.

Sumber: The Turkish Arms Embargo – Part I. <https://www.byrdcenter.org/blog/the-turkish-arms-embargo-part-i>

Setelah invasi Turki, wilayah Siprus utara menjadi dikuasai oleh pasukan Turki. Pada tanggal 15 November 1983, Turki mengumumkan pendirian Republik Siprus Utara yang merdeka, meskipun hanya diakui oleh Turki. Republik Siprus Utara mencakup sebagian besar wilayah utara pulau Siprus. Sejak itu, pulau Siprus terpecah-belah menjadi Republik Siprus di selatan yang dikuasai Siprus Yunani dan Republik Siprus Utara di utara yang dikuasai Siprus Turki. Garis hijau, yang dijaga oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Siprus (*United Nations Peacekeeping*

Force in Cyprus/UNFICYP), memisahkan kedua wilayah ini (Tocci, 2003).

Garis Hijau adalah zona penyangga yang memisahkan wilayah yang dikuasai oleh komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki di pulau Siprus, di mana garis ini bukan hanya berfungsi sebagai batasan fisik, tetapi juga menjadi simbol pemisahan politik dan sosial antara kedua komunitas. Meskipun telah ada upaya untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian di Siprus, termasuk upaya-upaya untuk menghapus Garis Hijau dan menyatukan kembali pulau tersebut, tetapi sejauh ini belum ada penyelesaian politik yang berhasil.

Upaya Penyelesaian Konflik Siprus

Selama beberapa dekade, telah dilakukan berbagai upaya untuk mencari penyelesaian damai bagi konflik Siprus. Salah satu upaya utama adalah Pembicaraan Helsinki pada tahun 1977, Proses Nicosia pada tahun 1980-an, dan *The Annan Plan* pada tahun 2000-2004. Pembicaraan Helsinki adalah salah satu percobaan awal untuk mencari penyelesaian politik bagi konflik Siprus. Negosiasi ini berlangsung di bawah pengawasan PBB dan melibatkan perwakilan dari komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki, serta jaminan dari negara-negara penjamin (Yunani, Turki, dan Inggris). Namun, pembicaraan ini tidak mencapai kesepakatan yang tuntas, dan konflik terus berlanjut (Zervaktis, 2004).

Proses Nicosia adalah rangkaian negosiasi yang lebih lanjut yang berlangsung di ibu kota Siprus, Nicosia, pada tahun 1980-an. Proses ini melibatkan pertemuan antara pemimpin komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki dalam upaya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dan pendekatan baru yang diusulkan, upaya ini juga tidak mencapai kesepakatan akhir. Berikutnya, salah satu upaya penyelesaian yang paling dikenal adalah *The Annan Plan* yang dipimpin oleh

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada awal tahun 2000-an. Proses ini mencoba mengatasi sejumlah isu kontroversial, termasuk pengaturan kekuasaan dan properti. Meskipun *The Annan Plan* disetujui oleh komunitas Siprus Yunani dalam referendum tahun 2004, tetapi rancangan ini ditolak oleh komunitas Siprus Turki, sehingga gagal mencapai kesepakatan akhir (Zervaktis, 2004).

Upaya-upaya penyelesaian konflik lainnya juga telah dilakukan, termasuk perundingan yang melibatkan pemimpin komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki, serta peran mediator internasional. Beberapa percobaan penyelesaian terbaru juga dilakukan, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jenewa pada tahun 2017 dan KTT di Crans-Montana pada tahun 2017. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa area selama KTT tersebut, perbedaan mendasar dan isu-isu yang sulit diatasi masih menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Sulitnya mencapai kesepakatan menyebabkan hingga saat ini penyelesaian damai yang tuntas belum tercapai, meskipun beberapa isu telah diatasi (Kaliber, 2021).

Konflik antara etnis Siprus Yunani dan Siprus Turki telah menyebabkan penderitaan manusia, pemisahan keluarga, dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Lamanya periode konflik yang terjadi, telah menjadikan konflik Siprus sebagai salah satu konflik tertua di dunia. Isu-isu seperti pengaturan wilayah, keamanan, dan status politik masih menjadi perdebatan yang sulit. Meskipun perundingan telah gagal dalam beberapa kesempatan, komunitas internasional terus mendukung upaya perdamaian di Siprus dengan harapan bahwa penyelesaian akhir dapat dicapai untuk mengakhiri pemisahan dan ketegangan antara komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki. Harapan masih ada untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Siprus dan menyatukan kembali kedua komunitas secara damai.

C. Konflik Basque di Spanyol dan Prancis

Konflik Basque mengacu pada sejarah konflik politik dan kekerasan yang berkecamuk di wilayah Basque. Konflik ini memiliki akar sejarah yang dalam dan kompleks, dengan beberapa faktor yang memengaruhi perkembangannya, termasuk identitas etnis, politik, sosial, dan sejarah. Wilayah Basque sendiri merupakan sebuah wilayah otonom di utara Spanyol dan selatan Prancis. Wilayah ini dikenal karena memiliki budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya.

Wilayah Basque terdiri dari tiga provinsi utama di Spanyol, yaitu Gipuzkoa, Bizkaia, dan Arab, serta tiga provinsi di Prancis, yaitu Lapurdi, Benafarroa, dan Zuberoa. Wilayah Basque ini memiliki identitas budaya yang kuat, dengan bahasa Basque (Euskara) yang merupakan salah satu bahasa tertua di Eropa. Bahasa ini bukan berasal dari keluarga bahasa Indo-Eropa yang umum seperti bahasa Spanyol atau Prancis, melainkan adalah bahasa yang berdiri sendiri, dan belum ada hubungan genetik yang jelas dengan bahasa-bahasa lain. Orang Basque telah mempertahankan bahasa Euskara sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka (Astrain & Stephens, 1997).

Selain itu, wilayah Basque juga dikenal dengan kebudayaan tradisional yang kuat, termasuk musik, tarian, dan olahraga yang khas. Misalnya, musik tamborin Basque atau “tamborrada” dan olahraga jai alai adalah contoh dari ekspresi budaya yang unik dalam masyarakat Basque. Terkait hal ini, orang Basque telah lama berjuang untuk mempertahankan identitas mereka dan otonomi budaya, terutama ketika Spanyol dan Prancis mengambil alih wilayah ini (Astrain & Stephens, 1997).

Dalam struktur pemerintahan, wilayah Basque memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Spanyol. Ini termasuk otonomi dalam pengaturan

pajak, pendidikan, dan bahkan kebijakan keamanan. Otonomi ini diatur oleh Statuta Otonomi Basque, yang memberikan pemerintah Basque sejumlah hak dan kekuasaan dalam mengatur urusan internal wilayah mereka. Secara umum, hampir sepanjang abad ke-20, terdapat perjuangan politik untuk otonomi yang lebih besar dan bahkan tuntutan kemerdekaan penuh di antara sebagian kelompok masyarakat Basque.

Konflik Basque modern sendiri bermula pada awal abad ke-20, yaitu ketika organisasi separatist Basque yang disebut ETA (*Euskadi Ta Askatasuna*, yang berarti “Tanah Basque dan Kebebasan”) didirikan pada tahun 1959. ETA memulai serangannya untuk mencapai otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan, yaitu dengan menggunakan taktik kekerasan seperti serangan bom dan pembunuhan. Selain ETA, terdapat juga kelompok-kelompok lain yang lebih moderat yang berjuang untuk perubahan politik melalui metode nonkekerasan (Chapman, 2005).

Pemerintah Spanyol dan Prancis kemudian mengambil tindakan keras terhadap ETA dan kelompok separatist Basque lainnya. Hal ini menyebabkan konflik yang berlarut-larut selama beberapa dekade, dengan ribuan korban jiwa. Pada tahun 2011, ETA mengumumkan gencatan senjata permanen dan tidak lagi aktif menggunakan kekerasan bersenjata. Langkah ini diterima baik oleh banyak pihak. Pada tahun 2018, ETA mengumumkan pembubaran resmi kelompok mereka (Espiau, 2019).

Setelah pembubaran ETA, terjadi upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah Basque. Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, tetapi masih terdapat tantangan lain yang harus diatasi, termasuk pemulihan masyarakat dan pembangunan politik yang lebih stabil. Di samping itu, perasaan kemerdekaan Basque masih ada di kalangan sebagian penduduk wilayah tersebut. Kondisi ini membutuhkan upaya rekonsiliasi

dan negosiasi berlanjut untuk mencapai penyelesaian yang lebih berkelanjutan.

Berakhirnya kegiatan kekerasan oleh ETA dan proses perdamaian di wilayah Basque merupakan contoh positif bagi upaya rekonsiliasi di Eropa. Pemimpin dan masyarakat di wilayah tersebut telah berusaha untuk mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan. Pengalaman ini dapat digunakan sebagai inspirasi bagi upaya rekonsiliasi di wilayah lain yang telah atau sedang mengalami konflik. Secara keseluruhan, konflik Basque telah memiliki dampak yang signifikan pada wilayah tersebut dan juga memberikan pelajaran berharga bagi Eropa dalam menangani konflik dan mencapai perdamaian serta rekonsiliasi.

D. Konflik Ukraina dan Ketegangan dengan Rusia

Konflik Ukraina dan ketegangan dengan Rusia adalah dua isu yang telah memengaruhi situasi di Eropa Timur dan hubungan internasional secara signifikan. Konflik ini sangat kompleks yang melibatkan sejumlah faktor politik, sejarah, dan geopolitik.

Kompleksitas Sumber Konflik Ukraina

Konflik Ukraina melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah Ukraina, kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk, serta Rusia sebagai pihak yang diduga mendukung separatis. Banyaknya pihak yang terlibat, menciptakan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam menilai pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik Ukraina dipandang telah menguji kemampuan UE untuk merespons secara efektif karena krisis ini melibatkan sejumlah faktor yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam upaya mengatasi konflik.

Konflik Ukraina dan Rusia memiliki akar sejarah yang kompleks dan panjang yang berasal dari sejarah politik, budaya, dan etnis di wilayah tersebut. Di masa lampau, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ukraina telah lama menjadi pusat peradaban dan memiliki sejarah yang kaya. Pada abad pertengahan, Ukraina merupakan bagian dari Keharyapatihan Kiev, salah satu negara terawal di Eropa Timur. Selama berabad-abad, wilayah ini telah menjadi objek penaklukan oleh berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia (Dibb, 2014).

Setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917, wilayah Ukraina menyatakan kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia dan mendirikan Republik Rakyat Ukraina. Namun, dalam beberapa tahun, wilayah ini jatuh ke dalam konflik antara Bolshevik (komunis) dan pasukan pro-kemerdekaan. Pada tahun 1922, Ukraina menjadi salah satu anggota pendiri Uni Soviet dan berpartisipasi dalam pembentukan Uni Soviet. Pada tahun 1932-1933, Ukraina mengalami kelaparan besar yang dikenal sebagai Holodomor, yang disebabkan oleh kebijakan kolektivisasi paksa yang diterapkan oleh pemerintah Soviet. Jutaan orang Ukraina meninggal akibat kelaparan ini, dan peristiwa ini menjadi pemicu ketegangan historis antara Ukraina dan Rusia (Matveeva, 2022).

Selama Perang Dunia II, wilayah Ukraina menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Nazi Jerman dan Uni Soviet. Banyak penduduk Ukraina terlibat dalam perlawanan terhadap kedua pihak. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh, dan Ukraina meraih kemerdekaannya. Negara ini menjadi Republik Ukraina yang merdeka.

Konflik antara Ukraina dan Rusia mencapai titik puncaknya pada tahun 2014, yaitu ketika Ukraina mengalami perubahan rezim politik yang berawal dari terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai “Euromaidan” atau “Revolusi Dignitas”

pada November 2013 di Kiev, ibu kota Ukraina. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Presiden Viktor Yanukovych untuk menolak perjanjian asosiasi dengan UE yang telah lama dinantikan oleh banyak warga Ukraina. Demonstran menuntut perubahan politik, transparansi, dan integrasi dengan UE (Hanappi, 2022).

Demonstrasi Euromaidan mencapai puncaknya pada Februari 2014 ketika bentrokan antara polisi dan demonstran mengakibatkan banyak korban jiwa. Akibat tekanan internasional dan meningkatnya ketegangan di Kiev, Yanukovych melarikan diri dari Ukraina pada tanggal 22 Februari 2014. Sebagai respons terhadap pengunduran diri Yanukovych, otoritas sementara di Kiev membentuk pemerintahan transisi. Setelah penggulingan Yanukovych, Rusia mengambil tindakan militer di Krimea, sebuah semenanjung di wilayah Ukraina yang memiliki mayoritas penduduk etnis Rusia dan secara tidak resmi menggabungkannya dengan Rusia. Pada tanggal 18 Maret 2014, Rusia secara resmi mengumumkan aneksasi Krimea, mengklaim bahwa ini adalah tanggapan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “ancaman terhadap warga etnis Rusia” dan untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sebuah referendum kemudian diadakan yang menunjukkan mayoritas penduduk mendukung aneksasi oleh Rusia. Namun, referendum tersebut diakui sebagai kontroversial karena terjadi di tengah kehadiran militer Rusia yang kuat dan dalam situasi yang tidak stabil (Hanappi, 2022).

Tindakan Rusia menganeksasi Krimea memicu kemarahan internasional dan dipandang sebagai aneksasi ilegal oleh Rusia. Banyak negara dan organisasi internasional, termasuk AS dan UE, mengutuk aneksasi Krimea dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai responsnya. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan perdagangan dengan Rusia. PBB juga memutuskan untuk tidak mengakui aneksasi Krimea oleh Rusia.

Setelah aneksasi Krimea oleh Rusia, wilayah tersebut secara de facto menjadi bagian dari Rusia, meskipun Ukraina tetap mengklaim kedaulatan atas Krimea. Hal ini menciptakan ketegangan yang berlanjut antara kedua negara. Konflik bersenjata di Krimea kemudian mereda dengan cepat, tetapi konflik meluas ke wilayah Donbas di timur Ukraina, termasuk Donetsk dan Luhansk, yang secara de facto dikuasai oleh kelompok pemberontak yang didukung oleh Rusia. Pertempuran berkelanjutan antara pasukan pemberontak yang didukung oleh Rusia dan pasukan Ukraina menyebabkan ribuan kematian dan pengungsi. Di lain pihak, aneksasi Krimea oleh Rusia tetap menjadi sumber ketegangan dan kontroversi internasional, dan situasinya masih belum terselesaikan. Peristiwa ini juga memicu ketegangan yang berlanjut antara Rusia dan negara-negara Barat serta memengaruhi dinamika politik dan keamanan di wilayah Eropa Timur.

Ketegangan Geopolitik dalam Konflik Ukraina-Rusia

Ketegangan geopolitik dalam konflik Ukraina-Rusia sangat kompleks dan memengaruhi dinamika keamanan global. Ketegangan geopolitik ini memengaruhi stabilitas di Eropa Timur dan berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Upaya diplomasi dan mediasi internasional terus berlangsung untuk mencari solusi damai. Namun, hingga saat ini, ketegangan tetap tinggi, dan konflik Ukraina-Rusia tetap menjadi salah satu fokus utama dalam geopolitik global.

Konflik Ukraina di antaranya terkait dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan Rusia dan barat, termasuk UE. UE harus menangani ketegangan ini dengan hati-hati, karena hubungan ekonomi, politik, dan keamanan dengan Rusia menjadi faktor penting dalam respons UE terhadap konflik ini. Dalam mengatasi konflik Ukraina, UE juga harus berkoordinasi dengan organisasi internasional lainnya seperti PBB dan OSCE, yang memiliki

peran dalam memfasilitasi upaya diplomatik dan pengawasan di lapangan (Davis & Slobodchikoff, 2022).

Konflik Ukraina-Rusia juga meningkatkan peran NATO dalam perlindungan dan pembelaan negara-negara Eropa Timur yang anggotanya merasa terancam oleh tindakan agresif Rusia. Aliansi ini meningkatkan kehadiran militer di wilayah Baltik dan Eropa Timur, yang memicu reaksi keras dari Rusia dan meningkatkan ketegangan. Peningkatan kehadiran militer NATO ini mencakup peningkatan pasukan, latihan militer bersama, dan pemasangan sistem pertahanan udara. NATO juga membentuk *Enhanced Forward Presence* (eFP), yang melibatkan penempatan pasukan aliansi di negara-negara Baltik (Latvia, Lithuania, Estonia) dan Polandia. Pasukan ini bertindak sebagai pembelajaran dan penyelidik terdepan, serta sebagai tanda komitmen NATO untuk melindungi anggotanya. Dilakukan pula pembentukan *NATO Response Force* (NRF) yang merupakan kekuatan siap tempur NATO yang dapat diaktifkan dengan cepat dalam situasi krisis. NATO juga memasang sistem pertahanan udara, termasuk rudal pertahanan udara, di negara-negara anggota Eropa Timur untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman udara potensial (Davis & Slobodchikoff, 2022).

Keterlibatan NATO dalam konflik Ukraina-Rusia ini sebetulnya dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan strategis dan keamanan, di mana salah satunya adalah komitmen terhadap Prinsip Pertahanan Kolektif (*Principles of Collective Defense*) yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Ukraina memang bukan anggota NATO, tetapi aliansi ini tetap menganggap penting untuk menegaskan komitmennya terhadap prinsip ini. Dalam konteks ini, tindakan agresif Rusia di Ukraina Timur dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan kolektif Eropa (Davis & Slobodchikoff, 2022).

Di samping itu, peningkatan kehadiran Rusia di perbatasan Eropa, terutama di Eropa Timur, juga telah menciptakan ketegangan dan kekhawatiran di antara negara-negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia. Hal ini mendorong NATO untuk meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut sebagai langkah pencegahan. Hal penting lainnya, keterlibatan NATO dalam konflik ini adalah pesan deterrensi kepada Rusia agar tidak melakukan tindakan agresif atau ekspansionis lebih lanjut di wilayah Eropa Timur. Aliansi ini ingin menunjukkan bahwa NATO akan mendukung dan melindungi negara-negara anggota yang merasa terancam oleh tindakan agresif Rusia. Dalam konteks ini, stabilitas di Eropa dipandang sebagai kepentingan strategis bagi NATO. Konflik di Ukraina dan ketegangan yang berkembang antara NATO dan Rusia dapat mengancam stabilitas kawasan tersebut, yang berpotensi menciptakan krisis keamanan yang lebih besar. Meskipun demikian, NATO juga berperan dalam mendukung upaya diplomatik untuk mencari solusi damai bagi konflik Ukraina-Rusia, di mana NATO mendukung peran OSCE dalam mediasi dan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung negosiasi (Minic, 2022).

Dengan demikian, penting pula untuk dicatat bahwa sementara NATO terlibat dalam isu-isu keamanan di Eropa Timur dan mendukung Ukraina dalam konflik ini, aliansi ini juga bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi damai. Akan tetapi, kehadiran dan komitmen NATO di wilayah tersebut telah menciptakan ketegangan geopolitik dengan Rusia, yang menjadi salah satu sumber ketidakstabilan di kawasan tersebut. Dalam hal ini, peningkatan kehadiran NATO di dekat perbatasan Rusia telah memicu reaksi keras dari pihak Rusia. Rusia melihat langkah-langkah ini sebagai ancaman terhadap keamanannya dan kemudian merespons dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan aktivitas militernya sendiri di wilayah perbatasan

Eropa Timur. Ini termasuk peningkatan latihan militer, pemasangan sistem pertahanan udara, dan peningkatan kehadiran pasukan. Pemerintah Rusia juga mengeluarkan pernyataan terhadap NATO, yaitu sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia, sekaligus memperingatkan tentang potensi konsekuensi serius jika NATO terlibat dalam konflik di wilayah tersebut.

Selain masalah keamanan, konflik Ukraina-Rusia juga mencerminkan kompetisi ideologis antara model demokrasi liberal yang didukung oleh Barat dan model otoriter yang diperjuangkan oleh Rusia. Perbedaan dalam pandangan ideologis ini telah memperdalam ketegangan ideologis di tingkat global dan menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan internasional. Konflik ini juga melibatkan propaganda dan pengaruh media, baik pihak Barat maupun Rusia telah menggunakan media dan propaganda untuk mempromosikan pandangan dan agenda mereka, termasuk di antaranya kampanye informasi yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik dan persepsi internasional tentang konflik (Minic, 2022).

Kompetisi ideologis ini juga menciptakan ketegangan di dalam organisasi internasional seperti PBB. Rusia menggunakan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memblokir tindakan internasional terhadap konflik di Ukraina, yang menghambat upaya-upaya resolusi. Secara umum, kompetisi ideologis ini menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan internasional dan berkontribusi pada ketegangan global yang lebih luas. Hal ini juga memengaruhi peran dan reaksi negara-negara lain di seluruh dunia terhadap konflik Ukraina-Rusia dan masalah ideologis yang lebih besar yang terkait dengannya.

Salah satu pengaruh dari konflik Ukraina-Rusia terhadap peran aktor global lainnya, dapat terlihat pada China dan negara-negara BRICS lainnya, yaitu Brazil, Rusia, India, dan

Afrika Selatan. China memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia. Meskipun keduanya memiliki perbedaan pandangan di beberapa isu internasional, seperti masalah perbatasan di sepanjang perbatasan Siberia, tetapi kedua negara ini juga menjalin kerja sama strategis dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, energi, dan diplomasi. Dalam konteks konflik Ukraina-Rusia, China cenderung mempertahankan sikap netral dan tidak secara terbuka mengutuk tindakan Rusia. China juga menggunakan konflik Ukraina-Rusia untuk mengonsolidasikan posisinya sebagai pemain ekonomi global, termasuk upayanya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa yang mungkin mencari alternatif sumber investasi dan perdagangan akibat sanksi yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia (Cox, 2023).

Di sisi lain, konflik Ukraina-Rusia telah memengaruhi peran Rusia dalam kelompok BRICS. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia telah memberikan tekanan ekonomi pada negara tersebut, yang juga memengaruhi kapasitasnya untuk berperan sebagai pemain utama dalam kelompok ini. Meskipun demikian, BRICS masih dapat dinyatakan sebagai forum penting bagi negara-negara tersebut, terutama untuk berkoordinasi dalam isu-isu terkait ekonomi global dan politik internasional. Terkait konflik Ukraina-Rusia ini, negara-negara BRICS lainnya, seperti Brazil, India, dan Afrika Selatan, cenderung mempertahankan sikap netral. Negara-negara ini tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia tanpa memihak dalam konflik tersebut serta berupaya menjaga stabilitas dalam kelompok BRICS itu sendiri (Cox, 2023).

Upaya Penyelesaian Konflik Ukraina-Rusia

Konflik Ukraina-Rusia bukan hanya telah menciptakan ketegangan keamanan di Eropa Timur. Konflik ini juga telah menyebabkan krisis pengungsi di Eropa. Banyak warga Ukraina yang melarikan diri dari daerah konflik, mencari suaka di negara-

negara Eropa, terutama di Polandia dan negara-negara Baltik. Hal ini telah menimbulkan tekanan pada sistem pengungsi di Eropa dan menimbulkan isu-isu politik internal di beberapa negara Eropa. Lebih jauh, konflik ini juga memengaruhi dinamika politik di beberapa negara Eropa. Beberapa partai yang memiliki pandangan pro-Rusia atau anti-Eropa telah mendapatkan dukungan yang lebih besar, sementara partai-partai pro-Eropa juga telah menjadi lebih vokal dalam mendukung Ukraina dan menekan Rusia (Cox, 2023).

Di lain pihak, terdapat fakta bahwa Rusia adalah salah satu pemasok utama gas alam dan minyak ke Eropa. Konflik ini telah meningkatkan kekhawatiran tentang ketergantungan Eropa pada pasokan energi Rusia. Oleh karena itu, negara-negara Eropa mencari alternatif sumber energi dan berupaya melakukan diversifikasi pasokan energi mereka untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia. Hal ini juga terkait dengan hubungan ekonomi UE-Rusia yang memang sangat signifikan, ditandai dengan Rusia adalah mitra dagang penting bagi banyak negara UE, terutama dalam hal energi. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh UE sebagai respons terhadap aneksasi Krimea dan konflik di Ukraina mencerminkan kompromi antara menjaga prinsip-prinsip hukum internasional dan mempertahankan hubungan ekonomi. Ini juga mencakup sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan tindakan tersebut.

Upaya penyelesaian konflik Ukraina-Rusia sendiri telah berlangsung sejak dimulainya konflik pada tahun 2014. Berbagai aktor internasional telah terlibat dalam upaya mediasi dan diplomasi untuk mencari solusi damai bagi konflik ini, misalnya melalui Perjanjian Minsk, upaya-upaya diplomasi bilateral, sanksi ekonomi, dialog rakyat-ke-rakyat, Pertemuan Normandy Format, upaya PBB, dan upaya-upaya UE (Hanappi, 2022).

Perjanjian Minsk merupakan upaya diplomasi utama yang telah disepakati pada tahun 2014 dan 2015 dalam upaya untuk mengakhiri konflik di Ukraina Timur. Perjanjian ini melibatkan perwakilan Ukraina, Rusia, OSCE, dan kelompok pemberontak. Perjanjian Minsk terdiri dari dua kesepakatan utama yang dikenal sebagai Minsk I dan Minsk II. Perjanjian Minsk I disepakati pada tanggal 5 September 2014 di ibu kota Belarus, Minsk. Perjanjian ini mencakup gencatan senjata, pertukaran tahanan perang, dan rencana untuk memulai proses politik yang lebih luas di Ukraina Timur. Selain itu, perjanjian ini menetapkan langkah-langkah seperti penarikan senjata berat dan pengawasan dari OSCE. Meskipun perjanjian ini menciptakan gencatan senjata sementara, konflik berlanjut dengan bentrokan sporadis (Matveeva, 2022).

Perjanjian Minsk kedua, yang juga dikenal sebagai Minsk II, disepakati pada tanggal 12 Februari 2015 setelah berbulan-bulan negosiasi lanjutan. Perjanjian ini menegaskan gencatan senjata, penarikan senjata berat, dan penciptaan zona demiliteris. Selain itu, Minsk II menguraikan rencana politik yang lebih terinci, termasuk otonomi yang lebih besar bagi wilayah-wilayah yang terpengaruh konflik di Ukraina Timur dan pemilihan lokal di wilayah tersebut. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk mengimplementasikan Minsk II, gencatan senjata yang sering kali dilanggar dan kesulitan dalam mencapai konsensus politik telah menyulitkan implementasinya. Secara garis besar, Perjanjian Minsk sebetulnya adalah upaya diplomasi yang penting untuk mencari solusi damai bagi konflik Ukraina-Rusia. Namun, implementasinya sulit dilakukan dan faktanya konflik terus berlanjut dengan berbagai eskalasi dan ketegangan di wilayah tersebut. Peran OSCE sebagai pemantau implementasi perjanjian ini juga menjadi penting dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran serta mengawasi prosesnya (Minic, 2022).

Upaya penyelesaian konflik Ukraina-Rusia lainnya ditempuh melalui berbagai upaya diplomasi bilateral. Beberapa negara dan pemimpin dunia, termasuk Prancis, Jerman, dan AS, telah terlibat dalam upaya diplomasi bilateral untuk mencari solusi damai. Prancis dan Jerman, misalnya, memainkan peran kunci sebagai perantara dalam upaya-upaya ini. Inisiatif diplomatik ini mencerminkan komitmen kedua negara tersebut untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan mempromosikan perdamaian di Eropa Timur.

Upaya penyelesaian juga ditempuh melalui pertemuan Normandy Format, yaitu forum diplomatik yang melibatkan empat negara utama (Prancis, Jerman, Ukraina, dan Rusia) yang berperan dalam mencari solusi damai untuk konflik Ukraina-Rusia. Nama “Normandy Format” merujuk pada tempat pertemuan pertama kali, yaitu di Normandy, Prancis, pada bulan Juni 2014. Pertemuan Normandy Format telah menjadi platform penting dalam upaya mencari solusi bagi konflik di Ukraina Timur, yaitu dengan berfokus pada implementasi Perjanjian Minsk, gencatan senjata, pertukaran tahanan perang, dan rencana politik yang lebih luas untuk mengakhiri konflik. Pertemuan Normandy Format telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan perjanjian sementara selama berlangsungnya konflik, meskipun pencapaian perdamaian yang berkelanjutan tetap menjadi tujuan yang sulit dicapai karena kompleksitas konflik dan ketegangan geopolitik yang terkait (Minic, 2022).

Upaya penyelesaian berikutnya, ditempuh melalui dialog rakyat-ke-rakyat, di mana upaya ini digunakan untuk mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi antara warga Ukraina yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Program-program semacam ini bertujuan untuk mengatasi perpecahan dan menciptakan dasar untuk perdamaian

berkelanjutan. PBB juga berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui Dewan Keamanan dan organisasi PBB lainnya. Namun, veto Rusia dalam Dewan Keamanan telah membatasi kemampuan PBB untuk mengambil tindakan tegas. Sementara, UE dan AS juga telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai tekanan untuk mencari solusi damai. Sanksi ini melibatkan pembatasan perdagangan, akses ke pasar keuangan, dan pelarangan perjalanan bagi sejumlah individu dan entitas yang terkait dengan konflik (Cox, 2023).

Lebih lanjut, UE juga telah berupaya untuk memfasilitasi upaya diplomatik guna mencapai penyelesaian konflik di Ukraina. Dalam hal ini, koordinasi dengan organisasi internasional ditempuh oleh UE, di mana UE bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, seperti PBB dan OSCE yang dilakukan dalam upaya memfasilitasi penyelesaian konflik dan mengawasi situasi di Ukraina. Sebagai tambahan, UE juga memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada Ukraina yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh konflik. Dukungan yang diberikan ini misalnya dalam bentuk bantuan pangan, perawatan medis, dan proyek-proyek pembangunan untuk membantu memulihkan ekonomi dan infrastruktur yang rusak (Cox, 2023).

Konflik Ukraina adalah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk geopolitik, ekonomi, dan kemanusiaan. Peran UE dalam mengatasi konflik ini mencerminkan pentingnya koordinasi, diplomasi, dan upaya untuk mencapai penyelesaian damai yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kerja sama dengan organisasi internasional lainnya juga sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada faktanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik Ukraina-Rusia masih berlanjut hingga saat ini, dan penyelesaiannya tetap menjadi tantangan

besar. Faktor-faktor seperti perbedaan ideologis, ketegangan geopolitik, dan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat memperumit proses penyelesaian. Upaya terus dilakukan untuk mencari solusi damai dan mengatasi konflik ini, tetapi perjalanan menuju perdamaian yang berkelanjutan masih jauh.

Invasi Rusia ke Ukraina 2022

Konflik di Ukraina meningkat menjadi perang pada 24 Februari 2022 yang ditandai dengan suara tembakan dan ledakan menyusul perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi negara tersebut. Invasi tersebut menjadi serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia II, di mana diperkirakan telah menimbulkan puluhan ribu korban sipil di Ukraina dan ratusan ribu korban militer. Pada Juni 2022, pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina. Sebagai akibatnya, sekitar 8 juta warga Ukraina menjadi pengungsi internal dan lebih dari 8,2 juta orang meninggalkan negara itu pada April 2023, sehingga menciptakan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Kerusakan lingkungan yang luas akibat perang, yang secara luas digambarkan sebagai ekosida, juga berkontribusi terhadap krisis pangan di seluruh dunia (Cox, 2023).

Sebelum terjadinya invasi tersebut, pasukan Rusia berkumpul di dekat perbatasan Ukraina sementara para pejabat Rusia membantah adanya rencana serangan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” (“*special military operation*”) untuk mendukung republik-republik memisahkan diri yang didukung Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang pasukan paramiliternya telah berperang melawan Ukraina dalam konflik Donbas sejak tahun 2014. Putin juga mengeklaim bahwa Ukraina diperintah oleh neo-Nazi yang menganiaya minoritas Rusia, sehingga Putin menyatakan tujuannya adalah untuk “demiliterisasi” dan “denazifikasi” Ukraina (Cox, 2023).

Serangan udara dan invasi darat Rusia kemudian dilancarkan di *front* utara dari Belarus menuju Kyiv, *front* selatan dari Krimea, dan *front* timur dari Donbas dan menuju Kharkiv. Ukraina memberlakukan darurat militer, memerintahkan mobilisasi umum dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Pasukan Rusia kemudian mundur dari *front* utara pada April 2022 setelah menghadapi tantangan logistik dan perlawanan keras dari Ukraina. Di *front* selatan dan tenggara, Rusia merebut Kherson pada bulan Maret dan Mariupol pada bulan Mei setelah sebuah pengepungan besar.



Rute invasi Rusia ke Ukraina.

Sumber: *Can Russia be held responsible for their invasion of Ukraine?*

<https://legalresearch.blogs.bris.ac.uk/2022/04/can-russia-be-held-responsible-for-their-invasion-of-ukraine/>

Rusia juga melancarkan serangan baru di Donbas dan terus mengebom sasaran militer dan sipil jauh dari garis depan, termasuk jaringan energi sepanjang musim dingin. Pada akhir tahun 2022, Ukraina melancarkan serangan balasan yang berhasil di selatan dan timur. Segera setelah itu, Rusia mengumumkan aneksasi ilegal terhadap empat wilayah yang sebagian didudukinya. Pada bulan

November, Ukraina merebut kembali sebagian Oblast Kherson, termasuk kota Kherson sendiri. Pada bulan Juni 2023, Ukraina melancarkan serangan balasan lainnya di tenggara (Cox, 2023).

Invasi Rusia tersebut kemudian mendapat kecaman internasional. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam invasi tersebut dan menuntut penarikan penuh militer Rusia pada Maret 2022, sementara Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi militer. Berbagai negara juga menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan sekutunya Belarus, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan militer kepada Ukraina. Demikian halnya semua negara Baltik menyatakan Rusia sebagai negara teroris. Protes juga terjadi di seluruh dunia, bersamaan dengan penangkapan massal terhadap pengunjung rasa anti-perang di Rusia, yang juga memberlakukan undang-undang yang memungkinkan sensor media yang lebih besar (Hanappi, 2022).

Selain itu, lebih dari 1.000 perusahaan menutup operasinya di Rusia dan Belarus akibat invasi tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court/ICC*) membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penculikan anak-anak, dan genosida. Sebagai hasilnya, ICC kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova pada Maret 2023, dengan tuduhan bertanggung jawab atas deportasi anak-anak yang melanggar hukum (Cox, 2023).

E. Masa Depan Perdamaian di Eropa

Masa depan perdamaian di Eropa adalah hal yang sangat penting dan relevan mengingat sejarah konflik di wilayah ini. Beberapa negara di Eropa bahkan menghadapi tantangan serius terkait perpecahan etnis dan budaya. Isu-isu ini berpotensi

menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan mengancam perdamaian. Beberapa negara Eropa yang menghadapi tantangan ini misalnya di Balkan, Ukraina, Spanyol, Rusia, dan Makedonia Utara.

Wilayah Balkan memiliki sejarah yang penuh dengan konflik antaretnis dan perpecahan budaya. Sejumlah perang terjadi di wilayah ini pada tahun 1990-an, termasuk Perang Bosnia dan Perang Kosovo, yang melibatkan perpecahan etnis antara kelompok Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Albania. Demikian halnya dengan konflik di Ukraina Timur, yang melibatkan separatistis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk, adalah contoh lain dari konflik etnis di Eropa. Isu-isu etnis dan identitas menjadi sangat penting dalam konflik ini. Sementara Spanyol menghadapi konflik budaya dan politik yang serius dengan Catalonia yang merupakan salah satu daerah di Spanyol. Gerakan kemerdekaan Catalonia, yang ingin memisahkan diri dari Spanyol, mencerminkan ketegangan etnis dan budaya. Rusia juga merupakan negara dengan keragaman etnis dan budaya yang besar. Dalam hal ini, tantangan perpecahan budaya dan etnis, terutama di wilayah Kaukasus dan Tatarstan, dapat menjadi sumber ketegangan internal bagi Rusia. Hal yang sama juga dihadapi oleh Makedonia Utara, di mana negara ini mengalami konflik antara kelompok etnis Makedonia dan Albania, yang menciptakan ketegangan antaretnis dalam sejarahnya (Bache et al., 2015). Berbagai tantangan perpecahan etnis dan budaya ini dapat berdampak serius pada stabilitas dan perdamaian di negara-negara tersebut. Bukan hanya berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan politik, tetapi juga menghambat proses rekonsiliasi dan inklusi sosial.

Perubahan iklim, pengungsi, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, serta perubahan politik global adalah isu-isu global yang juga ikut memengaruhi stabilitas di Eropa. Penanganan isu-isu ini

adalah bagian penting dalam menjaga perdamaian. Sebagai contoh, perubahan iklim adalah permasalahan global yang memengaruhi Eropa, seperti wilayah lain di dunia. Eropa mengalami peningkatan suhu yang lebih cepat daripada rata-rata global. Peningkatan suhu ini dapat mengakibatkan gelombang panas ekstrem, cuaca ekstrem, dan perubahan musim yang signifikan. Terkait hal ini, banyak negara Eropa berkomitmen untuk mencapai target perubahan iklim dalam Perjanjian Paris, yang mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca. Memastikan pencapaian target ini memerlukan upaya besar dalam mengubah sektor-sektor seperti energi, transportasi, dan industri. Kenaikan permukaan laut juga dapat mengancam wilayah pesisir Eropa. Dalam hal ini, beberapa negara seperti Belanda dan Italia memiliki risiko khusus terhadap kenaikan permukaan laut. Sementara, wilayah-wilayah tertentu di Eropa, seperti Laut Baltik dan wilayah Arktik di sebelah utara, sangat rentan terhadap perubahan iklim dan menghadapi tantangan khusus. Pada akhirnya, perubahan iklim dapat memicu konflik atas sumber daya alam yang terbatas dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik di Eropa (Borg & Diez, 2016).

Untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim di Eropa, negara-negara Eropa harus bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, menyesuaikan infrastruktur dengan dampak perubahan iklim yang sudah ada, dan mengembangkan kebijakan untuk mengurangi kerentanannya terhadap perubahan iklim. Hal ini juga melibatkan kerja sama internasional dalam rangka mencapai tujuan global dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang tepat, Eropa dapat berperan sebagai pemimpin dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Berikutnya, isu pengungsi juga sangat memengaruhi masa depan perdamaian di Eropa, utamanya terkait bagaimana isu

pengungsi dikelola dan bagaimana negara-negara Eropa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan ini. Isu pengungsi di Eropa pada dasarnya sering kali menjadi isu politik yang kontroversial. Krisis pengungsi yang berhubungan dengan konflik dan krisis kemanusiaan di Timur Tengah dan Afrika Utara ini telah berdampak besar pada Eropa. Pengungsi yang datang ke Eropa untuk mencari perlindungan telah menciptakan tantangan sosial, ekonomi, dan politik (Borg & Diez, 2016). Tantangan integrasi dan distribusi pengungsi di antara negara-negara Eropa ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik di dalam negeri, yang pada akhirnya akan memengaruhi stabilitas politik dan pemahaman antarnegara Eropa.

Dalam konteks isu pengungsi, juga terdapat kekhawatiran tentang infiltrasi oleh kelompok ekstremis atau teroris, yang dipandang akan menciptakan ketidakpastian keamanan di beberapa negara Eropa. Isu pengungsi terbukti juga telah memicu terjadinya polarisasi dalam opini publik di Eropa. Beberapa negara Eropa juga mengalami pergeseran politik yang berpotensi memengaruhi cara mereka menangani isu pengungsi. Singkatnya, isu ini merupakan ujian bagi kesatuan Eropa, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari integrasi Eropa. Dengan pendekatan yang bijaksana, kolaboratif, dan perhatian terhadap HAM, Eropa dapat menjaga perdamaian dan stabilitas di masa depan.

Tantangan terkait masa depan perdamaian di Eropa juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan yang dapat menciptakan ketidakpuasan sosial dan politik di Eropa. Kesenjangan ekonomi yang tajam dapat menghasilkan perasaan ketidakadilan dan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara negara-negara di Eropa ini juga dapat

menjadi sumber ketegangan dalam UE. Negara-negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi dapat menghadapi tekanan untuk meninggalkan atau mengubah hubungan mereka dengan UE.

Terakhir, perubahan politik global memiliki dampak yang signifikan pada hubungan Eropa dengan negara-negara lain di dunia. Pergeseran kekuatan global, perubahan dalam diplomasi internasional, dan peristiwa-peristiwa penting di luar Eropa dapat memengaruhi dinamika geopolitik dan kerja sama internasional Eropa. Dalam hal ini, pergeseran kekuatan global, terutama pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik negara-negara seperti China, dapat memengaruhi hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik Eropa. Eropa harus mampu menyesuaikan strategi luar negerinya untuk mengatasi pergeseran ini (Börzel, 2018).

Perubahan dalam pendekatan diplomatik dengan negara-negara utama seperti AS juga dapat memiliki dampak besar pada Eropa. Misalnya, perubahan pemerintahan di AS dapat mengubah arah kebijakan luar negeri AS yang dapat memengaruhi Eropa. Demikian halnya dengan krisis global seperti pandemi COVID-19 dan konflik regional dapat memaksa Eropa untuk merespons secara cepat dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan ini. Eropa harus terus berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, *Group 20* (G20), dan *Group 7* (G7) untuk memengaruhi agenda global dan berkontribusi pada solusi untuk masalah-masalah global seperti perubahan iklim, pengungsi, dan perdagangan.

Kerja sama dengan negara BRICS dan negara lainnya di seluruh dunia, juga penting untuk terus dijalin karena hal ini bukan hanya dapat menciptakan peluang ekonomi dan diplomatik, tetapi juga menghadirkan peluang dalam mengatasi perbedaan pendekatan dan kepentingan. Eropa perlu terus mengembangkan

kerja sama regional dalam berbagai bentuk, seperti UE, NATO, dan organisasi regional lainnya. Hal ini akan memungkinkan Eropa untuk berbicara dengan suara bersama dalam urusan global dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut (Börzel, 2018).

Eropa juga dapat memainkan peran penting dalam kerja sama global untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, penyebaran senjata nuklir, dan konflik regional. Kerja sama global ini adalah bagian integral dari upaya mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Sementara, dalam upaya menghadapi perubahan politik global, Eropa harus tetap fleksibel, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, HAM, dan perdamaian yang telah menjadi landasan kerja sama internasional. Diplomasi dan dialog tetap menjadi sarana utama dalam menangani perubahan politik global dan menjaga stabilitas di Eropa.

BAGIAN IV

HUBUNGAN EROPA KONTEMPORER DENGAN KAWASAN LAIN

Hubungan Eropa kontemporer dengan kawasan lain sangat penting dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana Eropa adalah salah satu aktor utama dalam berbagai persoalan global. Dalam konteks hubungan ekonomi, Eropa merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Hal ini ditandai dengan keberadaan Pasar Tunggal Eropa yang merupakan pasar tunggal terbesar di dunia. Eropa juga menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan berbagai negara dan kawasan, termasuk Amerika Utara, Asia, dan Afrika. Dalam konteks hubungan politik, Eropa memainkan peran penting dalam diplomasi internasional, di mana UE adalah aktor penting dalam upaya penyelesaian konflik global, promosi perdamaian, dan keamanan. Eropa juga memiliki hubungan politik yang kuat dengan berbagai negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika, sekaligus juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, negara-negara G7, G20, dan NATO. Ini memungkinkan Eropa untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, penyebaran senjata nuklir, dan pengentasan kemiskinan. Sementara, dalam konteks hubungan sosial dan budaya, Eropa adalah rumah bagi beragam budaya dan bahasa, sekaligus ikut menciptakan konektivitas budaya yang kuat dengan kawasan lain di dunia. Keterlibatan aktif Eropa di panggung global ini juga tercermin melalui terjalinnya berbagai jenis hubungan dengan kawasan lain di dunia.

BAB 1

HUBUNGAN TRANSATLANTIK



Eropa memiliki hubungan yang kuat dengan AS, yang sering disebut sebagai “hubungan transatlantik”. Hubungan ini telah menjadi salah satu aspek penting dalam politik dunia selama beberapa dekade. Dalam skala yang lebih luas, hubungan transatlantik adalah salah satu unsur kunci dalam arsitektur keamanan dan politik global saat ini. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan kebijakan dari waktu ke waktu, hubungan ini tetap menjadi aspek sentral dalam kebijakan luar negeri kedua pihak dan memiliki dampak besar terhadap dinamika politik global.

A. Hubungan Transatlantik sebagai Aspek Sentral Hubungan Eropa-AS

Hubungan transatlantik merupakan simbol penting dalam hubungan antara Eropa dan AS, di mana hubungan yang terjalin ini mencakup kerja sama dalam hal keamanan, ekonomi, politik dan diplomasi, serta kultural dan pendidikan. Dalam konteks kerja sama keamanan, hubungan transatlantik didasarkan pada aliansi militer yang kuat antara Eropa, terutama melalui NATO dan AS. NATO merupakan aliansi pertahanan kolektif yang dirancang untuk melindungi anggota dari serangan bersenjata, di mana AS berperan sebagai anggota utama NATO dan menyediakan kontribusi penting dalam upaya keamanan Eropa. Hubungan transatlantik melalui NATO ini, memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Eropa yang ditujukan sebagai upaya melindungi kepentingan bersama. Ini mencerminkan komitmen bersama Eropa dan AS untuk bekerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan yang mungkin timbul, yang berpotensi menciptakan keamanan yang lebih besar bagi semua anggota aliansi. Hubungan transatlantik melalui NATO juga mencerminkan komitmen bersama Eropa dan AS untuk menjaga perdamaian di Eropa setelah pengalaman konflik berkepanjangan dalam sejarah. Dengan mempertahankan aliansi ini, Eropa dan

AS berusaha untuk menciptakan zona keamanan yang stabil dan aman bagi seluruh wilayah (Zielonka, 2008).

Dalam konteks kerja sama ekonomi, Eropa dan AS adalah dua pasar ekonomi terbesar di dunia, di mana UE sebagai entitas ekonomi tunggal, adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, sementara AS juga memiliki ekonomi yang besar dan kuat. Hubungan perdagangan antara keduanya sangat erat, dengan arus barang dan jasa yang besar antara benua Eropa dan Amerika. Keduanya adalah mitra perdagangan utama satu sama lain. Produk-produk yang diperdagangkan mencakup mobil, peralatan elektronik, farmasi, produk-produk pertanian, dan banyak lagi. Ini menciptakan hubungan ekonomi yang vital bagi kedua pihak. Selain perdagangan barang, investasi juga merupakan aspek penting dalam hubungan ekonomi transatlantik. Perusahaan-perusahaan Eropa dan AS melakukan investasi besar di wilayah masing-masing, menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat interkoneksi antara ekonomi kedua kawasan. Selama beberapa dekade terakhir pula, Eropa dan AS telah bekerja sama dalam mengadakan berbagai perjanjian perdagangan dan investasi. Salah satu contoh adalah perjanjian perdagangan bebas antara UE dan AS yang dikenal sebagai *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP), meskipun perjanjian ini belum diimplementasikan (Zielonka, 2017).

Eropa dan AS juga bekerja sama dalam berbagai isu ekonomi global, termasuk penanggulangan perubahan iklim, perpajakan perusahaan multinasional, dan regulasi perdagangan global. Keduanya juga berkolaborasi dalam forum internasional seperti G7, G20, dan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* / WTO). Sementara dalam upaya mengatasi perbedaan terkait regulasi dan standar ekonomi antara Eropa dan AS, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendekatkan perbedaan ini, di antaranya

mencakup kerja sama dalam standar keselamatan produk, regulasi keuangan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks kerja sama politik dan diplomasi, hubungan Eropa dan AS memiliki dampak penting dalam berbagai forum internasional, khususnya dalam menangani sejumlah tantangan global. Dalam forum PBB, Eropa dan AS adalah anggota aktif PBB yang telah berkolaborasi dalam berbagai inisiatif dan badan PBB. Eropa dan AS bersama-sama bekerja untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, HAM, pembangunan berkelanjutan, dan penanganan krisis global. Dalam forum G7 dan G20, Eropa dan AS adalah anggota penting, di mana forum G7 adalah platform untuk dialog ekonomi dan politik yang mendalam, sementara G20 mencakup kelompok negara-negara yang lebih luas dan membahas isu-isu ekonomi global. Kedua forum ini adalah tempat penting bagi negara-negara Eropa dan AS untuk berkoordinasi terkait kebijakan ekonomi, perdagangan, dan keamanan global (Youngs, 2018).

Dalam upaya penyelesaian konflik dan keamanan internasional, Eropa dan AS berkolaborasi dalam penyelesaian konflik dan upaya penjaga perdamaian di seluruh dunia. Misalnya, berkontribusi dalam penanganan konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Balkan, serta mendukung operasi penjaga perdamaian PBB. Terkait pengendalian senjata nuklir, Eropa dan AS juga bekerja sama dalam upaya pengendalian senjata nuklir dan nonproliferasi. Kesepakatan seperti Perjanjian Pengurangan Senjata Nuklir (*New Strategic Arms Reduction Treaty/START*), yang mengatur jumlah senjata nuklir strategis yang dimiliki oleh AS dan Rusia, adalah contoh kerja sama ini. Kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme internasional dan keamanan global lainnya juga merupakan fokus penting dalam hubungan transatlantik. Dalam hal ini, Eropa dan AS bekerja sama dalam berbagi intelijen, penegakan hukum, dan operasi militer

untuk mengatasi ancaman ini. Sementara terkait isu perubahan iklim, kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim adalah salah satu bidang penting dalam hubungan transatlantik. AS dan Eropa memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan telah bekerja sama dalam negosiasi perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (Youngs, 2018). Berbagai kerja sama politik dan diplomasi antara Eropa dan AS ini mencerminkan pentingnya hubungan transatlantik dalam membentuk kebijakan luar negeri global.

Di sisi lain, hubungan transatlantik juga mencakup aspek-aspek budaya, pendidikan, dan pertukaran antara Eropa dan AS. Ini mencerminkan adanya hubungan budaya yang kuat antara kedua wilayah ini. Sebagai contoh, Eropa dan AS memiliki program pertukaran siswa dan mahasiswa yang penting. Program-program seperti Erasmus+ di Eropa dan program pertukaran siswa di AS memungkinkan ribuan siswa Eropa dan AS untuk belajar di negara-negara mitra mereka, sekaligus juga membantu memperkuat pemahaman lintas budaya dan mempromosikan kerja sama pendidikan. Kerja sama dalam industri kreatif seperti film, musik, dan seni visual juga sering kali melibatkan kerja sama lintas batas antara Eropa dan AS. Banyak film internasional diproduksi dengan tim kreatif dari kedua wilayah ini, dan berbagai festival seni dan musik di seluruh dunia mencakup karya-karya dari Eropa dan AS. Terjalannya pertukaran budaya dan pendidikan antara Eropa dan AS ini, tidak hanya memperkuat ikatan antara kedua wilayah, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan individu dan meningkatkan pemahaman lintas budaya di seluruh dunia. Hal ini merupakan bagian penting dari dinamika hubungan transatlantik yang melampaui kerja sama politik dan ekonomi.

B. Perbedaan dan Tantangan dalam Hubungan Transatlantik

Meskipun hubungan transatlantik memiliki banyak aspek positif, terdapat juga perbedaan dan tantangan yang dihadapi. Beberapa isu yang dapat menjadi sumber ketegangan meliputi kebijakan ekonomi dan perdagangan, perbedaan terkait isu-isu global, dan perbedaan pendekatan politik terhadap masalah-masalah keamanan, seperti Iran dan Rusia. Selain itu, perubahan dalam kebijakan luar negeri AS di bawah berbagai pemerintahan, ikut memengaruhi dinamika hubungan transatlantik.

Hubungan ekonomi antara Eropa dan AS memang terjalin sangat erat. Meskipun demikian, terdapat juga ketegangan dan sengketa yang muncul dari waktu ke waktu. Beberapa masalah yang menjadi sumber ketegangan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan transatlantik adalah sebagai berikut (Youngs, 2018).

1. Sengketa perdagangan: sengketa perdagangan antara Eropa dan AS berkaitan dengan berbagai hal, termasuk tarif impor, subsidi pertanian, dan hambatan perdagangan lainnya. Misalnya, pada tahun-tahun terakhir, terjadi perselisihan perdagangan terkait dengan subsidi kepada produsen pesawat Airbus (Eropa) dan Boeing (AS), yang berakhir dengan penegakan tarif saling balas pada produk-produk impor satu sama lain sebagai cara untuk menekan pihak lawan agar mematuhi putusan-putusan WTO. Tarif ini mencakup berbagai produk, termasuk anggur, keju, pesawat komersial, minuman beralkohol, dan produk-produk lainnya.
2. Tarif dan restriksi perdagangan: AS dan UE telah menerapkan tarif terhadap sejumlah produk ekspor dari satu sama lain sebagai tanggapan atas sengketa perdagangan dan masalah perdagangan lainnya. Penetapan tarif ini dapat memengaruhi biaya produk dan mengganggu aliran perdagangan.

3. Perlindungan data dan privasi: isu perlindungan data dan privasi menjadi semakin penting dalam ekonomi digital saat ini. Eropa telah menerapkan regulasi ketat seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR), yang memengaruhi perusahaan AS yang beroperasi di Eropa. Terkait hal ini, terdapat perbedaan pendekatan dalam perlindungan data dan privasi antara Eropa dan AS, yang dapat menimbulkan ketegangan.
4. Isu pajak perusahaan: Isu terkait dengan pajak perusahaan dan praktik perpajakan multinasional juga menjadi sumber ketegangan. Beberapa negara Eropa telah menekankan perlunya perubahan dalam aturan perpajakan internasional untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil.

Penting untuk diingat bahwa berbagai ketegangan yang terjadi ini merupakan bagian dari hubungan ekonomi yang kompleks antara Eropa dan AS, yang pada dasarnya adalah mitra ekonomi yang kuat, sehingga meskipun terdapat sengketa, kedua belah pihak bekerja keras untuk menyelesaikannya melalui dialog dan negosiasi. Hal ini didasari karena Eropa dan AS menyadari pentingnya hubungan ekonomi yang erat dalam mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja di kedua wilayah ini.

Dalam hubungan transatlantik, terdapat pula perbedaan dalam pandangan terhadap isu-isu global seperti krisis migrasi dan upaya penanggulangan perubahan iklim. Terkait krisis migrasi, Eropa telah menghadapi krisis migrasi besar-besaran, terutama pada tahun-tahun terakhir, dengan terus meningkatnya gelombang pengungsi yang mencari perlindungan di benua tersebut. Pandangan dan pendekatan Eropa terhadap krisis ini cenderung lebih inklusif dan berfokus pada HAM dan perlindungan pengungsi. Dalam hal ini negara-negara Eropa (terutama anggota UE) berupaya mencari

solusi bersama untuk krisis migrasi, termasuk pembagian beban antara negara-negara anggota UE dalam menerima pengungsi, serta dukungan terkait upaya penanganan krisis di negara-negara asal pengungsi. Sementara pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap imigrasi dan pengungsi. Pemerintahan Trump mengurangi jumlah pengungsi yang diterima oleh AS dan menarik diri dari Kesepakatan Pengungsi PBB. AS juga memperkenalkan kebijakan yang membatasi akses pengungsi ke AS. Salah satu langkah yang paling mencolok adalah upaya untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan perbatasan (Zielonka, 2017).

Pandangan dan pendekatan yang berbeda ini menciptakan ketegangan dalam hubungan antara Eropa dan AS terkait dengan krisis migrasi. Meskipun demikian, pemerintahan AS yang baru di bawah Presiden Joe Biden, telah mengumumkan niatnya untuk mengubah kebijakan imigrasi dan pengungsi yang lebih inklusif dan berbasis HAM, sekaligus menekankan pada pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi krisis migrasi dan perlunya koordinasi antara berbagai negara untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.



Pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan pimpinan UE merupakan tonggak sejarah dalam kemitraan transatlantik yang baru.

Sumber: EU-US Summit was a Successful Reboot of Transatlantic Relations. <https://www.euronews.com/2021/06/17/eu-us-summit-was-a-successful-reboot-of-transatlantic-relations-view>

Dalam isu terkait penanggulangan perubahan iklim, juga terdapat perbedaan pendekatan antara Eropa dan AS. Eropa, terutama anggota UE, secara kuat berkomitmen untuk melaksanakan Perjanjian Paris. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celsius di atas level sebelum era industri, dengan upaya untuk membatasinya hingga 1,5 derajat celsius. Terkait upaya pengurangan emisi, Eropa telah mengadopsi target ambisius dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Beberapa negara Eropa telah berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun-tahun mendatang, sementara UE secara keseluruhan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Eropa juga menginvestasikan banyak sumber daya dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau, di antaranya berupaya untuk mengurangi ketergantungan

pada bahan bakar fosil dan mengadopsi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan niatnya untuk menarik AS dari Perjanjian Paris pada tahun 2017. AS secara resmi keluar dari perjanjian ini pada November 2020, menciptakan ketegangan dalam hubungan transatlantik terkait perubahan iklim. Pemerintahan Trump juga menerapkan kebijakan yang lebih mendukung industri bahan bakar fosil, termasuk pengguliran regulasi lingkungan yang lebih ketat yang telah diadopsi sebelumnya. Secara umum, pemerintahan Trump lebih skeptis terhadap perubahan iklim, yang sering kali ditunjukkan melalui ketidaksetujuan terhadap konsensus ilmiah tentang perubahan iklim dan mempertanyakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Grebbele, 2023).

Pemerintahan AS yang baru di bawah Presiden Joe Biden kemudian mengumumkan untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris. Ini mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan perubahan iklim AS dan langkah positif dalam mendekati komitmen global. Meskipun demikian, perbedaan dalam pendekatan terhadap perubahan iklim antara Eropa dan AS, tetap ada. Akan tetapi, penting untuk digarisbawahi bahwa kerja sama internasional, termasuk antara Eropa dan AS, tetap penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Perbedaan pandangan dan ketegangan lainnya yang berpotensi terjadi dalam hubungan transatlantik adalah terkait pendekatan politik dalam masalah-masalah keamanan, seperti permasalahan di Timur Tengah, Iran, dan Rusia. Terkait upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina, Eropa dan AS memiliki perbedaan pendekatan. AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang ditandai dengan pemindahan

kedutaannya ke Yerusalem. Di lain pihak, banyak negara Eropa menekankan perlunya solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama. Perbedaan ini telah menciptakan ketegangan dalam upaya perdamaian (Zielonka, 2017).

Terkait permasalahan Iran, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Iran. AS misalnya menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*) pada tahun 2018 dan mengenakan sanksi ekonomi tambahan terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa JCPOA tidak cukup keras dalam mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan berperan dalam perluasan pengaruh regional Iran. Sementara Eropa, terutama anggota UE, secara keseluruhan tetap mendukung JCPOA dan memandang kesepakatan ini sebagai elemen penting untuk mencegah pengembangan senjata nuklir oleh Iran (Zielonka, 2017). Eropa berusaha untuk mempertahankan perjanjian ini bahkan setelah penarikan AS, dan berupaya menjaga saluran perdagangan dengan Iran melalui mekanisme khusus untuk menghindari sanksi AS.

Dalam penyelesaian masalah Rusia, AS dan Eropa memiliki pendekatan yang serupa, misalnya dikaitkan dengan upaya penegakan sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan agresi di Ukraina dan pelanggaran HAM. Namun, pendekatan AS juga mencakup elemen lain, seperti tekanan terhadap Eropa agar mengurangi ketergantungan mereka pada energi gas alam Rusia melalui pipa gas *Nord Stream 2*. Dalam konteks ini, Eropa mencoba menjaga dialog terbuka dengan Rusia dan menjalin kerja sama dalam beberapa bidang, termasuk perdagangan dan energi. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dalam menjaga hubungan dengan Rusia melalui proyek-proyek seperti *Nord Stream 2* (Grebbe, 2023). Ini

menciptakan perbedaan pendekatan antara Eropa Timur dan Barat dalam hubungan dengan Rusia.

Perbedaan dalam pendekatan terhadap Timur Tengah, Iran, Rusia, dan isu-isu lain, tidak dapat dimungkiri menciptakan ketegangan dalam hubungan politik antara AS dan Eropa. Namun, kedua belah pihak juga bekerja sama dalam banyak aspek kebijakan internasional, seperti keamanan kolektif melalui NATO dan kerja sama dalam penanggulangan perubahan iklim. Berbagai upaya kemudian terus dilakukan guna mencapai kesepakatan dan kompromi dalam isu-isu yang memunculkan perbedaan pendekatan. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa hubungan transatlantik yang kuat tetap menjadi elemen penting dalam diplomasi dan politik global.

BAB 2

HUBUNGAN DENGAN ASIA



Hubungan Eropa kontemporer dengan Asia adalah aspek penting dalam politik dan ekonomi global. Hal ini terutama didasarkan pada fakta bahwa Eropa dan Asia merupakan dua dari tiga pusat ekonomi terbesar di dunia (bersama dengan Amerika Utara). Keduanya memiliki potensi untuk membentuk pasar yang sangat besar dan dinamis. Dengan kekuatan ekonomi masing-masing, Eropa dan Asia berperan sebagai pusat perdagangan global yang memengaruhi arah perdagangan dunia. Eropa dan Asia, dengan memiliki beberapa negara anggota G20 dan kekuatan ekonomi utama, juga memiliki pengaruh signifikan dalam diplomasi global dan penentuan arah kebijakan global. Di lain sisi, baik Eropa dan Asia, memiliki sejarah dan kepentingan yang berbeda, tetapi tetap saling mengakui pentingnya kerja sama untuk mengatasi tantangan global dan memajukan kepentingan bersama. Hubungan yang terjalin di antara dua kawasan ini secara signifikan melibatkan berbagai negara di Eropa dengan negara-negara di Asia, terutama China, India, dan Jepang. Secara umum, dapat dinyatakan pula bahwa hubungan Eropa dengan Asia ini memiliki dinamika yang kompleks, yang mencakup berbagai isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

A. Hubungan Strategis Eropa dengan China, Jepang, dan India

Kerja sama ekonomi, diplomasi, dan investasi dengan negara-negara Asia telah menjadi fokus penting dalam hubungan internasional Eropa kontemporer. Dalam konteks ini, hubungan dengan China, Jepang, dan India mendapatkan perhatian khusus karena ketiga negara ini memiliki peran strategis yang sangat penting dalam politik, ekonomi, dan isu-isu global. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Eropa memfokuskan hubungannya pada ketiga negara tersebut (Balme, 2008).

1. Pertumbuhan ekonomi yang cepat: China, India, dan Jepang adalah tiga dari negara-negara dengan pertumbuhan

ekonomi tercepat di dunia. Kehadiran ekonomi yang kuat dalam kawasan Asia membuatnya menjadi mitra dagang dan investasi yang sangat menarik bagi negara-negara Eropa. Hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Asia ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Eropa.

2. Pengaruh global: China, India, dan Jepang memiliki pengaruh global yang signifikan dalam berbagai bidang. China adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan diplomasi. India adalah negara demokratis terbesar di dunia dan memiliki pengaruh dalam diplomasi regional dan isu-isu global. Jepang adalah kekuatan ekonomi besar dan merupakan sekutu kuat dalam keamanan dan perdamaian global.
3. Diplomasi dan isu regional: Eropa memfokuskan hubungannya dengan ketiga negara ini karena ketiganya memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Perkembangan isu-isu regional seperti konflik di Laut China Selatan, situasi di Semenanjung Korea, dan masalah terkait dengan energi dan perdagangan memerlukan koordinasi dan diplomasi yang kuat dengan China, Jepang, dan India.
4. Kerja sama dalam isu global: China, India, dan Jepang merupakan mitra penting dalam berbagai isu global, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, perdamaian dan keamanan internasional, serta penanggulangan penyebaran senjata nuklir. Eropa memiliki kepentingan memperkuat kerja sama dengan negara-negara ini untuk mencapai solusi dalam isu-isu tersebut.

5. Pengaruh dalam perdagangan internasional: negara-negara Eropa memiliki kepentingan untuk memperluas akses ke pasar Asia yang besar. China, India, dan Jepang adalah tujuan perdagangan utama bagi produk-produk Eropa, dan perdagangan bebas dengan negara-negara ini memiliki dampak signifikan pada ekonomi Eropa.

Dalam konteks hubungan ekonomi, kerja sama antara Eropa (atau UE) dengan China adalah salah satu hubungan ekonomi internasional yang paling penting dan kompleks di dunia saat ini. Kedua pihak memiliki hubungan yang erat dalam berbagai bidang ekonomi, meskipun juga menghadapi sejumlah tantangan dan ketegangan. Eropa adalah mitra perdagangan utama China, demikian sebaliknya. Kedua belah pihak telah meningkatkan volume perdagangan mereka selama bertahun-tahun. Banyak produk Eropa, termasuk kendaraan bermotor, mesin, barang elektronik, dan produk-produk makanan diekspor ke China (Balme, Richard. 2008).

Meskipun perdagangan bilateral ini bernilai besar, tetapi juga terdapat ketidakseimbangan perdagangan yang cukup besar, dengan China memiliki surplus perdagangan yang signifikan. Ini menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dan menjadi perhatian Eropa. Terkait investasi, Eropa dan China telah saling menjadi tujuan utama investasi satu sama lain. Banyak perusahaan Eropa telah berinvestasi di China, terutama dalam sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Sebaliknya, China juga menginvestasikan modalnya di Eropa, terutama dalam sektor infrastruktur dan energi. UE dan China juga telah mengupayakan perjanjian perdagangan dan investasi yang dikenal sebagai *Comprehensive Agreement on Investment* (CAI), yang bertujuan untuk membuka lebih banyak pasar China bagi investasi Eropa dan meningkatkan perlindungan terhadap investasi Eropa di China. Namun, perjanjian ini masih

dalam proses ratifikasi dan menghadapi tantangan dalam beberapa aspek (Becker et al., 2018).

Eropa juga memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan India, di mana India adalah salah satu pasar yang paling menjanjikan di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang besar. Terkait hal ini, UE adalah mitra dagang terbesar keempat India, sementara India adalah mitra dagang terbesar kesepuluh UE. Perdagangan bilateral antara keduanya mencakup berbagai sektor, termasuk barang manufaktur, jasa, dan pertanian. Perdagangan bilateral ini terus mengalami perkembangan, bahkan masih terdapat potensi yang besar untuk peningkatan lebih lanjut. UE dan India telah berusaha untuk meningkatkan akses pasar masing-masing dengan mengurangi hambatan perdagangan.

UE juga merupakan salah satu investor terbesar di India, terutama dalam sektor seperti otomotif, farmasi, energi terbarukan, dan manufaktur. Investasi Eropa di India telah menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. India juga semakin menjadi tujuan investasi bagi perusahaan Eropa, dan kedua pihak telah berupaya untuk mempromosikan investasi yang lebih dalam. UE dan India bahkan telah menjalankan negosiasi untuk mencapai perjanjian perdagangan dan investasi yang komprehensif melalui *EU-India Broad-based Trade and Investment Agreement* (BTIA). Perjanjian ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang bagi perdagangan dan investasi di kedua belah pihak. Sementara terkait kerja sama pembangunan, UE telah berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di India, terutama dalam bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi hijau (Becker et al., 2018). Ini adalah contoh kerja sama yang bertujuan untuk membantu India mengatasi tantangan pembangunan seperti ketidaksetaraan, akses air bersih, dan perubahan iklim.

Sebagaimana halnya dengan China dan India, kerja sama ekonomi antara Eropa dan Jepang juga telah menjadi salah satu hubungan ekonomi terpenting di dunia. Kedua pihak telah membangun hubungan yang kuat dalam berbagai bidang ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, dan kerja sama di sektor-sektor tertentu. Dalam sektor perdagangan, Eropa adalah mitra dagang penting bagi Jepang, dan sebaliknya. Kedua belah pihak telah melakukan perdagangan dalam berbagai produk, termasuk kendaraan bermotor, peralatan elektronik, mesin, dan produk kimia. Perjanjian Perdagangan Bebas antara UE dan Jepang, yang mulai berlaku pada tahun 2019, telah membuka lebih banyak akses pasar bagi produk-produk Eropa di Jepang dan sebaliknya. Perjanjian ini bahkan menjadi perjanjian perdagangan terbesar yang pernah dilakukan oleh UE dan memberikan dorongan besar bagi kerja sama ekonomi. Sementara terkait investasi, UE dan Jepang adalah dua dari tiga penghasil investasi langsung asing terbesar di dunia, yang berarti nilai investasi di antara keduanya sangat signifikan. Perusahaan-perusahaan Eropa telah menginvestasikan modalnya di Jepang dalam berbagai sektor, termasuk otomotif, farmasi, dan teknologi informasi. Sebaliknya, perusahaan Jepang juga memiliki investasi yang substansial di Eropa, terutama dalam sektor manufaktur, otomotif, dan teknologi.

Selain kerja sama yang strategis dalam bidang ekonomi, Eropa juga memiliki kerja sama bidang politik dan isu-isu global dengan China, India, dan Jepang yang memiliki dampak besar dalam kebijakan luar negeri Eropa. Kerja sama ini melibatkan sejumlah isu global yang kompleks, termasuk perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, perdagangan internasional, penyelesaian konflik, dan isu HAM. Bersama China, Eropa merupakan aktor kunci dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Keduanya telah berkomitmen untuk mencapai sasaran-sasaran pengurangan emisi karbon dan bekerja sama dalam inisiatif seperti Perjanjian

Paris tentang Perubahan Iklim. Eropa dan China juga memiliki kepentingan bersama dalam menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea, di mana keduanya telah berpartisipasi dalam upaya diplomasi untuk mencapai penyelesaian damai. Dalam hal ini, Eropa dan China menunjukkan minat bersama dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan regional, terutama di Asia dan Eropa Timur.

Terkait isu nuklir Iran, Eropa dan China adalah salah satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai Kesepakatan JCPOA. Kesepakatan ini dirancang untuk mengendalikan program nuklir Iran dan mencegah pengembangan senjata nuklir. Kesepakatan ini melibatkan negara-negara Eropa, AS, dan Iran, serta berbagai pihak lainnya. Dalam hal ini, Eropa dan China, bersama dengan Rusia, adalah pihak yang berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan kesepakatan ini, di mana negara-negara ini telah berkomitmen untuk mendukung JCPOA sebagai alternatif diplomatis untuk membatasi program nuklir Iran dan mencegah proliferasi senjata nuklir di wilayah tersebut. Eropa dan China juga telah bekerja sama dalam berbagai forum internasional, seperti PBB dan pertemuan tingkat tinggi, untuk menjaga kesepakatan ini tetap berjalan. Kerja sama dalam mempertahankan kesepakatan ini adalah contoh bagaimana Eropa dan China dapat bekerja bersama-sama dalam isu-isu keamanan global (Prakash, 2016).

Sementara dengan India, dalam konteks kerja sama terkait isu global, Eropa telah menjalin komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Keduanya bekerja sama dalam mendukung Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim dan mencapai target-target pengurangan emisi karbon. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Eropa dan India telah menjalin kerja sama yang kuat, termasuk dialog strategis tentang isu-

isu keamanan regional dan global. Sebagai contoh, Eropa dan India memiliki minat bersama dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah dan mendukung perjanjian nuklir Iran. Keduanya telah menjalankan dialog dan koordinasi dalam hal ini. Demikian halnya terkait isu-isu maritim, Eropa dan India memiliki minat bersama dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas di Laut Hindia dan Samudra Hindia. Kerja sama dalam isu-isu maritim, termasuk penanggulangan perampokan laut dan perlindungan lingkungan laut, menjadi fokus penting.

Terakhir, Eropa juga menjalin kerja sama erat dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan Jepang. Dalam hal ini, Eropa dan Jepang berbagi minat dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional dan global. Keduanya telah menjalin kerja sama dalam berbagai isu keamanan dan pertahanan, termasuk pembatasan senjata nuklir. Eropa dan Jepang juga memiliki minat bersama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia-Pasifik dan Eropa Timur, di mana keduanya terlibat dalam dialog dan kerja sama dalam berbagai isu keamanan regional, seperti Semenanjung Korea dan Ukraina. Sementara, di level kerja sama organisasi internasional, Eropa dan Jepang merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan G7 yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam berbagai isu global, termasuk perubahan iklim, perdamaian dan keamanan regional, serta perdagangan internasional (Becker et al., 2018).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa fokus Eropa pada hubungan dengan China, Jepang, dan India mencerminkan kepentingan strategis dan ekonomi yang besar bagi Eropa dalam konteks global. Upaya kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara ini diharapkan akan menciptakan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kerangka kerja internasional yang kompleks.

B. Persaingan dan Kompleksitas Tantangan dalam Hubungan Eropa dan Asia

Meskipun terdapat kerja sama yang kuat dalam hubungan Eropa dan Asia, tetapi terdapat pula perbedaan dan perdebatan dalam hubungan ini, khususnya antara Eropa dengan China. Beberapa isu yang berpotensi menciptakan ketegangan, meliputi masalah perdagangan yang belum terselesaikan, ketidaksepakatan dalam isu-isu HAM, dan kekhawatiran keamanan regional. Dalam bidang perdagangan dan investasi, persaingan antara Eropa dan China telah menjadi semakin nyata dalam beberapa aspek. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Eropa dan China adalah dua dari ekonomi terbesar di dunia. Keduanya bersaing untuk menguasai pasar global dan mengamankan sumber daya ekonomi. Persaingan ini terutama berpusat pada perdagangan barang dan jasa, di mana Eropa menginginkan akses yang lebih besar ke pasar China, sementara China juga berusaha memperluas pangsa pasarnya di Eropa.

Persaingan dalam perdagangan juga telah melibatkan isu-isu seperti tarif dan hambatan teknis perdagangan. UE telah menyuarakan keprihatinannya tentang praktik perdagangan yang tidak adil oleh China, termasuk subsidi pemerintah dan praktik *dumping*. Sementara terkait investasi langsung asing, China telah menjadi sumber investasi yang semakin penting bagi Eropa, terutama dalam sektor teknologi, infrastruktur, dan energi. Meskipun demikian, terdapat keprihatinan tentang kontrol China atas teknologi penting dan keamanan informasi, yang telah memicu debat tentang perlunya mengawasi investasi China. Isu lain yang mengemuka adalah terkait perbedaan standar dan regulasi, di mana hal ini telah menjadi sumber perselisihan antara Eropa dan China. Perselisihan ini mencakup isu-isu lingkungan, HAM, dan hak kekayaan intelektual. Ketegangan lain juga muncul terkait

terkait *Belt and Road Initiative* (BRI), yaitu proyek infrastruktur China yang ambisius yang mencakup sebagian besar Asia, Eropa, dan Afrika. Meskipun proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, beberapa negara Eropa telah menyuarakan keprihatinan tentang dampaknya terhadap lingkungan, hutang, dan pengaruh geopolitik China. Sementara persaingan terbesar lainnya antara Eropa dan China juga terjadi di bidang teknologi dan keamanan informasi, khususnya dalam hal pengembangan jaringan 5G. Eropa menghadapi dilema tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi China dalam jaringan 5G tanpa mengorbankan keamanan nasional (OECD, 2020).

Di samping ketegangan dan persaingan dalam bidang perdagangan dan investasi, isu HAM telah menjadi salah satu sumber ketegangan dalam hubungan antara Eropa dan China. Beberapa isu HAM yang telah menimbulkan perhatian Eropa dan komunitas internasional dalam konteks hubungan dengan China meliputi Tibet, Xinjiang, dan Hong Kong. Isu Tibet telah menjadi sumber ketegangan antara Eropa dan China selama beberapa dekade. Eropa telah mengkritik pelanggaran HAM di Tibet, terutama terkait dengan kebebasan beragama, budaya, dan otonomi. China, di sisi lain, menganggap Tibet sebagai bagian integral dari wilayahnya dan menanggapi kritik Eropa dengan keras (Becker et al., 2018).

Perhatian dunia terhadap Xinjiang juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena adanya laporan tentang pelanggaran HAM yang sistematis terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Eropa, bersama dengan komunitas internasional, telah mengecam penahanan massal, pengambilan paksa, dan tindakan represif lainnya yang dilaporkan di Xinjiang. Eropa telah meminta China untuk membuka akses independen ke wilayah tersebut untuk penyelidikan internasional. Eropa juga

menunjukkan perhatian terhadap perkembangan di Hong Kong, terutama terkait dengan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China di wilayah tersebut pada tahun 2020. Eropa menyatakan keprihatinan tentang pembatasan kebebasan sipil dan politik di Hong Kong dan telah mengambil tindakan, termasuk pemberian suaka politik kepada beberapa aktivis Hong Kong (Winn & Gänzle, 2023).

Dengan demikian, Eropa telah secara terbuka menyuarakan keprihatinan dan kritik terhadap pelanggaran HAM di China, dan hal ini telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika hubungan Eropa-China. Akan tetapi, di sisi lain, Eropa juga menginginkan hubungan yang konstruktif dengan China dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan perubahan iklim. Ini menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan yang diupayakan untuk seimbang antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai HAM.

Selain permasalahan dengan China, krisis nuklir di Semenanjung Korea juga telah menjadi perhatian serius bagi Eropa, di mana Eropa telah berperan sebagai mediator dalam upaya mencapai perdamaian dan denuklirisasi di wilayah tersebut. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Swedia, telah berupaya untuk berperan sebagai mediator dalam negosiasi nuklir dengan Korea Utara. Negara-negara ini berusaha memfasilitasi dialog dan berperan sebagai perantara antara Korea Utara dan negara-negara lain yang terlibat dalam pembicaraan nuklir (Winn & Gänzle, 2023).

Dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Korea ini pula, Eropa menyatakan dukungan bagi sanksi PBB terhadap Korea Utara sebagai respons terhadap uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal yang melanggar resolusi PBB. Meskipun demikian, Eropa tetap menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat

memperburuk situasi dan selalu mengutamakan pendekatan diplomatik. Sementara UE sebagai sebuah entitas juga telah mengeluarkan pernyataan dan kebijakan bersama terkait dengan krisis nuklir Korea. UE juga telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara yang ditujukan untuk membantu mengatasi masalah kemanusiaan di negara tersebut. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa ketegangan di Semenanjung Korea yang terjadi di antara Korea Utara dengan Korea Selatan adalah isu keamanan yang penting di kawasan tersebut. Eropa memiliki hubungan dengan kedua Korea dan telah mendukung upaya perdamaian dan denuklirisasi. Eropa juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas di kawasan ini dan mendukung diplomasi dalam menyelesaikan ketegangan (Becker et al., 2018).

Dalam konteks masalah keamanan di Asia Timur, Eropa juga menghadapi sejumlah tantangan termasuk sengketa wilayah di Laut China Selatan dan ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut. Terkait hal ini, Eropa juga harus mempertimbangkan hubungannya dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan dengan bijak. Sengketa wilayah di Laut China Selatan melibatkan beberapa negara di kawasan, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sementara Eropa tidak memiliki klaim wilayah di kawasan tersebut, tetapi memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di Laut China Selatan, terutama dalam hal kebebasan navigasi dan akses ke pasar.

Laut China Selatan memang merupakan wilayah strategis yang kaya sumber daya alam dan memiliki lalu lintas maritim yang penting, sehingga konflik dan ketegangan di wilayah ini dapat memiliki dampak global. Berikut beberapa alasan utama kekhawatiran Eropa terkait aktivitas militer China di Laut China Selatan (Winn & Gänzle, 2023).

1. Kebebasan navigasi: Eropa, seperti banyak negara lain, mendukung prinsip kebebasan navigasi di Laut China Selatan, yang merupakan prinsip hukum internasional. Kekhawatiran muncul ketika China mengklaim sebagian besar wilayah tersebut sebagai perairan teritorialnya dan mengambil tindakan yang dapat membatasi hak kapal asing untuk berlayar di wilayah tersebut.
2. Ketegangan regional: aktivitas militer China di wilayah tersebut telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga di Asia, seperti Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Eropa merasa perlu mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.
3. Perlombaan militer: peningkatan aktivitas militer China di Laut China Selatan telah memicu perlombaan militer di kawasan tersebut, yang dapat mengakibatkan eskalasi konflik dan meningkatkan ketegangan regional yang lebih luas.

Kekhawatiran Eropa terhadap situasi ini dapat memengaruhi hubungan antara Eropa dengan China. Eropa, melalui diplomasi dan forum internasional, telah menyuarakan keprihatinan mereka terkait situasi di Laut China Selatan dan mendorong penyelesaian damai dan berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, hubungan antara Eropa dan China adalah kompleks dan mencakup berbagai isu, termasuk perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan kerja sama dalam berbagai forum internasional. Meskipun ketegangan muncul dalam hubungan ini, baik Eropa maupun China memiliki insentif untuk menjaga kerja sama dalam isu-isu global yang penting. Diplomasi tetap menjadi alat penting dalam menangani perbedaan dan mencari solusi yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

Masih dalam konteks tantangan penguatan hubungan di Asia Timur, sejatinya Eropa memiliki hubungan yang kuat dengan Jepang dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Akan tetapi, dalam hubungan ini mengemuka tantangan yang melibatkan isu-isu sejarah yang sensitif, seperti perbudakan seksual selama Perang Dunia II, yang dapat memengaruhi dinamika hubungan. Salah satu isu utama adalah perbudakan seksual selama Perang Dunia II, yang melibatkan penggunaan wanita sebagai “wanita penghibur” oleh tentara Jepang. Masalah ini telah menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Jepang dengan negara-negara Eropa, termasuk juga dengan Korea Selatan dan China. Eropa juga telah menyuarakan keprihatinan tentang isu-isu sejarah ini, meskipun dampaknya mungkin tidak sekuat Korea Selatan dan China (Prakash, 2016).

Tantangan lain dalam hubungan Eropa-Jepang termasuk isu-isu perdagangan dan ekonomi, di mana ketegangan perdagangan global dan proteksionisme ikut memengaruhi hubungan perdagangan antara kedua wilayah tersebut. Meskipun demikian, Eropa-Jepang, keduanya juga memiliki banyak kepentingan bersama dan terus bekerja sama dalam berbagai inisiatif multilateral untuk mengatasi masalah global, seperti perubahan iklim, penanggulangan terorisme, serta perdamaian dan keamanan regional. Hubungan ini akan terus berubah seiring waktu, dan diplomasi akan memainkan peran penting dalam mengatasi perbedaan dan memperkuat kerja sama antara Eropa dan Jepang (Prakash, 2016).

Berbagai tantangan keamanan di Asia Timur ini memengaruhi kepentingan Eropa secara langsung dan mengharuskan Eropa untuk mengambil sikap yang bijak dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dikaitkan dengan hal ini, Eropa kemudian mencoba untuk berperan sebagai pemain penting dalam diplomasi dan stabilitas di Asia Timur, termasuk di antaranya berpartisipasi

dalam dialog-dialog regional sekaligus menunjukkan dukungannya terhadap kerja sama regional, misalnya melalui kerja sama dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation/ASEAN*). Melalui diplomasi, kerja sama dengan mitra regional, dan dukungan terhadap aturan internasional, Eropa berusaha untuk memainkan peran yang konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

BAB 3

HUBUNGAN DENGAN AFRIKA



Hubungan antara Eropa dan Afrika telah berkembang sepanjang sejarah, dan saat ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Hubungan ini memiliki banyak aspek yang kompleks, termasuk kolonialisme yang mendahuluinya, perdagangan, bantuan pembangunan, serta kerja sama dalam berbagai isu global. Sejarah kolonialisme Eropa di Afrika sendiri telah memainkan peran besar dalam membentuk realitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara Afrika. Proses dekolonisasi di abad ke-20 ini memunculkan sejumlah negara baru. Hubungan Eropa-Afrika yang kemudian terus berkembang secara dinamis, bertitik-tolak pada upaya kemitraan dalam menghadapi berbagai isu yang harus diatasi bersama, khususnya dalam upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, mengatasi konflik, dan mengatasi ketidaksetaraan. Salah satu isu yang menjadi aspek signifikan dalam hubungan Eropa-Afrika adalah terkait isu migrasi, di mana tekanan isu migrasi ini mencakup sejumlah tantangan dan perdebatan yang memengaruhi hubungan kedua benua tersebut.

A. Sejarah Kolonialisme, Diplomasi, dan Kemitraan dalam Hubungan Eropa-Afrika

Sejarah hubungan Eropa-Afrika dipengaruhi oleh masa kolonialisme yang menyisakan warisan yang kompleks dalam hubungan antara Eropa dan Afrika. Selama berabad-abad, negara-negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Belgia, Portugal, Spanyol, Jerman, dan lainnya, menjajah sebagian besar wilayah di Afrika. Negara-negara ini memperoleh kendali atas wilayah-wilayah jajahannya dan menguasai sumber daya alam serta memaksa banyak penduduk asli untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif. Oleh karena itu, kolonialisme Eropa di Afrika sering kali dicirikan dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang mineral, kehutanan, dan pertanian. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan

ekonomi dan kekayaan antara Eropa dan Afrika (Kotsopoulos et al., 2007).

Selain eksploitasi sumber daya alam, di beberapa wilayah Afrika, praktik perbudakan modern dan penindasan penduduk asli menjadi masalah serius selama masa kolonialisme. Ini menciptakan konsekuensi sosial dan budaya yang berkepanjangan. Penjajahan Eropa juga menghasilkan perpecahan wilayah yang sering kali tidak mempertimbangkan struktur etnis dan budaya yang ada. Di kemudian hari, ini menciptakan konflik internal yang berlarut-larut di banyak negara setelah negara-negara Afrika tersebut meraih kemerdekaan. Beberapa konflik di Afrika modern dapat ditelusuri kembali ke pembagian wilayah dan ketegangan etnis yang dihasilkan dari masa kolonialisme, di mana banyak negara Afrika menghadapi tantangan dalam memelihara perdamaian dan stabilitas (Kotsopoulos et al., 2007).

Di lain pihak, meskipun penjajahan adalah pengalaman yang sangat traumatis, tetapi juga membantu membentuk identitas nasional di banyak negara Afrika. Perjuangan melawan penjajahan membantu merangsang gerakan nasionalisme yang akhirnya memimpin menuju kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, hubungan antara Eropa dan Afrika menjadi kompleks. Eropa berupaya menjalin kemitraan yang lebih setara dengan negara-negara Afrika, di antaranya dalam bentuk kerja sama pembangunan dan bantuan.

Diplomasi dan kemitraan memang menjadi elemen kunci dalam hubungan Eropa-Afrika. Keduanya memiliki peran penting dalam memandu interaksi dan kerja sama antara kedua benua. Terkait kemitraan pembangunan, Eropa, melalui organisasi seperti UE dan negara-negara anggotanya, telah menjalin kemitraan pembangunan dengan banyak negara Afrika. Kemitraan ini melibatkan komitmen untuk memberikan bantuan pembangunan, berbagi pengetahuan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Diplomasi dan kemitraan Eropa dan Afrika juga ditunjukkan dalam kerja sama forum internasional untuk mengatasi berbagai isu-isu global yang meliputi perubahan iklim, perburuan liar, serta perdamaian dan keamanan terkait konflik regional. Kemitraan ini mencerminkan upaya bersama untuk mengatasi tantangan global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Terkait perubahan iklim misalnya, Eropa dan Afrika menjalin komitmen dalam kerangka kerja sama internasional, misalnya melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB (*Conference of the Parties/COP*). Keduanya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim, terutama di negara-negara Afrika yang sering kali menjadi yang paling terpengaruh. Perburuan liar juga menjadi permasalahan serius di beberapa negara Afrika, dan Eropa telah mendukung upaya internasional untuk menghentikan perburuan liar ilegal. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi spesies-spesies terancam punah dan mengurangi perdagangan ilegal satwa liar (Medinilla et al., 2020).

Dalam konteks perdamaian dan keamanan, Eropa dan Afrika berkolaborasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik. Eropa, termasuk negara-negara Eropa dan UE, telah berkontribusi dalam bentuk pengiriman personel, dana, dan sumber daya untuk misi-misi perdamaian PBB dan Uni Afrika di berbagai konflik di Afrika. Personel ini terlibat dalam pengawasan gencatan senjata, pemantauan pemilu, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perdamaian. Eropa juga telah mendukung upaya untuk mengatasi konflik regional di Afrika, seperti konflik di Kongo, Sudan Selatan, Mali, dan Somalia. Upaya-upaya ini mencakup mediasi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pembangunan untuk memulihkan stabilitas di daerah-

daerah yang terkena dampak. Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Kongo (*The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo/MONUSCO*), Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali (*The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali/MINUSMA*), dan Misi Uni Afrika di Somalia (*African Union Mission to Somalia/AMISOM*) merupakan beberapa contoh misi di mana Eropa telah berpartisipasi secara aktif (Medinilla et al., 2020).

Eropa dan Afrika juga bekerja sama dalam upaya pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis. Kerja sama ini mencakup pendanaan program-program kesehatan, distribusi obat-obatan, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Sementara KTT antara Eropa dan Afrika, termasuk di dalamnya KTT Uni Afrika-Uni Eropa, menjadi forum penting dalam dialog dan kerja sama antara kedua benua ini yang digunakan untuk membahas berbagai isu global dan regional serta merumuskan langkah-langkah konkret.

Wujud kemitraan dan kerja sama penting lainnya yang dijalin Eropa-Afrika adalah dalam hubungan ekonomi, di mana perdagangan dan investasi tetap menjadi elemen penting dalam hubungan ini. Eropa adalah mitra ekonomi utama bagi banyak negara di Afrika yang ditandai dengan Eropa adalah salah satu mitra perdagangan utama bagi Afrika. Banyak negara Afrika mengeksport berbagai jenis barang ke pasar Eropa, termasuk minyak mentah, mineral, produk pertanian, dan barang manufaktur.



Di tahun 2018, Afrika menjadi mitra dagang terbesar UE.

Sumber: Why Brexit is a Turning Point for Europe-Africa Relations.

<https://www.dw.com/en/why-brexit-is-a-turning-point-for-europe-africa-relations/a-52177939>

UE juga telah menjalin kemitraan ekonomi dengan berbagai kelompok negara di Afrika, misalnya melalui Kemitraan Afrika-Karibia-Pasifik (*African, Caribbean and Pasific/ACP*). Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke pasar Eropa dan mendukung perkembangan ekonomi di negara-negara Afrika, di antaranya melalui investasi. Dalam hal ini, perusahaan Eropa berinvestasi di berbagai sektor di Afrika, termasuk infrastruktur, pertanian, energi terbarukan, dan sektor manufaktur. Sementara, dalam upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, Eropa berupaya untuk memastikan bahwa perdagangan dan investasi yang dilakukan, mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Afrika (Medinilla et al., 2020).

Warisan kolonialisme memang tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah Eropa-Afrika, dan meskipun masa kolonialisme telah berakhir, dampaknya berlanjut dalam banyak

aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa hubungan Eropa-Afrika saat ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas warisan sejarah ini, melainkan terus berkembang dalam upaya mengatasi tantangan dan mempromosikan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

B. Tantangan Konflik di Afrika Modern dan Isu Migrasi dalam Hubungan Eropa-Afrika

Kolonialisme Eropa memiliki dampak yang signifikan terhadap beberapa konflik di Afrika modern sebagai akibat dari pembagian wilayah dan ketegangan etnis yang dihasilkan dari masa kolonialisme. Berikut beberapa contoh konflik di Afrika modern yang memiliki akar sejarah dalam masa kolonialisme (Medinilla et al., 2020).

1. Konflik di Sudan: pembagian wilayah Sudan menjadi dua negara, yaitu Sudan dan Sudan Selatan, yang terjadi pada tahun 2011 setelah perjuangan panjang untuk kemerdekaan Sudan Selatan, adalah hasil langsung dari masa kolonialisme. Penjajah Inggris dan Mesir memutuskan untuk menggabungkan wilayah-wilayah yang berbeda secara etnis, agama, dan budaya menjadi satu entitas politik tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut. Setelah kemerdekaan, konflik etnis dan agama terus berlanjut, yang akhirnya mengarah pada perjuangan panjang untuk kemerdekaan Sudan Selatan.
2. Genosida di Rwanda: genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 memiliki akar sejarah dalam kolonialisme Belgia. Penjajah Belgia mempromosikan perpecahan antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda. Penjajah Belgia mengidentifikasi kelompok-kelompok ini berdasarkan karakteristik fisik, seperti tinggi badan, dan memberikan

status yang berbeda kepada mereka. Ini menciptakan dasar bagi ketegangan dan permusuhan etnis yang berujung pada genosida Rwanda pada tahun 1994.

3. Konflik di Republik Demokratik Kongo: konflik di Kongo (*Democratic Republic of the Congo/DRC*) adalah contoh lain di mana pembagian wilayah kolonial dan ketegangan etnis berperan penting. Negara ini memiliki lebih dari 200 kelompok etnis yang berbeda, dan konflik berkepanjangan terutama berpusat di sekitar sumber daya alam yang melimpah. Kolonialisme Belgia dan pengaruhnya di Kongo memiliki dampak signifikan pada konflik berkepanjangan di wilayah ini.
4. Perang saudara di Nigeria: perang saudara Nigeria (Biafra) pada tahun 1967-1970 memiliki akar sejarah dalam ketidakpuasan kelompok etnis Igbo terhadap perlakuan pemerintah pusat dan pembagian wilayah oleh penjajah kolonial Inggris antara kelompok etnis Igbo, Yoruba, dan Hausa, sehingga menciptakan ketegangan etnis.
5. Konflik di Mali: di Mali, konflik antara kelompok etnis Arab dan Tuareg serta kelompok etnis Fulani dan Dogon adalah contoh ketegangan etnis yang masih berlanjut hingga saat ini. Ketegangan etnis ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonialisme di wilayah itu.
6. Konflik di Kamerun Barat dan Selatan: konflik di wilayah Kamerun Barat dan Selatan melibatkan ketegangan etnis dan budaya antara kelompok *Anglophone* (berbicara bahasa Inggris) dan kelompok *Francophone* (berbicara bahasa Prancis). Pembagian kolonial antara Inggris dan Prancis adalah salah satu akar dari konflik ini.

Warisan masa kolonialisme terkait pembagian wilayah dan ketegangan etnis tersebut masih berdampak pada stabilitas dan perdamaian di berbagai negara di Afrika modern. Hal ini juga

berdampak pada hubungan Eropa-Afrika. Dampak-dampak kolonialisme mencakup aspek sejarah, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membentuk hubungan yang kompleks antara kedua benua. Tidak dapat dimungkiri, masa kolonialisme Eropa di Afrika telah menciptakan sensitivitas sejarah yang mendalam. Praktik kolonial seperti penjajahan, eksploitasi sumber daya, perbudakan, dan peleburan etnis, meninggalkan bekas dalam ingatan kolektif masyarakat Afrika. Struktur ekonomi yang dibentuk selama masa kolonialisme juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini. Eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan yang tidak adil selama masa kolonialisme telah berdampak pada perkembangan ekonomi negara-negara Afrika. Kolonialisme juga memengaruhi perubahan sosial dan budaya di negara-negara Afrika, yaitu mencakup pengaruh bahasa, agama, sistem hukum, dan institusi yang diwariskan dari masa kolonial (Kotsopoulos et al., 2007).

Terkait hal ini, Eropa kemudian berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan dan dukungan teknis kepada negara-negara Afrika sebagai upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial masa kolonialisme. Bantuan ini memiliki tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan memperkuat kemampuan negara-negara Afrika untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dengan demikian, dalam upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dan berkelanjutan antara Eropa dan Afrika, penting untuk mengakui dan memahami dampak-dampak masa kolonialisme dan bekerja bersama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan konflik yang berasal dari sejarah tersebut. Rekonsiliasi, kerja sama, dan upaya bersama untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan inklusif adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi warisan kolonialisme ini.

Selain keberadaan berbagai konflik di Afrika modern, isu migrasi telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam hubungan Eropa-Afrika. Eropa menghadapi tekanan untuk mengelola isu migrasi dengan cara menghormati HAM dan membantu pengungsi yang membutuhkan perlindungan, sementara Afrika ingin memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya dipahami dan diakui. Diplomasi dan kerja sama dalam mengatasi isu migrasi tetap menjadi hal yang penting dalam hubungan ini, sambil juga mempertimbangkan tantangan yang ada dan mengupayakan solusi bersama yang berkelanjutan (Medinilla et al., 2020).

Migrasi dari Afrika ke Eropa memang merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan kemanusiaan. Terdapat beragam penyebab migrasi dari Afrika ke Eropa, yaitu meliputi konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, peluang ekonomi yang terbatas, kemiskinan, perubahan iklim, serta kondisi sosial dan HAM yang buruk di beberapa wilayah. Adapun jalur migrasi utama yang digunakan oleh migran Afrika meliputi jalur Mediterania yang menghubungkan Afrika Utara dengan Eropa Selatan, serta jalur-jalur lainnya seperti melalui Timur Tengah dan Afrika Barat. Beberapa negara Eropa menjadi tujuan utama bagi pengungsi dan migran dari Afrika ini. Negara-negara Eropa ini sering kali menjadi titik akhir perjalanan bagi mereka yang mencari perlindungan atau peluang ekonomi yang lebih baik. Beberapa negara tujuan utama pengungsi dan migran Afrika di Eropa meliputi Italia, Spanyol, Prancis, Yunani, Jerman, Swedia, Belanda, Portugal, dan Austria (Medinilla et al., 2020).

Italia menjadi salah satu negara tujuan utama pengungsi dan migran yang tiba melalui jalur Mediterania. Kota-kota seperti Lampedusa dan Sisilia di pantai Italia sering kali menjadi titik pertama kedatangan para migran dari Afrika. Spanyol, terutama

wilayah Ceuta dan Melilla yang berada di pantai Afrika Utara, menjadi pintu masuk ke Eropa untuk banyak migran yang datang dari Afrika Utara. Perancis, terutama wilayah pantai selatan seperti Pantai Azure dan Nice, menjadi tujuan bagi migran yang mencari peluang ekonomi dan perlindungan. Prancis juga memiliki wilayah seberang laut di Karibia, seperti Guyana Prancis, yang menjadi tujuan migran dari wilayah Afrika Barat. Yunani, khususnya pulau-pulau di Laut Aegea, telah menjadi tujuan migran yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah dan Afrika. Jerman, Swedia, dan Austria juga telah menjadi negara tujuan bagi sejumlah pengungsi dari Afrika, terutama mereka yang mengajukan permohonan suaka. Belanda menerima migran dan pengungsi dari Afrika, termasuk yang datang melalui jalur Laut Mediterania. Demikian halnya Portugal yang menerima sejumlah migran dari negara-negara Afrika, terutama mantan koloni Portugal seperti Angola, Guinea-Bissau, dan Mozambik (Medinilla et al., 2020).

Penting untuk diingat bahwa sebagian besar pengungsi dan migran Afrika tiba di Eropa melalui rute-rute yang berbahaya dan sering kali ilegal, termasuk perjalanan melalui laut atau melintasi perbatasan tanpa izin. Perjalanan ini sering kali berisiko, dan isu-isu terkait dengan HAM dan perlindungan menjadi perhatian utama dalam menangani masalah migrasi ini. Beberapa negara Eropa telah merespons isu-isu ini dengan kebijakan penanganan migrasi dan perlindungan HAM yang berbeda.

Dalam menghadapi isu migrasi, penting pula untuk mengambil pendekatan holistik dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan. Kerja sama antara Eropa dan Afrika, serta dengan organisasi internasional adalah kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting lainnya dalam mengelola permasalahan migrasi adalah mengatasi penyebab mendasar migrasi, seperti konflik, kemiskinan,

dan ketidakstabilan politik. Kerja sama dalam pembangunan berkelanjutan di Afrika juga berpeluang membantu mengurangi tekanan migrasi. Isu migrasi sendiri telah menguji solidaritas dalam UE, terutama dalam hal pembagian beban migrasi antara anggota UE. Masa depan hubungan Eropa dan Afrika juga akan dipengaruhi oleh kemampuan UE dalam mengatasi perbedaan dan menjalankan solidaritas terkait penanganan isu migrasi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa isu migrasi dapat memengaruhi keamanan dan stabilitas di kedua benua. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, akan dapat memperkuat stabilitas regional Eropa dan Afrika.

BAB 4

HUBUNGAN DENGAN TIMUR TENGAH



Hubungan antara Eropa dan Timur Tengah telah menjadi salah satu aspek penting dalam politik global dan ekonomi selama beberapa abad terakhir. Hubungan antara Eropa dan Timur Tengah adalah dinamis dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik, ekonomi, sosial, dan berbagai peristiwa yang terjadi di kedua kawasan. Sejarah kolonialisme dan perebutan kekuasaan di wilayah Timur Tengah oleh negara-negara Eropa, terutama selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, memberikan bentuk pada dinamika hubungan saat ini. Sebaliknya, keterlibatan Timur Tengah dalam Perang Dunia I dan II serta pembagian wilayah setelahnya juga ikut memengaruhi hubungan antara Eropa dan Timur Tengah. Di masa kini, salah satu bentuk ketergantungan timbal balik dalam hubungan antara Eropa dan Timur Tengah adalah terkait hubungan ekonomi, khususnya minyak dan energi yang menciptakan keterkaitan yang kuat antara kedua kawasan. Hal ini menjadikan stabilitas di Timur Tengah menjadi prioritas penting bagi negara-negara Eropa, sementara Timur Tengah terus bergantung pada ekspor minyak untuk pendapatan mereka.

A. Minyak dan Energi sebagai Aspek Kunci Hubungan Eropa dengan Timur Tengah

Hubungan antara Eropa dan Timur Tengah telah terjalin selama berabad-abad. Sejarah panjang ini mencakup periode perdagangan kuno, peradaban klasik, dan penjajahan Eropa. Sejarah kolonialisme Eropa di Timur Tengah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini memainkan peran penting dalam pembentukan hubungan modern antara Eropa dan wilayah tersebut.

Inggris dan Prancis adalah dua kekuatan Eropa utama yang memainkan peran besar dalam pembagian wilayah di Timur Tengah melalui perjanjian dan mandat. Misalnya, dengan Perjanjian Sykes-Picot (1916), Inggris dan Prancis membagi-bagi wilayah yang sekarang menjadi Suriah, Lebanon, Irak, Palestina, dan Yordania.

Ini menciptakan dasar bagi struktur politik modern di wilayah tersebut. Pembagian wilayah yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis ini, tidak selalu memperhitungkan identitas etnis dan agama di Timur Tengah. Di kemudian hari, hal ini menyebabkan ketegangan bahkan konflik etnis dan agama yang berkepanjangan. Misalnya, isu-isu seperti konflik Israel-Palestina memiliki akar terkait kebijakan kolonialisme Inggris dan Prancis di wilayah tersebut (Bicchi, 2007).

Selama masa kolonialisme pula, Eropa membawa pengaruh budaya dan sosial yang signifikan ke Timur Tengah. Ini mencakup pengaruh bahasa, sistem pendidikan, dan tradisi hukum. Bahasa Prancis dan Inggris, misalnya, bahkan tetap memiliki pengaruh kuat di beberapa negara Timur Tengah. Sejarah kolonialisme ini telah membentuk landasan bagi hubungan yang kompleks dan terkadang bergejolak antara Eropa dan Timur Tengah dalam konteks modern. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang berasal dari masa kolonialisme masih memengaruhi dinamika wilayah ini hingga saat ini. Hal ini mencakup dukungan diplomatis dan militer, peran dalam konflik regional, dan hubungan ekonomi (Bicchi, 2007).

Dalam konteks hubungan ekonomi, salah satu aspek kunci hubungan Eropa dengan Timur Tengah adalah sumber daya alam, terutama minyak. Sebagian besar negara Eropa adalah konsumen minyak utama, sementara sebagian besar negara di Timur Tengah adalah produsen minyak terbesar di dunia. Ini menciptakan ketergantungan timbal balik dalam hubungan ekonomi antara kawasan ini, di mana sebagian besar negara Eropa bergantung pada impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah. Minyak ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan, pemanas rumah, dan berbagai industri. Ketergantungan ini telah memaksa negara-negara Eropa untuk menjaga hubungan baik dengan

negara-negara produsen minyak di Timur Tengah (Colombo & Lecha, 2021).

Di lain pihak, sebagian besar negara di Timur Tengah mengandalkan pendapatan utama mereka dari ekspor minyak. Oleh karena itu, penjualan minyak adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi ekonomi mereka. Negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran, bergantung pada pendapatan minyak untuk mendukung ekonominya. Minyak adalah sumber pendapatan yang dominan, yang digunakan untuk mendanai infrastruktur, layanan publik, dan program sosial (Colombo & Lecha, 2021).

Ketergantungan timbal balik ini telah menjadi dasar untuk hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi antara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Kesepakatan dagang, investasi, dan kerja sama energi menjadi komponen penting dalam hubungan ini. Dalam hal ini, Eropa adalah pasar penting bagi produk-produk dari Timur Tengah, dan sebaliknya. Negara-negara Timur Tengah adalah mitra dagang utama bagi Eropa, yaitu dalam bentuk kesepakatan dagang, meliputi perjanjian perdagangan bebas serta memfasilitasi aliran barang dan jasa antara kedua wilayah tersebut.

Terkait kerja sama energi, Eropa bergantung pada pasokan energi dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki sumber daya energi yang signifikan, terutama minyak dan gas alam. Kerja sama dalam sektor energi ini melibatkan perjanjian pasokan, investasi dalam infrastruktur energi, dan kolaborasi dalam teknologi energi terbarukan. Dalam hal ini, negara-negara Eropa dan produsen minyak Timur Tengah telah mengadakan perjanjian kemitraan strategis untuk mengelola produksi dan pasokan minyak. Perjanjian kemitraan ini mencakup komitmen jangka panjang untuk memasok minyak dan kerja sama dalam menjaga stabilitas harga minyak.

Beberapa perusahaan energi Eropa, seperti Total (Prancis) dan Shell (Belanda), juga telah menginvestasikan modal besar di Timur Tengah dalam proyek-proyek minyak dan gas alam. Investasi ini mencakup eksplorasi, produksi, dan pengembangan infrastruktur untuk mengekstrak dan mengirimkan sumber daya energi. Demikian halnya proyek-proyek gas alam yang signifikan juga telah melibatkan kerja sama antara Eropa dan Timur Tengah. Sebagai contoh, negara-negara di Timur Tengah, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, telah mengembangkan fasilitas *Liquid Natural Gas* (LNG) untuk mengekspor gas alam cair ke pasar internasional, termasuk Eropa (Colombo & Lecha, 2021).

Selain kerja sama ekonomi, Eropa telah berupaya ikut menjaga stabilitas politik di Timur Tengah. Eropa memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut karena ketergantungannya pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Upaya diplomasi dan kerja sama politik Eropa di wilayah ini mencakup berbagai aspek, di antaranya Eropa bekerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah dan organisasi internasional untuk mencapai solusi bagi konflik regional yang berdampak pada stabilitas. Konflik-konflik yang mencakup perang Saudara Suriah, konflik di Yaman, dan ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk telah menjadi perhatian utama.

Salah satu contoh peran penting Eropa dalam upaya internasional untuk mengatasi konflik di Timur Tengah adalah dalam proses mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Kesepakatan nuklir JCPOA merupakan contoh keberhasilan diplomasi multilateral yang bertujuan untuk mengendalikan program nuklir Iran dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Eropa melalui Perwakilan Tinggi UE untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembicaraan antara Iran dengan kelompok negara-negara lain yang

terlibat, termasuk AS, Rusia, China, Prancis, Jerman, dan Inggris. Eropa bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan tersebut dan seluruh anggota UE mendukung kesepakatan ini. Bahkan, ketika AS mengumumkan penarikan dari JCPOA pada tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran, Eropa bersama dengan negara-negara lain yang masih berkomitmen pada kesepakatan, berusaha mempertahankan JCPOA. Eropa juga berusaha untuk melindungi perusahaan Eropa yang terlibat dalam perdagangan dengan Iran (Colombo & Lecha, 2021).

Dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik di Timur Tengah. Bantuan ini mencakup pengiriman makanan, obat-obatan, bantuan medis, dan dukungan untuk pengungsi. Eropa juga terlibat dalam pemberian bantuan pembangunan untuk membantu negara-negara Timur Tengah dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik dan mempromosikan perkembangan ekonomi yang stabil. Melalui upaya-upaya ini, Eropa berupaya untuk mendukung penyelesaian konflik, menjaga stabilitas wilayah, dan mengurangi dampak konflik terhadap keamanan pasokan energi dan kepentingan ekonomi. Diplomasi dan upaya kemanusiaan tersebut merupakan bagian penting dari strategi Eropa dalam mengatasi konflik regional di Timur Tengah.

B. Terorisme, Instabilitas Politik, Berbagai Konflik Regional, dan Kritik Terkait Hak Asasi Manusia dalam Perjalanan Hubungan Eropa-Timur Tengah

Terdapat sejumlah isu kunci yang memengaruhi hubungan antara Eropa dengan Timur Tengah, di antaranya terorisme, instabilitas politik, konflik regional, dan isu HAM. Dalam isu terorisme, keberadaan kelompok teroris ekstremis seperti ISIS telah

memiliki dampak yang signifikan pada hubungan Eropa dengan Timur Tengah, di mana ISIS telah menjadi ancaman keamanan langsung bagi Eropa. Kelompok ini telah merekrut individu dari Eropa yang kemudian pergi ke Timur Tengah untuk bergabung dengan mereka. Beberapa dari mereka yang telah terlatih oleh ISIS kembali ke Eropa, dengan niat melancarkan serangan teroris di berbagai negara Eropa. Serangan seperti serangan di Paris pada tahun 2015 dan serangan di Brussels pada tahun 2016 menunjukkan dampak serius yang dihasilkan oleh kembalinya anggota ISIS ke Eropa. ISIS dan konflik di Timur Tengah juga telah menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Eropa kemudian berupaya untuk melawan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme yang dilakukan oleh ISIS dan kelompok teroris lainnya. Ini mencakup upaya dalam memblokir situs web ekstremis, mengawasi media sosial, dan melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan radikalisis (Araźna, 2019).

Selain isu terorisme, instabilitas politik dan berbagai konflik regional di Timur Tengah juga memberikan dampak yang signifikan pada hubungan Eropa dengan wilayah tersebut. Beberapa konflik dan isu politik tersebut di antaranya sebagai berikut (Araźna, 2019).

1. Konflik di Suriah: konflik Suriah telah menjadi salah satu konflik paling mematikan dan kompleks di Timur Tengah. Konflik ini telah menciptakan gelombang pengungsi besar-besaran yang mencapai Eropa. Dalam hal ini, Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan dan berupaya memediasi solusi politik untuk mengakhiri konflik ini.
2. Konflik di Yaman: perang di Yaman antara pemerintah yang diakui secara internasional dengan kelompok Houthi telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang buruk. Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Yaman dan mendukung upaya perdamaian.

3. Konflik Israel-Palestina: konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menciptakan ketegangan di wilayah tersebut. Eropa telah berperan sebagai mediator dan mendukung solusi dua negara.
4. Ketegangan Iran dengan negara-negara Teluk: ketegangan antara Iran dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah menciptakan ketidakpastian di wilayah Teluk. Eropa telah berusaha untuk memediasi dan menjaga stabilitas di kawasan tersebut.
5. Ketidakstabilan di Libya: konflik di Libya dan ketidakstabilan politik telah menciptakan ketidakpastian di wilayah tersebut. Eropa telah berusaha untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Libya.

Dalam menghadapi berbagai konflik dan ketidakstabilan ini, Eropa telah berusaha untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah. Ini mencakup diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta kerja sama keamanan dan ekonomi. Dalam hal ini, Timur Tengah memiliki dampak signifikan pada Eropa dalam hal keamanan, ekonomi, dan kebijakan luar negeri, sehingga menjaga stabilitas dan mengatasi konflik di wilayah tersebut merupakan prioritas bagi Eropa.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari instabilitas politik dan konflik regional yang berkepanjangan di Timur Tengah adalah terjadinya krisis kemanusiaan yang melibatkan pengungsi dari berbagai konflik di Timur Tengah, di mana hal ini telah menciptakan tekanan besar pada Eropa. Negara-negara Eropa dihadapkan pada berbagai masalah integrasi pengungsi dan manajemen aliran migrasi.

Krisis pengungsi di Timur Tengah memang telah menciptakan tantangan besar dan kompleks bagi Eropa. Konflik Suriah yang

berkepanjangan, yang dimulai pada tahun 2011 misalnya, telah mengakibatkan lebih dari setengah populasi Suriah menjadi pengungsi. Jutaan orang telah mencari perlindungan di negara-negara tetangga dan di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Perang saudara di Yaman yang dimulai pada tahun 2015, konflik di Irak yang melibatkan serangan oleh ISIS dan operasi militer untuk mengusir kelompok tersebut, juga telah menyebabkan jutaan pengungsi yang mencari perlindungan di negara-negara Eropa. Selain tiga konflik utama di Suriah, Yaman, dan Irak, berbagai konflik regional dan ketidakstabilan politik di wilayah Timur Tengah juga ikut berkontribusi pada krisis pengungsi yang lebih luas. Hal ini mencakup konflik di Libya, Lebanon, Palestina, dan lainnya (Araźna, 2019).

Isu berikutnya yang mengemuka dalam hubungan Eropa dengan Timur Tengah adalah terkait pelanggaran HAM. Negara-negara Eropa sering mengecam pelanggaran HAM di Timur Tengah dan mengambil sikap keras terhadap negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Isu ini dapat menjadi titik ketegangan dalam hubungan bilateral. Dalam hal ini, terdapat beberapa isu HAM yang sering menjadi isu penting dalam hubungan Eropa dengan Timur Tengah, di antaranya kebebasan pers dan berpendapat, perlindungan hak minoritas, hukuman mati, dan hak perempuan.

Kebebasan berpendapat dan pers yang terbatas di beberapa negara Timur Tengah telah menciptakan lingkungan di mana wartawan dan aktivis menghadapi kesulitan dalam melaporkan berita dan menyuarakan pandangan mereka. Sebagai contoh, Arab Saudi telah menerapkan pengawasan yang ketat atas media dan wartawan. Di Iran, pemerintah secara teratur memblokir akses ke situs web berita independen dan platform media sosial. Hal ini membatasi akses masyarakat Iran kepada berita yang beragam

dan perspektif yang kritis. Di Bahrain, wartawan dan aktivis yang mengkritik pemerintah akan ditindak hukum dan menghadapi ancaman keamanan. Hal ini membatasi kebebasan berpendapat di negara tersebut. Demikian halnya di Uni Emirat Arab, pemerintah telah menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan pers, termasuk penangkapan aktivis yang mengkritik pemerintah. Pembatasan ini menciptakan tantangan serius dalam melaporkan berita yang kritis, menyuarakan pandangan yang berbeda, dan menjalankan jurnalisme independen di beberapa negara Timur Tengah. Negara-negara Eropa dan organisasi HAM sering mengecam pembatasan ini dan berupaya mendukung wartawan dan aktivis yang berjuang untuk kebebasan berpendapat dan pers di wilayah tersebut (Colombo & Lecha, 2021).

Perlindungan hak minoritas, terutama hak minoritas agama, juga telah menjadi isu penting dalam hubungan Eropa dengan Timur Tengah. Beberapa kelompok minoritas, seperti Yezidi, Kristen, dan Syiah, telah menghadapi permasalahan yang serius di beberapa negara Timur Tengah. Selama penyerangan oleh ISIS di Irak, kelompok Yezidi menjadi sasaran serangan dan pengusiran massal. Banyak perempuan Yezidi menjadi korban perdagangan manusia dan pemerkosaan. Beberapa negara Timur Tengah juga mengalami ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah. Penganiayaan dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas ini, telah menciptakan keprihatinan di Eropa. Eropa mendukung tuntutan untuk perlindungan hak minoritas dalam konstitusi dan hukum di negara-negara Timur Tengah. Hal ini mencakup dukungan untuk kesetaraan hak minoritas dan penolakan terhadap diskriminasi (Colombo & Lecha, 2021).

Beberapa negara di Timur Tengah masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Eropa, sebagai kawasan yang secara konsisten menentang hukuman mati,

telah berupaya untuk mengakhiri praktik ini di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Dalam hal ini, negara-negara Eropa secara konsisten mendeklarasikan penentangan terhadap hukuman mati dengan menyatakan sebagai pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Eropa juga menggunakan diplomasi untuk mengadvokasi penghapusan hukuman mati, termasuk berpartisipasi dalam dialog dengan negara-negara Timur Tengah.

Isu hak perempuan juga menjadi perdebatan penting dalam hubungan Eropa dengan Timur Tengah. Isu-isu hak perempuan mencakup berbagai aspek yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dan pembatasan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Isu-isu ini mencerminkan komitmen Eropa terhadap HAM dan kesetaraan gender. Meskipun realitas di berbagai negara Timur Tengah dapat bervariasi, isu-isu ini sering kali menjadi subjek diskusi dalam dialog dan diplomasi antara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah (Araźna, 2019).

Berbagai isu terkait HAM ini menciptakan ketegangan dalam hubungan antara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah, terutama ketika Eropa secara terbuka mengkritik pelanggaran HAM dan mengecam praktik-praktik yang dianggap melanggar norma-norma HAM internasional. Sementara Eropa mendukung HAM, faktor-faktor seperti stabilitas politik, keamanan, dan kepentingan ekonomi juga berdampak pada bagaimana Eropa menangani isu-isu ini dalam hubungannya dengan Timur Tengah.

BAB 5

HUBUNGAN DENGAN AMERIKA LATIN



Hubungan antara Eropa dan Amerika Latin telah berkembang selama berabad-abad dan mencerminkan sejarah kolonialisme, perdagangan, migrasi, serta dinamika politik. Salah satu aspek yang menjadi landasan hubungan kedua kawasan adalah sejarah kolonialisme, di mana Eropa memiliki dampak besar pada Amerika Latin, khususnya membentuk struktur sosial dan politik di wilayah tersebut. Peninggalan ini dapat ditemukan dalam bahasa, agama, dan budaya. Dalam perkembangannya, perjanjian dagang, investasi, dan kerja sama dalam bidang energi dan lingkungan telah menjadi bagian penting dari hubungan ini. Seiring waktu, tantangan dan peluang baru terus muncul dalam hubungan yang terjalin di antara Eropa dan Amerika Latin. Kolaborasi dan diplomasi dalam berbagai isu menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

A. Kolaborasi Ekonomi Strategis antara Eropa dan Amerika Latin

Hubungan awal antara Eropa dan Amerika Latin dimulai pada akhir abad ke-15 ketika penjelajah Eropa pertama kali tiba di Benua Amerika. Penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus, Hernán Cortés, dan Francisco Pizarro adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah penaklukan Amerika Latin. Mereka mengklaim wilayah-wilayah baru ini untuk kerajaan-kerajaan Eropa mereka. Kolonisasi Eropa di Amerika Latin, yang dipimpin oleh bangsa Spanyol dan Portugal kemudian berlangsung selama berabad-abad dan memengaruhi secara mendalam sejarah, budaya, dan bahasa di wilayah tersebut. Koloni-koloni di Amerika Latin ini menjadi sumber daya berharga bagi Eropa, termasuk emas, perak, gula, kopi, dan rempah-rempah. Eksploitasi sumber daya ini menghasilkan kekayaan besar bagi bangsa Eropa (Dominguez, 2015).

Selama masa kolonial, budaya Eropa, terutama agama Katolik, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan berbagai aspek budaya Eropa lainnya, diperkenalkan di Amerika Latin. Pengaruh ini masih sangat kuat dalam budaya Amerika Latin hingga hari ini. Kolonisasi Eropa juga membawa dampak demografi yang signifikan di Amerika Latin, termasuk terjadinya migrasi paksa orang Afrika sebagai budak untuk bekerja di ladang-ladang dan tambang-tambang, yang juga memengaruhi komposisi penduduk Amerika Latin. Secara umum, hubungan awal ini telah membentuk dasar sejarah panjang hubungan antara Eropa dan Amerika Latin, sekaligus memberikan fondasi bagi budaya yang beragam dan multikultural yang ada di Amerika Latin saat ini (Dominguez, 2015).

Setelah kolonisasi, hubungan antara Eropa dan Amerika Latin mengalami evolusi yang signifikan. Pada awal abad ke-19, banyak negara di Amerika Latin meraih kemerdekaan dari penjajahan Eropa. Proses ini memunculkan negara-negara merdeka yang mengembangkan hubungan dengan Eropa, terutama dengan Spanyol dan Portugal, yang sebelumnya menjajah mereka. Sejak awal abad ke-19, terjadi pula migrasi dan imigrasi yang signifikan antara Eropa dan Amerika Latin. Banyak imigran Eropa yang beremigrasi ke Amerika Latin dalam mencari peluang ekonomi baru, sementara imigran dari Amerika Latin juga mencari peluang di Eropa. Fenomena ini menciptakan keragaman budaya di kedua wilayah.

Di lain pihak, perdagangan antara Eropa dan Amerika Latin terus berkembang setelah kemerdekaan. Eropa menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara Amerika Latin, di mana perdagangan melibatkan berbagai komoditas dan barang, termasuk sumber daya alam, produk pertanian, dan manufaktur. Kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Eropa dan Amerika

Latin ini telah menghasilkan berbagai contoh kemitraan yang mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa contoh kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Eropa dan beberapa negara Amerika Latin (Nolte, 2021).

1. Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*): UE telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara Amerika Latin. Salah satu contoh yang signifikan adalah FTA antara UE dan Meksiko. FTA ini menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta membuka pintu bagi pertumbuhan perdagangan barang dan jasa antara keduanya.
2. Aliansi Pasifik (*Alianza del Pacífico*): UE telah berupaya untuk memperkuat hubungannya dengan *Alianza del Pacífico*, yang terdiri dari Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chili. UE menjalin hubungan erat dengan kelompok ini yang ditujukan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan. Selain aspek ekonomi, UE dan *Alianza del Pacífico* juga menjalin dialog politik dalam berbagai isu global dan regional, termasuk perdamaian, keamanan, HAM, dan isu-isu politik lainnya.
3. *Mercado Común del Sur* (Mercosur): UE telah lama menjalin hubungan dengan Mercosur, yaitu blok perdagangan regional yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. FTA antara Mercosur dan UE merupakan kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu, sekaligus membuka akses pasar yang signifikan. Selain perdagangan, kesepakatan ini juga mencakup kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk isu-isu investasi, hak kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
4. Investasi asing langsung: banyak perusahaan Eropa telah melakukan investasi langsung di negara-negara Amerika

Latin. Misalnya, perusahaan Eropa telah berinvestasi dalam sektor energi di Brasil dan sektor pertambangan di Peru. Dalam hal ini, Brasil memiliki salah satu pasar energi terbesar di Amerika Latin dan merupakan produsen dan eksportir energi utama di wilayah tersebut. Banyak perusahaan Eropa telah berinvestasi di sektor energi Brasil, terutama dalam bidang energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan proyek energi biomassa. Sementara Peru adalah salah satu produsen mineral dan logam terbesar di Amerika Latin, di mana sektor pertambangan merupakan bagian penting dari perekonomian negara tersebut. Perusahaan Eropa telah berinvestasi di sektor pertambangan di Peru yang mencakup berbagai sumber daya alam seperti tembaga, emas, perak, dan bijih besi. Investasi ini juga mencakup pembangunan dan pengelolaan tambang, pemrosesan bijih, dan eksplorasi mineral tambahan.

Terkait kerja sama dalam program pembangunan berkelanjutan, Eropa berupaya memberikan dukungan pembangunan kepada negara-negara Amerika Latin yang ditujukan untuk membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, dan mengatasi isu-isu lingkungan. Kedua wilayah ini juga terlibat dalam pertukaran ilmiah, pertukaran siswa, dan kerja sama dalam penelitian ilmiah, yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi.

Dalam kerangka kerja sama politik, UE dan negara-negara Eropa juga memiliki hubungan politik yang kuat dengan negara-negara Amerika Latin, yang ditempuh melalui berbagai forum politik dan organisasi internasional. Keduanya berusaha untuk mencapai konsensus dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, perdamaian, keamanan, dan HAM. Selain hubungan antara UE dan negara-negara Amerika Latin, terjalin pula kerja sama

regional seperti UE-Komunitas negara-negara Latin Amerika dan Karibia (*Community of Latin American and Caribbean States/CELAC*) yang berperan sebagai platform penting untuk diskusi politik dan kerja sama antarwilayah (Nolte, 2021). Berbagai kerja sama politik ini menciptakan kerangka kerja yang penting untuk mendukung stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kedua wilayah. Selain itu, kerja sama dalam isu-isu global membantu kedua belah pihak memainkan peran yang lebih kuat dalam politik global dan mengejar solusi bersama dalam menghadapi tantangan global.

B. Tantangan Ketidaksetaraan Ekonomi dalam Hubungan Eropa-Amerika Latin dan Kontroversi Kesepakatan UE-Mercosur

Ketidaksetaraan ekonomi dalam hubungan antara Eropa dan Amerika Latin adalah masalah yang kompleks dan memiliki beberapa dimensi. UE adalah salah satu blok ekonomi terbesar di dunia, sementara negara-negara Amerika Latin memiliki beragam ukuran ekonomi, dari negara-negara besar seperti Brasil hingga negara-negara kecil. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam daya tawar ekonomi masing-masing pihak dalam negosiasi perdagangan dan investasi.

Dalam hubungan ekonomi yang terjalin, defisit perdagangan juga terjadi. Beberapa negara Amerika Latin memiliki defisit perdagangan dengan UE, yang berarti mereka mengimpor lebih banyak dari Eropa dibandingkan ekspor mereka. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pertukaran dagang. Terjadi pula ketidaksetaraan akses pasar, di mana meskipun terdapat upaya untuk membuka akses pasar, tetapi beberapa hambatan perdagangan seperti tarif impor yang tinggi, masih terdapat dalam perdagangan antara Eropa dan Amerika Latin. Hal ini dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekspor Amerika Latin.

Ketidaksetaraan ekonomi dalam hubungan Eropa-Amerika Latin juga tercermin dalam perbedaan tingkat kesejahteraan dan distribusi pendapatan antara negara-negara di kedua wilayah. Beberapa negara Amerika Latin, terutama di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidaksetaraan sosial yang signifikan. Kemiskinan ini sering kali terkait dengan masalah akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Tantangan berikutnya yang mengemuka dalam hubungan Eropa-Amerika Latin adalah terkait deforestasi dan isu lingkungan. Dalam hal ini, perdagangan dan investasi dalam sektor pertanian dan peternakan di Amerika Latin, telah menciptakan keprihatinan akan deforestasi di Amazon dan dampak lingkungan lainnya. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kesepakatan Mercosur-UE yang telah memicu kontroversi. Kesepakatan ini akan membuka akses pasar yang signifikan bagi produk pertanian dan daging sapi dari Mercosur ke UE, tetapi di lain pihak, memicu kekhawatiran bahwa lonjakan produksi pertanian ini akan mendorong perubahan penggunaan lahan dan meningkatkan tekanan terhadap hutan hujan Amazon (Dominguez, 2015).

Pengumuman awal mengenai kesepakatan ini dibuat pada tahun 2019, dan keprihatinan tentang dampak lingkungan, termasuk deforestasi di Amazon, telah muncul sejak pengumuman tersebut. Kesepakatan ini kemudian berkembang menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, dengan proses negosiasi masih terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, keprihatinan mengenai isu lingkungan dan deforestasi ini semakin diperkuat oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi lingkungan (Nolte, 2021).

Amazon sendiri merupakan hutan hujan terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim global serta keanekaragaman hayati. Keprihatinan utama adalah bahwa kesepakatan UE-Mercosur ini dapat mendorong peningkatan deforestasi di Amazon, terutama melalui perluasan sektor peternakan dan pertanian untuk memenuhi permintaan dari UE. Para kritikus menyatakan bahwa negosiasi Mercosur-UE tidak memadai dalam hal mendorong kebijakan lingkungan dan perlindungan hutan hujan Amazon. Mereka mendesak untuk mengatasi masalah deforestasi dengan lebih tegas. Kesepakatan ini dipandang juga telah menciptakan keprihatinan sehubungan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal konflik lahan dan isu-isu sosial yang muncul seiring dengan perluasan pertanian dan peternakan di wilayah Amazon. Beberapa kelompok juga menekankan pentingnya transparansi dalam negosiasi dan melibatkan masyarakat sipil serta pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan keputusan mengenai kesepakatan ini (Nolte, 2021).

Perdebatan tentang kesepakatan Mercosur-UE ini mencerminkan dilema yang sering muncul dalam perdagangan internasional, yaitu sejauh mana perdagangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan HAM. Bagi banyak pihak, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan adalah tugas yang sangat penting. Sebagai hasilnya, proses negosiasi kesepakatan ini masih terus berlanjut dan menjadi subjek perdebatan yang intens.

BAB 6

KERJA SAMA REGIONAL



Eropa terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama regional dengan kawasan lain di seluruh dunia, mencakup kerja sama ekonomi, keamanan, pembangunan, dan diplomasi. Beberapa contoh kerja sama regional Eropa dengan kawasan lain yang melibatkan berbagai organisasi internasional dan forum regional, di antaranya dengan ASEAN, Afrika-Eropa, Mercosur, CARIFORUM-EU, *Gulf Cooperation Council* (GCC), dan Forum Pasifik-UE. Kerja sama regional Eropa dengan kawasan lainnya ini mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang kokoh, mempromosikan perdamaian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil dan inklusif secara global.

A. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN): Katalis Pembangunan Regional

Hubungan antara UE dan ASEAN melibatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, keamanan, dan sosial. UE dan ASEAN memiliki kerangka dialog politik yang terus berlanjut untuk membahas isu-isu regional dan global. Dalam hal ini *Asia-Europe Meeting* (ASEM) telah menjadi platform dialog yang melibatkan pemimpin dari kedua kawasan. Platform ini memberikan kesempatan untuk diskusi mendalam dan kerja sama antara UE dan ASEAN dalam konteks lebih luas. Dialog ini juga melibatkan pertukaran pandangan dan kerja sama dalam menjawab tantangan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan (Prakash, 2016).

Dalam bidang ekonomi, meskipun belum ada perjanjian dagang bebas menyeluruh antara UE dan ASEAN, keduanya telah memulai pembicaraan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2019, keduanya menandatangani

Perjanjian Kerja Sama dan Investasi (*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/ AJCEP*) yang melibatkan sejumlah negara ASEAN dan UE. UE juga memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di wilayah ASEAN. Ini mencakup dukungan untuk penanganan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Terkait kerja sama keamanan, kedua belah pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama keamanan, termasuk melalui dialog dan pertukaran informasi, di mana isu-isu keamanan seperti terorisme, kejahatan terorganisasi, dan penanganan konflik menjadi fokus dalam kerja sama ini.

UE dan ASEAN juga saling mendukung pengembangan program pertukaran pelajar, peneliti, dan profesional untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan mempromosikan pemahaman lintas budaya. Dalam hal ini, keduanya bekerja sama dalam mempromosikan kekayaan budaya dan seni, serta pelestarian warisan budaya. UE dan ASEAN juga bekerja sama dalam mempromosikan HAM dan pemberdayaan perempuan di kawasan tersebut. Inisiatif ini mencakup dukungan untuk penegakan hukum, keadilan, dan kesetaraan gender.

Dalam bidang kesehatan global, terutama selama pandemi COVID-19, kedua belah pihak telah meningkatkan kerja sama untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Ini mencakup dukungan untuk pengadaan vaksin dan penanganan pandemi. Sementara terkait isu penanggulangan perubahan iklim, UE dan ASEAN memiliki komitmen untuk menanggulangi perubahan iklim. Dalam hal ini, keduanya berpartisipasi dalam upaya global untuk mencapai tujuan lingkungan dan menangani tantangan lingkungan Bersama (OECD, 2020).

Hubungan antara UE dan ASEAN terus berkembang, dan kedua belah pihak memiliki kesamaan pandangan dalam banyak

isu global. Namun, perbedaan kontekstual dan dinamika internal di setiap organisasi ikut memengaruhi tingkat integrasi dan kerja sama. Dalam hal ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan keduanya. Beberapa tantangan utama melibatkan perbedaan dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial antara UE dan ASEAN. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam kerja sama EU-ASEAN (Becker et al., 2018).

1. Perbedaan model integrasi: UE menerapkan model integrasi yang mengarah pada suatu bentuk federasi ekonomi dan politik. Sementara itu, ASEAN mengadopsi model integrasi yang lebih longgar, yang lebih menitikberatkan pada kerja sama antarnegara tanpa menciptakan struktur federal. Perbedaan dalam pendekatan ini dapat menjadi hambatan dalam merancang kesepakatan dan memahami dinamika kerja sama.
2. Isu keamanan dan HAM: ASEAN cenderung bersifat lebih konservatif dalam mengatasi isu-isu keamanan regional dan HAM, terutama dalam konteks nonintervensi. UE, sebaliknya, memiliki pendekatan yang lebih proaktif dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan dalam kerja sama, terutama ketika menghadapi isu-isu sensitif.
3. Isu perdagangan dan ekonomi: perbedaan dalam model ekonomi dan tingkat pengembangan ekonomi antara negara-negara UE dan ASEAN dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, isu-isu perdagangan dan ketentuan ekonomi dapat menjadi hal yang rumit dalam perundingan perjanjian dagang atau kerja sama ekonomi lebih lanjut.
4. Kerentanan terhadap konflik regional: ASEAN memiliki sejumlah tantangan regional, termasuk ketegangan di

Laut China Selatan dan isu-isu keamanan di Semenanjung Korea. Tantangan ini dapat memengaruhi dinamika kerja sama dengan UE, terutama karena UE memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

5. Kerja sama regional ASEAN sendiri: tantangan dalam mencapai kesepakatan atau langkah-langkah bersama di antara negara-negara ASEAN sendiri dapat menjadi faktor yang memengaruhi kerja sama mereka dengan UE. Ketidaksetujuan internal atau perbedaan prioritas di antara anggota ASEAN bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kerja sama regional.
6. Ketidakpastian lingkungan global: faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian lingkungan global, termasuk gejolak ekonomi dan perubahan politik di beberapa negara, dapat memengaruhi kerja sama UE-ASEAN. Ketidakpastian ini dapat menciptakan tantangan baru dalam merancang kebijakan dan menjaga stabilitas.
7. Pengelolaan krisis dan respons pascapandemi: pandemi COVID-19 adalah salah satu tantangan terbaru yang memerlukan koordinasi dan respons global. Meskipun ada upaya untuk mengatasi pandemi bersama, perbedaan dalam pendekatan dan tingkat kesiapan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam respons dan menimbulkan dampak pada kerja sama.
8. Perbedaan kultur dan nilai: perbedaan dalam budaya, nilai, dan tradisi di antara negara-negara UE dan ASEAN dapat menciptakan hambatan dalam pemahaman dan kerja sama. Tantangan ini dapat memengaruhi komunikasi dan harmonisasi strategi antara kedua pihak.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi UE dan ASEAN untuk terus berkomunikasi, memahami perbedaan, dan menemukan titik temu dalam upaya untuk memperkuat kerja sama.

B. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan Berbagai Organisasi Regional di Afrika: Memperkuat Integrasi dan Kerja Sama Regional

Kerja sama antara UE dan organisasi regional di Afrika mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan, pembangunan, perdamaian, keamanan, dan isu-isu global lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara UE dan negara-negara di Afrika serta meningkatkan perkembangan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut. Kerja sama UE dengan organisasi regional di Afrika di antaranya terjalin melalui kerja sama dengan Uni Afrika (*African Union/AU*), Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (*Southern African Development Community/SADC*), Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (*Economic Community of West African States/ECOWAS*), Komunitas Afrika Timur (*East African Community/EAC*), dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (*Economic Community of Central African States/ECCAS*).

Kerja sama antara UE dan AU merupakan kemitraan yang luas yang melibatkan berbagai bidang, tujuan, dan program. Sebagai contoh, UE memberikan dukungan finansial dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di berbagai negara di Afrika melalui kemitraan dengan AU. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Terdapat pula upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara UE dan negara-negara Afrika

yang ditempuh melalui Economic Partnership Agreements, yaitu perjanjian perdagangan yang dirancang untuk meningkatkan akses pasar dan memfasilitasi perdagangan antara UE dan negara-negara Afrika. Sementara dalam bidang keamanan dan stabilitas, kerja sama yang dijalin mencakup dukungan UE terhadap misi-misi penjaga perdamaian di berbagai wilayah di Afrika, pemberdayaan kapasitas keamanan regional serta dukungan dalam penanganan konflik. UE dan AU juga bekerja sama dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Afrika. Ini melibatkan dukungan untuk inisiatif mitigasi dan adaptasi, transfer teknologi, serta kapasitas untuk mengatasi tantangan lingkungan (Medinilla et al., 2020).

Terkait upaya penegakan demokrasi dan HAM, UE, dan AU berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi, HAM, dan tata kelola yang baik. Dukungan diberikan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di seluruh benua. Program-program budaya dan pendidikan juga ditingkatkan dalam upaya mendukung pertukaran antara warga UE dan Afrika, mempromosikan saling pemahaman, sekaligus memperkaya keanekaragaman budaya. Berbagai kerja sama ini didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menguntungkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama, termasuk Agenda 2063 AU. Meskipun terdapat tantangan dan kompleksitas, kemitraan ini terus diperdalam untuk mencapai perkembangan positif di tingkat regional dan internasional (Medinilla et al., 2020).

Berikutnya, kerja sama antara UE dengan SADC yang melibatkan berbagai bidang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, keamanan, dan stabilitas di wilayah Selatan Afrika. Fokus dari kerja sama ini di antaranya dititikberatkan pada program pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah

SADC. Dukungan diberikan untuk proyek-proyek infrastruktur, energi, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Terjalin pula negosiasi perjanjian perdagangan, seperti *Economic Partnership Agreements* (EPA), untuk memfasilitasi perdagangan antara UE dan negara-negara SADC. Hal ini dinyatakan sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan investasi dan membuka akses pasar bagi produk-produk SADC di UE.

Dalam konteks kerja sama UE dengan ECOWAS, selain difokuskan pada upaya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, dukungan pada penguatan kapasitas keamanan dan penanganan konflik di wilayah ECOWAS juga menjadi perhatian utama. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi UE dalam misi-misi penjaga perdamaian dan dukungan bagi inisiatif keamanan regional. Beberapa negara di wilayah ECOWAS memang menghadapi tantangan keamanan serius, termasuk terorisme dan konflik etnis sebagai berikut (Kotsopoulos et al., 2017).

1. Nigeria: Boko Haram, kelompok militan yang aktif di utara Nigeria dan sekitarnya, telah menyebabkan konflik serius dan kekhawatiran keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, konflik antara kelompok etnis dan agama juga memperumit keadaan di beberapa bagian negara ini. Nigeria juga menghadapi tantangan serius dari kelompok terorisme dan konflik etnis di beberapa bagian negara ini, terutama di sepanjang perbatasan dengan Mali dan Burkina Faso.
2. Mali: krisis di Mali melibatkan kombinasi konflik etnis, konflik antara pemerintah dan kelompok separatis Tuareg, dan aktivitas kelompok teror seperti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang terafiliasi dengan Al-Qaeda.

3. Burkina Faso: negara ini menghadapi serangan terorisme yang meningkat, terutama di wilayah utara dan timur. Kelompok bersenjata seperti Ansarul Islam dan kelompok terafiliasi Al-Qaeda dan ISIS beroperasi di wilayah ini.
4. Côte d'Ivoire: meskipun situasi keamanan telah membaik setelah krisis politik pada tahun 2010-2011, masih terdapat potensi risiko konflik etnis dan permasalahan keamanan di perbatasan dengan Liberia dan Guinea.

Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik di wilayah ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah nasional, ECOWAS, dan juga dukungan dari pihak internasional, termasuk UE. ECOWAS memiliki mekanisme, seperti Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Konflik (*ECOWAS Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution/CMR*), untuk membantu mengatasi konflik dan mempromosikan perdamaian di wilayah ini. UE sendiri telah memberikan dukungan dalam hal pencegahan konflik, penanganan krisis, dan pembangunan kapasitas keamanan di negara-negara ECOWAS yang terdampak. Dukungan ini melibatkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, dan partisipasi dalam misi-misi penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Meskipun tantangan ini tetap signifikan, upaya bersama terus dilakukan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah ECOWAS (Kotsopoulos et al., 2017).

Sementara kerja sama yang dijalin UE dengan EAC mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan isu-isu global bersama. UE juga telah terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Afrika Timur melalui berbagai inisiatif dan dukungan. Afrika Timur sendiri telah mengalami beberapa konflik dan ketegangan selama beberapa dekade, yang melibatkan berbagai negara dan kelompok bersenjata.

Beberapa konflik terkemuka di kawasan ini melibatkan sejumlah isu, termasuk politik, etnis, agama, dan sumber daya. Sebagai contoh, konflik bersenjata di Sudan Selatan yang dimulai pada tahun 2013, setelah perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Konflik ini memiliki dimensi etnis dan politik, menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi (Colombo & Lecha, 2021).

Somalia juga telah mengalami konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik sejak awal 1990-an. Konflik ini melibatkan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Al-Shabaab, yang memberikan dampak signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat Somalia. Kawasan Timur Republik Demokratik Kongo juga telah menjadi pusat konflik bersenjata yang kompleks, melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan sering kali terkait dengan perebutan sumber daya alam, termasuk tambang mineral. Demikian halnya dengan krisis yang terjadi di Burundi, di mana pada tahun 2015, Burundi mengalami krisis politik yang berawal dari keputusan Presiden Pierre Nkurunziza untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang dipandang sebagai langkah yang kontroversial. Konflik ini memunculkan ketegangan etnis dan kekerasan politik. Terkait konflik-konflik ini, UE kemudian bekerja sama dengan organisasi regional, baik dengan AU maupun EAC untuk mengembangkan strategi bersama dalam mengoordinasikan upaya penyelesaian konflik (Medinilla et al., 2020).

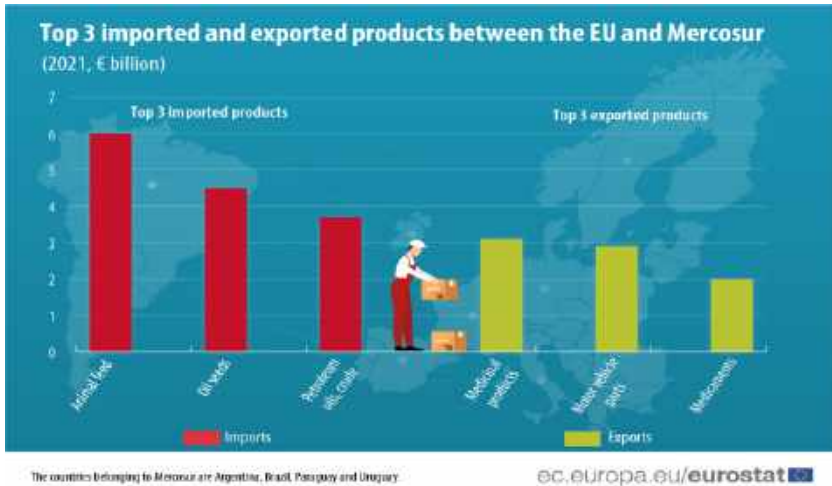
Terakhir, UE secara aktif juga menjalin hubungan kerja sama dengan ECCAS, di mana kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pembangunan, perdamaian, keamanan, dan isu-isu global bersama. Berikut beberapa aspek kerja sama UE dengan ECCAS. Dalam konteks kerja sama ekonomi, seperti halnya dengan beberapa komunitas ekonomi regional di Afrika, UE telah terlibat

dalam negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi dengan ECCAS, di antaranya melalui EPA yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi perdagangan antara UE dan negara-negara anggota ECCAS. UE juga bekerja sama dengan ECCAS dalam upaya pencegahan dan manajemen krisis, termasuk respons terhadap bencana alam, konflik, atau ancaman lainnya terhadap stabilitas wilayah. Berbagai kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara UE dan ECCAS, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendukung stabilitas di kawasan tersebut.

C. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan Mercosur: Memetakan Cakrawala Baru dan Membuka Peluang

UE dan Mercosur telah menjalani serangkaian negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang luas. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai Kesepakatan Asosiasi Uni Eropa-Mercosur, telah menjadi perbincangan dan proyek yang signifikan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua blok tersebut. Kesepakatan ini dirancang untuk membuka pasar antara UE dan Mercosur, memungkinkan akses yang lebih baik untuk produk dan layanan antara kedua pihak, yang di dalamnya termasuk penghapusan atau penurunan tarif perdagangan serta pembukaan akses untuk sektor-sektor tertentu.

Negara-negara yang tergabung dalam Mercosur sendiri adalah Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay. Mercosur selalu dianggap sebagai mitra strategis bagi UE karena pada tahun 1999, Perjanjian Kerangka Kerja Sama antar-regional telah diberlakukan. Pentingnya Mercosur sebagai mitra dagang kemudian ditegaskan kembali melalui perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada tahun 2019 dengan tujuan menghilangkan hambatan yang ada terhadap perdagangan barang, termasuk penghapusan tarif.



Pada tahun 2021, UE merupakan mitra dagang kedua bagi Mercosur, setelah China dan AS.

Sumber: Mercosur-EU International Trade in Goods Statistics.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mercosur-EU_-_international_trade_in_goods_statistics&oldid=581432

Kerja sama antara UE dan Mercosur secara umum dipandang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi kedua belah pihak, tetapi juga dihadapkan pada sejumlah peluang dan hambatan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi peluang (Dominguez, 2015).

1. Akses pasar yang lebih besar: kesepakatan perdagangan dapat membuka akses pasar yang lebih besar, sekaligus meningkatkan ekspor dan impor barang serta layanan antara UE dan Mercosur.
2. Peningkatan standar dan regulasi: kesepakatan dapat memberikan tekanan positif untuk meningkatkan standar dan regulasi dalam sejumlah sektor, termasuk sanitasi, lingkungan, dan HAM.
3. Kerja sama dalam inovasi dan riset: kemitraan ini juga

dapat merangsang kerja sama di bidang inovasi dan riset, memfasilitasi pertukaran teknologi dan pengetahuan antara UE dan Mercosur.

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah hambatan dalam kerja sama UE-Mrcosur, di antaranya sebagai berikut (Nolte, 2021).

1. Isu lingkungan dan HAM: kesepakatan ini menghadapi kontroversi terkait isu lingkungan dan HAM. Beberapa pihak menentang kesepakatan karena kekhawatiran dapat memberikan insentif bagi praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan melanggar HAM.
2. Ketidaksetaraan ekonomi: Mercosur terdiri dari negara-negara dengan tingkat pengembangan ekonomi yang berbeda. Ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam manfaat ekonomi yang diperoleh dari kesepakatan di antara beberapa negara anggota Mercosur.

Penting untuk dipahami bahwa kerja sama UE-Mercosur masih dalam proses dan dinamika, di mana meskipun negosiasi kesepakatan telah mencapai tahap yang signifikan, tetapi belum ada tanda-tanda tercapainya kesepakatan final yang tentunya akan sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keberlanjutan politik dan penanganan isu-isu sensitif.

D. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan CARIFORUM dan Forum Pasifik: Menjembatani Atlantik dan Pasifik

CARIFORUM (*The Forum of the Caribbean Group of African, Caribbean and Pacific States*) adalah kelompok yang mencakup negara-negara Karibia dan Komunitas Karibia (CARICOM). UE telah menjalin kerja sama dengan CARIFORUM melalui EPA yang bertujuan untuk membuka akses pasar antara UE dan negara-negara CARIFORUM. Ini mencakup penghapusan atau penurunan tarif perdagangan, yang diharapkan meningkatkan perdagangan

dan investasi. Kesepakatan ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi di negara-negara CARIFORUM dengan memberikan insentif dan fasilitas bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor tertentu.

Kesepakatan EPA juga mencakup ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan investasi bilateral antara UE dan CARIFORUM yang diharapkan dapat menciptakan peluang baru untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kesepakatan EPA ini mencerminkan pentingnya pembangunan berkelanjutan, mengingat di dalamnya memuat perhatian terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditujukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat pula tantangan sosial dan ekonomi dalam kerja sama EU-CARIFORUM ini, di antaranya menyangkut fakta bahwa beberapa negara di CARIFORUM menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, termasuk ketidaksetaraan dan ketidakstabilan. Kerja sama ini dapat menjadi peluang untuk mengatasi tantangan ini, tetapi juga dapat menjadi hambatan terkait implementasi kesepakatan (Bernal, 2013).

Sementara kerja sama antara Uni Eropa UE dan Forum Pasifik melibatkan sejumlah isu ekonomi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan kerja sama politik. Forum Pasifik adalah sebuah organisasi regional yang mencakup negara-negara dan wilayah-wilayah di Samudra Pasifik. Beberapa aspek kerja sama antara UE dan Forum Pasifik adalah sebagai berikut (Bernal, 2013).

1. Pembangunan berkelanjutan

- Bantuan pembangunan: UE menyediakan bantuan pembangunan untuk membantu negara-negara Pasifik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan,

meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan layanan kesehatan.

- Pemberdayaan ekonomi: kerja sama melibatkan program-program pemberdayaan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi di wilayah Pasifik.

2. Perdagangan dan investasi

- Perjanjian kemitraan ekonomi: meliputi upaya menjalin perjanjian perdagangan atau kemitraan ekonomi antara UE dan negara-negara Pasifik untuk meningkatkan akses pasar dan mendukung pertumbuhan perdagangan.
- Promosi investasi: inisiatif untuk mempromosikan investasi di sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pariwisata, dan energi terbarukan.

3. Perubahan iklim

- Adaptasi dan mitigasi: forum Pasifik dan UE bekerja sama untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui proyek-proyek adaptasi dan mitigasi, serta mendukung inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Konservasi lingkungan: perlindungan ekosistem laut dan inisiatif konservasi untuk memelihara keanekaragaman hayati di Samudra Pasifik.

4. Diplomasi dan keamanan

- Dialog politik: kerja sama dalam dialog politik untuk mengatasi isu-isu keamanan regional dan global, serta mendukung upaya penyelesaian konflik dan promosi perdamaian.
- Pemberdayaan perempuan dan HAM: kerja sama untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, HAM, dan tata kelola yang baik di wilayah Pasifik.

5. Tanggapan terhadap krisis

- Bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana: kerja sama terkait tanggapan terhadap bencana alam dan krisis kemanusiaan, termasuk bantuan darurat dan rekonstruksi pascabencana.

Penting untuk dipahami bahwa kerja sama ini bersifat dinamis. Isu-isu seperti keberlanjutan, ketahanan iklim, dan perdamaian regional menjadi prioritas bersama dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan stabilitas di wilayah Pasifik.

E. Kerja Sama Uni Eropa (UE) dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC): Menuju Kemakmuran dan Kolaborasi Strategis

Kerja sama antara UE dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mencakup sejumlah isu yang melibatkan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan. GCC terdiri dari enam negara di kawasan Teluk, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Dalam konteks kerja sama ekonomi, UE telah berupaya untuk menjalin perjanjian ekonomi dengan GCC dalam upaya memfasilitasi perdagangan bebas antara keduanya. Negosiasi ini mencakup sektor perdagangan barang, jasa, dan investasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk energi, infrastruktur, dan industri. Kerja sama ekonomi ini juga mencakup dukungan untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan GCC, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan inovasi (Dominguez, 2015).

GCC sebagai produsen minyak utama, juga memiliki potensi kerja sama dengan UE dalam isu-isu energi yang mencakup kerja sama dalam pengembangan sumber energi berkelanjutan dan diversifikasi energi. GCC dan UE juga melakukan kerja sama dalam penanganan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan,

terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Keamanan dan stabilitas regional juga menjadi isu penting, terutama mengingat dinamika geopolitik di kawasan Teluk. Kerja sama antara UE dan GCC terkait hal ini mencakup dialog dan langkah-langkah bersama untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian. Sementara kerja sama dalam penanggulangan terorisme dan keamanan regional dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen dan langkah-langkah bersama dalam melawan ancaman keamanan.



Pertemuan ke-27 Dewan Menteri Gabungan GCC-UE yang berlangsung di Muscat pada 9-10 Oktober 2023, mempertemukan perwakilan dari enam negara GCC dan 27 negara UE.

Sumber: GCC-EU Ministerial Council Discusses Strategic Partnership and Regional Issues. <https://www.fm.gov.om/gcc-eu-ministerial-council-discusses-strategic-partnership-regional-issues/>

Dalam perkembangannya, kerja sama antara UE dan GCC ini juga memiliki sejumlah peluang dan tantangan. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang menjadi peluang kerja sama (Dominguez, 2015).

1. Peluang: pasar yang besar: GCC memiliki ekonomi yang besar dan kaya sumber daya, terutama dalam sektor energi. Kerja sama dapat membuka peluang akses ke pasar yang signifikan bagi perusahaan UE.
2. Investasi: peluang untuk meningkatkan investasi antara UE dan GCC, khususnya di sektor energi, infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor strategis lainnya.
3. Kerja sama energi: GCC sebagai produsen minyak terkemuka memiliki peluang untuk bekerja sama dalam pengembangan energi bersih dan diversifikasi energi, mengingat pergeseran global menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.
4. Kerja sama di bidang keamanan: dalam konteks ketidakstabilan regional, terdapat peluang untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan dan penanggulangan terorisme.
5. Pemberdayaan ekonomi dan sosial: kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan peluang untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kedua wilayah.

Sementara tantangan yang dihadapi dalam kerja sama UE-GCC sebagai berikut (Araźna, 2019).

1. Isu HAM: isu HAM dan kebebasan sipil dapat menjadi hambatan dalam kerja sama, terutama menyangkut perbedaan pendekatan atau praktik yang kontroversial dalam hal HAM di salah satu pihak.
2. Dinamika regional yang rumit: persoalan regional dan ketegangan antara negara-negara GCC sendiri atau dengan negara-negara tetangga dapat menjadi tantangan untuk mencapai konsensus dan koordinasi dalam kerja sama dengan UE.

3. Perubahan harga minyak: kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di wilayah GCC dan secara tidak langsung memengaruhi ketergantungan ekonomi UE terhadap pasokan energi.
4. Dinamika politik regional: ketegangan geopolitik di kawasan Teluk, termasuk konflik di Yaman dan hubungan yang kompleks dengan Iran, dapat menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan kerja sama yang lebih luas.
5. Keberlanjutan sumber daya alam: ketergantungan ekonomi GCC pada sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, dapat menjadi tantangan dalam pencarian keberlanjutan ekonomi dan diversifikasi.

Sementara peluang tersebut dapat memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, berbagai tantangan di atas juga memerlukan keterlibatan diplomatik dan upaya bersama untuk diatasi. Penting pula untuk memahami kompleksitas geopolitik dan kultural di antara kedua kawasan dalam merancang kerja sama yang efektif dan berkelanjutan. Perubahan dinamika regional atau global juga akan sangat memengaruhi peluang dan tantangan ini seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. 2011. *Islamic Radicalism and Multicultural Politics: The British Experience*. London: Routledge.
- Abbas, T. 2021. *Countering Violent Extremism: A Global Deradicalization Agenda*. London: Bloomsbury.
- Abulafia, David. 1997. "Islam in the History of Early Europe". *European Review* 5, Issue 3: 241-256.
- Adler-Nissen, Rebecca. 2016. "Towards a Practice Turn in EU Studies: The Everyday of European Integration". *Journal of Common Market Studies* 54, no. 1: 87-103.
- Almond, Gabriel A., Russell J. Dalton, dan G. Bingham Powell Jr. (eds.). 1999. *European Politics Today*. New York: Longman.
- Amghar, Samir. 2010. *European Islam: Challenges for Public Policy and Society*. Centre for European Policy Studies.
- Arażna, Marzena. 2019. "The Arab Spring and its influence on European Union Policy". *Security and Defence Quarter* 3, no. 2: 81-96.
- Astrain, Luis Núñez dan Stephens, Meic. 1997. *The Basques: Their Struggle for Independence*. Cardiff, Wales: Welsh Academic Press.
- Bache, Ian, Simon Bulmer, Stephen George, dan Owen Parker. 2015. *Politics in the European Union 4th ed*. Oxford: Oxford University Press.
- Balme, Richard. 2008. *Europe-Asia Relations: Building Multilateralisms*. London: Palgrave Macmillan.
- Barslund, M., Busse M., Lenaerts K., Ludolph L., Renman V. 2017. "Integration of Refugees: Lessons from Bosnians in Five EU Countries". *Intereconomics* 52, no. 5.
- Becker, W., M. Dominguez-Torreiro, A.R. Neves, C.J. Tacao Moura, dan M. Saisana. 2018. "Exploring ASEM Sustainable

- Connectivity: What Brings Asia and Europe Together?".
 Ispra: European Commission, Joint Research Centre.
- Berger, Maurits. 2014. *A Brief History of Islam in Europe*. Leiden University Press.
- Bernal, R. 2013. *Globalization, Trade and Economic Development: The CARIFORUM-EU Economic Partnership Agreement*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bicchi, F. 2007. *European Foreign Policy Making Towards the Mediterranean*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bieber, F. 2006. *Post-War Bosnia Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bonikowski, Bart, Noam Gidron. 2015. "Populism in Legislative Discourse: Evidence from the European Parliament, 1999-2004". *Working Paper* Harvard University: 13-14.
- Bonikowski, Bart, Noam Gidron. 2016. "A Populist Era? An Analysis of Legislative Discourse in the European Parliament, 1999-2012". *Working Paper*, Harvard University: 20.
- Borg, Stefan, Thomas Diez. "Postmodern EU? Integration between Alternative Horizons and Territorial Angst". *Journal of Common Market Studies* 54, no. 1 (2016): 136-151.
- Börzel, Tanja A. 2018. "Researching the EU (Studies) into Demise?". *Journal of European Public Policy* 25, no. 3: 475-485.
- Bulmer, Simmon, Jonathan Joseph. 2016. "European Integration in Crisis? Of Supranational Integration, Hegemonic Projects and Domestic Politics". *European Journal of International Relations* 22, no. 4: 725-748.
- Burg, S., dan Shoup, P. 1999. *The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention*. New York: M.E. Sharpe.
- Calance, Madalina. 2012. "The Resurgence of Nationalism in the European Union.". *Centre for European Studies Working Paper* 4, no. 1: 24-34 <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/198153/1/ceswp-v04-i1-p024-034.pdf>.

- Canovan, Margaret. 2002. "Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy". *Democracies and the Populist Challenge*, Yves Meny dan Yves Surel (Eds.). New York: Palgrave.
- Cebula, Adam. 2020. "The Legacy and Consequences of World War I". *Journal of Military Ethics* 19, no. 2: 118-120.
- Chiara, Bottici, Benoît Challand. 2013. *Imagining Europe. Myth, Memory, and Identity*. New York: Cambridge University Press.
- Christensen, Thomas, Knud Erik Jørgensen, dan Antje Wiener. 1999. "The Social Construction of Europe". *Journal of European Public Policy* 6, no. 4: 528-544.
- Christensen, Thomas, Knud Erik Jørgensen, dan Antje Wiener (eds.). 2001. *The Social Construction of Europe*. London: Sage.
- Colombo, Silvia dan Eduard Soler i Lecha. 2021. "Europe and the 'New' Middle East". *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 23, no. 3: 403-422.
- Cordial, M. dan Rosandhaug. 2008. *Post-Conflict Property Restitution: The Approach in Kosovo and Lessons Learned for Future International Practice*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Cox, Pat. 2023. "Reflections on Russia's Invasion of Ukraine: One Year On". *Institute of International and European Affairs (IIEA)*. https://www.iiea.com/images/uploads/resources/Pat_Cox__Reflections_on_Russias_Invasion_of_Ukraine.pdf.
- Davis, Douglas dan Slobodchikoff, Michael O. 2022. "Great-Power Competition and the Russian Invasion of Ukraine". *Journal of Indo-Pacific Affair*: 215-226.
- De Haas, H. 2018. *European Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Policies*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0e56c014-3232-11e8-b5fe-01aa75ed71a1>.

- Delanty, Gerard. 1995. *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Delanty, Gerard. 2019. *Formations of European Modernity*. Palgrave Macmillan.
- Denk, Thomas, Henrik Serup Christensen, dan Daniel Bergh. 2015. "The Composition of Political Culture – A Study of 25 European Democracies". *Studies in Comparative International Development* 50, no. 3: 358–377.
- Dibb, Paul. 2014. *The Geopolitical Implications of Russia's Invasion of the Ukraine*. Strategic & Defence Studies Centre, ANU College of Asia & the Pacific.
- Dickrill, Michael L., Michael F. Hopkins. 2006. *The Cold War, 1945–1991*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Dodds, J. D. 1992. *Al-Andalus: The Art of Islamic Spain*. New York: Metropolitan Museum of Art.
- Dominguez, Roberto. 2015. *EU Foreign Policy Towards Latin America*. London: Palgrave Macmillan.
- European Union. 2020. "European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Accession Criteria". https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en.
- Evangelista, Mathew. 2003. "Chechnya's Russia Problem". *Current History* 102, no. 666.
- Fadil, Nadia, Francesco Ragazzi, Martijn de Koning. 2021. *Radicalization in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security*. Bloomsbury Publishing.
- Faroghi, Suraiya N. 2006. *The Later Ottoman Empire, 1603–1839*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Farrell, Mary, Stefano Fella, dan Michael Newman (eds). 2002. *European Integration in the 21st Century: Unity in Diversity?*. London: Sage.

- Gehler, Michael. 2016. "'Europe', Europeanisations and their Meaning for European Integration Historiography". *Journal of European Integration History* 22, no. 1: 141-174.
- Gellner, Ernest. 2003. *Nations, and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Goff, P. 1999. *The Kosovo News and Propaganda War*. Vienna: International Press Institute.
- Grande, Edgar, Swen Hutter. 2016. "Beyond Authority Transfer: Explaining the Politicisation of Europe". *West European Politics* 39, no. 1: 23-43.
- Greble, Emily. 2022. *Muslims and the Making of Modern Europe*. Oxford University Press.
- Guiraudon, Virginie, Carlo Ruzza, dan Hans-Jörg Trenz. 2016. *Europe's Prolonged Crisis: The Making or the Unmaking of a Political Union*. New York: Springer.
- Halliday, F. 1996. *Islam and the Myth of Confrontation*. London: Routledge.
- Hanappi, Hardy. 2022. "Russia. The Background of the Russian Invasion of Ukraine". *Vienna Institute for Political Economy Research (VIPER)*. https://mpira.ub.uni-muenchen.de/112394/1/MPRA_paper_112394.pdf.
- Harvey, L. P. 1996. *Islamic Spain, 1250-1500*. Chicago.
- Hashas, Mohhamed. 2019. *The Idea of European Islam: Religion, Ethics, Politics, and Perpetual Modernity*. London: Routledge.
- Hastings, Derek. 2018. *Nationalism in Modern Europe. Politics, Identity, and Belonging since the French Revolution*. London: Bloomsbury.
- Hathaway, Jane, Karl K. Barbir. 2008. *The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516-1800*. Harlow, UK: Pearson.
- Hatzopoulos, P. 2008. *The Balkans beyond Nationalism and Identity*. London: I. B. Tauris.

- Herrmann, R. K. 2004. "Learning from the End of the Cold War". R. K. Herrmann dan R.N. Lebow (Eds.), *Ending the Cold War: Interpretations, Causation, and the Study of International Relations*. Palgrave Macmillan, Houndmills.
- Hillenbrand, Carole. 2021. *Islam and the Crusades*. Edinburgh University Press.
- Hix, Simon. 2005. *The Political System of the European Union*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Howard, Michael. 2007. *The First World War: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Hyde-Price, Adrian. 2007. *European Security in the Twenty-First Century: The Challenge of Multipolarity*. London: Routledge.
- Ivarsflaten, Elisabeth. 2008. "What Unites Right-Wing Populists in Western Europe? Re-Examining Grievance Mobilization Models in Seven Successful Cases". *Comparative Political Studies* 41, no. 1: 14–15.
- Jones, Erik. 2018. "Towards a Theory of Disintegration". *Journal of European Public Policy* 35, no. 3: 440–451.
- Jovanovic, Miroslav. 1997. *European Economic Integration: Limits and Prospects*. London: Routledge.
- Karakas, Cemal. 2013. "EU-Turkey: Integration without Full Membership or Membership without Full Integration? A Conceptual Framework for Accession Alternatives". *Journal of Common Market Studies* 51, no. 6: 1057–1073.
- Kazan, I. 2002. "Cyprus and the Eastern Mediterranean, Seen from Turkey". *The European Union and the Cyprus Conflict. Modern Conflict, Postmodern Union*, Diez, T. (ed.). Manchester: Manchester University Press.
- King R., Okólski M. 2019. "Diverse, Fragile and Fragmented: The New Map of European Migration.". *Central and Eastern European Migration Review* 8: 9–32.

- Kinnvall, Catarina. 2016. "The Postcolonial has Moved into Europe: Bordering, Security and Ethno-Cultural Belonging". *Journal of Common Market Studies* 54, no. 1: 152-168.
- Kenealy, Daniel, John Peterson, dan Richard Corbett. 2015. *The European Union: How Does it Work? 4th ed.* Oxford: Oxford University Press.
- Kotsopoulos, J. dan Sidiropoulos, E. 2007. "Continental Shift? Redefining EU-Africa Relations". Brussels: European Policy Centre.
- Kreuder-Sonnen, Christian. 2018. "An Authoritarian Turn in Europe and European Studies?". *Journal of European Public Policy* 25, no. 3: 452-464.
- Kubicek, Paul. 2021. *European Politics*, 3rd ed. Abingdon: Routledge.
- Laffan, Brigid. 2017. *Europe's Union in Crisis: Tested and Contested.* London: Routledge, 2017.
- Laskowski, Jan, dan Agnieszka Laskowska. 2022. "Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries". *Safety & Defense* 8, no. 1.
- Leonard, Mark. 1998. *Making Europe Popular: The Search for European Identity.* London: Demos/Interbrand.
- Magone, José M. 2019. *Contemporary European Politics: A Comparative Introduction*, 2nd ed. Abingdon: Routledge.
- Malmros, Robin Andersson. 2022. "Prevention of Terrorism, Extremism and Radicalisation in Sweden: A Sociological Institutional Perspective on Development and Change." *European Security* 31, Issue 2: 289-312.
- Manners, Ian, Ben Rosamond. 2018. "A Different Europe Is Possible: The Professionalisation of EU Studies and the Dilemmas of Integration in the 21st Century". *Journal of Common Market Studies* 56, no. 1: 28-38.
- Martel, Gordon (ed). 2006. *A Companion to Europe: 1900-1945.* Malden: Blackwell Publishing.

- Matveeva, A. 2022. "Donbas: The Post-Soviet Conflict that Changed Europe". *European Politics and Society* 23, no. 3: 410-441.
- Medinilla, Alfonso dan Teevan, Chloe. 2020. "Beyond Good Intentions: The New EU-Africa Partnership". *Discussion Paper* no. 267, European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
- Meurs, Wim van, Robin de Bruin, Liesbeth van de Grift, Carla Hoetink, Karin van Leeuwen, dan Carlos Reijnen. 2018. *The Unfinished History of European Integration*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Minic, Dimitri. 2022. "Russia's Invasion of Ukraine: A Political-Strategic Break?". *Russie.Nei.Visions*. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/d.minic_invasion_russe_ukraine_2022_us.pdf.
- Moravcsik, Andrew, Milada Anna Vachudova. 2003. "National Interests, State Power, and EU Enlargement". *East European Politics and Society* 17, no. 1: 42-57.
- Mudde, Cas. 2007. *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mühlböck, Monika, Jale Tosun. 2018. "Responsiveness to Different National Interests: Voting Behaviour on Genetically Modified Organisms in the Council of the European Union". *Journal of Common Market Studies* 56, no. 2: 385-402.
- Mulhearn, Chris, Howard R Vane. 2008. *The Euro: Its Origins, Development, and Prospects*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Müller, Jan-Werner. 2002. *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Neuman Stanivuković, Senka, Marek Neuman. 2019. "Reading the EU's Migration and Security 'Crises' through (South) Eastern Europe". *Journal of European Studies* 49, no. 3-4: 374-393.

- Nicolaidis, Kalypso. 2013. "European Democracy and Its Crisis". *Journal of Common Market Studies* 51, no. 2: 351-369.
- Nielsen, Jorgen. 2004. *Muslims in Western Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Nolte, Detlef. 2001. *The EU's Beef with Mercosur: Geo-Economics Versus Climate Diplomacy, Latin America's Environmental Policies in Global Perspective*. Washington, DC: Wilson Center.
- Noutcheva, Gergana, Karolina Pomorska, dan Giselle Bosse (eds.). 2013. *The EU and Its Neighbours: Values Versus Security in European Foreign Policy*. Manchester: Manchester University Press.
- OECD. 2020. "Tackling Coronavirus (COVID-19): Contributing to a Global Effort –COVID-19 in Emerging Asia: Regional Socio-Economic Implications and Policy Priorities". Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Opello Jr, Walter C., dan Katherine A.R. Opello. 2009. *European Politics: The Making of Democratic States*. Boulder: Lynne Rienner.
- Pagden, Anthony, (ed.). 2002. *The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union*, Cambridge: Cambridge University Press/Woodrow Wilson Center Press.
- Parker, Owen. 2016. "Teaching (Dissident) Theory in Crisis European Union". *Journal of Common Market Studies* 54, no. 1: 37-52.
- Prakash, A. 2016. *Asia–Europe Connectivity Vision 2025: Challenges and Opportunities*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia and Government of Mongolia.
- Pichler, Peter. 2018. "European Union Cultural History: Introducing the Theory of 'Paradoxical Coherence' to Start Mapping a Field of Research". *Journal of European Integration* 40, no. 1: 1-16.

- Ramadan, Tariq. 1999. *To Be a European Muslim*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Recchi, E. 2015. *Mobile Europe: The Theory and Practice of Free Movement in the EU*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Riso S., Secher J. E., Andersen T. 2014. "Labour Migration in the EU: Recent Trends and Policies". *'Eurofound' Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Rittberger, Berthold, Michael Blauburger. 2018. "Introducing the Debate Section: The EU in Crisis: EU Studies in Crisis?". *Journal of European Public Policy* 25, no. 3: 436-439.
- Robins-Early, Nick. "Europe's Far Right Seeks to Exploit Post-Paris Attack Fears". *The Huffington Post*.
- Routley, Nick. 2021. "How the European Map Has Changed over 2,400 Years". *Visual Capitalist*. <https://www.visualcapitalist.com/2400-years-of-european-history/>.
- Said, B. dan H. Fouad. 2018. *Countering Islamist Radicalisation in Germany: A Guide to Germany's Growing Prevention Infrastructure*. International Centre for Counter-Terrorism the Hague.
- Sassatelli, Monica. 2002. "Imagined Europe: The Shaping of a European Cultural Identity through EU Cultural Policy". *European Journal of Social Theory* 5, no. 4: 435-451.
- Schimmelfennig, Frank. 2014. "EU Enlargement and Differentiated Integration: Discrimination or Equal Treatment?". *Journal of European Public Policy* 21, no. 5: 681-698.
- Silber L, Little A. 1996. *Yugoslavia: Death of a Nation*. New York: Penguin.
- Stone, Jon. 2016. "Brexit: Surge in Anti-Immigrant Hate Crime in Areas that Voted to Leave the EU". *The Independent*. <http://ind.pn/2aB7NR5>.
- Taggart, Paul, Aleks Szczerbiak. 2018. "Putting Brexit into Perspective: The Effect of the Eurozone and Migration Crises

- and Brexit on Euroscepticism in European States". *Journal of European Public Policy* 25, no. 8: 1194-1214. -----
- Tibi, Bassam. 2002. "Muslim Migrants in Europe: Between Euro-Islam and Ghettoization". *Muslim Europe or Euro-Islam? Politics, Culture, and Citizenship in the Age of Globalization*. Nezar Al-Sayyad dan Manuel Castells (Eds.): 31-52. Lexington: Lanham.
- Tolan, John, Henry Laurens, Gilles Veinstein, dan John L. Esposito. 2012. *Europe and the Islamic World: A History*. Princeton University Press.
- Tosun, Jale, Anne Wetzels, dan Galina Zapryanova. 2014. "The EU in Crisis: Advancing the Debate". *Journal of European Integration* 36, no. 3: 195-211.
- Triandafyllidou A., Gropas R. (eds). 2014. *European Immigration: A Sourcebook*. Farnham: Ashgate.
- United Nations Economic Commission for Europe, www.unece.org.
- Vachudova, Milada Anna. 2021. "Populism, Democracy, and Party System Change in Europe". *Annual Review of Political Science* 24: 1-28.
- van Mol C., de Valk H. 2016. "Migration and Immigrants in Europe: A Historical and Demographic Perspective". B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx (eds), *Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors*. Cham: Springer Open.
- Wagner, Wolfgang. 2017. "Liberal Power Europe" *Journal of Common Market Studies* 55, no. 6: 1398-1414.
- Wallace, Hellen (ed). 2001. *Interlocking Dimensions of European Integration*. Houndmills: Palgrave Macmillan, Introduction and Part IV.
- Warleigh-Lack, Alex. 1999. *European Union: The Basics (2nd Edition)*. London: Routledge.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Wheatcroft, Andrew. 2009. *The Enemy at the Gate: Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe*. Pimlico.
- Wimmer, Andreas. 2019. "Why Nationalism Works: And Why It Isn't Going Away." *Foreign Affairs* 98, no. 2: 27-34.
- Wright, Stephen. 2023. *Politics and Society in Contemporary Europe: A Concise Introduction*. Lynne Rienner.
- Youngs, Richard. "In the Trump Era, the EU Needs to Rethink its Approach to Liberal Order". *The Conversation*. 21 Augustus 2018. <https://theconversation.com/in-the-trump-era-the-eu-needs-to-rethink-itsapproach-to-liberal-order-101852>.
- Zielonka, Jan. 2008. "Europe as a Global Actor: Empire by Example?". *International Affairs* 84, no. 3: 471-484.
- Zielonka, Jan. 2017. "The Remaking of the EU's Borders and the Images of European Architecture". *Journal of European Integration* 39, no. 5: 641-656.

TENTANG PENULIS



Rizki Damayanti menyelesaikan pendidikan S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan S-2 dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dari University of Florence (Italia) dan meraih gelar *Master of Arts* (M.A) melalui program beasiswa penuh dari Kementerian Luar Negeri Italia. Ketika menempuh pendidikan S-2, penulis juga melakukan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma, Italia. Pada tahun 2023 penulis menyelesaikan pendidikan S-3 dan meraih gelar doktor dalam bidang *Islamic Studies* (Konsentrasi: Islam dan Hubungan Internasional) dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain pendidikan formal, penulis juga menempuh berbagai pendidikan nonformal antara lain: *Italian Language and Literature* (Istituto Parola, Florence, 2003-2005) dan *French Language and Literature* (Institut de Langue Francaise, Paris, 2004). Penulis juga pernah menjadi peserta internasional terpilih untuk mengikuti *International Summer Academy in Comparative Regional Integration* di Center for European Integration Studies, University of Bonn (Jerman) pada tahun 2007 melalui beasiswa penuh dari *German Federal Foreign Office and German Academic Exchange Service* (DAAD).

Pada tahun 2012, penulis juga terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia untuk mengikuti Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) melalui pendanaan dari *Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT).

Penulis merupakan dosen tetap di program studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, sejak tahun 2005 hingga sekarang dan aktif melakukan penelitian serta menulis berbagai artikel di jurnal nasional maupun internasional. Pada tahun 2010-2014, penulis merupakan Kepala Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, sekaligus juga berkontribusi sebagai *Program Coordinator* untuk Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP). Sebelumnya, di tahun 2008, penulis berkesempatan menjadi *Program Coordinator* dalam program *Paramadina Study Visit Abroad to China* (Beijing dan Shanghai) dengan mengunjungi berbagai universitas, institusi pemerintahan dan lembaga penelitian di antaranya University of Beijing (Peking University), Renmin University of China, KBRI Beijing, dan lembaga *think tank China Institutes of Contemporary International Relations* (CICIR). Penulis juga pernah terpilih menjadi salah satu *writing fellow* dalam program *Dissertation Scholarship* untuk periode November 2022-Januari 2023, dari *Center for Muslim Politics and World Society* (COMPOSE), *Faculty of Social Sciences* (FOSS), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Terakhir, penulis mengikuti *International Short Course "the Scientific-Educational Course of Hawwa"* di Mashhad dan Qom (Iran), pada bulan November 2023 melalui pendanaan dari *the Goharshad International Foundation*.

Khusus terkait keilmuan dan kajian Kawasan Eropa, penulis merupakan pengajar mata kuliah Kawasan Eropa di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Pengalaman panjang mengajar mata kuliah Kawasan Eropa sejak

tahun 2005, membuat penulis memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya di Kawasan Eropa. Selain itu, penulis juga telah terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam konteks Eropa, seperti integrasi Eropa, diplomasi Uni Eropa, dan perubahan politik di negara-negara Eropa. Dengan demikian, penulis memiliki kompetensi yang kuat dalam menyampaikan materi pembelajaran yang relevan dan aktual kepada mahasiswa, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Kawasan Eropa kontemporer di Indonesia.

KAWASAN EROPA KONTEMPORER



Dinamika Integrasi, Tantangan Multikulturalisme, dan Penguatan Diplomasi Global

Buku ini merupakan penjelajahan mendalam ke dalam Kawasan Eropa, sebuah wilayah yang kaya sejarah dan beragam dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang dinamika kontinental yang terus berkembang.

Dari pembahasan awal sejarah pembentukan Uni Eropa (UE) hingga analisis terkini tentang isu-isu politik kontemporer, buku ini membawa pembaca melalui perjalanan intelektual yang melibatkan konsep integrasi ekonomi, tantangan kebijakan luar negeri, dan keragaman budaya. Penekanan diberikan pada keterkaitan antara konsep dan realitas, memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas Kawasan Eropa.

Buku ini juga mencakup isu-isu kontemporer seperti dampak globalisasi, krisis migrasi, Islamofobia, konflik dan perdamaian, serta perubahan politik yang memengaruhi negara-negara Eropa. Pembaca juga diajak untuk memahami peran Kawasan Eropa dalam panggung global dan bagaimana perkembangan di wilayah ini memengaruhi dinamika geopolitik secara lebih luas.

Buku ini tidak hanya menciptakan landasan pengetahuan yang kokoh, tetapi juga memotivasi pembaca untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu kontemporer, dan menghubungkannya dengan konsep yang dipelajari.

Dengan didukung oleh pengetahuan mendalam dan komprehensif, buku ini diharapkan menjadi sumber rujukan utama bagi mahasiswa yang ingin memahami Kawasan Eropa dengan lebih baik. Selamat membaca, dan semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga dalam perjalanan akademis Anda!



Jl. Mardian No. 101, Sendangtiro, Burab, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55575
Telp. (0274) 2254545, Hp. 0856-03342319
Email: redaksi@bintangpustaka@gmail.com
Website: bintangpustaka.com



E-ISBN 978-623-190-880-3



9 786231 908803